



Peningkatan Kualitas SDM Investasi Masa Depan Perekonomian

“Menuju
INDONESIA 
KOMPETEN”



Laporan Tahunan 2017
APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia



Bangga Bersama Sampoerna

"Banyak perubahan yang saya alami setelah bergabung dengan Sampoerna *Retail Community* (SRC). Toko diperbesar, merapikan penataan produk, dan saya bisa mempekerjakan karyawan. Selama saya berusaha, saya yakin toko ini tidak akan kalah dengan toko-toko modern lain."

M. Sadullah, Wirausahawan - Pemilik toko

M. Sadullah adalah satu dari ribuan pengusaha retail yang tergabung dalam SRC dan tersebar di seluruh Indonesia. Sampoerna membantu para pedagang seperti M. Sadullah untuk mengembangkan usahanya. Kerja keras, semangat, dan sumbangsih para pedagang membawa Sampoerna menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia.

Simak cerita "Bangga Bersama Sampoerna" lainnya di www.sampoerna.com/banggabersamasampoerna



PT HM SAMPOERNA Tbk.



Laporan Tahunan 2017

Peningkatan Kualitas SDM Investasi Masa Depan Perekonomian

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia

**Gedung Permata Kuningan Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi
Jakarta 12980 - Indonesia
Telp : (62-21) 83780824 (hunting)
Fax : (62-21) 83780823, 83780746
Email : sekretariat@apindo.or.id
Website : www.apindo.or.id**

Visi dan Misi APINDO

VISI :

Menciptakan iklim Usaha yang kondusif dan Kompetitif.

MISI :

- 1. Mengembangkan Hubungan Industrial yang harmonis dan produktif**
- 2. Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha**
- 3. Berperan aktif dalam meningkatkan investasi**
- 4. Berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah.**



Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2018

Seperi yang telah dilakukan di sepanjang 2015 dan 2016, Pemerintah di tahun 2017 terus melanjutkan upaya pembuktian kinerja untuk menopang perbaikan ekonomi serta melakukan reformasi struktural. Tantangan eksternal yang masih tidak menentu yang ditambah dengan kejutan indikator ekonomi beberapa kuartal di 2017 yang berada di bawah harapan berbagai pihak menyebabkan target pertumbuhan ekonomi 2017 belum dapat terealisasi. Faktor-faktor optimisme yang sudah mulai terbentuk nampaknya mulai sedikit bergeming memasuki tahun 2018 ditengah situasi ketidakpastian global yang masih mengemuka, dan ditambah dengan arah perbaikan ekonomi nasional yang masih belum sejalan dengan upaya reformasi struktural, terutama memasuki periode pilkada di tahun 2018 serta pesta demokrasi kepemimpinan nasional pada 2019 mendatang.

Dinamika sepanjang tahun 2017 memberikan berbagai fenomena menarik, terutama perkembangan indikator konsumsi yang sempat membingungkan berbagai pihak dan kalangan. Stagnasi indikator konsumsi inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi 2017 kita secara agregat masih belum dapat beranjak naik dari tren yang telah dicapai sebelumnya di tahun 2016. Namun, relatif stabilnya indikator-indikator makro ekonomi Indonesia di sepanjang 2017 cukup membantu untuk “menenangkan” keadaan. Relatif terjaganya tingkat inflasi rata-rata di bawah 4,00% serta fluktuasi nilai tukar Rupiah selama tahun 2017 yang lebih stabil telah berperan untuk memberi sentimen pasar yang positif, setelah sebelumnya gejolak depresiasi Rupiah telah terlebih dahulu terbentuk di tahun 2015 dan 2016. Setelah pencapaian hasil pertumbuhan kuartal I dan kuartal II 2017 yang tidak terlalu menggembirakan banyak pihak, berbagai kalangan mulai pesimistis terhadap tercapainya target pertumbuhan agregat 2017 sesuai target APBN-P 2017. Tidak hanya bagi Pemerintah, realisasi-realisis indikator makro 2017 pun masih belum mampu memenuhi harapan dunia usaha.

APINDO juga mengapresiasi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui instrumen *7-Day Repo Rate* yang di awal tahun 2017 berada di level 4,75% untuk kemudian diturunkan ke level 4,50% dan kemudian kembali diturunkan menjadi 4,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan moneter BI adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi yang ada. Tindak lanjut berikutnya yang dibutuhkan dunia usaha adalah

SAMBUTAN KETUA UMUM

kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat menstimulasi perbankan komersial domestik dalam memperbesar pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha produktif. Kondisi neraca perbankan saat ini masih diperberat dengan semakin besarnya *Non Performing Loan* (NPL) dari kredit untuk sektor konsumtif. Perlunya peralihan paradigma pemberian kredit perbankan kepada sektor-sektor produktif pada akhirnya tidak hanya memperbaiki kinerja neraca keuangan perbankan secara umum, tetapi juga akan memberi ruang bagi dunia usaha domestik, khususnya UMKM, untuk mengajukan pinjaman dari perbankan domestik agar tidak berupaya mencarinya dari sumber-sumber kreditur luar negeri, yang tentunya dapat menjaga faktor resiko terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi 2016 dan 2017 yang masih di bawah target Pemerintah sempat melandasi revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, termasuk proyeksi APINDO sebesar maksimal 5,20% yang berada di bawah target pertumbuhan 2018 dalam APBN 2018 sebesar 5,40%. Kecuali indikator belanja Pemerintah (G) dan Konsumsi Rumah Tangga (C) yang diperkirakan belum akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2018, maka harapan Pemerintah dan pelaku usaha masih terletak pada kelanjutan perbaikan indikator Investasi (I) dan Perdagangan Internasional (Net Ekspor) kita. Jatuh bangun upaya Pemerintah untuk memaksimalkan perkembangan Investasi melalui perbaikan iklim usaha tidak akan pernah terlepas dari kelanjutan reformasi birokrasi yang terus konsisten dilakukan Pemerintah untuk mengontrol regulasi-regulasi baru yang hanya menghambat kinerja dunia usaha dan investasi. Untuk regulasi di tingkat pusat, Inpres No. 7/2017 telah menjawab kebutuhan tersebut

untuk mengatur tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan sehingga setiap Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan benar-benar ditujukan untuk menunjang iklim investasi dan dunia usaha yang sehat. Di tingkat regulasi daerah, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada April 2017 yang menganulir kewenangan Eksekutif untuk membatalkan Perda-Perda bermasalah tentunya menjadi faktor yang memperberat upaya Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan adanya keputusan MK tersebut, APINDO berharap agar koordinasi intensif antara Pusat dan Pemda beserta DPRD terus dilakukan secara preventif untuk dapat menghasilkan regulasi-regulasi daerah yang pro investasi dan ramah terhadap pengembangan dunia usaha.

Seperti halnya perkembangan peta politik secara global, APINDO juga tetap mencermati kelanjutan peta politik nasional dan daerah memasuki tahun 2018 yang akan menyelenggarakan ratusan Pilkada serentak sebagai kelanjutan pelaksanaan dari sebagian Pilkada serentak yang telah dilaksanakan di awal 2017. Dalam konteks global, ketidakpastian situasi di Semenanjung Korea, perkembangan kondisi Timur Tengah pasca pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait konflik Israel-Palestina, perkembangan terakhir pasca Brexit, serta dinamika-dinamika politik global lainnya masih menjadi faktor-faktor pertimbangan yang cukup pelik bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dituju di 2018. Sementara itu di dalam negeri, Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 yang dapat meminimalisir gejolak sosial serta mampu menghasilkan Kepala-Kepala Daerah baru yang berkarakter sejalan dan seiring dengan kebijakan pusat, dengan



kata lain pro investasi dan pengembangan iklim usaha serta penyediaan lapangan kerja. Pelaksanaan Pilkada 2015 yang tenang dan lancar dapat dijadikan contoh dan pedoman yang tepat bagi pelaksanaan dan pengawalan Pilkada 2018 yang aman dan lancar. APINDO berharap kekaduan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak berlanjut dalam Pilkada-Pilkada 2018 sehingga diharapkan mampu memberikan suasana kegiatan usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Sementara itu, di lingkup internasional, APINDO mengapresiasi upaya pemerintah di sepanjang 2017 dalam memperluas kerjasama perdagangan bilateral dan regional. Arah kebijakan pemerintah tidak terbatas hanya pada perluasan akses pasar tapi juga mengarah pada diversifikasi pasar. APINDO mencatat terdapat berbagai kerjasama perdagangan yang sedang dirundingkan dengan berbagai negara seperti Chile, negara-negara EFTA,

Turki, Iran, dan negara-negara rekanan ASEAN melalui perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), ASEAN-Hongkong dan ASEAN-Kanada. APINDO aktif terlibat dalam perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) yang telah berlangsung dengan baik, juga berharap tercapainya percepatan kesepakatan perundingan kerjasama perdagangan dalam skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) untuk menjamin akses pasar dengan preferensi yang terbaik bagi pelaku usaha Indonesia, memacu percepatan peningkatan standar kualitas produk Indonesia dan sekaligus sebagai *trigger* terhadap pencapaian kinerja ekspor yang semakin baik hingga saat ini. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan masukan-masukan dari pelaku usaha, khususnya APINDO, agar poin-poin perundingan tidak menjadi

SAMBUTAN KETUA UMUM

blunder yang dapat merugikan kinerja ekspor industri domestik di masa mendatang. Di samping itu, diperlukan juga edukasi bagi pelaku usaha untuk memahami dan mendapatkan manfaat FTA.

Di bidang pembangunan Energi Berkelanjutan, permasalahan kurang menariknya investasi di bidang energi telah diakui banyak pihak. Dan Pemerintah mengantisipasi dengan beberapa kebijakan yang diformulasikan untuk memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih kompetitif dalam bentuk wacana insentif untuk sektor migas dan *feed-in tariff* untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT). APINDO mencermati yang tidak kalah pentingnya dengan tingkat pengembalian modal adalah faktor kepastian usaha. Pelaku usaha akan sulit memberikan justifikasi investasi apabila kebijakan ternyata berganti-ganti akibat pergantian pejabat. Kesulitan untuk justifikasi tersebut sangat beralasan, apalagi investasi di sektor ESDM bersifat jangka panjang hingga puluhan tahun. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan disaat awal investasi dilakukan dapat bertolak belakang / berubah total dengan kebijakan Pemerintah 5-10 tahun kemudian. Indonesia pun mau tidak mau harus mengarah cepat ke model tata kelola sektor energi yang berhasil dikembangkan berbagai negara. Ketahanan energi nasional saat ini bukan lagi sekedar jargon yang dapat dimonopoli pemerintah, namun harus menyertakan peran dan masukan aktif investor dan dunia usaha. APINDO tidak akan pernah meragukan regulasi Pemerintah sepanjang kebijakan energi dan implementasinya mulai saat ini dijauhkan dari kepentingan politik sesaat.

APINDO mengapresiasi akan semakin kondusifnya situasi penetapan Upah Minimum (UM) 2018 yang berlangsung di akhir 2017 dalam suasana yang aman dan tertib, relatif bila dibandingkan dengan akhir 2015 dan 2016 dalam hal penetapan UM untuk tahun berikutnya.

Situasi kondusif tersebut tidak terlepas dari kekuatan faktor kepastian yang dimiliki PP 78/2015 dalam hal penetapan UM, yang telah sesuai dengan tujuan penciptaan regulasi itu sendiri yaitu untuk menciptakan kepastian dan stabilitas iklim usaha dan investasi, yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki produktivitas pekerja. Dunia usaha mengapresiasi sekaligus mencermati kebenaran laporan Kemenaker yang menyebutkan bahwa kenaikan UMP 2018 di seluruh provinsi sudah sesuai dengan PP 78/2015.

Perkembangan pola produksi secara global maupun di kawasan memperlihatkan transisi alat-alat produksi yang mulai beralih ke pola mekanis maupun *digital* (otomatisasi), terutama dalam sektor-sektor usaha berskala menengah-besar. Mulai bergesernya pola produksi tersebut harus dapat diantisipasi dengan cepat, terutama untuk negara seperti Indonesia yang berkarakter demografis mayoritas penduduk usia produktif. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja tidak boleh hanya berfokus pada dilematis penetapan UM dari tahun ke tahun dengan segala polemik yang menyertainya, yang justru semakin tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha. Realita nyata sedang berlangsung, otomatisasi semakin menjadi pilihan pelaku industri, dan para pihak tripartit harus cepat mengantisipasinya. *Link and match* antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha, yang diiringi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan *vocational training* agar keterampilan pekerja dapat memenuhi kebutuhan industri yang sedang bertransisi ke pola digitalisasi dan otomatisasi. Apabila respon kita berjalan lambat, maka Indonesia tidak dapat menghindari lonjakan tingkat pengangguran di masa mendatang, terutama apabila sektor informal ternyata tidak mampu menampung perpindahan tenaga kerja yang tidak tertampung oleh

industri di sektor formal akibat fenomena transisi pola produksi tersebut. APINDO selalu mencermati perkembangan ini dan mengharapkan agar percepatan penyiapan infrastruktur *vocational training* di beberapa waktu terakhir agar semakin diintensifkan untuk meminimalisir kondisi *missmatch*, yang diiringi dengan pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa sehingga Jawa tidak menanggung beban tingkat pengangguran yang semakin berat.

Dalam hal perpajakan, APINDO memberikan apresiasi terhadap kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty (TA)* selama Tahap I, Tahap II, serta Tahap III yang telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan. APINDO ingin melihat reformasi perpajakan yang dilakukan agar diarahkan menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, dan yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus menghindari tumpang tindih pengaturan diantara UU Amnesti Pajak dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, APINDO merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi terhadap besaran tarif PPh Badan serta tarif PPN. Sebagai perbandingan, *tax reform* yang sedang dilakukan Amerika Serikat ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi domestiknya sekaligus memperbesar minat investasi ke AS. Apabila AS kini mulai beralih ke kebijakan *inward looking* untuk mendukung industri, investasi, dan ekonominya, maka APINDO tentunya mempertanyakan komitmen serupa Pemerintah untuk mendukung dunia usaha domestik, salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang ramah investasi dan pro pengembangan usaha. Di kawasan, Singapura juga menyesuaikan tarif PPh

Badan ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, APINDO berpandangan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serupa terhadap tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20%, sehingga dunia usaha Indonesia semakin berdaya saing. APINDO juga meminta agar dilibatkan dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta mengenai pengadilan pajak. Diharapkan proses revisi dan perampungan ketiga UU terkait perpajakan tersebut agar dapat segera terselesaikan di awal 2018. Bila Pemerintah mengalami kesulitan di dalam mengandalkan revisi ketiga UU di bidang perpajakan tersebut, APINDO merekomendasikan agar Kemenkeu RI berinovasi lebih lanjut melalui instrumen PP atau Permen. Revisi terhadap tiga UU di bidang perpajakan itu juga agar diikuti perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pajak untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak, dan pada akhirnya Pemerintah dapat mencapai penerimaan perpajakan yang semakin meningkat secara *high compliance* tanpa membebani kinerja dunia usaha.

Melanjutkan upaya APINDO untuk perbaikan kualitas kebijakan usaha di tahun 2017, APINDO akan terus melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan di tahun 2018, beberapa diantaranya terkait Rencana Revisi UU Persaingan Usaha agar KPPU tidak menjadi *super body*; implementasi UU Produk Halal agar tidak salah arah dan justru merugikan perekonomian nasional; *judicial review* UU Pajak dan Retribusi Daerah di MK untuk menghapuskan jenis pungutan yang tidak semestinya, penggantian UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang ternyata belum masuk di dalam daftar Prolegnas prioritas 2018, dan lain sebagainya.

Selain kebutuhan mutlak terhadap penggantian payung hukum UU Ketenagakerjaan, terdapat empat aspek lainnya yang juga

SAMBUTAN KETUA UMUM

menjadi fokus APINDO di 2018 yang berkaitan erat dengan perbaikan regulasi-regulasi di bidang hubungan industrial, diantaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), perijinan tenaga kerja, serta pendidikan vokasi dan pemagangan. APINDO tetap sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. Selain mendukung deklarasi pemagangan nasional bersama Presiden, Kemenaker dan Kadin Indonesia, APINDO telah menerbitkan buku Panduan Pemagangan dan laporan studi *best practices* pemagangan, serta buku panduan pengembangan ketrampilan untuk siap kerja di beberapa bidang seperti: otomotif dan retail. Diperlukan sinergi kuat antara dunia usaha, pemerintah dan dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi dan kualitas pengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan industri - yang didukung dengan sarana prasarana pelatihan yang memadai dengan optimalisasi pemanfaatan bersama fasilitas fasilitas swasta dan pemerintah.

APINDO juga akan terus mengawal rancangan-rancangan legislasi di 2018 agar dapat menghasilkan produk hukum yang mampu menopang iklim dunia usaha yang sehat. Pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, revisi UU Persaingan Usaha yang Sehat yang masih berjalan, PP Jaminan Produk Halal, dan PP Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menjadi daftar prioritas Tim Ahli APINDO untuk dicermati agar tidak bertentangan dengan mandat dan rekomendasi dunia usaha, agar tidak melampaui ketaatan regulasi - demi menjamin kelangsungan dan perkembangan bisnis.

APINDO telah memberikan masukan kepada Pemerintah dalam beberapa hal.

Pertama, agar pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi belakangan ini. Polemik yang terjadi menjadikan dunia usaha dan investor semakin berhati-hati dan pesimis, terutama memasuki tahun politik 2018. Kedua, agar Pemerintah melanjutkan pemberian insentif kepada dunia usaha terutama di sektor padat karya. Pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di industri padat karya dikarenakan tingginya Upah Minimum. Hal ini menyebabkan tenaga kerja formal mulai menyusut, dan beralih ke informal, sehingga pada akhirnya menunda pembelian/konsumsi. Ketiga, Pemerintah diharapkan meningkatkan proporsi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan pendalaman industri industri prioritas. Hal tersebut untuk memperkuat industri nasional yang berdaya saing tinggi. Berikutnya, Presiden diharapkan mengingatkan kepada jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi, bukan justru berlomba-lomba mempublikasikan berbagai pencapaiannya. APINDO mencermati bahwa Presiden sudah berkomunikasi secara optimis, namun beberapa pembantunya seringkali hanya "mencari panggung", yang menimbulkan kecemasan dunia usaha.

Sebagai catatan akhir, ikhtisar pandangan dan sumbang pikir yang saya nyatakan tersebut di atas untuk 2018 selalu mengedepankan sinergi dengan seluruh *stakeholders* APINDO, dalam kerangka optimisme yang tidak pernah pudar. Apabila optimisme yang selalu dijaga dunia usaha tidak dibarengi dengan sinergi yang memadai dengan Pemerintah, Pekerja, maupun *stakeholders* APINDO lainnya, maka akan mustahil negara kita di 2018 untuk mampu menjauhi *siluet* kelesuan ekonomi yang menghinggapi di tahun-tahun terakhir bahkan hingga 2017 lalu.

Bersama ini saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih

kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi sektoral beserta mitra-mitra APINDO di pusat dan daerah, yang terus setia berjalan beriring bersama kami hingga memasuki tahun 2018 sekaligus mempercayakan mandatnya kepada kami dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha nasional, serta tentunya tidak terlepas dari dukungan finansial yang diberikan. APINDO akan selalu berkomitmen untuk menjadi *partner* strategis Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga kami dapat memenuhi komitmen dan tanggung jawab kami dalam melayani perusahaan anggota APINDO maupun dunia usaha Indonesia secara keseluruhan.

Secara khusus, saya menyambut gembira terhadap terbentuknya PAMI (Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia) di tahun 2017, sebagai bentuk komitmen APINDO dalam menjunjung tinggi kesamaan hak dan keadilan bagi para pencari keadilan dengan struktur kelembagaan dan susunan tenaga arbiter dan mediator yang objektif, kredibel, profesional dan independen. Saya berharap dengan berdirinya PAMI akan dapat memberikan kontribusi dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan di Indonesia dalam bidang perdagangan, perindustrian dan sektor keuangan yang sangat menentukan bagi kemajuan perekonomian Nasional sehingga Indonesia dapat bersaing secara internasional khususnya di tingkat ASEAN dalam bidang bisnis. Di saat yang bersamaan, saya terus mendorong agar IPC (*International Partnership Center*) yang telah dibentuk APINDO terlebih dahulu sebelum PAMI berdiri, dengan harapan bahwa melalui bertambahnya usia IPC akan berperan lebih besar dalam menarik masuk investasi asing melalui berbagai upaya *business match making*, pelayanan informasi kebijakan dan berbagai bentuk fasilitasi investasi untuk

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Akhir kata, kepemimpinan yang saya jalankan di APINDO telah memasuki tahun ke-4 seiring dengan dimulainya lembaran tahun 2018. Saya mengapresiasi sekaligus tetap mengharapkan keberlanjutan kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap jajaran Pengurus dan Sekretariat DPN APINDO, DPP dan DPK APINDO seluruh Indonesia.

Saya berterimakasih juga kepada seluruh partner APINDO diantaranya seperti Kadin-Indonesia dan asosiasi-asosiasi usaha sektoral, asosiasi-asosiasi usaha asing di Indonesia, kementerian lembaga pemerintah, mitra pengembangan organisasi seperti ILO, SP/SB, DECP, PLAN, OXFAM, dan sebagainya, yang selalu bersama kami dalam berbagai kondisi dan dinamika yang ada.

Di tahun 2018 APINDO akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk memilih kepemimpinan nasional APINDO periode 5 (lima) tahun mendatang yang saya yakin akan terselenggara dengan baik atas dukungan para pimpinan APINDO dari seluruh 34 provinsi. Saya selalu optimis bahwa peran besar APINDO pada tahun-tahun sebelumnya akan semakin menguat di tahun 2018 melalui sumbang pikiran dan rekomendasi kepada Pemerintah, agar cita-cita besar bangsa ini dapat terwujud melalui komitmen dan kerja kita bersama.

**Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Pengusaha Indonesia**



**Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum**

DAFTAR ISI



Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah



Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan



Bidang Informasi & Layanan Anggota



Bidang Hubungan Internasional & Investasi



Bidang UKM - IKM



Bidang Industri



Bidang Perdagangan

II VISI DAN MISI APINDO

III SAMBUTAN KETUA UMUM

X DAFTAR ISI

XII KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

XXIII STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO

XXIV DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO

2 BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH

14 BIDANG KOORDINASI KETENAGAKERJAAN

24 BIDANG INFORMASI & LAYANAN ANGGOTA



Bidang Keuangan dan Perbankan



Bidang Kebijakan Publik



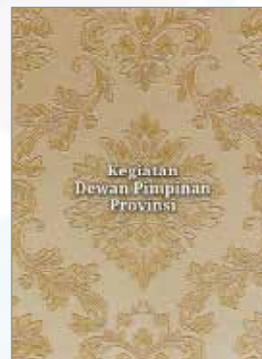
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Bidang Kajian



Unit Bisnis DPN APINDO



Kegiatan Dewan Pimpinan Provinsi

36	BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL & INVESTASI
48	BIDANG UKM - IKM
58	BIDANG INDUSTRI
66	BIDANG PERDAGANGAN
72	BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN
78	BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK
90	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
96	BIDANG KAJIAN
112	UNIT BISNIS DPN APINDO
125	KEGIATAN DEWAN PIMPINAN PROVINSI

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

DEWAN PERTIMBANGAN

KETUA KEHORMATAN



M. Jusuf Kalla

KETUA



Sofjan Wanandi

SEKRETARIS



Sudhamek

ANGGOTA :



Arifin Panigoro



Alexander Tedja



Budiarsa Sastrawinata



Chairul Tanjung



Djoko Susanto



Eddy Sariaatmadja



Eddy Sugianto



Edwin Soeryadjaya



Franky O. Widjaja



Franky Sibarani



Fransiscus Welirang



H.M. Aksa Mahmud



Hari Boedi Hartono



Haryanto Adikoesoemo



James T. Riady



Kiki Barki

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018



Mardjoeki Atmadiredja



Mari Pangestu



Mucki Tan



Murdaya Poo



Oesman Sapta



Peter Sondakh



Prayogo Pangestu



Prijono Sugiarto



Robert Budi Hartono



Rosan P. Roeslani



Shanti Poesposoetjipto



S.P. Lohia



Sugianto Kusuma



Surya Darmadi



Tahir



Theodore P. Rachmat



The Nin King



Trihatma K. Haliman



William Katuari

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

DEWAN PIMPINAN HARIAN

KETUA UMUM



Hariyadi B. Sukamdani

WAKIL KETUA UMUM



Suryadi Sasmita

WAKIL KETUA UMUM



Shinta W. Kamdani

KETUA :



Anthony Hilman



Anton J. Supit



Arif Rahmat



Benny Soetrisno



Danang Girindrawardana



D.E. Setijoso



Eddy Hartono



Eddy Hussy



Harijanto



Johnny Darmawan



Lukito Wanandi



M. Arsjad Rasjid



Mintardjo Halim



Nina Tursinah



Putri K. Wardhani



Sammy Hamzah



Soebronto Laras



Sutrisno Iwantono

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

SEKRETARIS UMUM



Sanny Iskandar

WAKIL SEKRETARIS UMUM :



Hendra Widjaja



Herman Kasih



Iftida Yasar



M. Aditya Warman



Thomas Darmawan

BENDAHARA UMUM



Victor R. Hartono

WAKIL BENDAHARA UMUM



Glenn Sugita



Harry Hanawi



Yeane Lim

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

1. BIDANG KETENAGAKERJAAN :

- Aloysius Budi Santoso
- Agus Dwijanto
- Bagus Wima
- Bob Azam
- Cicilia Tri Sulistyawati
- Dani Handayani
- Dartono
- Darwoto
- Deddy Harsono
- Dipasusila Satia Utama
- Mufidah
- Susana
- Evert Matulesy
- Gama Yogotomo
- Gregorius Chen
- Handoyo Budhisejati
- Harjono
- Inda D. Hasman
- Ishak Muin
- Joko Baroto
- Matheus Sekardianto
- Miftahudin
- Myra M. Hanartani
- Nunung Riyanto
- Renata Catur
- Ripy Mangkusubroto
- Sarman Simanjourang
- Timoer Soetanto



Agus Dwijanto



Bob Azam



Darwoto



Deddy Harsono



Dipasusila Satia Utama



Evert Matulesy



Gama A. Yogotomo



Handoyo Budhi Sejati



Harjono



Ishak A. Muin



Inda D. Hasman



Matheus Sekardianto



Myra M. Hanartani



Renata Catur



Sarman Simanjourang



Timoer Soetanto

2. BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI :

- Anton Pripambudi
- Ay Tjhing Phan
- Bernadino M. Vega
- Catharina Widjaja
- Chris Septiryman
- Fachry Thaib
- Gautam Naraindas
- Hardini Puspasari
- Imelda Adisaputra
- Mochamad Tommy Hersyaputra
- Neneng Goenadi
- Olivia Husli Basrin



Anton Pripambudi



Ay Tjhing Phan



Bernadino M. Vega



Catharina Widjaja



Chris Septiryman



Fachry Thaib



Gautam Naraindas



Hardini Puspasari

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

- Selo Winardi
- Sinta Sirait
- Wahyuni Bahar
- Wilson Andrew
- Yos Adiguna Ginting



M. Tommy Hersyaputera



Neneng Goenadi



Olivia Husli Basrin



Radju Munusamy



Selo Winardi



Sinta Sirait



Wahyuni Bahar



Wilson Andrew



Yos Adiguna Ginting

3. BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN :

- Christian Wanandi
- Gunawan Tjokro
- Haryono Tjahjarjadi
- Hendrisman Rahim
- Henrietta Kristanto
- Henry Chevalier
- Herris B. Simandjuntak
- Hotman Simbolon
- Prijohandojo Kristanto
- Siddhi Widyapratama
- Tjip Ismail
- Willy S. Dharma



Christian Wanandi



Gunawan Tjokro



Haryono Tjahjarjadi



Hendrisman Rahim



Henrietta Kristanto



Henry Chevalier



Herris B. Simandjuntak



Hotman Simbolon



Prijohandojo Kristanto



Siddhi Widyapratama



Tjip Ismail



Willy S. Dharma

4. PETERNAKAN DAN PERIKANAN :

- Adikelana Adiwoso
- Hari Lukmito
- Krissantono
- Sudirman



Adikelana Adiwoso



Krissantono



Sudirman

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

5. BIDANG PERHUBUNGAN

- Arif Wibowo
- Bani Poespoesoeptipto
- David Hutagalung



Bani M. Mulia

6. BIDANG ESDM

- Ananda Idris
- Hendra Sinadia
- Ida Ayu Pusparini
- Irwan Priatna
- Johnny Tjea
- Joi Surya Dharma
- Michael Putra
- Muliawan Margadana
- Paul Butar Butar
- Suryadarma
- Tiffany Johanes
- Tjay Lay Tardja
- Tony Wenas
- Tumbur Parlindungan



Ananda Idris



Johnny Tjea



Joi Surya Dharma



Michael Putra



Muliawan Margadana



Tiffany Johanes



Suryadarma

7. BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR (ANEKA INDUSTRI)

- Ade Sudrajat
- Adji Sapta
- Ali Soebroto
- Eddy Yusuf
- Eko Rudianto
- Henry C. Wijaya
- I Made Dana Tangkas
- Massaruddin
- Noergardjito
- R. Basuki
- Rivana Erni
- Rosalina
- Sumirad Widodo
- Wartam Radjid



Ade Sudrajat



Ali Soebroto



Eko Rudianto



Henry C. Widjaja



I Made Dana Tangkas



R. Basuki



Rosalina



Wartam Radjid

8. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- Ahmad Z. Amirudin
- Amy Wirabudi
- Brata Rafli
- Cecep Rukmana
- Chris Hardijaya
- Handito Joewono
- Intan Katoppo
- Leoni Agustin
- Rina Radinal
- Sinta Dhanuwardoyo
- Solichin



Brata Rafli



Handito Joewono



Sinta Dhanuwardoyo

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

9. BIDANG LOGISTIK

- Bambang Soetiono
- Iskandar Zulkarnain
- Moenardji Soedargo
- Stefanus H. Ruspany
- Sumadi Kusuma



Bambang Soetiono



Iskandar Zulkarnain



Moenardji Soedargo



Stefanus H. Ruspany



Sumadi Kusuma

10. BIDANG INFRASTRUKTUR

- Evan Kanter
- Franky Lumenta
- Henri Wahyu
- Jeffry Nedi
- Ongki Abdulrachman
- Rama Datau
- Rico Herlambang
- Zulnahr Usman



Evan Kanter

11. BIDANG UKM - IKM

- Djoko Wintoro
- Eddy Iskandar
- Endah Karniasari
- Euis Saedah
- Fachruddin Basalamah
- Gina Karsana
- Herni Dian
- M. Hasbi Chaipadmol
- Miftachul Bari
- Otty H. Chandra Ubayani
- Riza Deliansyah
- Syahnhan Phalipi
- Tee Dina Midiani
- Wulan Maharani Tilaar



Fachruddin Basalamah



Endah Karniasari



Euis Saedah



Gina Karsana



Herni Dian



M. Hasbi Chaipadmol



Miftachul Bari



Otty H. Chandra Ubayani



Riza Deliansyah



Syahnhan Phalipi



Tee Dina Midiani



Wulan Maharani Tilaar

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

12. BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH

- Djoko Sungkono
- Eko Budi Santoso
- Feri Sunardi
- Fernando Ganindito
- Gema Taruna
- M. Alfian Alfian
- Mansyur Achmad
- Murniansya Madjid
- Ricko Bakri
- Sharmila
- Syamsul Munir
- Tedjodinigrat
- Urip Widodo



Gema Taruna



Syamsul Munir



Urip Widodo

13. BIDANG PERDAGANGAN

- Afit Purwanto
- Dharma Surjaputra
- Fernando Hutahaeen
- Helga Kumontoy
- Josep R. Bica Wicaksono
- Lay Ridwan Gautama
- Made Astawa
- Megan Wijaya
- Nursalam
- Ratna Sari Loppies
- Roy Sembel
- Sancoyo Antariksa
- Sarwi Notoatmodjo
- Satria Hamid
- Sribugo Suratmo



Dharma Surjaputra



Fernando Hutahaeen



Helga Kumontoy



Josep R. Bica Wicaksono



Lay Ridwan Gautama



Made Astawa



Megain Wijaya



Nursalam



Ratna Sari Loppies



Roy Sembel



Sancoyo Antariksa



Sarwi Notoatmodjo



Satria Hamid

14. BIDANG RITEL

- Agus Riandy Sijoatmodjo
- Mira Amahorseya
- Pudjianto
- Thomas Farial
- Tutum Rahanta
- Yongki Susilo



Agus R. Sijoatmodjo



Mira Amahorseya



Pudjianto



Thomas Farial



Tutum Rahanta



Yongki Susilo

15. PROPERTI DAN KONSTRUKSI

- Andreas Suharsono
- Ben Susanto
- Edwyn Lim
- Hadian Pramudika
- Halim Shahab
- Hendra Lesmana
- Jimmy Sardjono Michael
- Johannes Archiadi
- Johannes Ongko
- Roy Mande
- Setyo Maharso
- Stefanus Ridwan
- Teguh Budiono
- Theresia Rustandi



Edwyn Lim



Setyo Maharso



Teguh Budiono



Theresia Rustandi

16. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- Farid Bahar
- Joko Supriyono

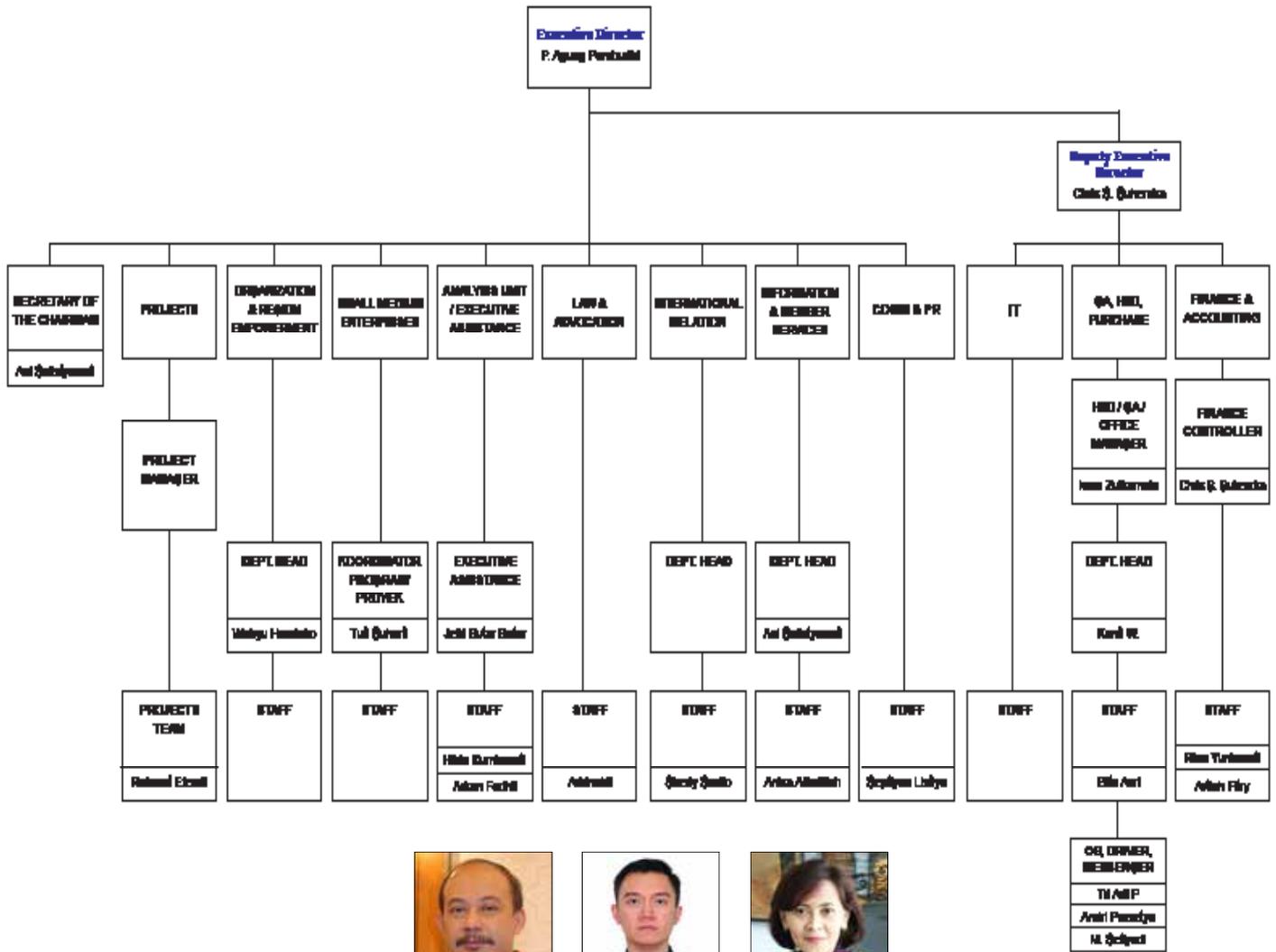


Farid Bahar



Joko Supriyono

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO



Agung Pambudhi



Chris S. Suhendra



Diana M. Savitri



Iwan Zulkarnain



Ani Sulistyowati



Wahyu Handoko



Kanti Widiarti



Tuti Suharti



Jefri Butar Butar



Andri Prasetyo



Anisa Alfadillah



Artiah Fitry



Arkan Fadil



Gita Asri



Hilda Kurniawati



Moh. Septiadi



Rahmat Efendi



Rina Yuniawati



Septiyan Listiya



Sherly Susilo



Adrinaldi



Tri Adi

DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO

NAD

Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman, SE
Jl. Tengku Daud Beureuh No. 170 E,
Lampriet - Banda Aceh (23126)
T. 0651-227 36 / 21614
F. 0651-227 36 / 635554
E-mail: nad@apindo.or.id



Bengkulu

Ketua : M. Basri Muhammad
Jl. Merapi No. 116 Kebun Tebeng,
Bengkulu
T. 0736 - 284 05
F. 0736 - 284 05
E : apindobengkulu@yahoo.co.id



Sumatera Utara

Ketua : Parlindungan Purba, SH, MM
Jl. Sungai Deli No. 21 Medan (20114)
T. 061-773 980 21 / 414 4657
F. 061-457 5651
E-mail: apindosu@yahoo.co.id



Sumatera Selatan

Ketua : Sumarjono Saragih
Jl. Brigjend Hasan Kasim
Komplek Jaya Raya Garden No. C-3
Palembang, Sumsel (30116)
T. 0711- 813154
F. 0711- 813154
E-mail : sumsel@apindo.or.id



Riau

Ketua : Wijatmoko Rahtriso
Hotel Premiere Lt. 3 Ruang Mulia 9
Jl. Jend. Sudirman No.389 Pekanbaru
T. 0761-7891818
F. 0761-7891818
E-mail: apindo_riau@yahoo.com
riau@apindo.or.id



Bangka Belitung

Ketua : WFM Nasution
Jl. Air Selan No. 232 Gabek I
Pangkal Pinang (33118)
T. 0717- 421 793
F. 0717- 425 6635 / 422 007
E-mail : elligustina@yahoo.com



Kepulauan Riau

Ketua : Ir. Cahya
Kompleks Citra Indah Blok A3
No. 1-2, Batam Centre, Batam (29432)
T. 0778 - 469 955
F. 0778 - 467366
E-mail :
apindo.kepri_santi@yahoo.co.id



Lampung

Ketua : Yusuf Kohar
Jl. Gajah Mada No. 17 B
Bandar Lampung (35241)
T. 0721 - 258 614
F. 0721 - 261 327
E-mail : iwanpalem@gmail.com



Sumatera Barat

Ketua : Muzakir Aziz Akin
Jl. Kedondong No. 12 Purus V,
Padang (25115)
T. 0751 - 443390
F. 0751 - 41584
E : sekretariat@apindo-sumbar.or.id



Banten

Ketua : Deddy Djunaedi
Komplek Pemda No. A/29
Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten
T./F. (0254) 8483436
T. 0254 - 914 4849
F. 0254 - 212 741
E-mail : banten@apindo.or.id
dppapindobanten@yahoo.com



Jambi

Ketua : Junus Abdullah
Jl. Raden Wijaya No. 92 Jambi (63137)
T. 0741 - 420 38
F. 0741 - 420 38
E-mail : jambi@apindo.or.id



DKI Jakarta

Ketua : Solihin
Graha Mampang L6
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta (12760)
T. 021-7970365 / 797 0323
F. 021-797 0018
E. apindodki@gmail.com



DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO

Jawa Barat

Ketua : Dedy Widjaya
Putraco Gading Regency
Jl. Gading Utama Blok K - 3
Soekarno - Hatta Bandung (40292)
T. 022-730 3029
F. 022-732 3131
E-mail : apindo.jabar@yahoo.co.id



Jawa Tengah

Ketua : Frans Kongi
Ruko Semarang Indah Blok E II No. 28
Jl. Madukoro Raya, Semarang (501444)
T. 024 - 766 32990
F. 024 - 766 32989
E-mail : jawatengah@apindo.or.id



DI Yogyakarta

Ketua : Buntoro
Gedung Mega Andalan Kalasan
Jl. Tanjung Tirto No.34-36
Yogyakarta (55571)
T. 0274-496393, 497068, 7838844
F. 0274-496226
E-mail : apindodiy@yahoo.co.id
priharsonodrupa@yahoo.com



Jawa Timur

Ketua : Arief Harsono
Jl. Bogowonto No. 1, Surabaya
T. 031-561 4865, 5677918
F. 031-561 5436
E-mail : apindo_jtm@yahoo.co.id



Bali

Ketua : Nengah Nurlaba, SH
Jl. Menuh No. 1 Denpasar (80235)
T. 0361-263 243/751 816
F. 0361-263 243/756 647
E-mail : apindobali@dps.centrin.net.id
apindobali_dpp@yahoo.co.id



NTB

Ketua : Ni Ketut Wolini
Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama
Mataram
T. 0370-634 680 (Komang),
0370-644 873 (Rika)
F. 0370-634 680
E-mail : ntb@apindo.or.id



NTT

Ketua : Freddy Ongko
Jl. Timor Raya No. 122 Km.5
Oesapa, Kupang NTT (85111)
T. 0380 - 828 813
F. 0380 - 831 718
E-mail : tarsankupang@hotmail.com



Kalimantan Utara

Ketua : Herry Johanes
Jl. Mulawarman RT. 15 Ruko No. 1
Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat
E-mail : herryjohaness70@gmail.com



Kalimantan Barat

Ketua : Maman Surachman
Jl. Adi Sucipto Km. 5 Pontianak
Kalimantan Barat (78124)
T. 0561-739 777
F. 0561-739 828
E : ed-pers-ro@timber.lyman.co.id



Kalimantan Tengah

Ketua : Hernica Rasan
Gedung Batang Garing L3 Kav. 307
Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya
T. 0536-324 2218
F. 0536-324 2217
E-mail : apindo_kalteng@yahoo.com



Kalimantan Timur

Ketua : M. Slamet Brotosiswojo
Jl. Soekarno Hatta, Komp. Nirwana
Blok B 1 No. 11 - Balikpapan,
Kalimantan Timur
T. 0542 - 7212466
F. 0542 - 7212488
E-mail : apindokaltim@yahoo.com



Kalimantan Selatan

Ketua : DR. Supriadi, Spd, MM
Komplek Ruko 53 Kav. 6,
Jl. Lingkar Dalam Banjarmasin
T. 0511 - 4315592
F. 0511 - 4315592
E-mail : kalsel@apindo.or.id
apindo.kalsel@yahoo.com



DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROPINSI APINDO

Sulawesi Utara

Ketua : Nicho Lieke
Jl. Sarapung No. 3 - 5 Manado
T. 0431-846457, 0431-51560
F. 0431-866889
E-mail :
max.pangkey@ptsinarpurefood.com



Maluku Utara

Ketua : Christopher Herliem, SH
Jl. Dr. Chasan Boesoirie No. 40
Ternate, Maluku Utara (97721)
T. 0921-326 231
F. 0921-326 231
E-mail : c.herliem@gmail.com
apindomu@gmail.com



Gorontalo

Ketua : H. Suharto Puluhulawa
Jl. Kenangan No. 156 Dulalowo
Kec. Kota Tengah, Gorontalo (96115)
T. 0435 - 824431/826859
F. 0435 - 826859
E-mail : l_buana_n@yahoo.com
gorontalo@apindo.or.id
harto_06@yahoo.co.id



Maluku

Ketua : Hellen Sarita de Lima
Hellen S. Koesnadi, SH & Part
Jl. Cendrawasih Gg. Vina
SK 3/2 No. 7, Ambon (97123)
T. 0911-341 257
F. 0911-354 952
E-mail : hellen_ambon@yahoo.com



Sulawesi Barat

Ketua : Dirga Adhiputra Singkarru
Jl. Martadinata Kantor LPJKP
Mamuju, Sulbar 9100191
T / F : -
E-mail : ifz1988@yahoo.com



Papua

Ketua : Drs. Simon P. Morin
Jl. Raya Abepantai No. 30
Kel. Awiyo, Abepura, Jayapura
T. 0967 - 582 459
F. 0967 - 582 459
E-mail : apindopapua@yahoo.com
papua@apindo.or.id



Sulawesi Tengah

Ketua : Arthur Pangemanan
Jl. Sapta Marga II/2 Palu
T. 0451- 487 301
F. 0451 - 456 556
E-mail : moniqueikha@gmail.com



Papua Barat

Ketua : James Taroreh
Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari
Papua Barat (98311)
T. (0986) 211723
F. (0986) 215281
E-mail : apindopabar@ymail.com



Sulawesi Selatan

Jl. Jend. A. Yani No. 23 Makassar
Sulawesi Selatan
T. 0411-324 944/437 059
F. 0411-324 944/466 3606
E. baktipersada_latu@yahoo.com
tigasaktiutama@yahoo.com



Sulawesi Tenggara

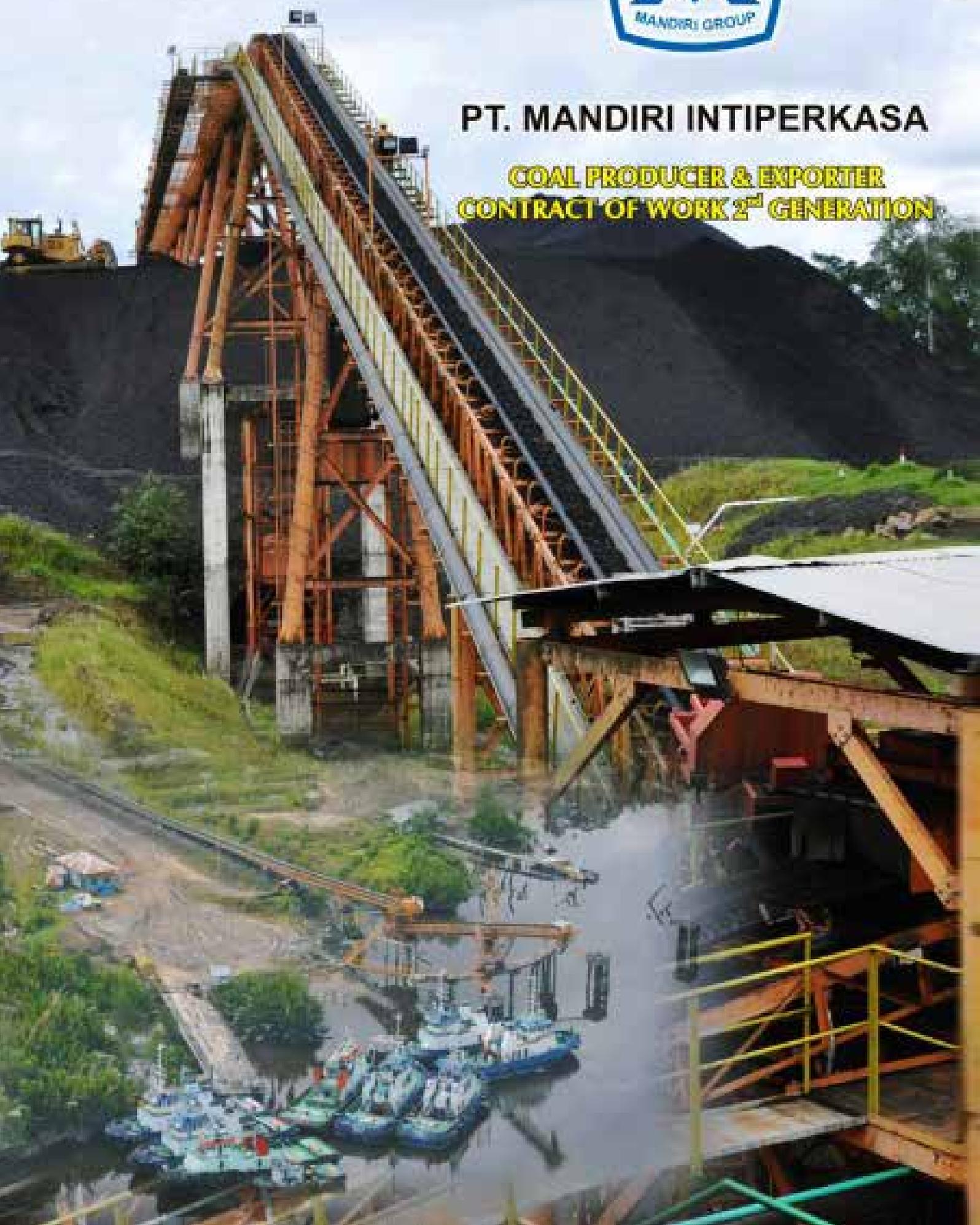
Ketua : Ir. H. Zuhri Rustan
Jl. Malik Raya No. 33 A Kendari,
Sulawesi Tenggara (93111)
T. 0401 - 3125178,
F. 0401 - 3125697
E: apindodppsultra@yahoo.com





PT. MANDIRI INTIPERKASA

**COAL PRODUCER & EXPORTER
CONTRACT OF WORK 2nd GENERATION**



" MARI WUJUDKAN INDONESIA DIGDAYA "

DJARUM BEASISWA BULUTANGKIS

Telah melahirkan atlet-atlet yang berhasil menjuarai: Olimpiade, BWF World Championships, All England, Thomas Cup, Uber Cup dan Sudirman Cup.

5.000+ ATLET bulutangkis telah dibina sejak tahun 1969.

11 ATLET bulutangkis mempersembahkan medali Olimpiade untuk Indonesia.

DJARUM TREES FOR LIFE



2.000.000+ POHON telah ditanam di pulau Jawa sejak 1979.

Pencanangan program penanaman pohon trembesi untuk mengurangi pemanasan global, sepanjang

2.150 km jalur Jawa-Madura mampu menyerap

2.600.000 TON CO₂ / TAHUN.



DJARUM BEASISWA PLUS

10.355 MAHASISWA

telah menerima beasiswa prestasi dan pelatihan kepemimpinan di

119 PERGURUAN TINGGI unggulan di Indonesia.

16 SMK

di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah dikembangkan melalui program kejuruan unggulan, antara lain: animasi, pelayaran, kuliner, fashion, dan sebagainya.

DJARUM SUMBANGSIH SOSIAL

28.000+ ORANG

mendapat bantuan air bersih dari sumur resapan dan penampungan air.

39.000+ ORANG

mendapatkan pelayanan medis gratis.

DJARUM APRESIASI BUDAYA



Mendukung **3.000+** KEGIATAN BUDAYA DAN PERTUNJUKAN SENI sejak 1992.



Galeri Indonesia Kaya sebagai ruang edutainment budaya berbasis multimedia pertama di Indonesia telah dikunjungi **450.000+** PENIKMAT SENI sejak tahun 2013.

Organization and Regional Empowerment Division



Preface

During 2017, the Department of Organization and Regional Empowerment conducted activities for organizational development and ensured the continuity of organizational leadership. The activities are in the internal organizational agendas at national and regional levels. In the national scope, the organization's internal activities are the National Work Meeting and Consultation (RAKERKONAS) and the adjustment of APINDO National Board organizational structure according to the needs. In the regional areas, activities related to the Provincial Conference (MUSPROV) and the

APINDO National Board is always present in every MUSPROV. As for RAKERKONPROV, not all areas holding it are attended by APINDO national Board. To involve the Provincial Executive Committee in strategic activities, APINDO National Board continue to cooperate with research institutes to involve Provincial Boards in implementing it to get the result according to the local condition and so that there is interaction between Provincial Board and regional stakeholders. Activities involving other Provincial Boards are reported separately in other areas such as: employment, SMEs, etc.

Activities

1. XXVIII APINDO RAKERKONAS



The National Work Meeting and Consultation (RAKERKONAS) which is regulated in Article 27 of APINDO's Articles of Association is a coordination and consultation forum between the National Management and Provincial and Regency/City Management throughout Indonesia, especially to improve the investment climate and business competitiveness of the business world in Indonesia.

The XXVIII APINDO RAKERKONAS in Palembang, South Sumatera was held on 19-21 April 2017, the theme is "Improving Business Competitiveness through Central and Regional Synergy".

The role of the regional government is very important for the investment activities to support national economy. A number of regional challenges need to be addressed, especially the ones related to the Regional Regulation. Moreover, the decision of



the Constitutional Court (MK), which cancelled the authority of the Minister of Home Affairs to revoke the Regional Regulations, is subsequently transferred to the Supreme Court (MA), which caused the central government to lose the control in reviewing the existing Regional Regulation.

APINDO through the Monitoring Committee for the Implementation of Regional Autonomy (KPPOD) often reviews the Regional Regulations that obstruct business activities and submits a review to the Ministry of Home Affairs. KPPOD has provided inputs to the Ministry of Home Affairs that there are 3,100 Regional Regulations that hinder the business world.

The chairman of APINDO National Board, Hariyadi B. Sukamdani in his speech said that APINDO needs to build a synergy with the government through a close cooperation between business players, government, and society by



building a good communication and understanding towards the present problems.

The number of existing challenges lies especially in the Field of Manpower and Wages, Industry and Trade, and Field of Investment. The solution to these challenges will depend on the program and policy of the related Ministries in the remaining time of 2014-2019 Government which will have implications for the development of domestic, industry and trade, investment dynamics, and overall welfare of workers.

APINDO expects the business world to continue to improve its competitiveness as a part of global supply chain. Business competitiveness requires the full support of service institutions (institutional mechanisms), quality and integrity of human resources and bureaucracy services, and good intention and good policy regulations.

The industrial sector is a sector with a great potential to create an added value and employment absorption. The industry sector's contribution to the total GDP in 2016 was 17.82% and the employment absorption was 15.54 million people or about 13% of the total workforce in Indonesia. That means the role of the industrial sector, especially the strategic labour intensive industry, is still expected as the economy main driver in labour intensive industries in 2017 and beyond. The Government's Economic Policy Packages that have been issued since 2015 became a breakthrough that have a direct impact

on the sustainability and ease of doing business for the business world.

The progress of Indonesia's trade agreements with other countries/regions, such as Indonesia-EU CEPA and Indonesia-Australia CEPA, also becomes one of the primary barometers of Indonesia's trade as well as an opportunity to promote domestic industries based on import substitution, resulting in a trade surplus that will positively impact other macroeconomic indicators.

Investment as one of the supporting components of economic growth will be an indicator that continues to require full attention from stakeholders, and is expected to play a greater role in 2017. A declared and implemented Integrated One Stop Service (PTSP) that regulates an investment licensing process for the minimum of 3 (three) hours have been used by various investors as much as possible. However, in the future, the business world is still waiting for the result of the coordination between the Investment Coordinating Board (BKPM) with the Regional Government in terms of regional regulation (especially the basic agreements required for realizing investment agreements which are the districts/municipal's authority such as SIUP, TDP, HO, IMB) which in many areas are not in line with the reformation spirit of licenses simplification that has been done by the central government. This condition is still exacerbated with the existence of Regional Regulations that are substantially hampering the investments such as various forms of local levies and distorting employment arrangements that have not been cancelled by the Government. Without the support and commitment of the Regional Head, it is almost impossible to make investment a reality in Indonesia. The clarity of the simplification of local regulations will have a tangible impact on the increase in investment interest, which will directly contribute to the national economy as well as the increase of employment.

Therefore, the main spirit lies in the commitment to accelerate the simplification of business licensing and investment regulation in 2017.

The result of the Panel Discussion on APINDO RAKERKONAS is expected to present and provide an overview of a number of objectives such as:

1. Synergy of the direction of national industry and trade policies to create national competitiveness,



including the focus of the industry of choice/priority for the creation of added value and employment, as well as international investment and trade policies.

2. Coordination and cooperation between the central and regional governments in the fields of investment and trade, including legal certainty and good quality of service in terms of business licensing and certainty of local charges.
3. Synergy that can be developed between the Government and business players

2. APINDO West Kalimantan Provincial Conference

APINDO West Kalimantan Provincial Conference was held on 23 February 2017. The Provincial Conference was attended by all District/City Executive Committees of West Kalimantan and attended by Mr. Anthony Hilman, Chairman of Department

of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board. In the APINDO West Kalimantan Provincial Conference, Mr. Maman Surachman was re-elected as the Chairman APINDO West Kalimantan for the period of 2017-2022. In his speech, he said that in the future of APINDO Provincial Board of West Kalimantan will focus guiding the members at the provincial and district/city level and of course simultaneously keep fighting for the members' interests.



3. APINDO South Sumatera Provincial Conference

APINDO South Sumatera Provincial Conference was held on March 7, 2017 with the theme of Unite to realize the World of Business Competitiveness. This provincial meeting was

opened by Mr. Anthony Hilman, the Chairman of Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board and attended by all the District/City Executive Committees of South Sumatra. In South Sumatra, Sumarjono Saragih was re-elected as the Head of APINDO Provincial Board of South Sumatra for the 2017-2022 period.



Some important guests who attended were the Chairman of KADIN provincial board, Chairman of PWI Provincial Board, Supervisor of BPJS Affairs, Mr. Aditya Warman, Managing Director of BPJS Health, Mr. Fahmi Idris, and Chairman of BPJS Employment, Mr. Chairul Radjab, and Mayor of Makassar, Ir. Ramdan Pomanto. The new provincial board administrators of APINDO South Sulawesi for the period 2017-2022 was officiated directly by Mr. Hariyadi B. Sukamdani as the Chairman of APINDO National Board.



4. APINDO South Sulawesi Provincial Conference

APINDO South Sulawesi Provincial Conference was held in Makassar on 27 April 2017. This provincial conference was opened by Mr. Ir. Agus Arifin Nu'mang, Vice Governor of South Sulawesi and attended by all District/City Executive Committees of South Sulawesi. Mr. Eko Budi Santoso - Vice Chairman of the Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board's from the Organizational Field became one of the speakers. He also gave the welcoming speech. In APINDO South Sulawesi Provincial Conference, Mr. Drs. La Tunreng, M.M was re-elected as Chairman of APINDO Provincial Board of South Sulawesi for the period of 2017 - 2022.



5. APINDO Bali Provincial Conference

APINDO Bali Provincial Conference was held in Denpasar on 9 May 2017. APINDO Bali Provincial Conference was opened by Assistant III of Regional Secretariat of Bali, Drs. I Gusti Ngurah Alit, M.Si and attended by all the District/City Executive



Committees in Bali, Chairman of APINDO National Board Mr. Hariyadi B. Sukamdani, Chairman of the Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board, Mr. Anthony Hilman, Head of Manpower Office of Bali, Head of BPJS Health of Bali, and Head of BPJS Employment of Bali, as well as partners of other APINDO Provincial Board of Bali including Labor Union in Bali.

In Bali Provincial Conference, Mr. Nengah Nurlaba was elected as the Chairman of APINDO Provincial Board of Bali for the period of 2017-2022. It is hoped that through the Bali Provincial Conference, the new Chairman and Management will be able to strengthen the existence of APINDO in carrying out the vision and mission of the organization, including guiding the SMEs and continuing to oversee the process of licensing and investing in Bali.



6. APINDO Gorontalo Provincial Conference

APINDO Gorontalo Provincial Conference was held on 9 May 2017, it was attended by all the District/City Executive Committees of Gorontalo. It was opened and closed by Mr. Urip Sedyo Widodo, Vice Chairman of the Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board

Mr. H. Soeharto Puluhulawa, S.E, M.M was re-elected in this Provincial Conference as the Chairman of APINDO Provincial Board of Gorontalo for the period of 2017 - 2022.



7. APINDO West Sumatera Provincial Conference

APINDO West Sumatera Provincial Conference was held on 22 July 2017 with the theme 'Encouraging the Role of SMEs in order to Improve Competitiveness of West Sumatra Province'. This conference was opened by Mr. Hariyadi B. Sukamdani – the Chairman of APINDO National Board and attended by all representatives of APINDO District/City Executive Committees of

West Sumatera. The Provincial Conference was also attended by Mr. Anthony Hilman as the Chairman of the Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board. Mr. Muzakir Aziz Akin was re-elected as the Chairman of APINDO Provincial Board of West Sumatera for the period of 2017 - 2022 in the APINDO West Sumatera Provincial Conference.



8. APINDO Southeast Sulawesi Provincial Conference

Musyawarah Provinsi (MUSPROV) APINDO Southeast Sulawesi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan mengangkat tema APINDO Southeast Sulawesi Wujudkan Iklim Dunia Usaha Yang Kondusif. Musyawarah Provinsi ini dibuka oleh Pelaksana tugas Gubernur Southeast Sulawesi Bapak H. Saleh Lasata, dihadiri oleh Bapak Anthony

Hilman – Ketua DPN APINDO Department of Organization and Regional Empowerment dan dihadiri seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota APINDO se Southeast Sulawesi. Dalam Musyawarah Provinsi APINDO Southeast Sulawesi ini terpilih sebagai Ketua DPP APINDO masa bhakti tahun 2017 – 2022 adalah Bapak Ir. H. Zuhri Rustan.

APINDO Southeast Sulawesi Provincial Conference was held on 21 August 2017 with the theme 'APINDO of Southeast Sulawesi Creating a Conducive Business Climate'. This conference was opened by the Governor of Southeast Sulawesi, Mr. H. Saleh Lasata, attended by Mr. Anthony Hilman - Chairman of the Department of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board. It was also attended by all representatives of the APINDO District/ City Executive Committees of Southeast Sulawesi. Mr. Ir. H. Zuhri Rustan was elected as the Chairman of APINDO Provincial Board Southeast Sulawesi for the period of 2017 - 2022 in the APINDO Southeast Sulawesi Regional Conference.



9. APINDO DKI Jakarta Extraordinary Provincial Conference

APINDO DKI Jakarta Extraordinary Provincial Conference (MUSPROVLUB) was held on 24 August 2017 with the theme 'Enhancing the Partnership with Government and Trade Union / Labour Union for the Realization of a More Conducive Business Climate'. The Extraordinary Provincial Conference was opened by the Chairman of APINDO National Board, Mr. Hariyadi B. Sukamdani. MUSPROVLUB was attended and participated by all Executive Committees of DKI Jakarta and some Extraordinary Members. Mr. Anthony Hilman, the Chairman of the Department

of Organization and Regional Empowerment of APINDO National Board and Mr. Sanny Iskandar, the General Secretary of APINDO National Board also attended the opening and closing ceremony.

Mr. Solihin was elected as the Chairman of APINDO Provincial Board of DKI Jakarta for the period of 2017 - 2022 in the APINDO DKI Jakarta Extraordinary Provincial Conference.



10. APINDO North Sulawesi Provincial Conference



The APINDO North Sulawesi Provincial Conference was held on 12 December 2017. The provincial conference was opened by Mr. Anthony Hilman, the Chairman of Department of Organization and Regional Empowerment of

APINDO National Board, and attended by all North representatives of APINDO District/ City Executive Committees. Mr. Nicho Lieke was elected as the Chairman of APINDO Provincial Board of North Sulawesi for the period of 2017 - 2022 in the APINDO North Sulawesi Provincial Conference.



11. Business Competitiveness Survey & Annual Conference

The Business Competitiveness Survey is based on the consideration that Indonesia is a "rising middle power". As the Indonesian economy grows, Singapore and the neighbouring countries in Southeast Asia will also gain the benefit. Indonesia as the largest economy in ASEAN is expected to lead in improving Japan-ASEAN and China-ASEAN connectivity.

The implementation of the ASEAN Economic Community and other regional trade agreements will improve the welfare of the ASEAN region in general.

For the same reason, Indonesia is also expected to lead in encouraging the realization of Regional Comprehensive Economic Partnership (ASEAN, Australia, China, India, Japan, Korea, and New Zealand) and the next Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP).

The research conducted by Asia Competitiveness Institute (ACI) - Lee Kuan Yew School of Public Policy in cooperation with APINDO National Board is studying whether Indonesia is able to become the engine of economic growth in Southeast Asia and how fast the position can be achieved.

The research is done by collecting the entrepreneur respondent in a forum with the purpose:

1. Entrepreneurs who are present can understand/ comprehend the explanation of the results of the business competitiveness survey in previous years concerning the map of competitiveness,



such as: macroeconomic stability, government and institutional planning, financial condition, business and labour, quality of life, and infrastructure development.

2. Entrepreneurs who are present as participants can also understand/comprehend the explanation from ACI regarding SWOT Analysis: Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (Threat) to then be able to take a position in determining the corporate and public policy in the future.
3. Obtaining input/data from respondents for the Survey of Business Competitiveness in 2016 from the participants.

From the various inputs that are received every year ACI, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore hold a conference attended by employers (APINDO) and Indonesian universities to discuss and refine the results of the survey. In 2017, the Asia Competitiveness Institute (ACI) Annual Conference was held on 22-24 November 2017 in Singapore, with the theme "Infrastructure Development for Economic Competitiveness of the Role of the Public Sector". Prior to the competitiveness conference, APINDO National Board had the opportunity to conduct a Coordination Meeting of all APINDO Provincial

Board to discuss various matters related to the Organization Strengthening and Regional Empowerment Program.

Expectation

The year 2017 passed along with all the happiness and sorrows in managing and running the wheel of the organization. Much has been accomplished from several organizational work programs in 2017. APINDO National Board greatly appreciates and is grateful for the hard work, dedication, and sacrifice of all APINDO's Chairmen and Management as well as secretarial staffs at all levels throughout Indonesia. Nothing is perfect; there are still various shortcomings that should be used as lesson to be learned together. As a family, APINDO is looking at a more optimistic year of 2018 and the coming years.

APINDO District Board should be the locomotive of investment climate creation, the creation of quality jobs, and encourage productivity in the region. Therefore, the role of APINDO District Board needs to be improved continuously in influencing Regional Political Policy related to creating a more conducive investment climate. Moreover, APINDO District Board should continuously oversee the harmonious and just industrial relations and are actively involved in other sectors of the economy, both locally and nationally.

APINDO's task is not merely a matter of employment and industrial relation. APINDO district board can also play a role in encouraging the establishment of certification as an effort to improve the welfare of workers and at the same time as a source of income for APINDO organizations in the region. It is also necessary to strengthen a competent and professional secretariat as a center of information for members and as a mean of coordination among administrators.

We are certain that APINDO's role in 2018 will be as big as the Government in promoting the business world. Hopefully in the year 2018, APINDO big family throughout Indonesia still maintain and promote solidity and good, optimal cooperation to realize the vision, mission, and goals of the organization.

Harapan

Tahun 2017 telah dilalui bersama dengan segala suka maupun duka dalam mengelola dan menjalankan roda organisasi. Banyak hal yang telah dicapai dari beberapa program kerja organisasi di tahun 2017. DPN APINDO memberikan apresiasi yang luar biasa dan berterima kasih atas kerja keras, dedikasi dan pengorbanan yang tidak sedikit dari seluruh Ketua dan Pengurus APINDO serta staff kesekretariatan di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Tak ada gading yang tak retak, tentu harus disadari bahwa masih ada berbagai kekurangan yang kiranya dapat dijadikan pembelajaran bersama sebagai keluarga besar APINDO untuk menatap lebih optimis di tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya.

APINDO Daerah harus menjadi lokomotif penciptaan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong produktifitas di daerah, oleh karena itu perlu ditingkatkan terus Peran APINDO Daerah dalam mempengaruhi Kebijakan Politik Daerah yang terkait dengan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif serta terus mengawal hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta terlibat aktif dalam sektor-sektor perekonomian lainnya baik di daerah maupun tingkat nasional.

Tugas APINDO bukanlah sekedar urusan ketenagakerjaan dan hubungan industrial saja. APINDO Daerah juga bisa berperan dalam mendorong pembentukan sertifikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sekaligus sebagai pemasukan bagi organisasi APINDO di Daerah. Perlu juga adanya penguatan sekretariat yang kompeten dan profesional sebagai pusat informasi baik bagi anggota maupun koordinasi antar pengurus.

Kami yakin bahwa peran APINDO di tahun 2018 ini akan sama besarnya dengan Pemerintah dalam hal memajukan dunia usaha. Mudah-mudahan di tahun 2018 ini keluarga besar APINDO di seluruh Indonesia tetap menjaga dan meningkatkan soliditas serta kerjasama yang baik dan optimal untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari organisasi.

KIIC
Karawang International Industrial City

Distance To Jakarta Business Center 1 + 85 KM, Tanjung Priuk Harbor 1 + 88 KM, To Semarang-Hatta Air Port 1 + 70 KM

Total area 1,409 Ha and currently we are developing new expansion area

- * Direct Access to Jakarta-Cikampek Toll Road
- * Excellence Infrastructures
- * Premium Electrical and Telecommunication System
- * Industrial Gas Supply, Water and Waste Water Treatment Plant
- * Excellence Facilities
- * Sedena Golf Course and Park KIIC
- * Commercial Area (Bank, Restaurants, Rental Offices, etc)
- * Rental Factory and Warehouse
- * Parking Zone and Container Yard
- * Security & Community Development Center
- * Village Area: Agro Green Education Park

SUPPORTING & FACILITIES

- Workshops
- Rental Factory
- Parking Zone
- Sport Hall
- Restroom
- Agro Green Education Park

THE WORLD OF MANUFACTURING IS SAFE IN OUR HAND

INFRASTRUCTURES & UTILITIES

PT. BUKALIA PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
PT. KARAWANG AMANG BAKRI & SONS
PT. KARAWANG TEKNIK SINA INDUSTRIAL ESTATE
Marketing & Management Office
Bukha KIC JI. Pemuda Raya Lot 2, 18, KARAWANG RESIDENSI KIC,
Kawandang 41021, Indonesia. Telp. (0271) 800988 Fax. (0271) 800177
E-mail: marketing@buk.com.id | general@buk.com.id
PURN KIC Telp. (0271) 840065 E-mail: Purn@buk.com

Sampoerna Retail Community

Mendukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan
Pertumbuhan UMKM Indonesia



> 45.000 SRC dari Sabang sampai Merauke

PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) memberikan pendampingan usaha kepada lebih dari 45.000 peritel tradisional di Indonesia, di antaranya terkait tata kelola toko, pemasaran, serta motivasi.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



Melalui pendampingan tersebut, mereka kini mampu mendorong peningkatan omzet dan taraf hidup mereka. Para peritel tradisional penggerak ekonomi kerakyatan ini menyatu dalam “Sampoerna Retail Community.”

Untuk informasi peluang kerjasama hubungi: contact@sampoerna.com

#YukBelanjake





**Manpower Coordination
Division**



Preface

In the beginning of 2017 APINDO National Board has restructured their management especially in the Manpower Coordination Department. The restructuring of the Manpower field has established that the field of Law and Advocacy becomes an integral part of the department of employment coordination.

In the restructuring, there are 6 Sectors under the Department of Manpower Coordination led by Mr. Harijanto assisted by 3 (three) Vice Chairman, Mr. Aloysius Budi Santosa, Mrs. Myra Hanartani, and Mr. Bob Azzam. The six fields are :

- (1) Regulation and Institutional Relation,
- (2) Wages and Productivity,
- (3) Occupational Health and Safety (K3),
- (4) Social Security Sector,
- (5) Advocacy Sector,
- (6) Training and Skills Improvement Field.

Any policy issued by the Government will certainly affect and have legal and economic consequences on the subject of the law itself, in this case is to the Entrepreneur and/ or the company that is incorporated or not incorporated in APINDO. Therefore, each field incorporated in the Department of Manpower Coordination management has a decisive role and function to safeguard, ensuring that any policies and regulations issued by the government can accommodate the interests and/or perspectives of businessmen, in which APINDO is representing. APINDO is a business world's representative in the field of Industrial Relations for various industrial relations institutional instruments such as Wage Council, National and Regional Tripartite Cooperation Institutions (LKS), K3 Board, etc.

Activities

The role and function of the Department of Manpower Coordination APINDO National Board, which consists of various fields as mentioned above, can be seen from several activities that have been implemented through cooperating with industrial relation stakeholders such as the Ministry of Manpower, Employee/Labour Unions, especially the ones registered in the Ministry of Manpower and Institutions, and Other Private Institutions such as the ILO and many more.

Coordination of The National Tripartite Cooperation Intitution (LKS TRIPNAS)

1. Periodic Routine Meeting conducted by members of National Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripnas) in various policies and issues of Manpower, through LKS Plenary Session and Plenary Session. The topics of discussion include: implementation of wage scale structures, organizational strengthening of elements in Tripnas institution, etc.

2. The administrator in Manpower field, particularly the ones representing the National Tripartite membership attending May Day Activities with the Ministry of Manpower and Employee Union / Labor Union.
3. National Coordination Meeting of National Wage Council (Depenas) at Hotel Ciputra, Jakarta
4. Implementation of the Indonesian Workers League in the Soccer to strengthen the bond between Workers and the Company



Indonesia National Wage Council Meeting with the Minister of Manpower



Consolidation of Wage Council throughout Indonesia

Selection of Ad Hoc Judge of Phi Level and Appeal Rate of Supreme Court

1. Telah dilaksanakannya Proses Seleksi Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA untuk Periode 2017, dimana DPN APINDO melalui Tim Seleksi telah memilih untuk merekomendasikan 12 nama calon dari total 37 berkas yang masuk di DPN APINDO dan hanya 26 orang calon yang mengikuti sesi Interview tersebut pada tanggal 18 September 2017. Terdapat 12 calon yang dipilih untuk direkomendasikan oleh Tim Seleksi telah disetujui oleh Ketua Umum DPN APINDO untuk dikirim berkasnya kepada Panitia Seleksi Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia sesuai waktu yang ditetapkan KY. Dari 12 calon tersebut setelah melalui berbagai tahap seleksi, telah ditetapkan Calon Hakim Ad Hoc dari unsur APINDO sebanyak 5 orang; sementara dari unsur SP/SB 9 orang yang akan menjalani proses wawancara di Komisi Yudisial untuk kemudian *fit and proper test* di DPR RI.

2. Telah dilaksanakan proses Seleksi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial oleh Mahkamah Agung (Tingkat Pertama) dimana DPN APINDO telah mendistribusikan Surat Edaran Informasi seleksi kepada seluruh DPP APINDO se Indonesia. Juga telah dikirimkan Surat

Persetujuan atas Pengusulan Calon Hakim AdHoc PHI 2017 oleh DPP APINDO dari DPN APINDO kepada setiap DPP APINDO se Indonesia Dari 300 peserta yang mencalonkan diri baik dari unsur APINDO maupun unsur SP/SB saat ini sudah terseleksi menjadi sekitar 150 calon yang lolos seleksi tingkat Kemenaker yang nantinya akan diseleksi kembali oleh Mahkamah Agung sehingga menjadi 48 orang dengan komposisi 26 orang unsur APINDO dan 22 orang unsur SP/SB.

Pelayanan Konsultasi Anggota Luar Biasa (ALB) DPN APINDO

Memberikan pelayan kepada anggota berupa informasi, saran, dalam bentuk konsultasi hingga tindakan advokasi merupakan bagian dari fungsi Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan yang khususnya ditangani oleh Bidang Advokasi dan Bidang Regulasi dan Hubungan Kelembagaan DPN APINDO.

Bidang Advokasi memberikan pelayanan kepada anggota mengenai implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait hubungan industrial di Indonesia berupa konsultasi dan advokasi kepada anggota serta mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang dialami anggota.

Sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2017 terdapat berbagai permasalahan terkait





Proses seleksi Hakim AdHoc PHI tingkat Kasasi Mahkamah Agung

hubungan industrial yang dikonsultasikan ke Bidang Advokasi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam hal-hal berikut ini:

1. Keberatan atas UMP DKI Jakarta 2017 yang diterbitkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta; tentang wajib atau tidaknya melampirkan Lampiran Struktur Upah dan Skala Upah (pelaksanaannya hanya diperlihatkan saja dan yang menjadi pertinggal hanya surat keterangan dari Direksi Perusahaan)
2. Penghitungan jam kerja lembur pada saat libur nasional, termasuk untuk pekerja shift
3. PHK Karyawan karena Indisipliner terkait jam istirahat yang digunakan untuk mengurus pekerjaan pribadi.
4. Implementasi CoB / Koordinasi Manfaat BPJS Kesehatan yang belum jelas.
5. Keberatan atas Upah Minimum Sektoral (UMS) karena perusahaan tidak dilibatkan dalam penyusunan UMS tersebut dengan meminta dibuatkan endorment dari DPN APINDO untuk melakukan penangguhan upah sektoral tersebut.
6. Arahan atas Permen Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU) yang baru terbit terkait kewajiban melampirkan SUSU tersebut (pelaksanaannya hanya diperlihatkan saja dan yang menjadi pertinggal hanya surat keterangan dari Direksi Perusahaan).
7. Kewajiban pelaporan Struktur Upah dan Skala Upah jika SUSU baru selesai dibuat sementara PKB/PP sudah dilaporkan.
8. Pendirian SP baru diperusahaan yang berafiliasi dan FSPMI dan membubarkan SP lama yang independent.
9. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tentang wajib tidaknya Komisaris menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
10. Dasar perhitungan THR (Tunjangan Hari Raya) terkait upah pokok dan pendapatan lainnya
11. Perhitungan upah lembur dengan menerapkan upah 100% atau upah pokok (75%) + tunjangan tetap? dalam kaitannya dengan hal hal yang telah diatur dalam PKB
12. Mekanisme teknis terminasi atas karyawan yang tidak baik kinerjanya.
13. Perkembangan Kebijakan Tapera mengingat perusahaan harus menyusul anggaran keuangan perusahaan tahun 2018.
14. Kewenangan perusahaan untuk dapat melakukan PHK karyawan yang mempunyai kekurangan seperti pandangan mata yang tidak jelas akibat kecelakaan kerja.

Konsultasi, advice hukum dan advokasi yang telah diberikan kepada Anggota atas jenis jenis kasus tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan, situasi dan kondisi secara faktual dan ketentuan normatif sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang menjadi rujukan hukum positif terkait Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan di Indonesia.

KERJASAMA BIPARTIT

DPN APINDO dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) mengadakan program untuk peningkatan kualitas PKB (Perjanjian Kerja Bersama) bagi perusahaan-perusahaan anggota APINDO. Kegiatan tersebut dilakukan melalui serial *workshop* bipartit APINDO-KSBSI dalam bentuk dialog



dan *Training to Trainer* yang diikuti unsur DPN-DPP-DPK dan Perusahaan anggota APINDO beserta *counterpart* KSBSI di setiap tingkatan tersebut.

Kegiatan yang didukung oleh DECP (partner APINDO) dan CNV (partner KSBSI) dari Belanda tersebut diawali dengan *roundtable discussion* yang dilaksanakan di Jakarta dengan diikuti unsur pimpinan nasional DPN APINDO maupun KSBSI yang dihadiri *expert* dari DECP dan CNV serta perwakilan dari Kemenaker. Hasil dari pertemuan berupa panduan fokus materi dialog bipartit dan kesepakatan untuk melakukan serial *workshop* bagi para calon *trainer* yang dilakukan Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan yang juga dihadiri oleh beberapa DPP APINDO dari wilayah sekitarnya.

Kegiatan bi-partit tersebut menghasilkan *Action Plan* untuk terus melaksanakan kerjasama bipartit APINDO-KSBSI di wilayahnya masing masing. Rencana tindak lanjut diantaranya untuk melakukan: dialog reguler APINDO-KSBSI maupun dialog yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan di setiap tingkatnya masing-masing; fokus dialog diarahkan untuk peningkatan jumlah dan kualitas PKB; kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengawal pembentukan Perda (Peraturan Daerah) agar sesuai kebutuhan bi-partit; dan sebagainya.

PROGRAM KESETARAAN JENDER

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja merupakan prinsip dasar ketenagakerjaan yang berlaku secara internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO no. 100 (1951) tentang upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama dan Konvensi ILO no. 111 (1958) tentang diskriminasi (pekerjaan dan jabatan). Indonesia

sebagai anggota ILO telah meratifikasi kedua konvensi tersebut melalui UU no.80/1957 dan UU no.21 tahun 1999. Semangat yang terkandung dalam kedua konvensi tersebut telah diadopsi dalam UU no. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Melanjutkan inisiatif-inisiatif APINDO



Workshop TTT dialog bi-partit tersebut akan dilanjutkan di kegiatan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan yang juga diikuti beberapa DPP APINDO dari wilayah sekitarnya.

sebelumnya, APINDO bekerja sama dengan OXFAM melakukan kegiatan: sosialisasi dan pelatihan penerapan kesetaraan gender di tempat kerja dan bimbingan teknisnya, kemudian penyusunan buku panduan sederhana berupa Buku Saku Tanya Jawab yang dapat diterapkan di semua skala usaha baik kecil, menengah maupun besar dengan melibatkan melibatkan 7 (tujuh) Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) dan 19 (sembilan belas) perusahaan yang terlibat dalam penyusunan buku saku ini.

Buku saku ini didistribusikan ke semua perwakilan DPP yang hadir pada acara RAKERKONAS APINDO yang berjumlah sekitar 400 orang, 414 ALB, *Plan Indonesia* dan *Canada Center* (TPSA Project).

Secara internal di DPN APINDO juga dilakukan sosialisasi penerapan kesetaraan gender di tempat kerja ini kepada staf sekretariat DPN APINDO dan staff APINDO Training Center (ATC) di bulan Desember 2017.

Untuk keberlangsungan program penerapan kesetaraan gender di perusahaan, APINDO dan OXFAM telah menyepakati untuk



melanjutkan program kerjasama ini. Kerjasama fase kedua ini akan berlangsung dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Kegiatan pada fase kedua ini selain melanjutkan sosialisasi dan edukasi prinsip kesetaraan gender di tempat kerja, juga akan menyusun indikator kesetaraan gender di tempat kerja dan melakukan pendampingan kepada beberapa perusahaan terpilih sebagai *pilot project*. Diharapkan dengan program pendampingan ini pengusaha mendapatkan manfaat langsung dari program kesetaraan gender di tempat kerja.



PROGRAM PEMAGANGAN DAN PENDIDIKAN VOKASI

Sebagai wujud dari komitmen APINDO dan KADIN Indonesia untuk Percepatan Peningkatan Kualitas SDM melalui Pengembangan Program Pelatihan Terpadu yang dideklarasikan bersama Menaker dihadapan Presiden di akhir tahun 2016, telah dilaksanakan *pilot project* untuk realisasinya.

Pilot project pelatihan terpadu tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi sebagai daerah percontohan. Selain komitmen dunia usaha dan pemerintah, faktor lain yang menentukan berlangsungnya program adalah dukungan dari pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya, Komite Vokasi Daerah yang dibentuk dunia usaha,



pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting bagi terwujudnya program tersebut. Pengembangan program pelatihan ini mendapatkan dukungan dari pihak Jerman seperti Kedutaan Besar Jerman, EKONID, IHK Trier dan GIZ.

PROGRAM KERJASAMA BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari aspek kesehatan kerja, setiap tenaga kerja ingin agar tetap sehat sejak memulai kariernya sampai mencapai masa pensiun, terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerjanya.



Untuk itu setiap pengusaha/manajemen perusahaan harus melaksanakan upaya kesehatan kerja di tempat kerja.

Upaya kesehatan kerja adalah upaya di bidang kesehatan yang ditujukan pada komunitas tenaga kerja, yang meliputi : Upaya kesehatan promotional, Upaya preventif, Upaya kuratif, Upaya rehabilitasi.



Pembinaan dan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pekerja sangat bergantung atas kemauan baik dan kesungguhan (*goodwill dan commitment*) tripartit yang berhubungan langsung dan ikut bertanggung jawab atas produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja, baik dari segi ketangguhan fisik maupun keterampilan kerja. Bersamaan dengan itu dalam rangka menjalani era perdagangan bebas, dunia usaha harus dipacu dalam melakukan efisiensi, memupuk produktivitas dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja sesuai *global*

social compliance.

APINDO sebagai organisasi perwakilan dunia usaha bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan organisasi perburuhan dunia (ILO) mengupayakan tercapainya budaya K3 serta produktivitas dari aspek K3.

Beberapa program di bidang K3 yang sedang berlangsung adalah :

1. Sinergi dengan kementerian kesehatan dan *Global Fund* (Program CCM) dalam penanggulangan TB dan HIV/AIDS
2. Kerjasama dengan ILO dalam program *Safe Youth* dan program K3 menuju budaya K3.
3. Membantu pembudayaan keluarga berencana nasional
4. Bekerjasama dengan berbagai sektor terkait khususnya kementerian sosial RI, kementerian ketenagakerjaan, kementerian kesehatan dalam pendidikan inklusif terhadap kaum disabilitas, pemagangan serta pekerjaan inklusif baik sektor pemerintah, dunia kerja non pemerintah maupun *entrepreneurship* di kalangan disabilitas.

AKTIVITAS INTERNAL DAN PARTISIPATIF APINDO

1. Kegiatan Forum Silaturahmi dan Konsolidasi 3 unsur APINDO (Ketua DPP, Bid. Advokasi dan Hakim AdHoc) di Serpong – Tangerang yang dihadiri oleh seluruh provinsi.
2. Rapat Rutin Kelembagaan Tripartit Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan (Rapat Bidang maupun Sidang Pleno) di Kemenakertrans.
3. Dukungan Advokasi DPN APINDO terhadap Anggota Luar Biasa (ALB) diantaranya kepada: PT. Frigolass Indonesia selaku ALB DPN APINDO sebagaimana terkait penangguhan pembayaran upah sektoral di Kabupaten dan/atau Kota Bekasi; PT. Freeport Indonesia terkait kasus perselisihan hubungan industrialnya, dll.
4. Perumusan usulan revisi PP 78 Tahun 2015



- tentang Pengupahan yang ditujukan kepada Presiden RI.
5. Penyusunan Surat Edaran kepada DPP dan DPK APINDO terkait Pedoman bagi Tim APINDO yang duduk di Dewan Pengupahan berkaitan dengan Upah Sektoral dan Sektor Padat Karya.
 6. Pembahasan Kisi-kisi Revisi UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan
 7. Diskusi dengan DPP dan DPK Bogor terkait dengan Kewenangan APINDO dalam pembahasan UMSK.
 8. Finalisasi Draft SOP Advokasi Kasus Hubungan Industrial yang telah diselesaikan, perlu dilengkapi dengan ketentuan tarif pelayanan
 9. Pembentukan tim pengupahan yang berfungsi sebagai think thank untuk pengupahan nasional begitu juga dengan produktivitas diantaranya bekerjasama dengan beberapa partner seperti CSIS dan Depenas.
 10. MoU dengan beberapa lembaga terkait guna menggaungkan pesan APINDO khususnya terkait upah sektoral.
 11. Penerbitan Surat Edaran DPN APINDO Nomor. 541/DPN/1.3/2C/XII/17 tertanggal 21 Desember Perihal Pedoman Upah Sektoral
 12. Penyusunan sikap APINDO terkait KHL yang harus diperbaharui di tahun 2019 berdasar ketentuan PP 78/2015.
 13. Penegasan sikap DPN APINDO berkaitan dengan terbitnya Permenaker mengenai Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU) dimana APINDO berpandangan bahwa Struktur Skala Upah merupakan ranah Pengusaha untuk menyusun dan menetapkannya serta SUSU yang telah dibuat hanya diperlihatkan saja kepada petugas disnaker setempat dengan pertinggal sebuah surat keterangan dari Direksi Perusahaan terkait telah disusunnya SUSU tersebut.
 14. Penerbitan Surat Edaran DPN APINDO yang ditujukan kepada Anggota APINDO yang duduk di Dewan Pengupahan baik Nasional maupun Daerah guna pelaksanaan kebijakan Penetapan Upah Sektoral sesuai dengan peraturan yang ada pasca terbitnya PP 78/2009.
 15. Penyusunan sikap Apindo terkait data K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 16. Pembahasan bersama pemerintah berkaitan dengan usia pensiun yang akan bertambah ditahun 2019 (usia pensiun bertambah setiap 3 tahun sekali dan hal ini menjadi isu penting dalam kaitanya dengan posisi dunia usaha terhadap usia pensiun apakah di usia 55 tahun ataukah mengikuti perubahan sesuai peraturan terkait BPJS Jaminan Pensiun tersebut. APINDO harus membuat sikap resmi.
 17. Penyusunan sikap terkait TAPERERA dimana pada prinsipnya APINDO dan SP/SB menolak TAPERERA dan hal ini sudah disepakati di LKS Tripnas. Namun demikian melihat proses yang terjadi sepertinya pemerintah akan tetap mengundang peraturan tentang TAPERERA ini. Oleh karena itu APINDO harus segera memikirkan solusi terkait aturan tersebut untuk meringankan beban dunia usaha misalnya Penundaan untuk Swasta, Menyusun kalimat-kalimat (klausul) pasal nantinya yang dinilai menguntungkan dunia usaha dan sebagainya.
 18. Penyusunan pedoman terkait konsep ketenagakerjaan kedepan di era Digitalisasi. Forum diskusi / seminar dengan topik seputar Ketenagakerjaan di berbagai institusi diantaranya di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.



17. Penyusunan sikap terkait TAPERA dimana pada prinsipnya APINDO dan SP/SB menolak TAPERA dan hal ini sudah disepakati di LKS Tripnas. Namun demikian melihat proses yang terjadi seperti halnya pemerintah akan tetap mengundang peraturan tentang TAPERA ini. Oleh karena itu APINDO harus segera memikirkan solusi terkait aturan tersebut untuk meringankan beban dunia usaha misalnya Penundaan untuk Swasta, Menyusun kalimat-kalimat (klausul) pasal nantinya yang dinilai menguntungkan dunia usaha dan sebagainya.
18. Penyusunan pedoman terkait konsep ketenagakerjaan kedepan di era Digitalisasi. Forum diskusi / seminar dengan topik seputar Ketenagakerjaan di berbagai institusi diantaranya di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

KERJASAMA DENGAN ILO

Secara rutin APINDO mengikuti pertemuan reguler unsur tripartit yang difasilitasi oleh ILO. Berbagai macam agenda pembahasan diantaranya mencakup: kebijakan ketenagakerjaan, proyek-proyek ILO, sinergi kelembagaan. Beberapa hasil pembahasan disampaikan sebagai masukan ke lembaga terkait seperti tripartit nasional maupun dewan pengupahan nasional.

Dalam lingkup kegiatan, APINDO bekerjasama dengan dengan ILO diantaranya

tentang *Training of Trainers Collective Bargaining* di Sektor Garment dan *Global Supply Chain* disektor Garment. Tujuan training agar Perusahaan di sektor Garment memiliki dan meningkatkan kepemilikan dan konten PKB diperusahaannya masing-masing. Pelatihan telah dilakukan berturut-turut dengan *pilot project* kepada Management Perusahaan dan Pengurus SP/SB perusahaan di Tangerang.

SOLUSI ASURANSI untuk menunjang aktivitas Anda

Aswata asuransi terpercaya

Asuransi Kebakaran & Properti
Asuransi Rekrayasi
Asuransi Kendaraan
Asuransi Kecelakaan Diri
Asuransi Pengangkutan

PT ASURANSI WAHANA TATA
KANTOR PUSAT
Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4,
Jakarta 12920
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax: (021) 520 3149, 520 5222-23
e-mail: aswata@aswata.co.id
web/site: www.aswata.co.id
PT Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

AA(idn) Outlook Stable
Layanan Aswata 1500 298
www.aswata.co.id

Asuransi Wahana Tata @aswata Asuransi Wahana Tata aswata_id

OFFICIAL PRESTIGE PARTNER



Menuju Desa Sejahtera

PERSEMBAHAN 61 TAHUN ASTRA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA

72 Kampung Berseri Astra yang berfokus pada pengembangan kampung secara terpadu dalam bidang Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Hidup saat ini berada di 34 Provinsi.

Kampung Berseri Astra tengah dalam pengembangan baik dalam jumlah maupun konsep, menuju Desa Sejahtera.



Otomotif



Lata Keuangan



Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi



Agribisnis



Infrastruktur & Logistik



Teknologi Informasi



Properti

www.satu-indonesia.com



APINDO sebagai organisasi pengusaha dengan salah satu misinya adalah untuk melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota, selalu berusaha berada pada barisan terdepan dalam memberikan informasi terkini mengenai perkembangan dunia usaha serta memberikan pelayanan kepada dunia usaha khususnya anggota.

Pemberian informasi ini disampaikan melalui berbagai media termasuk *website* APINDO yang dapat diakses masyarakat luas dan penyelenggaraan konferensi pers sebagai upaya memperluas jangkauan suara APINDO melalui media massa.

Kegiatan

1. Kegiatan Bersifat Informasi

Kegiatan bersifat informasi bagi Anggota Luar Biasa dan publik secara luas dilakukan melalui beberapa sarana komunikasi, diantaranya *website*, e-newsletter dan penyelenggaraan Konferensi Pers serta Liputan yang dihadiri awak media. Kegiatan ini dilakukan untuk mendistribusikan informasi, pandangan, maupun sikap APINDO terkait sejumlah isu yang menjadi fokus Asosiasi.

1.1. Website

Melalui portal *website*, APINDO menyajikan sejumlah informasi terkait kegiatan terkini, yang diselenggarakan APINDO baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk regulasi terbaru terkait Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan, Investasi dan isu strategis lainnya. Terdapat beberapa fitur *website* yang memberikan informasi terkait dunia usaha, salah satunya agenda kegiatan yang diselenggarakan APINDO maupun partners dengan melibatkan sejumlah *stakeholders*.

Publikasi dalam *website* menyediakan informasi bagi anggota untuk membaca *Factsheet* yang disusun Tim Kajian mengenai Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, dan isu perekonomian secara umum dan makro. *Standpoint* APINDO juga ditampilkan di dalam *website* tersebut untuk mengetahui Sikap APINDO mengenai isu tertentu.

Konferensi Pers yang digelar APINDO dengan mengundang sejumlah awak media, baik dari media cetak, elektronik, dan daring (*online*) juga disampaikan pada Siaran Pers yang ada di dalam *website*. Ruang Anggota yang ada di dalam *website* meliputi materi diskusi atau presentasi saat *Members Gathering*, testimonial anggota APINDO, dan juga berita kunjungan anggota yang dilakukan Bidang Pelayanan Anggota ke perusahaan anggota APINDO.

Selain mendapatkan informasi, pengunjung *website* juga bisa melakukan permohonan pendaftaran menjadi anggota APINDO secara *online*, termasuk diantaranya mengajukan pertanyaan *online*. Sepanjang tahun 2017, APINDO menerima 20 permohonan untuk menjadi anggota APINDO dan terdapat 120 pertanyaan *online* yang diterima melalui *website* APINDO.

1.2. E-Newsletter

E-Newsletter menjadi salah satu alat komunikasi bagi APINDO untuk menyebarluaskan informasi terkait Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan, Investasi, dan isu strategis lainnya, termasuk kegiatan yang diselenggarakan atau *stakeholder* lain yang mengundang Ketua Umum maupun Pengurus APINDO.

1.3. Konferensi Pers dan Undangan Peliputan Media

Pandangan APINDO mengenai isu terkini dipublikasikan melalui Konferensi Pers maupun Peliputan Kegiatan dengan mengundang sejumlah media cetak, elektronik, dan daring (*online*). Sepanjang 2017, APINDO mengadakan Konferensi Pers dan Peliputan

Media, dengan tema sebagai berikut:

- CEO Gathering: *Outlook* Perekonomian Indonesia 2017
- CEO Gathering: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia, Implikasinya Bagi Dunia Usaha
- Farewell Amnesti Pajak
- *Public Policy Discussion* APINDO “Tantangan Perbaikan Kebijakan Industri Perkebunan Sawit”
- Diskusi Publik Lelang Gula Kristal Rafinasi, Solusi atau Distorsi?
- Workshop dan Dialog Hubungan Industrial dan Kelangsungan Investasi di Sektor Pertambangan
- *Launching* PAMI
- Makna dan Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/201
- CEO Focus 2017: Tantangan Dunia Usaha dan Pengembangan Pasar Modal
- *Outlook* APINDO 2018
- Diskusi Publik Lelang Gula Kristal Rafinasi.



Suasana Konferensi Pers APINDO, 2017



Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B. Sukamdani sedang menjawab pertanyaan wartawan dalam Konferensi Pers *Outlook* Perekonomian APINDO

Salah satu Siaran Pers yang disampaikan APINDO adalah sebagai berikut:

APINDO : Lanjutkan Pemberian Insentif Sektor Padat Karya

APINDO meminta Pemerintah tetap melanjutkan pemberian insentif kepada Dunia Usaha, khususnya pada sektor Padat Karya. Pejabat publik juga diharapkan mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi saat ini karena hal tersebut menjadikan Dunia Usaha dan Investor semakin berhati-hati dan pesimis, terutama memasuki tahun politik 2018. APINDO mengharapkan adanya Politik Kerja, bukan Politik Rencana atau Politik Wacana.

APINDO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 akan tumbuh dalam rentang 5,05% hingga 5,20%, di bawah target pertumbuhan 2018 dalam RAPBN 2018. Proyeksi tersebut dibuat dengan landasan kehati-hatian sekaligus pandangan realistis Dunia Usaha terhadap kelanjutan reformasi struktural yang masih dilakukan Pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani dalam Konferensi Pers *Outlook* APINDO 2018 di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan pengusaha dan investor enggan berinvestasi di industri padat karya lantaran tingginya Upah Minimum. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja formal mulai menyusut dan beralih ke sektor informal. Dengan demikian, terjadi penundaan pembelian atau konsumsi.

Melalui *Outlook* 2018, APINDO memaparkan sejumlah proyeksi perekonomian dan bisnis Indonesia di tahun 2018 yang disebut sebagai tahun politik. APINDO menilai, di tahun politik inilah menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melanjutkan pembuktian kinerjanya dalam menjaga optimisme Dunia Usaha.

Pada kuartal 3 (tiga) tahun 2017, APINDO melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% tidak terlalu menggembirakan. Hal ini ditambah dengan perbaikan kinerja



industri pengolahan dan dunia usaha secara keseluruhan masih belum memperlihatkan pola ekspansi yang diharapkan.

Dengan hasil pertumbuhan pada kuartal 3 tahun 2017 tersebut, maka target pertumbuhan 2017 secara keseluruhan sebesar 5,20% seperti dalam APBN - P 2017 akan sulit tercapai.

Oleh karenanya, APINDO memandang apabila upaya Pemerintah di tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada tahun 2017, maka target pertumbuhan tahun depan di level 5, 20% atau lebih akan sulit tercapai.

"APINDO berharap upaya Pemerintah benar-benar *out of the box* terhadap berbagai motor produktif pertumbuhan ekonomi, baik sektor industri konvensional maupun sektor harapan baru seperti sektor pariwisata dan industri kreatif yang diharapkan menjadi bintang di tahun 2018 ini. Hal ini dengan tidak mengesampingkan upaya reformasi struktural yang terus dilakukan Pemerintah dalam mendongkrak kinerja industri pengolahan dan manufaktur, investasi PMDN dan PMA, serta penyediaan lapangan kerja, papar Hariyadi.

Hariyadi mengungkapkan APINDO tidak ingin berfokus dengan angka agregat pertumbuhan. Menurutnya, Perkembangan sejumlah komponen pembentuk pertumbuhan di level yang lebih mikro justru menjadi perhatian utama, terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja industri pengolahan serta sektor usaha produktif seperti logistik, telekomunikasi, transportasi, lainnya. "Perkembangan sejumlah sektor usaha produktif tersebut belum memperlihatkan perbaikan yang memuaskan dalam tiga tahun terakhir, walaupun Pemerintah terus berkomitmen menjalankan reformasi struktural" tegas Hariyadi.

Dalam *Outlook* 2018, APINDO juga menyoroti sejumlah potensi penghambat kinerja Dunia Usaha 2018, diantaranya adanya kebijakan Kementerian yang kontradiktif serta bertentangan dengan semangat penyederhanaan regulasi.

Meskipun demikian, Dunia Usaha mencatat beberapa isu strategis yang dapat menumbuhkan optimisme Dunia Usaha terhadap perekonomian 2018. Isu daerah dan regulasi, dimana Pengawasan kebijakan daerah mendapat tantangan besar pasca keputusan MK di tahun 2017 yang menganulir kewenangan Pemerintah / Kemendagri (*executive review*) untuk membatalkan Perda.

Isu Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah hingga akhir 2017 dinilai masih terbelenggu ribuan regulasi. Implementasi kebijakan menjadi harapan bagi Dunia Usaha untuk Pemerintah. Terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 (Perpres no.91/2017) Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, jika masalah birokrasi perijinan usaha bisa diselesaikan melalui satu kali registrasi *on-line* maka akan sangat positif pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

APINDO mendesak Pemerintah segera melakukan perubahan total terhadap UU Ketenagakerjaan No.13/2003 seiring dengan gagalnya mandat yang dijalankan UU tersebut. Isu Regulasi di bidang Hubungan Industrial lain yang menjadi perhatian APINDO adalah regulasi terkait Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), perijinan tenaga kerja, upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja hingga pendidikan vokasi dan pemagangan.

Kapabilitas penciptaan kondisi ekonomi dan politik yang stabil dalam memasuki tahun politik 2018 sangat diperlukan Dunia Usaha. Dengan demikian, APINDO mengharapkan adanya Politik Kerja, bukan Politik Rencana atau Politik Wacana.

Terkait Reformasi Perpajakan, APINDO mengharapkan Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20%, sehingga dunia usaha Indonesia dapat semakin berdaya saing. APINDO juga meminta keterlibatannya dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta mengenai pengadiln pajak.

2. Kegiatan Bersifat Layanan

Kegiatan bersifat layanan diperuntukkan khusus bagi Anggota APINDO. Berbagai pelayanan APINDO bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pekerja perusahaan Anggota, khususnya terkait bidang ketenagakerjaan, perdagangan, dan investasi. Dengan semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan pekerja yang baik, APINDO percaya perusahaan akan dapat meningkatkan daya saingnya.

Untuk memperkaya kegiatan kepada anggotanya, APINDO melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi baik dari dalam

dan luar negeri. Salah satu kerjasama yang telah terjalin lama adalah dengan *The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership* (AOTS) – Jepang dalam memberikan pelatihan ketenagakerjaan di Jepang. Di dalam negeri sendiri, APINDO bekerjasama sama dengan berbagai kementerian dalam memberikan sosialisasi dan diskusi terkait dunia usaha.

2.1. Members Gathering

Selama tahun 2017 APINDO telah menyelenggarakan Members' Gathering sebagai berikut:

Members' Gathering APINDO di Tahun 2017

No.	Keterangan	Waktu
1.	<p>"Update Perkembangan Terkini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan"</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Misbahul Munir, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan • Bapak La Tunreng, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan • Bapak M. Aditya Warman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan • Ibu Myra Hanartani, Wakil Ketua Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan <p>Moderator: Bapak Dipasusila Satia Utama, Wakil Ketua Bidang Jaminan Sosial DPN APINDO</p>	21 Maret 2017
2.	<p>"RUU TJSP, Peluang dan Tantangannya bagi Perusahaan"</p> <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Sinta Kaniawati – Head of Unilever Indonesia Foundation • Bapak Danang Girindrawardana – Ketua Kebijakan Publik APINDO • Bapak Rahmat Hidayat – Wakil Ketua Kebijakan Publik GAPPMI/ Danone 	26 April 2017
3.	<p>"Implementasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan"</p> <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Adriani – Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI • Bapak Aloysius Budi Santoso – Ketua Bidang Pengupahan dan Produktifitas DPN APINDO <p>Moderator: Bapak Matheus Sekardianto – Wakil Ketua Bidang Pengupahan dan Produktifitas DPN APINDO</p>	30 Mei 2017
4.	<p>"Penjelasan dan Pembahasan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)"</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Andang Bachtiar – Dewan Energi Nasional • Bapak Hilmi Panigoro - Presiden Direktur Medco Energy Internasional • Bapak. Komaidi Notonegoro – Direktur Eksekutif ReforMiner • Bapak Jorgen Erstom Meller – Visiting Senior Research Fellow Institute of Southeast Asian Studies <p>Moderator: Bapak Ahmad Yuniarto</p>	8 Agustus 2017

5.	<p>APINDO Workshop “Hubungan Industrial dan Kelangsungan Investasi di Sektor Pertambangan”</p> <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Muliawan Margadana – Ketua Bidang Minerba, Dewan Pengurus Nasional APINDO • Bapak Irwandy Arif – Chairman, Indonesian Mining Institute (IMI) • Bapak Kemalsjah Siregar – Praktisi Hukum Hubungan Industrial <p>Moderator: Bp. Hendra Sinadia – Komite ESDM, APINDO</p> <p>Jumlah Peserta : 52 orang.</p>	23 Agustus 2017
6.	<p>“Update Tapera”</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Ristadi, Ketua Umum FSPN • Bapak Eddy Husy, Ketua Bidang Properti dan Konstruksi • Bapak M. Aditya Warman, Wakil Sekretaris Umum 	24 Oktober 2017
7.	<p>Forum Diskusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XV/2017 tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk Alat Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Forum : Bapak Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum APINDO • Narasumber : Tim Lawyer Ali Nurdin, Pakar Hukum dan Pelaku Usaha 	14 November 2017



Members' Gathering 21 Maret 2017



Members' Gathering 26 April 2017



Members' Gathering 24 Oktober 2017

2.2. CEO Gathering

Pelaksanaan CEO Gathering selama tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Keterangan	Waktu
1.	<p>“Outlook Perekonomian Indonesia 2017” dalam rangka HUT APINDO ke-65</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI • Bapak Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI 	3 Februari 2017
2.	<p>“Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin Kepastian Hukum di Indonesia, Implikasinya bagi Dunia Usaha”</p> <p>Narasumber :</p> <p>Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS - Ketua Mahkamah Konstitusi</p>	27 Februari 2017
3.	<p>"Komitmen APINDO dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi melalui Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah"</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Sudhamek, Anggota KEIN dan Dewan Pertimbangan APINDO • Bapak Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum APINDO 	28 Juli 2017

No.	Keterangan	Waktu
4.	<p>"Tantangan Dunia Usaha dan Pengembangan Pasar Modal"</p> <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian • Bapak Wahyu Widodo, Direktur Kementerian Ketenagakerjaan • Bapak Eddy Putra Irawadi, Staf Khusus Kementerian Perekonomian 	6 November 2017
5.	<p>"Understanding and anticipating the Future of Work and Future of Employers Organizations"</p> <p>Narasumber : Mr. Roberto Soares Santos, Deputy Secretary General IOE</p> <p>Moderator : Bapak P. Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif APINDO</p>	8 Desember 2017



CEO's Gathering dan HUT APINDO ke-65 Tahun, 3 Februari 2017



Pemberian plakat APINDO oleh Bapak Hariyadi Sukamdani kepada Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS.



Penyerahan Plakat APINDO oleh Bapak Yos Ginting kepada Mr. Roberto Soares Santos

2.3. Kunjungan ke Perusahaan Anggota

Untuk meningkatkan pelayanan dan juga mempererat hubungan dengan anggotanya, APINDO secara rutin mengunjungi beberapa perusahaan Anggota. Dalam kesempatan tersebut APINDO menyampaikan upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misinya, di lain sisi perusahaan Anggota menyampaikan tantangan dan peluang yang sedang dihadapi serta harapannya terhadap APINDO dalam mendukung keberlangsungan perusahaan.

Pada Tahun 2017 APINDO telah melakukan kunjungan perusahaan diantaranya :

2.3.1 Kunjungan PT Combiphar

Dalam kunjungan ke PT Combiphar, menyampaikan pengalamannya dalam menerapkan peraturan terkait ketenagakerjaan. Komitmen PT Combiphar untuk menjadi perusahaan taat aturan tercermin dari berbagai pengalaman yang disampaikan.

Selain itu, PT Combiphar juga berkomitmen dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), salah satunya melalui program COMBI HOPE Healthy Living Education yang fokus dalam upaya mewujudkan hidup sehat bagi generasi muda Indonesia. Pada tahun 2017, COMBI HOPE dianugerahi penghargaan Asia Responsible Entrepreneurship Award (AREA) oleh Enterprise Asia.



Kunjungan ke PT Combiphar

2.3.2 Kunjungan ke PT Vivo Mobile Indonesia

PT Vivo Mobile Indonesia merupakan Anggota baru APINDO yang bergabung sejak Agustus 2017. Apindo mengunjungi salah satu pabrik PT Vivo di kawasan Cikupamas. PT Vivo menyampaikan harapannya untuk dapat bertahan dan rencananya untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sebagai

perusahaan baru, PT Vivo dan APINDO banyak berdiskusi tentang peraturan ketenagakerjaan dan strategi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.



Kunjungan ke PT Vivo

2.4. Pelatihan Ketenagakerjaan; Kerjasama APINDO - AOTS

Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) merupakan sebutan baru untuk Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) yang telah bekerjasama dengan APINDO selama hampir 15 (lima belas) tahun.

Selama tahun 2017, APINDO telah berhasil mengirimkan 11 (sebelas) orang perwakilan perusahaan Anggota untuk mengikuti 7 (tujuh) pelatihan berbeda yang diselenggarakan oleh AOTS. Berikut adalah daftarnya :

Pelatihan Ketenagakerjaan Kerjasama APINDO - AOTS selama tahun 2017

No.	PROGRAM	TANGGAL	PERUSAHAAN	NAMA
1.	The Role of Executives for Better Industrial Relations in Global Era (ERGE)	23 Januari - 3 Februari 2017	PT Eastern Pearl Flour	Muammar Muhayang
2.	Management Training Program (ERMT)	8 - 15 Maret 2017	PT International Chemical Industry	Asep Sarif Hidayat
3.	"Instructors" Training Course on "Management Training Program" (ERMI)	24 Mei - 9 Juni 2017	PT Indomarco Prismatama	Nia Larissa Lemuella Poerba

4.	Program in Industrial Relations and Human Resource Management (ERHR1)	19 - 30 Juni 2017	PT AKR Korporindo Tbk	Cahyadi Permana
			Federal International Finance	Rosadari Berliana
5.	Program on Working Environment for Employers (ERWM)	25 September - 6 Oktober 2017	PT. Riau Andalan Pulp and Paper - APRIL Group	Iman Budi Fikri
			PT.Panasonic Manufacturing Indonesia	Diah Tri Handayani
6.	Program on Industrial Relations and Human Resource Management for Executives (ERHE)	9 - 20 Oktober 2017	PT Garudafood Putra Putri Jaya	Sri Utami Wati
			PT International Chemical Industry	Cornelius Hendrawan
7.	Program for Successful Former Participants -- Study of Latest Japanese Labour Practices and Opinion Exchange with Japanese Professionals - [ERFP]	24 Oktober - 2 November 2017	PT Palyja	Mohammad Fata Rizka
			APINDO	P. Agung Pambudhi



Peserta Program on on Industrial Relations and Human Resource Management for Executives (ERHE)



Peserta Program in Industrial Relations and Human Resource Management (ERHR1)



Peserta Management Training Program (ERMT)



Kunjungan ke pabrik Toyota di Jepang sebagai bagian kegiatan The Role of Executives for Better Industrial Relations in Global Era (ERGE)



Suasana ruang belajar Program on Working Environment for Employers (ERWM)



Penyerahan sertifikat pelatihan kepada Iman Budi Fikri salah satu perwakilan Indonesia dalam Program on Working Environment for Employers (ERWM)

2.5. Kegiatan Lainnya

- Buka Puasa Bersama APINDO dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 12 Juni 2017 bertempat di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama APINDO dan PHRI yang bertujuan menjalin silaturahmi antar asosiasi dan anggotanya.



Buka Puasa Bersama APINDO dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 12 Juni 2017

- Dialog Sosial Pengusaha dan Organisasi Pengusaha, 19 September 2017 di *Ubud Meeting Room*, Hotel Puri Denpasar, Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama APINDO dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memperkuat peran dan fungsi APINDO dalam menciptakan ketenangan berusaha di Indonesia.



Dialog Sosial Pengusaha dan Organisasi Pengusaha, 19 September 2017

- APINDO merupakan salah satu pendukung Ikatan Alumni Prasetya Mulya (IKAPRAMA), Ikatan Alumni Satya Wacana (IKASATYA), PT. HM Sampoerna Tbk dalam menyelenggarakan diskusi mengenai teknologi dan dunia bisnis. Diskusi pertama dilaksanakan pada 12 Januari 2017 dengan tema "*Fintech The Digital (R)evolution in Business*". Diskusi kedua dengan tema "*Digital Society: Collaborating for Good of The Customer*" diselenggarakan pada 4 Mei 2017. Dunia bisnis erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, perusahaan harus jeli mencermati dan memilih teknologi yang tepat bagi perusahaan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu APINDO mendukung pelaksanaan dua kegiatan tersebut sebagai upaya memberikan informasi terkini terkait teknologi dan dunia usaha kepada perusahaan Anggota.

Harapan

Tahun 2018 merupakan tahun penting bagi APINDO karena akan dilaksanakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) APINDO yang menentukan Kepengurusan APINDO untuk 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan dan Penyempurnaan Kepengurusan sudah pasti menumbuhkan banyak harapan untuk masa depan APINDO yang lebih baik.

Departemen ILA berharap dapat memberikan pelayanan lebih baik dari tahun-tahun

sebelumnya sehingga Anggota tetap setia dan semakin bertambahnya perusahaan yang belum anggota tertarik untuk bergabung. Selain itu, terciptanya integrasi keanggotaan APINDO di Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Kabupaten Provinsi, dan Dewan Pimpinan Kota seluruh Indonesia. Dengan demikian APINDO dapat memberikan pelayanan maksimal dan komprehensif bagi Anggota di semua tingkat APINDO.



Innovation for a Better Life

Prescription Pharmaceutical, Consumer Health, Nutritionals,
Distribution & Logistics

PT KALBE FARMA Tbk.
Jl. Let. Jend Suprpto Kav. 4
Jakarta 10510. Indonesia

 (6221) 4287 3888, 89
 (6221) 425 6326
 Corp.Comm@kalbe.co.id



PEOPLE | TECHNOLOGY | EXCELLENCE



We are a leading global producer of polymers, fertilizers, petrochemicals, disposable gloves and textile raw materials. With a rich history of over 40 years, we continue to grow with the support and trust of our customers, suppliers, stakeholders, and employees.

Our products touch everyday lives and we are committed to upholding our high standards of quality and service to the global market.

INDORAMA
Graha Irama 17th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
 +62 - 21 - 526 1555
www.indorama.com

Bangga menjadi Bangsa Indonesia, Bangga dengan karya anak bangsa.

Di balik kekayaan produk nasional Indonesia, ada jutaan anak bangsa yang berperan penting untuk menghasilkannya. Lewat tangan-tangan mereka, lahirlah produk-produk Indonesia yang kini dikenal luas hingga ke seluruh dunia.



sinarmas

Bidang Hubungan Internasional dan Investasi





Pendahuluan

Departemen Hubungan Internasional dan Investasi APINDO didedikasikan untuk membangun dan memelihara kerjasama domestik dan internasional untuk meningkatkan *competitiveness* pelaku usaha Indonesia di pasar internasional. Dibekali dengan *network* yang luas di dalam dan luar negeri, Departemen Hubungan Internasional dan Investasi menjalankan misinya dengan 2 cara, yakni dengan mendukung Pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan perdagangan dan investasi yang dapat mendukung pengembangan iklim usaha yang baik dan *competitiveness* pelaku usaha Indonesia serta dengan kegiatan-kegiatan nyata yang mempromosikan kerjasama antara pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing di Indonesia. Dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan *competitiveness* pelaku usaha Indonesia dilakukan melalui kerjasama

dengan rekan-rekan APINDO di dalam dan luar negeri dalam bentuk advokasi bersama, *outreach* dan konsultasi dengan para anggota APINDO melalui masukan kepada Pemerintah Indonesia untuk negosiasi perdagangan internasional yang diagendakan sepanjang tahun 2017. Dialog perdagangan internasional dan promosi perdagangan internasional kepada para anggota APINDO juga dilakukan melalui forum perdagangan internasional APINDO bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan para pemangku kepentingan terkait. Promosi kerjasama pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing dilakukan oleh *International Partnership Center*, sebuah desk independen di bawah Departemen Hubungan Internasional dan Investasi yang memiliki misi untuk memfasilitasi kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia antara pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing.

Kegiatan

A. Kerjasama Internasional

Memperluas dan mempererat jalinan kerjasama internasional APINDO merupakan mandat utama Departemen Hubungan Internasional dan Investasi APINDO. Untuk itu, Departemen Hubungan Internasional dan Investasi APINDO tidak lupa untuk memperluas dan mempergunakan jalinan relasi yang ada untuk meningkatkan kemampuan APINDO di bidang keenagakerjaan, perdagangan internasional dan investasi melalui kerjasama dengan rekan-rekan internasional baik di dalam maupun di luar negeri.



Kerjasama promosi perdagangan dan investasi APINDO dengan EU Desk BKPM dan Kedutaan Besar Polandia di Jakarta



Kerjasama APINDO dengan FTA Center Kementerian Perdagangan RI untuk diseminasi informasi perjanjian perdagangan internasional



Knowledge Sharing Forum APINDO bersama Kedutaan Besar Swedia dengan tema "Rules of Origin" dalam Perjanjian Perdagangan

1. The Overseas Human Resources and Industry Development Associations (HIDA) - Japan

Kerjasama APINDO dengan *Overseas Human Resources and Industry Development Associations* (HIDA) telah terjalin selama lebih dari satu dekade. Selama 2017 pun, APINDO dan HIDA terus bekerja sama menciptakan hubungan industrial dan keselamatan kerja yang baik dengan melatih professional-professional hubungan industrial dan keselamatan kerja di Indonesia yang mengabdikan di perusahaan Anggota Luar Biasa APINDO. Kegiatan kerjasama APINDO dengan HIDA di tahun 2017 dapat dilihat lebih lanjut di dalam laporan Departemen Informasi dan Pelayanan Anggota APINDO.

B. Perundingan Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional merupakan sebuah "game changer" oleh APINDO yang secara langsung akan mengubah arah perdagangan dan investasi Indonesia. Di tahun 2017 Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan merundingkan 21 perjanjian perdagangan internasional baik di level bilateral maupun regional hingga akhir tahun 2018 untuk meningkatkan *competitiveness* usaha di Indonesia. Sebagai perwakilan pelaku

usaha Indonesia dalam tim perundingan perdagangan Indonesia, APINDO dan KADIN Indonesia menggabungkan diri bersama-sama mengikuti dan mendukung seluruh perundingan perdagangan tersebut sebaik mungkin untuk memastikan kepentingan pelaku usaha Indonesia diakomodasi dalam perundingan perdagangan tersebut. Untuk itu, sepanjang tahun 2017, Departemen Hubungan Internasional dan Investasi APINDO bekerjasama dengan rekan-rekan dunia usaha, khususnya KADIN Indonesia, asosiasi sektor usaha dan para pemangku kepentingan lain, untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut.

1. Pembangunan Kapasitas dan Sosialisasi tentang Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA)

Meskipun Indonesia telah menciptakan perjanjian perdagangan sejak tahun 1994 dan hingga saat ini memiliki 7 perjanjian perdagangan bebas yang berlaku efektif, pada faktanya pelaku usaha Indonesia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang perjanjian perdagangan bebas. Pelaku usaha Indonesia yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas pun masih sedikit. Bahkan pada berlaku penuhnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), survei LIPI di akhir tahun 2015 tentang kesiapan Indonesia dalam menyambut AEC menyatakan bahwa hanya 27% pelaku usaha Indonesia mengetahui apa itu AEC dan bagaimana memanfaatkan AEC. Menyadari adanya keterbatasan pemahaman tentang perjanjian perdagangan, APINDO menciptakan buku "*Free Trade Agreement Practical Guide*" (Panduan Praktis untuk Perjanjian Perdagangan Bebas) bersama dengan KADIN Indonesia untuk membantuk para pelaku usaha Indonesia untuk memahami apa isi dari perjanjian perdagangan bebas dan bagaimana perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi kegiatan usaha sehari-hari. Lebih dari sekedar alat untuk memahami, Ketua Umum APINDO, Bapak



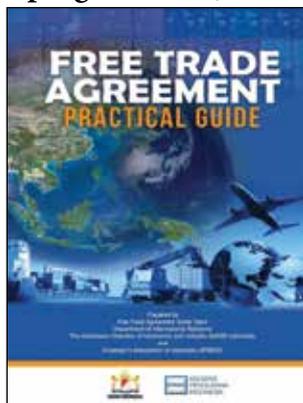
Hariyadi B Sukamdani, dalam sambutannya mengharapkan agar buku ini dapat menarik perhatian para pelaku usaha Indonesia terhadap perjanjian perdangan Indonesia yang sudah ada dan mempergunakan perjanjian perdagangan tersebut untuk memajukan kegiatan usaha para pelaku usaha Indonesia sehari-hari. Buku ini diterbitkan pada Juni 2017 secara bilingual serta diakui oleh Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI. Selain itu, buku *Free Trade Agreement Practical Guide* juga diberikan kepada Bapak Tom Lembong, Kepala BKPM dan Bapak A.M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, serta Ibu Ni Made Ayu Marthini, perwakilan dari Tim Perunding IEU CEPA, dalam Rapat Kerja Bidang Hubungan Internasional KADIN.

2. Indonesia-EU Comprehensive Economic



Serah-terima Buku *Free Trade Agreement Practical Guide* dan KADIN-APINDO *Stakeholders Consultation Report for IEU CEPA*

Partnership Agreement (IEU CEPA)



Buku *Free Trade Agreement Practical Guide*

Di antara 21 perundingan perdagangan bilateral dan regional yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini, IEU CEPA merupakan perundingan perdagangan yang paling ambisius dan menantang yang dinegosiasikan Indonesia. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia yang juga merupakan salah satu dari 10 rekan dagang terbesar Indonesia, liberalisasi perdagangan antara Indonesia dan EU sangat dinantikan para pelaku usaha Indonesia. Namun, pada saat yang sama *gap* perkembangan ekonomi dan sosial antara kedua ekonomi menciptakan banyak tantangan untuk mencapai kesepakatan, khususnya terkait tuntutan pasar Eropa yang tidak mudah dipenuhi oleh pelaku usaha Indonesia.

Pada Mei 2017, APINDO dan KADIN Indonesia beserta beberapa asosiasi usaha terlibat dalam dialog *roundtable* dengan Komisi Perdagangan Luar Negeri Parlemen Eropa untuk membahas berbagai isu perdagangan yang menjadi kepentingan pelaku usaha Indonesia dan Eropa. Dalam kesempatan ini, para pelaku usaha Indonesia dan Eropa menyampaikan keinginan yang sama, yakni dipercepatnya proses perundingan IEU CEPA. Pelaku usaha Indonesia juga menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait pengetatan regulasi di Uni Eropa yang dapat menghambat perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya terkait regulasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya serta terkait kriteria perlindungan alam yang dapat berpengaruh



EU-Indonesia Business Roundtable on IEU CEPA dengan Komisi Perdagangan Luar Negeri Parlemen Eropa



terhadap kelayakan komoditi kertas yang diperdagangkan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Untuk merepresentasikan dengan baik kepentingan-kepentingan para pelaku usaha Indonesia, APINDO dan KADIN Indonesia melakukan konsultasi dengan 60 sektor usaha untuk membentuk “KADIN-APINDO Stakeholders Consultation Report for IEU CEPA”, yakni sebuah laporan khusus dan komprehensif kepada para perunding Indonesia untuk IEU CEPA sebagai panduan untuk menentukan posisi runding Indonesia. Laporan ini merepresentasikan rekomendasi para pelaku usaha Indonesia dari berbagai sektor, khususnya sektor-sektor usaha penting dalam perundingan IEU CEPA untuk dirundingkan dalam IEU CEPA. Laporan khusus ini diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam Rakernas KADIN Indonesia pada Oktober 2017.

Menyadari perlu adanya upaya untuk



Penyerahan KADIN-APINDO Stakeholders Consultation Report for IEU CEPA kepada Presiden Joko Widodo dalam Penutupan Rakernas KADIN Indonesia



KADIN-APINDO Stakeholders Consultation Report for IEU CEPA



KADIN-APINDO-EUROCHAM Joint Recommendation for IEU CEPA

menjembatani perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Uni Eropa, APINDO, KADIN dan EUROCHAM juga membuat laporan rekomendasi bersama untuk IEU CEPA. Laporan ini berisikan rekomendasi-rekomendasi yang merupakan kepentingan bersama pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha EU di Indonesia yang perlu dirundingkan dan dicapai kesepakatannya dalam IEU CEPA. Laporan rekomendasi bersama ini disampaikan kepada kedua tim perunding Indonesia dan EU dalam *Europe-Indonesia Business Dialogue* yang diadakan pada November 2017.

3. ASEAN Economic Community (AEC)

Meskipun Masyarakat Ekonomi ASEAN telah diimplementasikan secara penuh per 1 Januari 2016, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha ASEAN dalam memahami perjanjian-perjanjian perdagangan ASEAN yang menjadi pilar-pilar utama AEC menciptakan urgensi baru untuk mengevaluasi pelaksanaan AEC sejauh ini dan membuat komunikasi yang lebih baik antara Sekretariat ASEAN, Pemerintah dan para pelaku usaha di ASEAN. Untuk tujuan ini, Sekretariat ASEAN mengadakan Private Sector Outreach Workshop yang mengikutsertakan perwakilan pelaku usaha dari 10 negara anggota ASEAN pada November 2017 untuk mendiskusikan pola komunikasi dan diseminasi informasi yang lebih baik dan efektif tentang perjanjian-perjanjian perdagangan ASEAN kepada pelaku usaha agar pemanfaatan perjanjian perdagangan ASEAN lebih maksimal oleh para pelaku usaha ASEAN.

4. Perundingan-Perundingan Perdagangan Lain



ASEAN Private Sector Outreach Workshop, 27 November 2017



Komitment APINDO untuk mendukung kelancaran perundingan perdagangan Indonesia dengan negara-negara rekan diwujudkan dalam berbagai masukan kepada tim perunding Indonesia. Sepanjang tahun 2017, Bidang Hubungan Internasional APINDO telah memberikan masukan dan dukungan kepada hampir seluruh perundingan perdagangan yang dirundingkan Indonesia, khususnya Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, dan Indonesia-Chile CEPA yang baru saja ditandatangani pada Desember 2017.

C. Forum Perdagangan



APINDO dalam Putaran ke-11 Perundingan Indonesia-Australia CEPA di Jakarta

Ringkasan Status 5 Perundingan Utama Indonesia (per 31 Desember 2017)

No.	Perundingan	Status
1.	Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)	Negosiasi putaran ke-11
2.	Indonesia-Australia CEPA	Negosiasi putaran ke-11
3.	Indonesia-EU CEPA	Negosiasi putaran ke-3
4.	Indonesia-Chile CEPA	Selesai. Dalam proses ratifikasi.
5.	Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)	Negosiasi putaran ke-16

Internasional

1. Lokakarya Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor

Lokakarya Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor merupakan kerjasama antara APINDO dengan KADIN, yang telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur pada 29-30 May 2017. Lokakarya dihadiri oleh ketua DPP APINDO NTT, wakil ketua KADINDA provinsi NTT, DPN APINDO Bidang Perdagangan International, Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan Kadis Perdagangan sebagai wakil Gubernur NTT. Terdapat 2 sesi diskusi panel, panel pertama terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP NTT), Ketua Asosiasi Pelaku Export (APEX) NTB dan Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Panel kedua terdiri dari Bank Indonesia, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, PPK Sampoerna dan Plan International Indonesia. Di hari kedua kegiatan ini, APINDO mengunjungi sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mempunyai usaha di bidang perikanan, rumput laut dan tenun ikat. Kegiatan ini telah diliput oleh beberapa media seperti Victory news, Pos Kupang, dan Timor Express.

2. Pengembangan Daya Saing Pelaku Usaha





Daerah Berorientasi Ekspor

Perdagangan Internasional dan UKM DPN APINDO bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor Nasional telah melakukan kegiatan aktivasi kerjasama pengembangan ekspor di beberapa daerah yang melibatkan anggota APINDO di tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan Aktivasi Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekspor dengan tema “**Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor**” adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perdagangan.

2.1 Aktivasi kerjasama pengembangan ekspor ke India di Padang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 dan dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh \pm 60 pelaku usaha sedangkan kegiatan kunjungan lapangan dilakukan pada tanggal 22 April 2017 ke PT. Rajdular Brothers yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran peserta kegiatan adalah perusahaan/pelaku usaha yang berorientasi ekspor, yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang bergerak sebagai trader untuk barang-barang hasil perkebunan seperti kayu manis, pinang, gambir, lada dan produk perkebunan lainnya.

2.2 Pengembangan daya saing pelaku usaha berorientasi ekspor ke pasar Rusia di Surabaya

Dengan tema “**Pengembangan Potensi Daerah Berorientasi Ekspor**”, workshop ini dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 dengan peserta \pm 60 orang. *Workshop* ini merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama pengembangan ekspor yang bermanfaat dalam peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor nasional dengan sasaran peserta adalah perusahaan/pelaku usaha yang

berorientasi ekspor, yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur c.q Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (UPT P3E) Surabaya, dan APINDO Provinsi Jawa Timur dengan pembicara dari berbagai instansi seperti: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, *Trade Representation of the Russian Federation, Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Export Trainer BEDO* Bali dan LPEI Surabaya

2.3 Seminar pengembangan ekspor ke Iran di Tangerang Propinsi Banten



Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Alium Tangerang pada tanggal 19 Juli 2017 yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-program kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai salah satu upaya peningkatan potensi daerah, khususnya untuk kerja sama yang telah dilakukan oleh Ditjen. PEN dengan *Iran Trade Promotion Organization (ITPO)*.

2.4 Forum Diseminasi “Peningkatan Ekspor ke Pasar Filipina dengan Memanfaatkan



Konektivitas Laut Bitung – Davao/ General Santos”

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 di Hotel Whiz Prime, Bogor. Forum diseminasi merupakan program kegiatan Direktorat Kerja sama Pengembangan Ekspor sebagai anggota *Tim Task Force Konektivitas Laut Bitung - Davao* serta sebagai tindak lanjut dari diresmikannya jalur laut Roro - Bitung - Davao yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada tanggal 30 April 2017.

Salah satu narasumber *best practice* untuk ekspor ke Filipina adalah anggota APINDO



dari PT. Kalbe Farma yaitu Bapak Galatia Chandra, *Head of Strategic Management System* untuk berbagi pengalaman bagaimana selama ini melakukan ekspor ke Filipina. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk masuk ke pasar Mindanao, untuk beberapa produk seperti: rumput laut, minyak goreng, tepung terigu, disamping produk potensial lainnya, seperti: bulir jagung, kopra, kopi,

semen Portland, tuna yellofin beku, lemak dan minyak hewani atau nabati, *building material*, ikan cakalang, papan konsol untuk voltase melebihi 1.000 volt, serta pupuk ammonium sulfat

2.5 Seminar “Peluang Ekspor ke Pasar Hongkong dan Taiwan” di Bandung



Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan *Hongkong Trade Development Council (HKTDC)* dan *Taipei Economic and Trade Office (TETO)*. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 November 2017 di Bandung Jawa Barat, bekerjasama dengan APINDO Jawa Barat.

Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di Jawa Barat mengenai potensi pasar Asia, khususnya Hongkong dan Taiwan. Nara sumber kegiatan ini antara lain: *Director Economic Division – TETO*, Manajer Operasional – HKTDC, serta perwakilan eksportir dari anggota APINDO Jawa Barat yaitu Ahmad Muhtaromi dari *officer trading and business development* dari PT. Chitose International yang sudah sukses ekspor ke negara Hongkong dan Taiwan. Peserta seminar adalah pelaku usaha / eksportir dengan produk antara lain: produk perhiasan, produk *essential oil, furniture*, makanan dan minuman, *stationery, home textile, fashion and accesories, decorative arts and crafts, houseware, gift, toys and games, gems and jewellery, information and communication technology (ICT), medical equipment, baby products, electronic* dan *footwear*.

2.6 Diseminasi Informasi Penugasan Khusus Ekspor ke Pasar Afrika



Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 di Auditorium Gedung BBPPEI diikuti oleh ± 100 pelaku usaha. Acara tersebut diselenggarakan untuk menginformasikan telah diterbitkannya KMK No. 787/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, dan kiranya fasilitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang sudah ekspor ke Afrika atau yang berencana untuk melakukan ekspor ke Afrika.

3. Forum Perdagangan Internasional

Forum Perdagangan Internasional merupakan sarana untuk bertukar wawasan dan pandangan antara akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dalam memahami isu-isu perdagangan yang membawa implikasi terhadap dunia usaha Indonesia. Beberapa forum perdagangan sepanjang tahun 2017 :

- Forum Perdagangan internasional pada tanggal 26 Januari 2017 dengan tema **“Addressing non-tariff barriers to maximize Indonesia trade potential”**. Pembicara forum: Ibu Dr. Intan Soeparna (*Airlangga Institute of International Law Study*), Dr. Zakiyah (Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Statistik Nasional), dan Ibu Netty Muharni (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
- Forum Perdagangan internasional pada tanggal 2 Maret 2017 dengan tema **“Dealing with international trade disputes to protect Indonesia’s rights in international trade”**. Pembicara forum: Ibu Dra. Pradnyawati, MA (Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan) dan Ibu Dr. Intan Soeparna (*Airlangga Institute of International Law Study*).
- Forum Perdagangan internasional pada tanggal 11 April 2017 dengan tema **“Harmonized regulations for fair international**

trade: Indonesia’s transparency of regulatory process and public consultation”.

Pembicara forum: Bapak Iman Prihandono PhD (*Airlangga Institute of International Law Study*) dan Ibu Enny Nurbaningsih (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

- SPECIAL Forum Perdagangan internasional pada tanggal 17 May 2017 dengan tema **“Trade Disputes in Asia and the Geopolitical Implications for Indonesia Bilateral Relations”**. Pembicara forum: Bapak Daniel T. S. Simanjuntak (Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri), Bapak Drs. Jully Paruhum Tambunan, MA (Direktur Perundingan Multilateral, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan) dan Mr. Duane W. Layton (*Partner and Chair, Government and Global Trade Group MAYER BROWN*).
- Forum Perdagangan Internasional pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan tema **“Implementing Halal Standards in Indonesia based on Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance: The Impact on trade and economy”**. Pembicara forum: Ibu Dr. Intan Soeparna (*Airlangga Institute of International Law Study*), Bapak Danang Girindra Wardhana (Kepala Bidang Kebijakan Publik APINDO) dan Bapak Rachmat Hidayat (*Vice Chairman of Public Policy & Institutional Relations GAPMMI*).
- Forum Perdagangan internasional pada tanggal 28 September 2017 dengan tema **“Addressing Local Content Requirements (LCRs) Regulations to maximize Indonesia trade potential”**. Pembicara forum: Ibu Dr. Intan Soeparna (*Airlangga Institute of International Law Study*) dan Bapak Dody Widodo (Direktur Ketahanan Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI).
- Forum Perdagangan internasional pada tanggal 24 November 2017 dengan tema



“Improving Global Trade Performance by Strengthening Indonesia’s position in Global Competitiveness Index (CGI)”. Pembicara forum: Bapak Dr. Maddaremmeng A Panennungi, S.E (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia), Bapak Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA

(Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dan Bapak Kasan Muhri (Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan).

G FORCE[®]
THE ULTIMATE AUTOMOTIVE PARTS
www.gforcesantini.com

KEBANGGAAN INDONESIA

info@gforcesantini.com | gforce santini | gforce_id | @GforceSantini

Luxuriate
in the tranquility



Explore resort-style living at the newest Sahid Hotels & Resorts in Maumere, Puncak, Bintan, Wakatobi and Banyuwangi with our great summer deals and more surprises

JAKARTA | WEST JAVA : CIKARANG, JATINANGOR | YOGYAKARTA | CENTRAL JAVA : SOLO, PEKALONGAN | EAST JAVA : SURABAYA, MALANG, BANYUWANGI | SUMATERA : BANDAR LAMPUNG, BINTAN, BATAM | SULAWESI : MAKASSAR, TORAJA, MANADO, WAKATOBI | NTT : MAUMERE | PAPUA

OPENING SOON : BANGKA, KUPANG, LOMBOK, GILI TRAWANGAN, SOREANG-BANDUNG, PANGANDARAN, BSD-SERPONG

Reservation Center :

+ 62 21 573 9888 | reservation@sahidhotels.com

Sahid Hotels and Resorts @sahidhotelsandresorts



www.sahidhotels.com



MANAGED BY
SAHID



SAYANGI HIDUP
DENGAN SEGALA
KEMURNIAN AIR.

NEOREST



Experience The Sophisticated Toilet

20 years ago, TOTO introduced Neorest, the essential element in the modern luxury toilet. This sophisticated toilet will indulge you with the automatic closet seat, deodorizer to neutralize odor, three mode to clean with warm water, drying and automatic flush. All of these feature can be operated easily by remote control.

TOTO
www.toto.co.id

Bidang Usaha Kecil Menengah / Industri Kecil Menengah





Pendahuluan

Lebih dari 90% perusahaan domestik yang ada di Indonesia adalah Usaha Kecil Menengah – Industri Kecil Menengah (UKM - IKM) yang menyerap 75-90% dari angkatan kerja non pertanian. Meskipun demikian, walaupun memiliki nilai ekonomi yang penting, namun UKM-IKM menghadapi masalah dan tantangan struktural, fiskal dan non-fiskal yang besar.

UKM-IKM menyediakan basis pemasok yang mendukung keberhasilan dan produktivitas perusahaan internasional skala besar, oleh karena itu merupakan pondasi yang penting untuk pengoperasian mereka. Keberhasilan salah satu sektor UKM-IKM akan mendukung perdagangan, investasi asing dan hasil pekerjaan yang sehat, serta memberi manfaat ekonomi dan sosial untuk kawasan ini. Hal ini banyak terjadi di beberapa industri misalnya otomotif, tekstil/garmen, mesin listrik, peralatan dan komponen, serta furnitur dimana volume perdagangannya besar dan terus mengalami perkembangan. UKM juga membantu menciptakan sebagian besar lapangan kerja yang ada dan lapangan kerja baru, dan memberi kontribusi PDB yang besar. Oleh karena itu, pengembangan UKM-IKM yang sehat ditujukan untuk mencapai pertumbuhan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

APINDO sebagai suatu organisasi pengusaha menaruh perhatian besar pada pengembangan dan penguatan UKM/IKM sebagai penopang perekonomian Indonesia. Bidang UKM-IKM di APINDO terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM-IKM, misalnya dengan bersinergi dengan kementerian perdagangan khususnya ditjen Pengembangan Ekspor Nasional dan

Bidang Perdagangan internasional APINDO dalam peningkatan ekspor nasional, melalui pelatihan yang berkesinambungan, penyelenggaraan kegiatan seminar, *training*, *workshop*, pameran, *talk show* dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas lainnya, diharapkan UKM-IKM dapat bersaing di tingkat lokal maupun Internasional.

Beberapa tantangan mengenai posisi UKM/IKM di Indonesia pada saat ini diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran dan kapasitas pengetahuan/informasi terhadap Standard Internasional (Kurangnya informasi dan kepatuhan yang minim terhadap standar dan sertifikasi dalam rangka ekspor) yang sangat diperlukan untuk kemudahan perdagangan, dan kolaborasi antar negara
2. Kurangnya kapasitas SDM dalam manajemen produksi, untuk pengembangan produk dan kualitas dari manajemen UKM-IKM
3. Kurangnya akses terhadap permodalan, Teknologi informasi dan komunikasi yang kurang memadai (*e-commerce*)
4. Kurangnya kapasitas terhadap akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri
5. Kurangnya pengalaman dalam melakukan bisnis/transaksi dengan *buyers* International
6. Tingkat penciptaan pekerjaan maupun kehilangan pekerjaan secara signifikan lebih tinggi pada UKM/IKM dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar
7. Keterampilan kewirausahaan dan manajemen yang tidak memadai

Kegiatan

I. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UKM melalui Program SCORE

Program SCORE adalah program pelatihan peningkatan produktivitas dan daya saing UKM yang awalnya dirintis oleh ILO dan didanai oleh *Swiss State Secretariat of Economic Affairs (SECO)* dan *Norwegian Agency for Development (NORAD)*. Program ini dikembangkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh Indonesia, serta ILO Jakarta.

Tujuan menyeluruh dari program ini adalah membantu UKM-IKM agar lebih berdaya saing, lebih berkesinambungan, lebih bersih, lebih produktif serta mampu menyediakan pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang produktif.

Pada tahun 2017 ini APINDO bekerjasama dengan DEKRANAS dan organisasi lokal lainnya sebagai pelaksana seperti SMI (Semut Manajemen Indonesia) untuk pelaksanaan program SCORE di daerah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan untuk pelaksanaan program SCORE di provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan organisasi lokal Bali yaitu BEDO (*Business Export Development Organization*) dan DEKRANASDA Tuban.

Melalui program SCORE ini, UKM-IKM diharapkan dapat:

- Meningkatkan pengelolaan lingkungan kerja serta mengurangi kegiatan yang non value added dengan melaksanakan sistem 5S, agar dapat meningkatkan mutu dan produktivitas
- Meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia serta menciptakan komunikasi yang lebih baik bagi manajemen maupun pekerja
- Meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Dalam program SCORE, evaluasi pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi tiga aspek yang dinilai berdasar skala 5 - 1: sangat baik, baik, cukup, kurang, buruk, yaitu:

- Evaluasi terhadap lokakarya secara keseluruhan.
- Evaluasi terhadap sesi-sesi tertentu.
- Evaluasi dengan nilai skala 5 (lima), dengan kriteria sebagai berikut :

Grafik Hasil Evaluasi

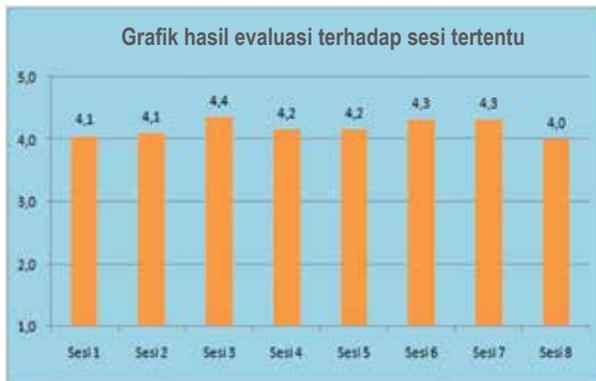
Metode evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil tanggapan dari peserta. Tabulasi evaluasi untuk mengetahui penilaian peserta selama lokakarya berlangsung.

a). Evaluasi terhadap lokakarya secara keseluruhan.



Pada grafik diatas terlihat nilai tertinggi adalah lokakarya secara keseluruhan dengan nilai **4,4**. Sedangkan nilai terendah pada tempat pelatihan, dengan nilai **4,0**. Rata-rata nilai dari keseluruhan evaluasi lokakarya adalah **4,3** dengan kriteria **Baik**.

b). Evaluasi terhadap sesi-sesi tertentu.



Pada grafik diatas terlihat nilai terhadap sesi tertentu. Sesi yang mendapat nilai tertinggi adalah pada sesi 3 (tiga) peserta sangat antusias pada sesi kerja sama tim dengan nilai **4,4**. Sedangkan nilai terendah pada sesi 8 dengan judul sesi memulai tindakan. Rata-rata nilai dari keseluruhan evaluasi terhadap sesi tertentu adalah **4,2** dengan kriteria **Baik**.

1. Kegiatan SCORE di Jakarta

Untuk keberlangsungan program SCORE secara mandiri, maka kegiatan program SCORE di Jakarta diawali dengan TOT (*training of trainer*) kepada 10 orang calon instruktur pada tanggal 3 - 4 Agustus 2017 di Ruang Serba Guna APINDO.



Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ke 5 perusahaan terpilih yaitu PT. Timas Suplindo, PT. Mahasuri Utama, PT. Indotirta Abadi, PT Dekasari Perkasa dan PT Matahari



Permainan games antar sesama peserta untuk pengenalan

Panganindo. Kegiatan SCORE dan 10 calon instruktur serta kunjungan pendampingan ke perusahaan di Jakarta-Banten berlangsung dari bulan Agustus-Desember 2017. Hasil yang dicapai, diantaranya:

PT Matahari Abadi Panganindo

Produk yang dihasilkan berupa: ayam karkas, *boneless chicken*, *wing/sayap*, *mechanical debone meat* (MDM), *fancy products* (tulip, tulang muda cecker), *side products* (kulit, hati, ampela, kerongkong, *trimming*, tulang paha), produk marinasi. Dengan merek dagang "SunOne".



Proses Parting sebelum pelatihan



Proses parting setelah pelatihan



sarung tangan



Pembukaan Program oleh Ibu Bintang Puspayoga



Sambutan oleh Ibu Nina Tursinah dari APINDO

2. Kegiatan SCORE di Tuban

Untuk implementasi Program SCORE di Tuban, APINDO bekerjasama dengan DEKRANAS yang dilaksanakan oleh instruktur BEDO (*Business Export Development Organization*) yang sudah berpengalaman dan juga sebagai pelaku usaha, dilanjutkan dengan pendampingan langsung di tempat kerja sebanyak 3 kali, yang diikuti oleh 5 perusahaan yaitu UD Tenun Zaenal, UD Budi Karya, UD Melati Mekar Mandiri, UD Batik Royyan dan UD Sekar Ayu Wilujeng. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Agustus 2017 - Januari 2018.



Foto kegiatan ToE (Training of Enterprises)



Foto Peserta bersama Ibu Nina Tursinah dan Ibu Bintang Puspayoga



DOKUMENTASI PROGRESS IKM

SEBELUM	SESUDAH
<p>UD Budi Karya</p> <p>Area penjemuran batik. Berantakan dan kawat jemuran berkarat</p>  <p>08.31.2017</p>  <p>Pembatik bekerja berdesak-desakan</p>	 <p>Area penjemuran lebih luas, dan kawat jemuran dilapisi pipa paralon kecil untuk mencegah karat kawat berpindah ke kain batik.</p>  <p>Pembatik dibuatkan area baru dan pembatik dibagi dalam kelompok kecil untuk menggunakan kompor batik bersama-sama dan bisa menghemat pemakaian bahan bakar. Foto : batik tulis Tuban</p>
<p>UD Sekar Ayu Wilujeng</p>  <p>Pewarna batik yang tidak ada label dan kartu stock</p>  <p>Area pewarnaan batik yang basah dan kotor</p>	 <p>Pewarna batik ditata dan diberi label</p>  <p>Dibuat pembatas area basah dan area kering, dan rak yang tidak dipakai dipindah</p>



Foto Kegiatan Result Presentation Day 19 Januari 2018

Sambutan dari Ketua Bidang
UKM/IKM APINDO, Ibu Nina Tursinah



Fashion show perwakilan 5 IKM Kabupaten Tubán



Liputan Media tentang pelaksanaan SCORE di Kabupaten Tuban :



Info Link :

<https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/bloktuban/program-score-training-dari-dekranas-dan-apindo-ilo-sasar-tenun-gedog-tuban.amp>



Info Link :

<http://kimronggolawe.com/2018/01/bintang-puspayoga-resmi-tutup-program-score-ikm-ukm/>



Info Link :

<https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/bloktuban/program-score-training-dari-dekranas-dan-apindo-ilo-sasar-tenun-gedog-tuban.amp>

II. Kapasitas UKM dalam program “Keberlanjutan Korporasi dan Pelaporan Keberlanjutan bagi Bisnis yang Kompetitif” atau *Corporate Sustainability Reporting for Competitive Business (CSRCB)*

Program ini merupakan kerjasama antara APINDO dengan GRI (*Global Reporting Initiative*) yang bertujuan memberikan capacity building bagi para UKM (*medium sized*) di lingkungan perusahaan agar mereka dapat memperoleh akses menuju *Global Value Chain (GVC)* sehingga dapat meningkatkan kinerja dan membuka kesempatan kerja lebih banyak.

GRI adalah organisasi Internasional independen yang membantu sektor usaha, pemerintah dan organisasi lain untuk mengerti dan mengkomunikasikan dampak dari usahanya pada isu keberlanjutan yang penting seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi dan lainnya.

GRI menghasilkan standar untuk pelaporan keberlanjutan berkelas dunia yang dapat dipercaya dan banyak dipakai, yang memungkinkan organisasi untuk menilai dan memahami dampak yang paling penting pada lingkungan, masyarakat (sosial) dan ekonomi.

Sektor usaha yang akan dilibatkan untuk program CSRCB adalah industri pengolahan makanan (*food and beverage*), otomotif, pertanian/perkebunan, tekstil, industri padat karya, ritel (modern dan tradisional)

Program ini terdiri dari 3 pilar, yaitu :

- 1) Mengembangkan kapasitas UKM untuk pelaporan berkelanjutan;
- 2) Menciptakan lingkungan pelaporan yang kondusif dan
- 3) Membantu perkembangan permintaan untuk data yang berkelanjutan

Kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2017 adalah pembentukan trainer APINDO melalui TOT selama 2 hari, yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2017 yang diikuti 9 trainer.

Kemudian pada tanggal 10 agustus 2017



dilakukan sosialisasi mengenai program CSRCB ini oleh Service Director GRI yaitu Asthildur Hjaltadottir kepada PT. Kalbe farma dan PT Adhis Dimension Footwear.

Pada tanggal 9 September 2017, trainer dari DPN APINDO melakukan workshop sosialisasi mengenai program CSRCB ini juga kepada beberapa Anggota Luar Biasa (ALB) APINDO.

III. Pengembangan dan penguatan kapasitas UKM oleh PUM

PUM adalah organisasi non profit yang didirikan oleh relawan pensiunan dari berbagai *expert* di Belanda, yang didukung oleh pemerintahan Belanda dan didirikan pada tahun 1970 serta sudah lebih dari 30 tahun berada di Indonesia.

Setiap tahunnya PUM membantu 200 UKM di seluruh Indonesia dengan memberikan asistensi teknis dari para *expert* tersebut yang mana bidang keahlian yang dimiliki beragam seperti: akses pasar Ekspor, IT, logistic, *ecommerce*, keuangan dan akuntansi, produksi, promosi dan sebagainya).

Dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap jaringan UKM-IKM, APINDO akan bekerjasama dengan PUM untuk bantuan *experts* penguatan UKM-IKM tersebut. Pada tahun ini ada proyek percontohan untuk penguatan dan pendampingan UKM di PT.

Sarandi Karya Nugraha. Kunjungan dan pendampingan tenaga ahli Belanda bernama Mr. Ger Janssen ke Pabrik akan dimulai pada tanggal 4 September 2017. Pendampingan akan dilakukan selama dua minggu di sisi peningkatan kualitas produksi. Tim sekretariat APINDO melakukan kunjungan pada tanggal 11 September 2017 dan meeting dengan Pemilik Perusahaan beserta *expert* dari PUM tersebut.



myBCA, Digital Banking Experience



Nikmati pengalaman digital banking yang mudah, lengkap, dan nyaman di myBCA.

Kunjungi segera myBCA di Mall Gandaria City Jakarta, Kota Kasablanka Jakarta, Central Park Jakarta, Emporium Pluit Jakarta, Mall Bintaro Xchange Tangerang, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya.

Inovasi BCA untuk Anda.

Bidang Industri





APINDO mencermati bahwa perkembangan sektor industri di Indonesia belum menemukan pondasi yang kokoh untuk berperan dominan bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun untuk mencapai posisi supremasinya secara regional. Oleh karenanya, pembangunan sektor industri tidak dapat hanya dilaksanakan secara parsial dengan membangun pabrik secara fisik, penyediaan lahan, faktor permodalan mesin produksi dan peralatan produksi fisik lainnya. Pembangunan sektor industri harus melingkupi seluruh aspek yang mampu mendukung perkembangan industri secara berkelanjutan, baik secara fisik, regulasi yang pusat dan daerah yang ramah terhadap pengembangan industri, pengembangan SDM penunjang industri, serta faktor-faktor penunjang keberlangsungan sektor industri yang harus dilakukan secara bersamaan dan kongruen, dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Apabila dilakukan secara parsial dan tidak berkesinambungan, maka sektor industri Indonesia hanya tidak akan mampu bertumbuh secara berkesinambungan maupun dalam memenangkan persaingan di kawasan regional maupun global.

UU Perindustrian No. 3 Tahun 2014 yang telah dihasilkan merupakan salah satu aspek pendukung perkembangan sektor industri nasional, sekaligus berperan sebagai modal dasar dalam pembangunan industri. Sesuai amanat UU tersebut, Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015. Di dalam RIPIN telah tercantum rencana aksi pembangunan industri nasional yang menargetkan Indonesia untuk menjadi negara industri maju dan tangguh di tahun 2035 dengan tolok ukur kontribusi industri non-migas nasional terhadap total PDB sebesar 30%.

Para pemangku kepentingan di bidang industri harus memikirkan dan merenungkan mengenai metode terbaik dalam mengimplementasikan RIPIN dan mencapai

sasarannya, dan tentunya memiliki kaitan erat dengan cara pola berpikir antara membangun Pabrik atau Industri. Dalam konsep membangun Pabrik, yang diutamakan secara fisik adalah adanya input dan output serta proses pabrikasi yang berjalan baik dan dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Sedangkan dalam konsep membangun Industri, semua input dan output harus dipikirkan ketersediaannya secara berkelanjutan, dengan disertai inovasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Demikian juga *output* produk industri harus direncanakan agar dapat diterima oleh pasar dan konsumen dengan berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, aman, dan terjangkau, sesuai regulasi yang berlaku, serta memiliki daya saing.

Konsep pembangunan Industri tersebut telah dirancang dalam RIPIN, dimana “Bangun Industri Nasional” harus mempunyai modal dasar, yaitu SDA, SDM, teknologi, inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu akan menjadi penting tentang bagaimana seharusnya modal dasar itu dipikirkan ketersediaannya, serta terkoordinasi secara berkelanjutan agar konsep pembangunan industri tidak hanya sekedar membangun pabrik. Di sinilah pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam menjalankan konsep industri yang diamanatkan RIPIN, mulai dari Pemerintah, Legislatif, pelaku usaha, akademisi, bahkan sampai konsumen.

Disinilah pentingnya peran Pemerintah dalam mendukung konsep pembangunan industri berkelanjutan. Meskipun fungsi Pemerintah adalah sebagai regulator dan pengawas, namun perannya dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah strategis. Pemerintah harus berpihak dan menjamin ketersediaan bahan baku, dikarenakan pengembangan industri tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan bahan baku di hulu. Industri berbasis migas dan petrokimia, industri berbasis logam dasar dan mineral tambang, dan industri berbasis agro, merupakan contoh sektor-sektor industri yang memerlukan penyediaan lahan serta pembangunan di sisi hulunya yang harus

disesuaikan dengan kepentingan industri terkait, salah satunya melalui upaya klusterisasi industri.

Proses produksi, mesin dan peralatan pendukungnya juga harus dikembangkan berbasis teknologi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Demikian juga harus dipikirkan mengenai efisiensi pergerakan barang beserta prosesnya melalui "*motion study*". Inovasi produk dilakukan secara terencana dan terus menerus untuk memenuhi permintaan pasar, demikian halnya inovasi di semua lini produksi mulai bahan baku, proses, sampai dengan sistem dan konsep pemasarannya, dan kemudian bergabung dengan lini Global Value Chain (GVC) untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produksi berbagai sektor industri nasional.

Negara-negara lain terlebih dahulu telah mulai memikirkan konsep GVC untuk mendukung sektor-sektor industrinya, dengan metode memaksimalkan penyediaan bahan baku dari dalam negeri, tanpa perlu menghambat kebutuhan bahan baku impor. Yang paling utama adalah bagaimana mendapatkan nilai tambah semaksimal mungkin di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi permintaan produk jadi di pasar global. Indonesia termasuk negara yang belum banyak memanfaatkan sumber daya global untuk memenuhi permintaan produk global bernilai tambah. Data *GVC participation rate* tahun lalu memperlihatkan bahwa *rate* Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Malaysia dan Thailand memanfaatkan GVC secara maksimal sehingga daya saing industrinya semakin kuat sehingga mampu mendulang pertumbuhan nilai tambah yang besar bagi industri domestiknya.

Untuk menjawab tantangan kesiapan tenaga kerja bagi industri serta inovasi berbasis teknologi tepat guna dan tepat sasaran, maka kolaborasi dengan akademisi dan dunia akademik menjadi penting. Perguruan tinggi perlu mengambil peranan strategis, dengan

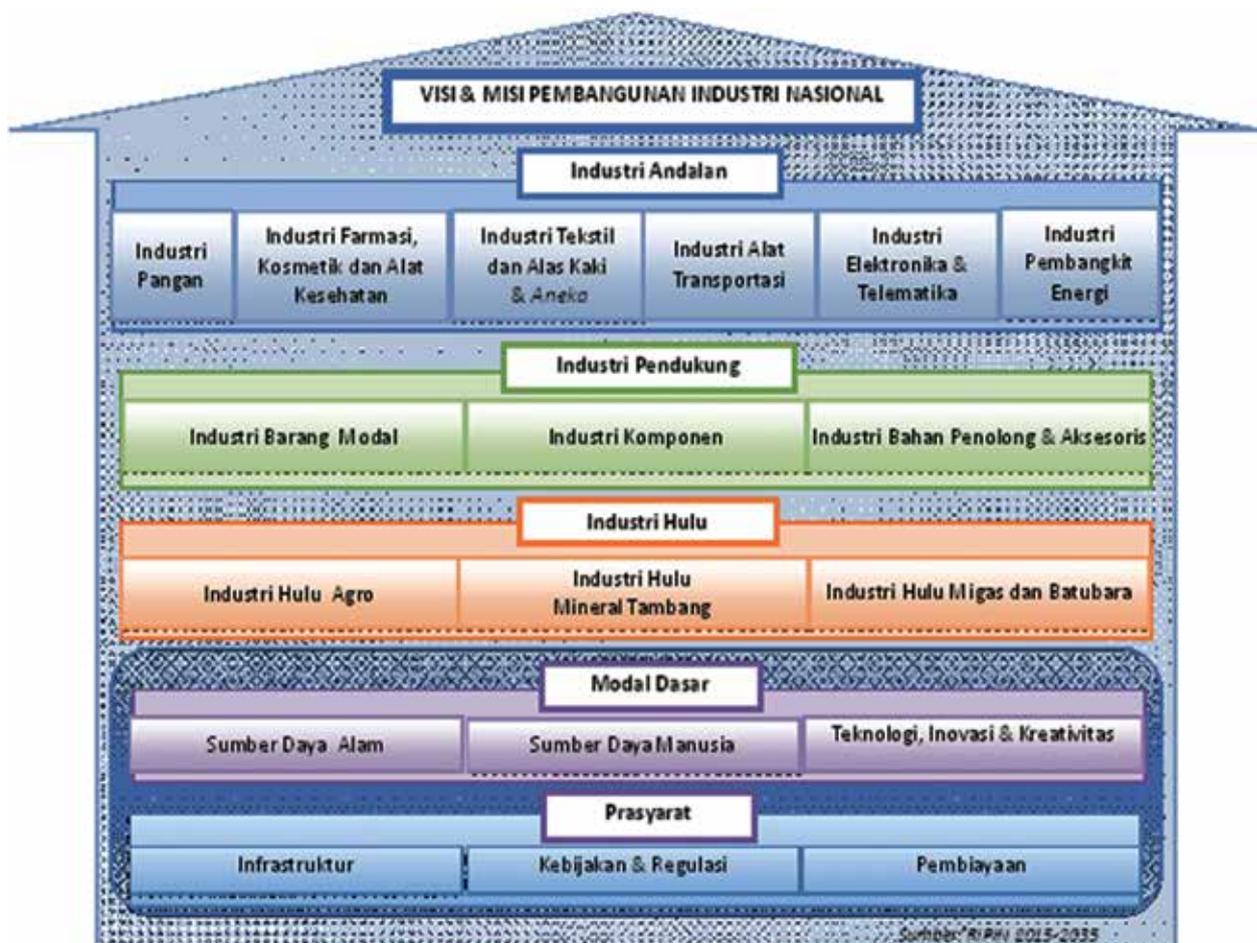
mencetak *entrepreneur* dan faktor penunjang industri dalam lingkungan ekosistem inovasi yang berkelanjutan, sekaligus melakukan riset inovasi yang diprioritaskan untuk memperkuat daya saing industri domestik untuk menghasilkan produk substitusi impor. Selain bahan baku dan SDM, faktor konsumen tidak kalah penting. Peran konsumen jelas akan menjadi kekuatan dalam mendorong industri dalam negeri berkembang.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Industri

Membangun Industri tidak sama dan tidak sesederhana membangun pabrik. Pernyataan sederhana ini harus menyadarkan seluruh pemangku kepentingan bahwa target agar Indonesia menjadi negara industri yang tangguh harus diwujudkan. Untuk merealisasikannya, APINDO sebagai perwakilan dunia usaha mengajak seluruh *stakeholders* seperti pemerintah, asosiasi-asosiasi sektoral, pelaku usaha, akademisi / perguruan tinggi, untuk bersama-sama menyusun peta rekomendasi "**Membangun Industri Nasional Yang Berkelanjutan**". Rekomendasi tersebut akan menjadi benang merah dalam suatu sinergi diantara Pemerintah, pelaku industri dan akademisi terkait mengenai pentingnya konsistensi para *stakeholders* terhadap kebijakan yang mendukung pembangunan industri, komitmen peningkatan TKDN, peningkatan kualitas SDM, serta yang terpenting adalah keberpihakan pemerintah yang dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan industri di Indonesia. Dengan demikian, seluruh input, output dan proses pabrikasi dapat dipikirkan ketersediaannya dalam suatu skema yang berkelanjutan. Dalam menghimpun serta memperdalam masukan rekomendasi dari para pelaku industri, asosiasi, akademisi serta Pemerintah melalui beberapa kegiatan FGD.

Oleh karena itu, DPN APINDO mengusulkan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama dalam proses membangun dan mengembangkan industri secara berkelanjutan, melalui empat faktor usulan penting, yaitu :

1. Konsisten, konsekuen, dan kongruen terhadap kebijakan / regulasi yang telah dibentuk untuk melaksanakan pendalaman struktur industri. Pengertiannya adalah :
 - a. Konsisten dalam membuat maupun menjalankan proses ke arah pendalaman industri sesuai dengan *milestone* / KPI yang telah ditetapkan.
 - b. Konsekuen dalam pemberian insentif fiskal, non-fiskal, kemudahan perijinan, dan lain-lain.
2. Adanya keberpihakan pemerintah dalam mendukung ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing. Seperti pembangunan pabrik baja, aluminium, metal, sebagai faktor landasan untuk membangun industri, menggiatkan pabrik petrokimia yang menjadi bahan baku untuk industri seperti plastik, dan lain sebagainya.
3. Adanya keberpihakan pemerintah dalam mendukung program TKDN.
4. Mengharapkan pemerintah secara komprehensif membangun dan meningkatkan SDM beserta infrastruktur pendukungnya, melalui :
 - a. Vokasi dan Pemagangan.
 - b. PP terkait Pengupahan yang didasarkan pada konsep produktivitas agar dapat memenuhi SDM industri yang mampu bersaing secara global.
 - c. Meningkatkan kompetensi, pendidikan, dan kurikulum pendidikan.





5. Mengusulkan agar pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, dalam mentransformasikan visi dan misi pembangunan industri nasional dapat terlaksana dan terealisasi melalui kepastian dan keberpihakan dalam pengembangan industri hulu. Keberpihakan ini akan memberi dampak positif akan terjaminnya ketersediaan bahan baku bagi pengembangan industri pendukung dan industri andalan yang berdaya saing. Dengan demikian seluruh input, output dan proses pabrikasi dapat dipikirkan ketersediaannya secara berkelanjutan, yang dapat ditempuh melalui:

- Konsistensi terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri yang akan menghasilkan produk yang mempunyai akar kuat di dalam negeri.
- Keberpihakan dalam mendukung program pelaksanaan pemanfaatan TKDN.
- Keberpihakan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas SDM dalam negeri.
- Kepastian dan keberpihakan dalam mendukung ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing.

Kegiatan Bidang Industri

1. Pembahasan Pengembangan Kawasan Industri Luar Pulau Jawa

Melakukan pembahasan pengembangan kawasan industri di luar Jawa dan bersama-sama dengan KEIN melakukan FGD pada tanggal 9 Februari 2017 di hotel JS Luwansa



dengan topik “**Pengembangan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa**” dengan dihadiri 400 partisipan. FGD tersebut dibuka oleh menteri serta melibatkan pelaku usaha, asosiasi, pemerintah, dan akademisi.

2. Pembahasan *Mapping* Industri Manufaktur dan Sumber Daya

Bersama dengan KADIN dan KEIN, APINDO membahas mengenai mapping industri manufaktur dan sumber daya serta industri pendukung. Pembahasan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :

- a. FGD yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, pakar ekonomi dan akademisi.
- b. Undangan sebagai narasumber / pembicara dalam beberapa acara yang diselenggarakan KEIN (13 Juni 2017 dan 25 Juli 2017) dalam rangka penyusunan roadmap pembangunan industri.
- c. Diskusi-diskusi mengenai potensi investasi di Indonesia dengan JETRO, JICA, Itochu Member, RDI (Research and Development Innovation), serta perwakilan pelaku-pelaku usaha dari RRT (Mr. Vince Gowan).



3. Narasumber FGD KADIN

APINDO berpartisipasi sekaligus menjadi nara sumber bersama dengan KADIN dalam rangka penyusunan usulan rekomendasi kepada Pemerintah melalui acara “**Membangun Industri Nasional yang Berkelanjutan**”

yang dilakukan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) pada 27 November 2017 di Hotel Borobudur.

4. Kegiatan Lainnya



APINDO juga secara rutin dan aktif ikut serta dan menghadiri diskusi-diskusi yang membahas kebijakan-kebijakan serta regulasi Pemerintah yang dilakukan beberapa kali oleh Kementerian Industri RI serta Kementerian Perdagangan RI.

Harapan

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, suatu potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Namun, dari sisi perkembangan aktivitas produksi, industri manufaktur dalam negeri masih berupaya keluar dari siklus kelesuannya. Kelesuan tidak hanya menghinggapi industri-industri UMKM, namun juga industri-industri berskala menengah-besar. APINDO mencermati bahwa ternyata industri kecil mengalami kelesuan yang lebih parah dibandingkan industri manufaktur besar, dan ini dapat dikatakan berada di luar kewajaran. Pada umumnya selama bertahun-tahun, justru industri kecil bergerak lebih bergairah dibandingkan pertumbuhan industri besar.

APINDO tentu mencermati apa sebenarnya

yang sedang terjadi dengan industri nasional? Perlu dicari penyebab krusial sebagai faktor-faktor penyebab tertekannya ekspansi sektor industri nasional. APINDO berharap Pemerintah lebih waspada terhadap tren kelesuan industri ini, karena berdampak terhadap penurunan daya serap tenaga kerja lokal meskipun tren investasi. APINDO juga menyesalkan kondisi penurunan konsumsi masyarakat yang terjadi hingga Semester II 2017. Dan hal itu jelas berdampak terhadap sektor industri yang juga melemah. Salah satu sektor industri yang mengalami tekanan adalah sektor manufaktur.

Untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat tersebut, APINDO mengharapkan beberapa hal agar dapat dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta berbagai pihak. Pertama, agar masyarakat terutama pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi belakangan ini. Hal tersebut menjadikan masyarakat dan kalangan usaha semakin berhati-hati dalam berbelanja. Kedua, agar Pemerintah tetap melanjutkan pemberian insentif kepada dunia usaha terutama di sektor padat karya. Saat ini banyak pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di industri padat karya dikarenakan tingginya Upah Minimum yang sudah ditetapkan. Hal itu pula yang menyebabkan tenaga kerja formal saat ini mulai menyusut, dan beralih ke informal, sehingga pada akhirnya menunda konsumsi. Ketiga, Presiden harus memperingatkan kepada jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi, bukan justru berlomba-lomba mempublikasikan berbagai pencapaiannya. APINDO mencermati bahwa Presiden sudah berkomunikasi secara optimis, namun beberapa pembantunya seringkali hanya “mencari panggung”, sehingga yang terjadi hanya menimbulkan kecemasan. Keempat, APINDO berharap Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan proporsi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan pendalaman industri industri prioritas. Hal tersebut untuk memperkuat industri nasional



yang berdaya saing tinggi.

Dengan semakin membaiknya posisi Indonesia di sektor perdagangan dan industri, APINDO berharap agar perkembangan ini dapat menjadi motivator untuk meningkatkan optimisme sekaligus meningkatkan rating daya saing industri nasional. APINDO juga berharap agar momentum tersebut dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Indonesia sehingga sektor perdagangan dan industri di Indonesia bisa

semakin positif dan terus naik peringkat. Titik krusialnya adalah bahwa ternyata perdagangan Indonesia bisa berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Karena memang ada dua kunci pertumbuhan ekonomi, net ekspor (surplus) dan serta peningkatan investasi. Tanpa kedua hal tersebut tidak mungkin pertumbuhan industri dan perekonomian dapat melesat lebih cepat lagi.

Perpaduan antara komitmen, kerja keras, cipta, rasa dan karya pribadi-pribadi unggul telah menghasilkan produk inovatif dan berkualitas yang menguasai pasar lokal hingga regional. Kini, GarudaFood telah bertransformasi menjadi perusahaan makanan minuman terdepan di Indonesia

chocolatis garuda IN RASANYA clevo SUPER OZ 2 Geryb Leo

www.garudafood.com garudafood garudafood_id garudafood_id

BETTER BUSINESS, BETTER WORLD



Mari ciptakan masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia!

Alamat Kantor Pusat:

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

JL. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang – 15345

Telp. +6221 8082 7000

Fax. +6221 8082 7002

Suara Konsumen:

0800 1 55 8000 (Toll Free)

021 5299 5299 (Regular)

www.unilever.co.id



Improving Lives by Developing Resources Sustainably



www.rgei.com

APRIL



Apical



Tanoto Foundation

Bidang Perdagangan





Bidang Perdagangan DPN APINDO di sepanjang tahun 2017 aktif mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi sekaligus mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah terhadap isu-isu bidang perdagangan yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja sektor retail domestik, khususnya di tengah fenomena perkembangan digitalisasi dalam aspek-aspek kegiatan ekonomi nasional. Dari beberapa isu bidang perdagangan, APINDO setidaknya berfokus pada tiga isu utama di 2017, yaitu kebijakan Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR), Perkembangan *E-Commerce* dan Digitalisasi, serta Penurunan Daya Beli Masyarakat.

Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi

Kementerian Perdagangan pada Maret 2017 mengeluarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Lelang Komoditas Pasar Gula Kristal Rafinasi (GKR), yang intinya mengubah sistem perdagangan GKR secara ekstrim dan struktural dari B2B (*Business to Business*) menjadi sistem lelang termediasi oleh monopoli tunggal penyelenggara lelang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran APINDO dan pelaku usaha terutama pelaku usaha di sektor industri makanan-minuman terhadap potensi terjadinya monopoli tunggal yang dilakukan oleh institusi swasta. APINDO sebagai wadah pengusaha memiliki *concern* dan perlu untuk turun tangan dalam menggali penyebab polemik berkepanjangan dari Permendag tersebut sekaligus merekomendasikan solusi jalan keluar melalui rekomendasi kebijakan.

APINDO melalui tim penelitiannya telah melakukan riset untuk mengukur dampak kebijakan lelang GKR. Hasil riset APINDO yang dilakukan menyimpulkan bahwa Permendag tentang Lelang GKR berpotensi memunculkan potensi praktek KKN yang sistematis dengan adanya berbagai biaya pungutan dan biaya transaksi lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga

menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi pelaku industri yang menggunakan GKR. Secara prinsip regulasi tersebut tidak sejalan dengan tujuannya untuk mengurangi rembesan GKR, meningkatkan akses UKM untuk mendapatkan GKR dan transparansi tata niaga GKR.

Oleh karena itu, APINDO telah merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah melalui Menteri Perdagangan RI mencabut Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Lelang Pasar Komoditas GKR dan bukan menunda pelaksanaan Permendag tersebut.
2. Menekankan agar para Menteri Kabinet Kerja dapat mencegah kemunculan regulasi-regulasi tidak perlu yang memunculkan pungutan, monopoli, maupun ketidakberpihakan kepada dunia usaha.
3. Meminta agar Menteri-Menteri terkait di Kabinet Kerja untuk merumuskan regulasi swasembada gula dari hulu ke hilir secara komprehensif.

Ekonomi Digital : Aturan Main E-Commerce

Ekonomi digital di tahun 2017 berkembang pesat. Hal tersebut dapat diamati melalui ekspansi sektor *E-Commerce* dengan meningkatnya berbagai bentuk transaksi dan barang yang dijual secara *online*.

Perkembangan tersebut menjadi landasan bagi APINDO untuk memberi rekomendasi kepada Pemerintah agar tidak terlambat dalam membangun struktur dan pondasi *E-Commerce*, dengan kemampuan untuk menjadikan pengusaha *retail online* domestik sebagai pemain utama, ditengah gencarnya serangan pemain *retail online* regional dan global. Apabila Pemerintah terlambat mengantisipasinya, para pemain *retail online* asing akan dengan cepat masuk dan menguasai pangsa pasar dalam negeri. Kemajuan digitalisasi di bidang perdagangan eceran ini harus dibarengi dengan kecepatan

antisipasi Pemerintah dalam mengutamakan dan mengembangkan pemain retail nasional dan jangan mengeluarkan regulasi yang justru memberi ruang bagi pemain *retail online* asing untuk semakin berkembang dan dominan.

Kebebasan *E-Commerce* dalam menjual berbagai produk dengan harga sangat murah dapat berimbas negatif dalam bentuk ketidakadilan kompetisi terhadap sektor retail konvensional maupun terhadap pemain *E-Commerce* lokal. APINDO yakin bila Pemerintah telah mencermati hal ini di beberapa tahun terakhir, namun justru tidak sigap dan lamban dalam mengantisipasi perkembangannya secara tepat.

APINDO berharap agar Pemerintah memiliki keberpihakan terhadap pemain *E-Commerce* lokal agar dapat bertumbuh dan berdaya saing dengan para pemain *E-Commerce* regional dan global, termasuk keberpihakan dalam bentuk program pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendorong ekspansi para pemain lokal. APINDO juga meminta agar Pemerintah dapat menjalankan kebijakan strategis jangka pendek dan menengah untuk mengurangi ketergantungan *E-Commerce* terhadap produk impor. Kebijakan itu dapat berbentuk penguatan daya saing produk nasional yang memang masih membutuhkan waktu yang lebih lama sejak sekarang.

Bila kebijakan-kebijakan Pemerintah keliru dan tidak mendengarkan saran rekomendasi dunia usaha *retail E-Commerce* nasional, maka pangsa pasar domestik akan semakin dikuasai para pemain sejenis utamanya yang berasal dari China. Kebijakan Pemerintah yang tepat dapat diwujudkan dalam bentuk pengurangan pajak berlapis terhadap industri-industri domestik. Pengenaan pajak berlapis menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan beban biaya produksi pabrikan lokal menjadi lebih mahal ketimbang produk impor, walaupun kualitasnya sama bahkan lebih baik baik dibandingkan produk impor.

Penurunan Daya Beli Masyarakat

Dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun muncul berbagai diskusi mengenai fenomena turunnya daya beli konsumen, yang ditandai dengan menurunnya omzet penjualan para pemain retail konvensional seperti Roxi, Glodok, Matahari, Ramayana, Lotus, serta Debenhams di Senayan City. Namun, anggapan dan fenomena itu langsung terbantahkan oleh rilis data-data beberapa ekonom yang menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir pertumbuhan riil konsumsi masyarakat justru *robust* di kisaran 5,0%. Dalam struktur PDB Indonesia, Konsumsi Rumah Tangga memang masih menjadi kontributor terbesar, yang mencapai 54%. Sebagian analis dan ekonom menyatakan sepinya gerai retail konvensional disebabkan beralihnya konsumen ke gerai *retail online*. Kesimpulan tersebut pun beberapa kali dianggap *misleading* karena penjualan *E-Commerce* memang ternyata hanya menyumbang 1,2% dari total PDB, dan hanya berkisar 0,8% (tahun 2016) dari total penjualan retail nasional. Pertumbuhan penjualan *E-Commerce* memang eksponensial, namun magnitudenya belum signifikan untuk dapat dijadikan penyebab utama terhadap penurunan kinerja perdagangan retail nasional.

APINDO mencermati dan mewaspadaai situasi kelesuan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang berlangsung hingga Semester II 2017, yang jelas berdampak besar terhadap kinerja keseluruhan sektor industri. Sektor industri yang ikut tertekan akibat fenomena tersebut adalah industri manufaktur. Agar daya beli masyarakat kembali terdongkrak, APINDO telah memberi usulan kebijakan kepada Pemerintah serta para pelaku usaha terkait, yaitu :

1. Agar masyarakat terutama pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi di sepanjang tahun 2017. Hal tersebut sedikit banyak berperan terhadap



faktor kehati-hatian masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk melakukan aktivitas konsumsi dan belanja.

2. Agar Pemerintah melanjutkan pemberian insentif kepada dunia usaha terutama sektor padat karya. Banyak pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di sektor padat karya akibat tingginya Upah Minimum, yang berimbas terhadap menurunnya jumlah tenaga kerja formal yang dapat diserap industri, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat kemampuan pekerja / masyarakat untuk melakukan konsumsi.
3. Presiden sebaiknya mengingatkan jajaran pembantunya untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan, dan bukan justru berlomba memamerkan publikasi berbagai pencapaiannya. APINDO menghargai upaya Presiden untuk “berkomunikasi” secara optimis, namun beberapa kalangan menterinya justru hanya “mencari panggung” sehingga yang muncul hanyalah kecemasan konsumen serta pelaku usaha.

Dalam kegiatan ini, APINDO mengundang narasumber dari berbagai kalangan : Internal Pengurus DPN APINDO, Pengusaha, serta Ekonom UI, Bapak Faisal Basri, yang juga dihadiri oleh jurnalis media cetak dan elektronik.

• **Public Policy Discussion II – Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi. Perlukah?**

Seperti yang telah dilakukan dalam diskusi pertama sebelumnya, dalam kegiatan ini APINDO kembali mengundang narasumber dari beberapa kalangan : Internal Pengurus DPN APINDO, Pengusaha, serta Ekonom INDEF Ibu Enny Sri Hartati, dan diliput oleh jurnalis yang sebagian besar berasal dari media elektronik. Dalam kegiatan ke-2 ini, DPN APINDO menyampaikan hasil kajian tim kebijakan publik yang disampaikan Bapak Danang Girindrawardana. Selain paparan Bapak Danang, diskusi publik ini juga mendengarkan pandangan pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Bapak Ibnu Sina.

Kegiatan

1. Diskusi Publik Lelang Gula Kristal Rafinasi

- **Public Policy Discussion I – Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) : Solusi atau Distorsi? (27 September 2017)**



2. Kegiatan Lainnya

Selain mengadakan kegiatan diskusi publik, perwakilan APINDO juga ikut menghadiri beberapa diskusi mengenai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah. Keikutsertaan perwakilan APINDO ini

diwujudkan dalam bentuk partisipasi sebagai narasumber maupun sebagai peserta diskusi. Diskusi-diskusi kebijakan publik tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, namun juga dilakukan oleh media serta organisasi-organisasi lainnya, diantaranya berikut ini :

1. Keikutsertaan APINDO sebagai pembahas dalam *Policy Dialogue Series* Kementerian Perdagangan RI.
2. Penyampaian Informasi Mengenai Penerbitan *Import Health Standard* Buah Salak oleh Pemerintah Selandia Baru.
3. Undangan International Conference and Call for Paper “A New Paradigm in Trade Governance to increase Domestic Efficiency & To strengthen Global Competitiveness”.
4. Rapat Pembahasan Pemetaan Kompetensi Ekspor-Impor Kemendag RI.
5. Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Manifest Perdagangan Domestik Antar Pulau Kemendag RI.
6. FGD Optimalisasi Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP).
7. Peresmian Pembukaan Trade Expo Indonesia 2017.
8. Pengawasan Kegiatan di Bidang Perdagangan Kemendag RI.
9. Peserta *Policy Dialogue Series* (PDS).
10. Undangan Pra Konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
11. *Focus Group Discussion* Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Harapan

Perekonomian Indonesia masih dihindangi berbagai resiko dan tantangan internal maupun eksternal. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, APINDO menekankan pentingnya Pemerintah untuk mengutamakan

dan membenahi pasar domestik, termasuk perkembangan sektor *E-Commerce*. Pembenahan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor, peningkatan produksi dan daya saing, serta penguatan pelaku usaha *E-Commerce* lokal. Dunia usaha selalu bersedia bekerja sama dengan Pemerintah melalui kegiatan pembinaan kepada para pelaku usaha nasional, khususnya UMKM. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia bersumber dari kegiatan konsumsi di dalam negeri. Sehingga, ketika ekonomi global sedang menghadapi beragam tantangan, APINDO mengharapkan agar Pemerintah dapat menggenjot konsumsi domestik, dan dapat memperluas pertumbuhannya dengan melakukan ekspor, terutama pasar ASEAN yang lebih mudah dijangkau dan ditembus Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut, APINDO berharap agar Pemerintah melalui Menteri dan Kementerian Perdagangan RI dapat bersikap transparan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Sikap tersebut akan sangat penting dalam menjaga iklim perekonomian dan peningkatan wirausaha di Indonesia. Transparansi tersebut dapat dibentuk melalui kerjasama yang berkesinambungan. Oleh karenanya, APINDO berharap kerjasama antara Kemendag RI dengan APINDO dan dunia usaha dapat semakin diintensifkan, utamanya melalui diskusi-diskusi yang dilakukan sebelum dilakukannya rilis kebijakan terbaru dengan tujuan agar regulasi yang dikeluarkan telah melalui proses diskusi yang matang dan memenuhi ekspektasi dunia usaha yang terlibat di dalamnya. APINDO akan selalu berkomitmen untuk memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai permasalahan nasional dan internasional yang dapat memberikan solusi terbaik bagi peningkatan ekspor serta penguatan konsumsi pasar dalam negeri secara berkelanjutan.



BE FAST,
BE FORWARD,
BEST ESTATE
FOR ALL

www.befa.id

MM2100
INDUSTRIAL TOWN

Industrial Land

+62 21 898 0133
+62 21 252 5334
marketing@befa.id

Standard Factory Building

HEAD OFFICE
Kawasan Industri MM2100
Jl. Sumatera, Cikarang Barat
Bekasi 17520, Indonesia

REPRESENTATIVE OFFICE
Wisma Argo Manunggal 10th floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930, Indonesia

Logistic Center



Supported by Government Program
Direct Construction
Investment Service

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE TBK



RELIABLE LUBRICANTS FOR
WIDE RANGE OF INDUSTRIES



Distributorship Information:
PT PANA OIL INDONESIA
Pluit, Jakarta Utara, Indonesia
customersupport@panaoil.id
www.panaoil.id

Quality assured by:



Management
System
ISO 9001:2015

Bidang Keuangan dan Perbankan



Section 3: ...
...verse the day-to-day management and operation of the franchise loca... while maintaining
...ce customers have come to expect from the Company.
...responsible for maintaining the upkeep of the location. The Company will inspect the location
...nth, year, etc.]. Failure to comply with the Company's standards in this regard, as noted in
...ndbook, attached addendum, etc.] will result in [punishment for not complying with the

Section 4: Company Responsibilities
4.2 Company will also provide support in the form of [ways in which the company will support the franchisee]

Section 5: Advertising
5.1 Franchisee will maintain its own advertising campaign locally, and pay [amount in dollars] [c
[national/international] advertising of the Company every [week, month, year, etc.]

Sepanjang tahun 2017 Bidang Keuangan dan Perbankan DPN APINDO telah menyelenggarakan dan juga menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tema pasar modal, keuangan, perbankan, perpajakan, digitalisasi sektor keuangan, serta beberapa tema / isu terkait keuangan dan perbankan lainnya. Hal ini merupakan wujud nyata dari peran APINDO untuk ikut menyuarakan rekomendasi kebijakan bagi perkembangan industri perbankan dan keuangan yang sehat dan berkesinambungan di tanah air.

Bidang Pasar Modal

Dalam bidang pasar modal, APINDO telah melakukan kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam menyelenggarakan event CEO Focus 2017 di bulan November 2017. Pelaksanaan CEO Focus 2017 diusung dengan mengangkat tema “**Tantangan Dunia Usaha dan Pengembangan Pasar Modal**” yang bertempat di Main Hall BEI Jakarta.



Diskusi dalam CEO Focus 2017 tersebut membahas mengenai arah dan rencana strategis pemerintah dalam membangun industri nasional, progress Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid 1 sampai dengan Jilid 16 yang telah dikeluarkan Pemerintah beserta realisasi pencapaiannya di lapangan,

serta membahas perkembangan isu ketenagakerjaan khususnya yang terkait pengupahan dan struktur skala upah. Diskusi dalam *CEO Focus 2017* memiliki tujuan untuk memperkuat kinerja dunia usaha nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Lebih lanjut diskusi menyoroti kenyataan bahwa permodalan dunia usaha sebagian besar diperoleh melalui pinjaman kredit perbankan, namun tentunya tidak dapat diandalkan secara terus menerus sebagai sumber pembiayaan. Untuk itu terdapat alternatif lain bagi perusahaan untuk mendapatkan dana, yaitu melalui pasar modal (*capital market*). Pasar modal merupakan pasar yang berbeda dengan pasar pada umumnya, di dalamnya terjadi jual beli efek jangka panjang berupa obligasi, saham reksa dana dan instrumen derivatif serta instrumen lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana yang mempertemukan pemilik dana dengan perusahaan atau institusi yang memerlukan baik untuk berinvestasi maupun untuk pengembangan usaha.

Keberadaan pasar modal memiliki banyak manfaat bagi ekonomi maupun bagi pemerintah, investor, emiten dan lainnya. Emiten menjadi bagian penting dalam perkembangan pasar modal, dikarenakan dengan adanya eksistensi emiten maka muncul pihak yang akan memberikan pinjaman modal. Modal yang diberikan atau dipinjamkan berupa penawaran surat berharga (efek), untuk dijual dan diperdagangkan. Hal ini dilakukan emiten dengan tujuan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Dalam hal ini, emiten umumnya merupakan perusahaan atau institusi yang membutuhkan dana untuk membiayai kelangsungan usaha ataupun perluasan bisnisnya. Oleh karena itu, pengenalan Pasar Modal beserta manfaatnya kepada dunia usaha akan semakin memperluas dan memperkuat peran Pasar Modal sekaligus

memberikan alternatif permodalan baru bagi dunia usaha dalam upaya membiayai aktivitas produksinya.

Oleh karena itu, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumpulkan para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kehadiran para pengusaha tersebut tidak lain adalah untuk membahas tantangan dunia usaha dan pengembangan pasar modal yang dikemas dalam diskusi CEO Focus 2017.

Berlandaskan hal tersebut, DPN APINDO bekerja sama dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini bahwa CEO Focus 2017 akan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi sinergi dunia usaha dan Pasar Modal Indonesia. Dengan tekad bersama, Pemerintah bersama Pasar Modal serta dunia usaha, akan mampu mendongkakan jumlah investor lokal secara berkualitas yang terlibat di Pasar Modal, terutama ditengah perubahan tatanan dan arah ekonomi nasional dan global yang semakin memiliki tantangannya tersendiri, sehingga kedepannya dapat memberikan kebermanfaatn lebih besar terhadap perkembangan dunia usaha serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

Secara terpisah, Direktur Pengaturan Anggota Bursa Alpino Kianjaya menyatakan bahwa isu perkembangan dunia usaha sangat menarik dan selalu ditunggu oleh emiten tercatat di pasar modal. Perkembangan dunia usaha ini akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam memutuskan strategis bisnis. Perkembangan di pasar modal tidak pernah lepas daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dengan perputaran roda dunia usaha. Hingga saat

ini, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi.

Hadir dalam CEO Focus 2017 tersebut diantaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Putra Irawady, Direktur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Wahyu Widodo, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang, dan Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani.

Diskusi CEO Focus 2017 mengupas tentang arah dan langkah strategis pemerintah dalam membangun dunia usaha. Selain itu, juga dibahas tentang perkembangan ketenagakerjaan khususnya pengupahan dan struktur skala upah. Untuk mendukung keinginan dan harapan tersebut, APINDO juga berharap agar Pasar Modal di Indonesia juga memperoleh perhatian yang semakin besar dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapan ini tentunya dilandasi tujuan agar tingkat literasi dan inklusi di Pasar Modal dapat mencapai sebesar tingkat literasi dan inklusi di industri keuangan lainnya. Harapan lainnya melalui event CEO Focus 2017 adalah agar OJK juga memiliki spirit yang berkesinambungan dalam melakukan diskusi yang kontinyu dengan pelaku pasar untuk memperoleh masukan-masukan mengingat cukup banyaknya pekerjaan rumah di Pasar Modal kita.

Selain harapan di atas, APINDO dan dunia usaha secara umum juga memiliki sejumlah harapan lainnya agar proses sinergi serta target pencapaian inklusi keuangan di Pasar Modal dapat berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Pertama, agar dilakukan review terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga lebih harmonis dengan UU yang terkait dengan Pasar Modal, agar peraturan-peraturan yang ada tetap kondusif untuk mendorong perkembangan Pasar Modal.



Kedua, pelaku usaha yang akan menjadi calon emiten tentunya berasal dari berbagai kelompok skala industri kecil, menengah, dan besar. Oleh karena itu, pengkategorian calon emiten dan emiten tentunya tidak dapat disama-ratakan, dan perlu dikelompokkan ke dalam tiga kategori tersebut. Ketiga, Pasar Modal juga semestinya dapat menjadi pusat keuangan yang menarik agar perusahaan calon emiten berminat untuk masuk ke Pasar Modal. Terakhir, peran Asosiasi di pasar modal harus terus diaktifkan secara berkesinambungan.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan CEO Focus 2017 di Jakarta, APINDO juga menyelenggarakan Seminar yang berlokasi di Banjarmasin dengan tajuk “**Strategi Menjadi Perusahaan Go Publik**”. Adapun yang menjadi pembicara dalam Seminar ini adalah Bapak Saptono Adi Junarso, *Head of Privatization, Start up SME and Foreign Listing* Bursa Efek Indonesia (BEI), Bapak Gunawan Tjokro, Ketua Bidang Pasar Modal DPN APINDO, serta Bapak Isakayoga, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Selain pelaksanaan Seminar tersebut, DPN APINDO juga mengikuti kegiatan

partisipatoris lainnya yaitu undangan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2017 serta keterlibatan APINDO dalam *hearing* pemilihan Dewan Komisiner OJK bersama dengan DPD-RI dan DPR-RI.

Bidang Perbankan

Dalam kegiatan-kegiatan di bidang perbankan, DPN APINDO juga secara kontinyu dan aktif ikut serta dengan menghadiri undangan diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan tema-tema krusial yang berperan penting dalam menopang perkembangan dunia perbankan nasional, diantaranya :

1. Prospek Dunia Usaha 2017.
2. Bersinergi Memperkuat Resiliensi, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi.
3. Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Pasca UU PPKSK.

Selain beberapa kegiatan partisipatoris tersebut, pada bulan September 2017 DPN APINDO yang diwakili oleh Pengurus di Bidang Keuangan dan Perbankan telah berpartisipasi sebagai narasumber dalam *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh BankIndonesia dengan tema “**Macrofinancial Linkages & Recovery**” serta berpartisipasi dalam acara *Indonesia Banking Expo 2017* yang diselenggarakan oleh Perbanas.

Bidang Perpajakan

Untuk Bidang Perpajakan, DPN APINDO selama tahun 2017 telah mengikuti dan menghadiri berbagai undangan, dengan keikutsertaan APINDO sebagai narasumber maupun sebagai peserta, diantaranya :

1. Dialog Amnesti Pajak bersama Dirjen Pajak.



2. *Public Hearing* tentang Perubahan PMK RI mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Kesepakatan Internasional.
3. Pembahasan Permasalahan Penerapan PMK-213/PMK.03/2016.
4. FGD terkait Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengenai Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang menjadi isu utama bidang perpajakan secara nasional yang telah digaungkan sejak tahun 2016, akhirnya dapat ditutup secara resmi pada akhir Maret 2017 lalu dengan pencapaian yang cukup menggembirakan.

Sejak perumusan RUU Pengampunan Pajak hingga pelaksanaan sosialisasinya, DPN APINDO berperan secara aktif bahkan hingga pelaksanaan kegiatan penutupan Program Pengampunan Pajak di akhir Maret 2017 yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

Selain berpartisipasi di dalam pelaksanaan Program, APINDO juga aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan diskusi, seminar, workshop yang berkaitan dengan tema *Tax Amnesty*. Partisipasi aktif APINDO diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan narasumber APINDO di berbagai kegiatan acara, seperti yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia dengan tema “**Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty**” serta gathering yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI bertemakan “**Tax Gathering Pasca Amnesti Pajak Wajib Potensial**”.

Kegiatan Lainnya

Selain berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan yang terkait Pasar Modal, Perbankan, dan Perpajakan, Bidang Keuangan dan Perbankan DPN APINDO juga aktif ikut serta dalam menghadiri berbagai kegiatan lainnya seperti :

1. Undangan Kementerian Keuangan RI untuk acara *Analyst dan Economic Update Meeting* pada bulan Januari 2017.
2. *Stakeholder Gathering* di bulan Maret 2017.
3. Silaturahmi & Diskusi Menteri Keuangan RI dengan para Pemimpin Opini Publik pada bulan Juni 2017.

Selanjutnya, DPN APINDO juga berperan serta dalam memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut dilakukan APINDO melalui kerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam memberikan pemaparan materi dan rekomendasi kepada 26 dosen wirausaha. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi serta meningkatkan kualitas metode mengajar kepada para dosen wirausaha tersebut.

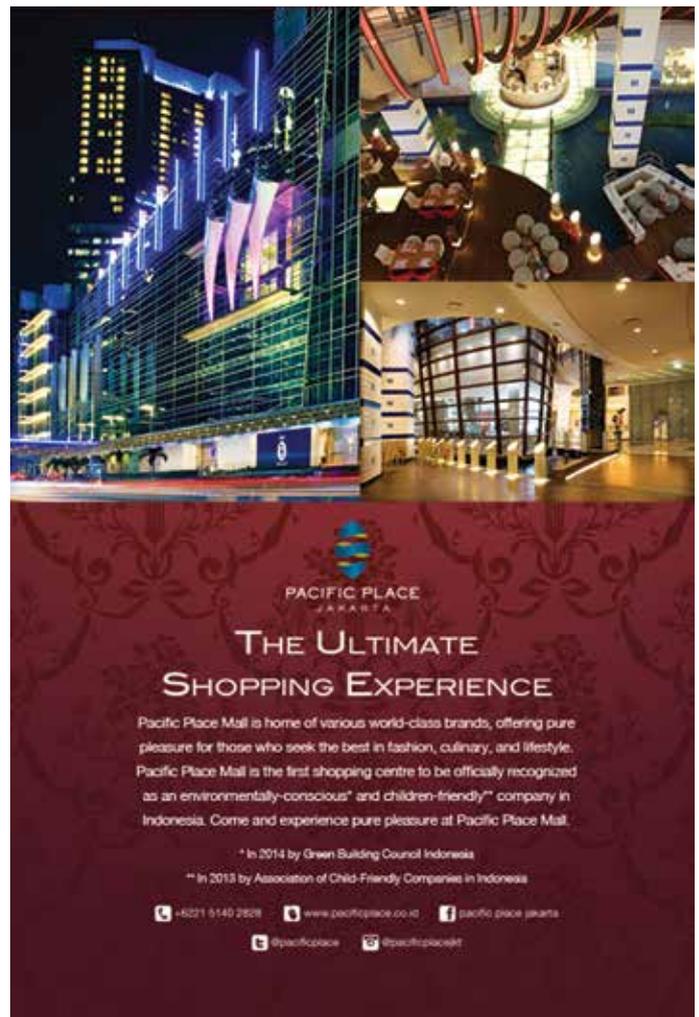
Harapan

Perkembangan dunia keuangan dan perbankan secara nasional maupun global selalu memiliki tingkat kedinamisan yang tinggi, terutama di tengah pesatnya peran digitalisasi di berbagai bidang ekonomi dalam hal ini pengaruhnya yang sangat pesat terhadap perkembangan dunia keuangan dan perbankan nasional. APINDO meyakini bahwa apabila Pemerintah, pelaku industri keuangan dan perbankan, serta para pemangku kepentingan di bidang ini terlambat dalam mengantisipasi berbagai faktor perkembangan tersebut, maka akan sulit bagi sektor keuangan dan perbankan Indonesia untuk berperan secara maksimal dalam menopang pertumbuhan bidang-bidang industri lainnya.

Rekomendasi kebijakan yang aktif digaungkan APINDO terkait Bidang Keuangan dan Perbankan harus didengar para pemangku kepentingan terkait, khususnya Pemerintah (Eksekutif) dan pihak Legislatif, dikarenakan suara saran kebijakan yang disampaikan berkaitan secara langsung dengan implementasi di lapangan oleh para pelaku usaha di bidang keuangan dan perbankan serta sektor-sektor industri terkait lainnya. Sumbang saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh DPN APINDO khususnya menyangkut perumusan regulasi (UU, PP, Permen, dan regulasi sejenis) dilakukan dengan tujuan agar regulasi yang nantinya secara resmi disahkan untuk tidak bersifat menghambat perkembangan sektor keuangan dan perbankan maupun menghambat sektor-sektor industri lainnya yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan peran industri keuangan dan perbankan.

Rekomendasi saran kebijakan DPN APINDO terhadap perumusan regulasi khususnya ditujukan pada perumusan UU di

bidang Perpajakan, yang akan berpengaruh penting terhadap perkembangan iklim berusaha dan berinvestasi di tanah air. DPN APINDO berharap agar kelanjutan perumusan regulasi-regulasi terkait di Bidang Perpajakan, Keuangan dan Perbankan dalam tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik dan cepat sehingga dapat memberikan output UU yang mampu mendukung perkembangan dunia usaha nasional, sekaligus mampu memberikan stabilitas ketahanan fiskal yang berkesinambungan bagi Pemerintah.





**Bidang
Kebijakan Publik**

Di tahun 2017, DPN APINDO membentuk bidang baru yaitu bidang Kebijakan Publik berdasarkan surat keputusan Ketua Umum DPN APINDO nomor: 10/SK-DPN/VI/2016. Pembentukan bidang ini tidak terlepas dari perluasan lingkup aktivitas APINDO yang terlibat di seluruh kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan anggota APINDO. Maka tugas utama bidang ini sangat luas untuk menangani bidang-bidang yang tidak ada struktur kepengurusannya di DPN APINDO. Bidang ini aktif melakukan advokasi kebijakan yang berinteraksi langsung dengan kementerian lembaga terkait dan DPR-RI. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini intensif melibatkan media masa untuk penguatan advokasi kebijakan dunia usaha.

Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan

Bidang kebijakan publik menghasilkan sejumlah masukan kebijakan baik di tingkat undang undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dalam berbagai bidang. Elaborasi di bawah ini untuk menggambarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan langsung ke pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan DPR-RI, serta juga ke berbagai *stakeholder* APINDO lainnya yang relevan dengan permasalahan spesifik kebijakan tersebut.

RUU Persaingan Usaha

Azas dan tujuan UU Persaingan Usaha semestinya bukan menghukum atau mematikan dunia usaha, tetapi menciptakan iklim *fair play* dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi, adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Prinsip persaingan usaha adalah “non diskriminatif” berdasarkan nilai dasar “*equally in opportunity*” (kesetaraan peluang usaha). Advokasi persaingan usaha

melalui UU No. 5/1999 seyogyanya tidak diartikan bahwa hukum pasar merupakan panglima dari kebijakan ekonomi nasional (*competition is not the backbone of the economic policy*) yang mengarah pada sistem liberal yang bertentangan dengan dasar ekonomi Indonesia yang berlandaskan UUD 1945. Prinsip persaingan sehat dilakukan diantara mereka yang setara, maka untuk kepentingan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif pada industri dimana terdapat UMKM dimungkinkan penerapan sistem imunitas melalui regulasi (kebijakan pemerintah).

APINDO menyambut baik rencana DPR untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Azas dan tujuan UU adalah menciptakan iklim *fair play* dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi, adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hukum persaingan usaha akan menjadi instrumen ekonomi yang digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan adil sehingga hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsipnya APINDO mendukung rencana perbaikan perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha, mengingat pada waktu penerbitan UU No. 5/1999 di waktu sebelumnya diperoleh kesan penyusunan yang tergesa-gesa tanpa mencerminkan konten ideologi yang jelas karena bersumber dari kutipan berbagai peraturan serupa di berbagai negara. Namun, APINDO tegas menolak draft revisi UU yang memperluas kewenangan KPPU untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut, dan sekaligus pemutus perkara dalam kewenangan KPPU.

Revisi seyogyanya dilakukan secara komprehensif terutama mengenai substansi, struktur pasal-pasal, masalah kelembagaan KPPU, tentang hukum acara, masalah kewenangan, tentang sanksi dan denda, tentang kode etik dan pengawasan dan muatan-muatan baru yang diperlukan agar kepentingan umum

dapat dikedepankan guna mencapai efisiensi dan kemakmuran rakyat. Revisi UU bukan untuk menambah kewenangan KPPU yang menurut APINDO sudah berlebihan. APINDO akan memastikan agar tidak memberikan kewenangan berlebihan bagi KPPU yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan, pengusutan, dan penindakan / vonis.

Pertanyaan lain yang berkembang (terutama disaat ramainya revisi UU No. 5/1999) adalah apakah hukum persaingan usaha berlaku kepada pelaku usaha kecil dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? UU No. 5/1999 juga telah mengatur secara jelas dalam Pasal 51. Hal ini memberikan hak pengecualian bagi beberapa BUMN yang melakukan kegiatan untuk kepentingan orang banyak atau berada dalam sektor strategis. Perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut tidak boleh berlindung dari gugatan perilaku monopoli dengan menggunakan Pasal 51 tersebut. Dalam amandemen RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini sudah seharusnya menempatkan swasta dan BUMN pada tempat yang sama mewujudkan sistem perekonomian yang sustainable. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan pelat merah berdiri sama tinggi dengan perusahaan lain dan harus berani bersaing dengan perusahaan lainnya. Jadi nasionalisme persaingan usaha bukan semata hanya melindungi kepentingan perusahaan pelat merah. Namun juga harus mencakup dan mengakomodir kepentingan masyarakat luas, baik penyediaan barang ataupun harga barang. Pada akhirnya akan tercipta sistem ekonomi yang tidak merugikan konsumen.

RUU CSR / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Pembahasan RUU CSR / Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan telah masuk ke dalam daftar Prolegnas 2015-2019. Tujuan

Pemerintah merumuskan regulasi terkait CSR adalah memperkuat peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya regulasi tentang CSR ini akan berkontribusi pada penyelesaian berbagai persoalan sosial ekonomi di daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan serta minimnya akses pendidikan dan kesehatan. RUU CSR juga bertujuan untuk memperbaiki praktek CSR di Indonesia yang hingga saat ini dianggap belum efektif dan belum tepat sasaran.

Sehubungan dengan pembahasan RUU CSR itu, APINDO aktif berdiskusi bersama para pelaku usaha dan stakeholders lainnya terkait praktek CSR di Indonesia. Berdasarkan diskusi-diskusi tersebut, APINDO mewakili dunia usaha sepakat untuk menolak draft RUU CSR mengingat pengaruhnya yang bisa menghambat iklim investasi dan berusaha di Indonesia. Aturan RUU CSR berupa kewajiban beban iuran untuk pelaksanaan kegiatan terhadap seluruh jenis perusahaan dinilai tidak sesuai dengan konsep CSR. CSR lahir atas dasar kesadaran tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar di tempat perusahaan beroperasi. Adanya kewajiban iuran dan sanksi yang diatur dalam RUU CSR hanya akan menambah beban pengeluaran perusahaan, terutama ditengah pertumbuhan ekonomi relatif masih berjalan lambat untuk saat sekarang ini.

APINDO menganggap salah satu penyebab tidak efektifnya praktek CSR di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya pemahaman konsep CSR oleh para stakeholders terkait dan terbukti dari munculnya Perda-Perda CSR yang standar acuannya berbeda-beda. Hasil kajian PIRAC menemukan 90 Perda baru tentang CSR telah disahkan hingga 2016. Dari sekian Perda tersebut, mayoritas alokasi dana CSR perusahaan hanya menjadi sumber tambahan pendapatan daerah untuk pengeluaran daerah yang bersifat tidak berkelanjutan. Hal

ini berlawanan dengan tujuan dari konsep CSR sebenarnya yaitu memberikan manfaat yang berlanjut ke depan dan menunjukkan bahwa CSR di Indonesia seakan-akan hanya dipandang sebagai bentuk sumbangan sosial dari perusahaan ke daerah. Dikhawatirkan tambahan regulasi akan menimbulkan moral hazard baru terlebih sulitnya memastikan sumber daya manusia yang bisa mengelola kegiatan CSR di daerah dengan baik dan benar.

Belum optimalnya praktik CSR di Indonesia membutuhkan perhatian seksama dari semua pihak agar manfaat keberlanjutan yang menjadi tujuan dari program CSR bisa dicapai. RUU CSR yang saat ini dibahas oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki praktik CSR agar lebih efektif dan diterima oleh di Indonesia. APINDO memandang RUU CSR tersebut ternyata justru mereduksi konsep CSR yang sebenarnya karena berpotensi menurunkan iklim bisnis di Indonesia. Seharusnya praktik CSR tidak dibatasi dengan kewajiban iuran yang membuat perusahaan enggan terdorong melakukan CSR dan juga malas berinisiatif membuat program CSR yang berorientasi pada keberlanjutan. Sebaliknya, tidak dibatasinya lingkup CSR akan membuat implementasi program CSR bisa sejalan dengan business-line perusahaan sehingga CSR bukan lagi sekadar menjadi “program” tetapi menjadi *business model* perusahaan.

RUU CSR ini mengedepankan pemikiran bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab perusahaan, bukan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka pemikiran delegasi tanggung jawab dari pemerintah kepada perusahaan dalam rangka pengentasan kemiskinan ini keliru secara konseptual. Apindo menolak konsep ini namun menyetujui bahwa perusahaan menjadi aktor kontributor pengentasan kemiskinan melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah dan penciptaan lapangan kerja serta sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan CSR yang ideal adalah CSR yang menyatu dengan aktivitas utama (*core competence*) dari bisnis tersebut. Praktek CSR yang ideal diharap mampu berkontribusi lebih luas untuk pembangunan berkelanjutan yang dipatuhi oleh para pemangku kepentingan. Tanpa adanya pemahaman yang sama atas pentingnya CSR maka CSR hanya akan sekadar sebuah program filantropi atau sekadar sumbangan dana sosial tanpa memberi dampak yang berkelanjutan dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.

RUU Kewirausahaan

Pertanyaan paling mendasar atas RUU Kewirausahaan adalah apakah perlu mengatur iklim kewirausahaan di tingkat undang-undang untuk meningkatkan kewirausahaan di Indonesia. Untuk menumbuhkan jumlah prosentase wirausahawan di Indonesia, prasyarat apa yang perlu diciptakan dan bagaimana pengaturannya apakah memerlukan instrumen aturan hukum setingkat UU ataukah cukup dengan perbaikan iklim investasi mengingat kewirausahaan akan tumbuh jika iklim investasi kondusif. Apindo menilai berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE) yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini sudah mengarah kepada penciptaan iklim investasi yang baik, sampai dengan Paket Kebijakan Ekonomi nomor 16 yang diikuti lahirnya Perpres 91 Tahun 2017.

Dengan dasar pemikiran tersebut, APINDO memberikan catatan kepada DPR-RI dan Pemerintah beberapa hal penting yang diatur dalam RUU Kewirausahaan. **Pertama**, RUU ini lebih untuk menciptakan iklim investasi di level UMKM/IKM yang dinilai relatif belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah saat ini – dengan demikian semangat perbaikan iklim investasi yang diperlukan sebagaimana tujuan paket kebijakan ekonomi diharapkan

juga mendukung pertumbuhan UMKM/IKM. Lebih lanjut RUU ini diharapkan mendorong kemitraan dunia usaha menengah besar dengan UMKM/IKM yang pola-pola kemitraannya sebenarnya juga sudah ada dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain. Diantaranya sebagai contoh yang baik adalah di sektor perkebunan.

Kedua, RUU ini menginisiasi pembentukan sebuah badan atau kelembagaan yang dapat melaksanakan program tersebut. APINDO menyarankan untuk mempertimbangkan secara cermat tentang perlu tidaknya sebuah badan atau kelembagaan harus dilahirkan lagi. Dalam cara pandang dunia usaha, untuk pencapaian hasil atas prioritas kebijakan harus didukung dengan 2 hal yaitu kewenangan dan anggaran. Dalam struktur kementerian yang ada saat ini kementerian koordinator perekonomian yang semestinya mengkoordinasikan semua inisiatif pembinaan kewirausahaan dalam satu program dan satu anggaran, tidak lagi tersebar di berbagai kementerian lembaga yang menjalankannya secara sepotong sepotong. Dengan konsolidasi tersebut diharapkan pembinaan kewirausahaan menjadi lebih terfokus dan lebih menjamin potensi keberhasilannya.

Ketiga, RUU ini bermaksud mendorong/menginjeksi jiwa kewirausahaan ke dalam pendidikan formal. Dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa kali perubahan kurikulum pendidikan, sayangnya tidak ada satu pun yang mencakup tentang materi kewirausahaan bagi sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Sebaiknya DPR cukup meminta Kementerian Riset dan Dikti serta Kemendiknas untuk memasukkan materi kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap mental dan keterampilan berwirausaha. Kurikulum pendidikan vokasi saat ini juga perlu penguatan untuk pemagangan agar lulusannya memiliki ketrampilan yang diperlukan dunia usaha.

Keempat, Infrastruktur kewirausahaan dalam batang tubuh RUU mengatur tentang sistem informasi kewirausahaan. APINDO juga mencermati bahwa isi pasal-pasal dalam hal ini masih menganut pola administratif yang konservatif, yaitu perijinan usaha – yang menempatkan warga negara sebagai pemohon perijinan usaha, sebaliknya menempatkan aparatur sebagai pihak yang lebih kuasa sebagai pemberi ijin berusaha. APINDO menyarankan sebaiknya mengubah paradigma permohonan perijinan menjadi lebih bersifat pemberitahuan atau notifikasi sebagaimana telah diadopsi dalam Perpres 91/2017 dalam Paket Kebijakan Ekonomi 16. Dengan sudut pandang ini nantinya, pelaku usaha kecil cukup memberikan notifikasi kepada Dinas / PTSP di Kabupaten / Kota setempat tentang permulaan pembukaan usahanya, sehingga aparatur pemerintah yang kemudian bertugas memberikan pelayanan yang datang ke alamat pelaku usaha kecil untuk memberikan layanan advokasi dan layanan perijinan ditempat, sehingga pengusaha kecil tidak perlu melakukan proses permohonan perizinan.

Kelima, Dalam hal pengaturan tentang pemberdayaan kewirausahaan, khususnya pemikiran tentang zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan daerah. APINDO memandang bahwa dengan era *borderless* saat ini sudah tidak saatnya lagi berpikir mengenai kawasan-kawasan zonasi untuk pertumbuhan iklim investasi. Contoh daerah Bantul yang terkenal dengan industri tembikar, namun kemudian di daerah-daerah lain pun muncul industri serupa. Ketika Pemerintah mencoba masuk ke dalam satu pengaturan yang era nya sudah sangat terbuka *borderless*, akan menjadi suatu hambatan besar karena Pemerintah justru akan kebingungan dalam mengidentifikasi keunikan UMKM / IKM yang akan diatur.

Keenam, pemikiran tentang kemitraan harus didasarkan kepada mekanisme yang memberikan mutual benefit diantara perusahaan berskala menengah-besar dengan

UMKM / IKM. Selama ini praktek yang berjalan cukup baik adalah mekanisme sistem plasma inti di perkebunan. Meski terdapat beberapa kelemahan, namun dapat menjadi suatu barometer model kemitraan yang baik, seperti misalnya di industri sawit dan industri tembakau.

Terakhir, dalam hal pengaturan mengenai sanksi, APINDO menilai tidak ada kaitannya upaya pengembangan kemitraan dengan sanksi. Jika yang dimaksudkan sanksi berupa denda finansial yang sangat besar bahkan sanksi pidana dikaitkan dengan kemitraan tentu tidak tepat dan akan menjadi kontra produktif karena sifatnya bukan lagi mengajak tapi memaksa dan mengancam.

Sebagai catatan penutup, APINDO ingin menyampaikan bahwa dunia usaha selama ini sudah dibebani dengan rimba peraturan yang sangat complicated sehingga menghambat kinerja optimal untuk memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. APINDO mengharapkan beban tersebut tidak ditambah dengan pengaturan pengaturan baru yang akan kontraproduktif. Sebaiknya fokus negara adalah untuk peningkatan daya saing perekonomian Indonesia diantaranya dengan secara konsisten mengimplementasikan paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah mulai menghasilkan perbaikan iklim usaha di Indonesia. Dengan semakin kompetitifnya perekonomian Indonesia, diyakini akan menciptakan wirausaha wirausaha baru sebagaimana terjadi di negara-negara tetangga.

RPP Jaminan Produk Halal

Berdasar UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dipersyaratkan untuk melahirkan PP sebagai instrumen pelaksana UU ini. Apindo secara intens menjalankan advokasi terhadap keberadaan UU yang sudah terlanjur dilahirkan ini.

UU Jaminan Produk Halal ini adalah satu-satunya di dunia yang memaksa semua produk yang diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi di Indonesia wajib bersertifikat halal. UU ini memiliki definisi yang amat sangat terlaluluas, misalnya bahwa UU mendefinisikan produk adalah barang dan jasa yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya, produk-produk konsumsi yang tidak terkait dengan makanan dan minuman juga wajib bersertifikat halal. Termasuk juga jasa, seperti tukang cukur, sopir, profesi apapun akan wajib bersertifikasi halal.

Adapun yang menjadi masalah serius adalah prinsip mandatory atau kewajiban mengajukan sertifikat halal terhadap semua produk dengan segala kategorinya. Termasuk didalamnya adalah proses memproduksi produk itu, bahan-bahan produksi termasuk dalam negeri dan impor, dan penyajiannya. Prinsip *mandatory* ini mengubah proses serifikasi halal yang selama ini dikenal dilakukan oleh MUI yang berbasis pada pilihan.

UU mengamanatkan agar proses permohonan sertifikat halal ini tidak gratis dan tidak juga difasilitasi oleh negara, artinya semua jenis usaha dan profesi di Indonesia dengan biayanya sendiri wajib mengajukan permohonan sertifikat halal. UU juga mengamanatkan adanya proses sertifikasi yang diulang setiap 4 (empat) tahun sekali. Dunia usaha dalam setiap levelnya akan keberatan baik dari segi biaya yang dikenal mahal dan potensial untuk menimbulkan pungli-pungli masif dan diskriminasi terhadap pelaku usaha jenis tertentu, karena adanya amanat bahwa produk yang tidak bersertifikasi akan diberi label non halal atau haram.

Biaya-biaya yang dibayarkan pada proses permohonan sertifikasi dan proses pemeriksaan halal ini tidak langsung masuk sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) namun akan dikelola oleh BPJPH sebagai BLU (Badan Layanan Umum) untuk mendanai kegiatan operasi badan itu sendiri.

Berbagai asosiasi bisnis dari luar negeri juga merasa resah dengan lahirnya UU ini, karena pertimbangan bahwa UU ini akan menghambat iklim investasi dan membuat kekacauan perdagangan Indonesia dengan luar negeri, karena adanya kewajiban pemeriksaan halal terhadap produk-produk yang diimpor ke Indonesia.

APINDO masih terus berupaya agar meskipun terdapat PP nantinya tetap disusun agar ramah iklim investasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PERPRES tentang Online Single Submission Perijinan Usaha

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hambatan realisasi investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 22 September 2017 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 (Perpres 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengakhiri proses penerbitan izin usaha yang berbelit-belit, lama, dan *overlapping* di Indonesia dengan dibentuknya *Task Force* percepatan pelaksanaan berusaha yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan dengan menciptakan mekanisme penerbitan izin usaha satu pintu yang disebut dengan sistem *Online Single Submission*. Sistem *Single Submission* ini akan menjadi satu-satunya pintu penerbitan izin usaha di Indonesia dari ijin pertanahan, ijin usaha hingga ijin perdagangan.

Urgensi kebutuhan untuk memperlancar proses realisasi investasi di Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melaksanakan mandat Perpres 91/2017. Akhir tahun 2017 ini, Pemerintah RI harus sudah menyelesaikan seluruh infrastruktur institutional yang diperlukan untuk menjalankan mekanisme *Single Submission*. Per 1 Januari 2018, mekanisme *Single Submission* ini akan diujicobakan

kepada pelaku usaha Indonesia dan akan mulai mempengaruhi perusahaan-perusahaan dan investor yang berinvestasi di Indonesia. Sistem *Single Submission* akan diimplementasikan sepenuhnya pada akhir Maret 2018 dan sistem ini akan mempengaruhi proses bisnis di seluruh Indonesia, khususnya perusahaan yang beroperasi di KEK, SEZ, FTZ, Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Sistem *Single Submission* tidak akan hanya berdampak pada kegiatan investasi tetapi juga terhadap aktifitas usaha lain seperti aktifitas perdagangan perusahaan dan bahkan terhadap pengenaan retribusi kepada perusahaan.

Mengingat banyaknya prosedur perijinan yang tidak konsisten, tidak efisien dan *overlapping* di Indonesia antar satu kementerian dengan kementerian yang lain dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Perpres 91/2017 membawa harapan kepada pelaku usaha Indonesia agar proses usaha di Indonesia dapat menjadi lebih efisien bagi perusahaan. Pelaku usaha pada dasarnya berharap agar peraturan ini dapat membuat proses perijinan menjadi jauh lebih sederhana, transparan, jelas, cepat, dapat dilacak, dan lebih *service oriented* sehingga membuat perusahaan Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam kompetisi pasar dunia. *Task Force* dan sistem *Single Submission* dapat menciptakan koordinasi dan konsistensi yang lebih baik antar lembaga pemerintah, khususnya antara pusat dan daerah, dalam penerbitan ijin usaha di Indonesia sehingga tercipta kepastian berusaha yang jauh lebih baik.

Namun demikian, pembentukan mekanisme dan pelaksanaan mekanisme merupakan dua hal yang berbeda. Di Indonesia khususnya, sering terdapat perbedaan antara rencana dan implementasi, terlebih untuk memastikan bahwa mekanisme yang baru ini dapat sungguh-sungguh bermanfaat bagi pelaku usaha Indonesia sebagaimana yang diperlukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan banyak klarifikasi terkait

bagaimana mekanisme ini akan bekerja. Sejauh mana mekanisme *Single Submission* ini dapat memfasilitasi hambatan perijinan yang dianggap menyulitkan oleh pelaku usaha, bagaimana koordinasi antar lembaga pemerintah akan berlangsung, kepada siapa pelaku usaha dapat berkonsultasi apabila mereka menghadapi kendala dalam hal perijinan melalui mekanisme ini.

PERMEN LHK tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri/PerMen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dikeluarkan tahun lalu dengan isi pokok perubahan areal tanaman pokok (bahan baku industri) menjadi fungsi lindung ekosistem gambut setelah satu kali panen hasil. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, diperkirakan akan mengurangi 60% s/d 65% lahan yang digunakan perusahaan sebagai sumber bahan baku produksi dan berpotensi membatasi kegiatan produksi perusahaan – yang akan berimbas langsung pada tenaga kerja di wilayah tersebut.

Hilangnya potensi produksi kelapa sawit dan kayu HTI akibat berkurangnya areal tanaman pokok di fungsi budidaya yang berubah menjadi fungsi lindung di lahan gambut, tercatat seluas 780.000 ha lahan HTI dan 1.020.000 ha lahan sawit. Khusus terkait lahan sawit, terdapat potensi hilangnya ekspor kelapa sawit hingga 13% karena lahan yang ada harus dikembalikan menjadi fungsi lindung. Dan dikhawatirkan dampak terhadap lingkungan dimana areal yang tidak diusahakan akan rentan menjadi sasaran perambahan liar ataupun kerusakan lahan gambut.

APINDO dan Asosiasi-Asosiasi terkait telah mencermati beberapa potensi penurunan / kehilangan pertumbuhan usaha kehutanan dan perkebunan akibat tidak adanya aktivitas ekstenfisikasi. Dan kemudian berimbas

terhadap hilangnya potensi pendapatan negara baik pusat maupun daerah, masyarakat dan investasi usaha (usaha besar, menengah dan kecil), termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada UMKM di sekitar area produksi. Hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat tersebut terutama berimbas terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada industri pulp / kertas dan perkebunan.

Selain itu, terancamnya pengembalian nilai investasi dari industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan perkebunan yang dibiayai oleh pinjaman dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kredit macet.

Secara teknis, APINDO dan Asosiasi menilai PerMen LHK No. P.17/2017 mengenai perubahan areal tanaman pokok (bahan baku industri) menjadi fungsi lindung ekosistem gambut setelah satu kali panen hasil akan mengakibatkan perusahaan mereduksi jumlah lahan tempat operasionalnya di wilayah lahan gambut yang merupakan sumber bahan baku produksi. Implementasi PerMen LHK No. 17/2017 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2016 tersebut akan menyebabkan berkurangnya lahan yang berdampak terhadap pengurangan kegiatan produksi sehingga berimbas langsung pada pengurangan tenaga kerja (PHK).

Sebagai Asosiasi yang merepresentasikan dunia usaha Indonesia secara khusus di bidang Ketenagakerjaan, APINDO telah memperoleh berbagai masukan dari perusahaan-perusahaan anggota APINDO dan juga Asosiasi-Asosiasi terkait seperti GAPKI, APKI, APHI, APKINDO, ASMINDO, APKASINDO, ASPEKPIR. Dari berbagai masukan dan informasi data yang APINDO peroleh, jumlah pekerja yang akan berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sekitar 20.700 pekerja dari sektor perkebunan pada 60% lahan yang berkurang akibat

peraturan ini. Diperkirakan jumlah pekerja yang terimbas akan jauh lebih besar mengingat banyaknya perusahaan turunan (dalam rantai pasok) di sektor usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PERMENDAG tentang Lelang Gula Kristal Rafinasi

Tata niaga GKR (Gula Kristal Rafinasi) yang saat ini melalui mekanisme business to business akan diubah menjadi sistem lelang yang dimediasi oleh perusahaan swasta dengan diterbitkannya Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2017. Implementasi Permendag tersebut awalnya direncanakan mulai dilaksanakan Juni 2017 namun diundur ke tanggal 15 Januari 2018 karena penolakan para pelaku usaha langsung maupun asosiasi pengusaha.



Diskusi Publik 'Lelang Gula Kristal Rafinasi' dengan Pakar Ekonomi Faisal Basri, Pelaku Usaha, dan Tim Peneliti UGM yang dipimpin Tony Prasetyantono untuk mendapatkan masukan.

APINDO melakukan advokasi untuk pembatalan permendag tersebut karena dinilai akan menimbulkan high cost economy yang tidak perlu terjadi. Advokasi dilakukan ke berbagai pihak berdasarkan sejumlah pertimbangan yang diperkuat dengan kajian akademis yang dilakukan oleh hasil studi yang dilakukan Tim Peneliti UGM (Universitas Gadjah Mada) dan Tim Peneliti Leadership Park yang menggunakan pendekatan RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan Analisa Substansi Regulasi, sebagai berikut:

Pertama, tujuan lain dari Permendag untuk mengatasi rembesan GKR yang seharusnya hanya untuk industri namun dipasarkan ke konsumen rumah tangga tidak akan tercapai selama masih adanya dualisme penawaran dan pasar gula (PTPN-PT.Perkebunan Nusantara yang menghasilkan GKP-Gula Kristal Putih untuk konsumsi Rumah Tangga dan Pabrik Gula Modern yang menghasilkan GKR untuk konsumsi Industri). Kedua, Permendag ini mengenakan pungutan bukan untuk pemasukan negara (PNBP) tetapi sebagai *transaction fee* (biaya transaksi) oleh perusahaan swasta penyelenggara. Ketiga, Permendag ini akan menciptakan bad *corporate governance* dalam bentuk praktek pelimpahan kewenangan strategik Pemerintah kepada swasta secara monopoli. Keempat, Permendag ini merupakan *short cut regulation* (regulasi jalan pintas) yang hanya berorientasi hilir daripada hulu sehingga negara akan terus menerus terjebak dalam masalah yang sama.

Dari aspek sinergi kebijakan, Permendag tersebut mengabaikan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu: Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pada intinya adalah upaya pencegahan perilaku KKN; UU No. 5 Tahun 1999 untuk menciptakan iklim persaingan usaha sehat dan bebas dari monopoli; UU No.12 Tahun 2011 yang pada intinya adalah amanat perumusan peraturan perundang-undangan yang baik; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan dimana kewenangan pembinaan dan pengembangan pasar komoditas harus diatur berdasarkan Peraturan Presiden, bukan berdasarkan Peraturan Menteri.

Mengingat hal-hal tersebut APINDO merekomendasikan hal-hal berikut :

- 1) Pembatalan Permendag No 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Lelang Komoditas Pasar Gula Kristal Rafinasi bukan penundaan implementasinya, karena bertentangan dengan tujuan penerbitannya, dan bahkan menciptakan ekonomi biaya tinggi;
- 2) Dalam jangka pendek untuk mengatasi rembesan diperlukan koordinasi pengawasan dan penegakan hukum;
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan membantu IKM untuk mendapatkan legalitas usahanya agar tidak dikriminalisasi oleh aparat ketika membeli GK;
- 4) Dalam jangka panjang, menghilangkan dualisme penawaran dan pasar gula GKR dan GKP selain untuk mendapatkan harga yang kompetitif, juga secara fundamental menghilangkan adanya rembesan;
- 5) Dari sisi hulu industri gula, diperlukan peningkatan produktivitas dan rendemen tebu agar menarik minat petani untuk menanam tebu disertai dengan sistem pembayaran ke petani yang adil atas kerjasamanya dengan pabrik gula; dan
- 6) Dalam jangka panjang diperlukan revitalisasi PT. Perkebunan Nusantara diantaranya melalui mekanisme *public private partnership* dengan pabrik gula modern atau pihak swasta lainnya.

PERMENDAG tentang Ketentuan Impor Tembakau dan RUU Pertembakauan

Investasi IHT (Industri Hasil Tembakau) juga mengalami masalah serius dengan lahirnya Permendag nomor 84 tahun 2017 Tentang

Ketentuan Impor Tembakau. Permendag ini mengatur tentang pembatasan impor tembakau jenis Virginia, Burley, dan Oriental. Padahal ketiga jenis tembakau ini dibutuhkan industri rokok, sedangkan hasil pertanian tembakau dalam negeri belum mencukupi. IHT merasa keberatan dengan Permendag ini karena masalah *supply* dan *demand* yang tidak sebanding sehingga memang masih memerlukan impor tembakau.

Apindo menghadiri berbagai kegiatan diskusi publik dan diskusi terbatas dalam berbagai kesempatan untuk menyuarakan *concern* tentang ini. Pemikiran utama yang berkembang dalam berbagai diskusi adalah produksi tembakau di dalam negeri saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan industri rokok nasional. Sehingga jika larangan importasi itu benar-benar dilakukan akan mengakibatkan surutnya industri hasil tembakau. Padahal, negara memerlukan cukai tembakau dalam kontribusinya pada APBN nasional yang masih sangat signifikan.

Kemenko Perekonomian akhirnya mengeluarkan instruksi agar Permendag ini dibatalkan. Namun, pada tahun 2017 dan tahun 2018 DPR RI memasukkan RUU Pertembakauan dalam Prolegnas. Polemik pertembakauan dan investasi IHT masih akan menghadapi tantangan atau peluang dengan adanya RUU ini. APINDO masih memberikan atensi khusus terhadap ini.

PERMENDAG dan RUU tentang Larangan Minuman Mengandung Ethil Alkohol

Dalam prolegnas 2017 dan 2018 DPR RI memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Rancangan beleid ini tampak menindaklanjuti Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, dimana pada intinya Pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol kurang dari lima persen) di mini market dan

toko pengecer. Namun, pada kenyataannya minuman mengandung alkohol golongan A tidak boleh dijual di toko-toko resmi malahan justru meningkatkan peredaran minol oplosan yang dikonsumsi anak-anak di bawah umur yang malahan membeli minuman oplosan di warung jamu, warung kelontong, dan perantara.

APINDO menyayangkan penyusunan sebuah kebijakan publik tanpa menggunakan basis data yang kuat. Jika basis data salah maka akan menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai. Permendag dan RUU ini mencampuradukan masalah sosial dan masalah pertumbuhan ekonomi. Banyaknya korban jatuh akibat minuman oplosan adalah bukan karena adanya penjualan atau produksi minuman alkohol. Maka pola pemikiran sebaiknya adalah mengatur peredaran dan membatasi konsumsi pada anak dibawah umur, sehingga mengedepankan pola konsumsi alkohol secara bertanggung jawab adalah yang terbaik daripada melarangnya sama sekali yang pada ujungnya malah menimbulkan praktek perdagangan gelap yang membuat korban.

Pembahasan RUU Minol di DPR terdiri atas 4 (empat) klaster, yaitu larangan total terhadap minol seperti di Aceh; larangan dengan pengecualian; larangan tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan; dan tidak perlu ada larangan melainkan cukup dengan pengendalian atau pengaturan. Menurut DPR pengaturan minol dalam RUU ini adalah sebagai payung hukum. Sebab, ada Perda dan Pergub di masing-masing daerah yang berbeda dalam menyikapinya. Tetapi kesimpulannya, ada pengaruh negatif minol di masyarakat, baik kesehatan maupun kriminalitas, sehingga perlu dicari titik temu dari pengaruh negatif tersebut. APINDO berpendapat bahwa RUU ini perlu menjamin kepastian hukum, meskipun dilakukan dalam upaya meminimalisasi jatuhnya korban dari minuman yang diproduksi dan dijual secara tidak bertanggung jawab.

INPRES 7/2017 tentang tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan

APINDO berpendapat bahwa salah satu hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia adalah munculnya berbagai regulasi yang mengganggu visi dan misi Presiden RI. Kendala utamanya terletak pada proses perumusan regulasi tersebut, yaitu termasuk rendahnya akurasi data, minimnya keterlibatan *stakeholders*, sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga, serta mengabaikan analisa dampak regulasi.

Keempat hal tersebut mengakibatkan guncangan serius pada dunia usaha, terkaget kaget dengan munculnya regulasi secara tiba-tiba. Akibatnya para pengusaha bersikap *wait and see*, tanpa tergerak untuk melakukan reinvestasi usaha.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, APINDO berulang kali menyuarakan kendala-kendala ini dan menyodorkan usulan solusi, yaitu memunculkan regulasi setingkat perintah Presiden agar memperkuat kewenangan koordinatif Menkoo Perekonomian. Usulan ini disetujui dan akhirnya Presiden menerbitkan Inpres No 7 Tahun 2017 tersebut.

Pada intinya, Inpres ini menegaskan, bahwa sebelum penyusunan dan penetapan kebijakan, Menteri dan Kepala Lembaga agar berkoordinasi lebih erat secara sistematis dengan Kemenko Perekonomian agar terdapat sinergisitas rancangan kebijakan. Inpres ini juga mewajibkan setiap Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan: analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko; dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum menerbitkan kebijakan.

Pada prinsipnya, Inpres ini selain mewajibkan koordinasi, juga menggunakan

pendekatan RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan pelibatan *stakeholder* secara lebih sistematis. Tujuannya adalah adanya koordinasi sinergis kebijakan, ukuran dampak dan pelibatan pemangku kepentingan. Inpres ini juga mengatur agar Menteri Koordinator mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna, atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Judicial Review di MK atas UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

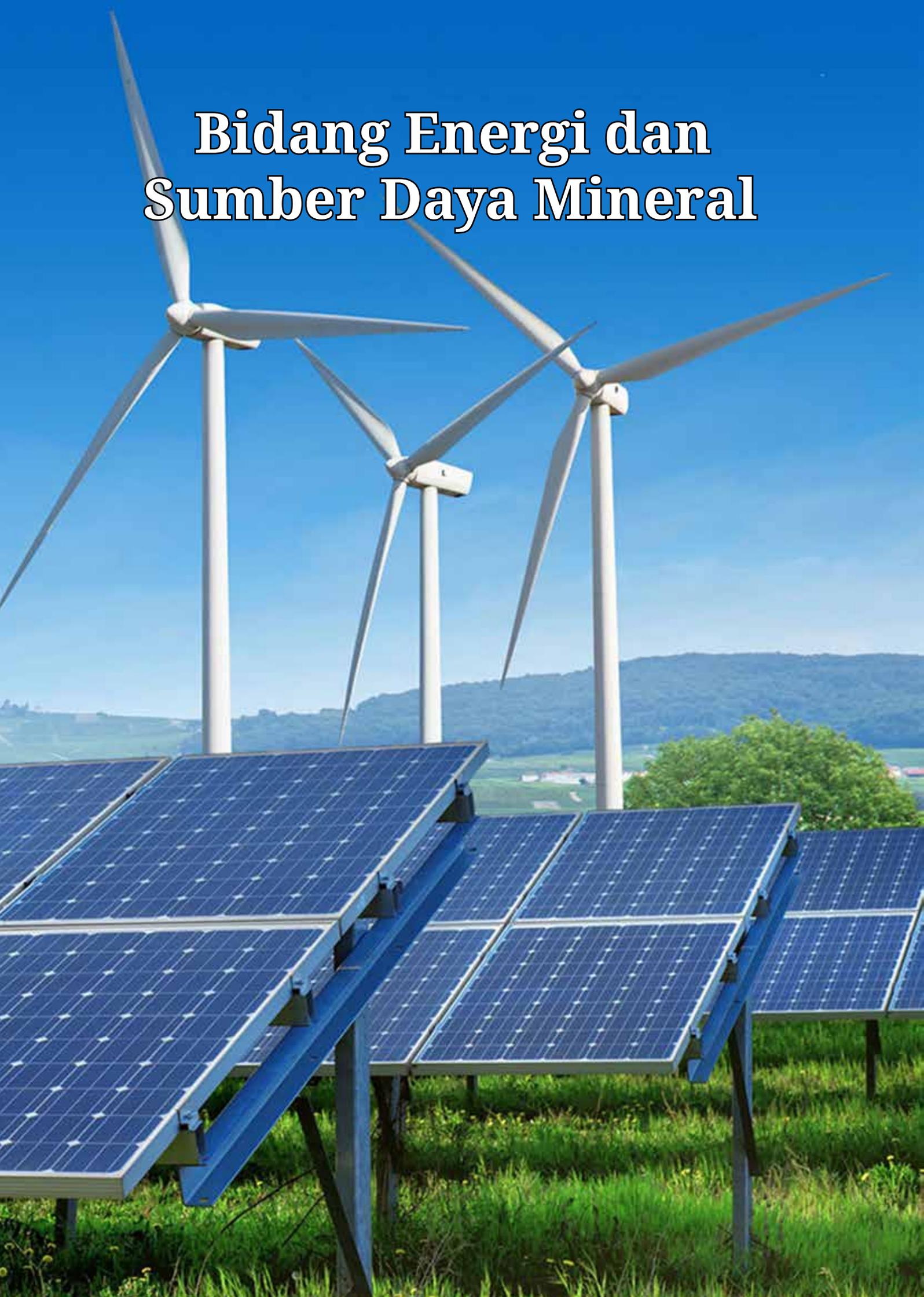
Menjelang akhir tahun 2017 DPN APINDO mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sumbernya dihasilkan sendiri oleh perusahaan.

Pada dasarnya perusahaan bersedia untuk membayar PPJ yang sumber listriknya dari PLN, namun berkeberatan untuk membayar PPJ yang sumber listriknya dari perusahaan sendiri seperti power plant atau genset. Pertimbangan utama adalah bahwa sebenarnya perusahaan lebih memilih untuk menggunakan listrik yang bersumber dari PLN namun karena keterbatasan PLN yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha maka perusahaan melakukan investasi untuk membangun power plant atau menggunakan genset, yang berbiaya lebih tinggi dibandingkan listrik dari PLN.

Persidangan sudah berlangsung beberapa tahap termasuk sudah diajukan Kesimpulan oleh kuasa hukum APINDO. Saat ini sedang menunggu hasil musyawarah Majelis Hakim untuk menentukan amar putusan terhadap perkara tersebut yang terdaftar pada Nomor Registrasi perkara 80/PUU-XV/2017.



Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral





DPN APINDO melakukan perubahan mendasar kepengurusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam struktur kepengurusan DPN APINDO pada bulan Mei tahun 2016 dengan surat keputusan Ketua Umum DPN APINDO nomor : 006/SK-DPN/VI/2016. Perubahan mendasar tersebut didasari pertimbangan semakin pentingnya sektor ESDM dalam tatanan ekonomi nasional dan kebutuhan anggota untuk menyuarakan kepentingan sektor ESDM dari perspektif pengusaha. Dalam menjalankan tugasnya dibentuk struktur organisasi yang terbagi dalam 4 sub-bidang : Minyak & Gas (Migas), Mineral & Batubara (Minerba), Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan.

Sepanjang tahun 2017 bidang ESDM melakukan beberapa aktivitas berupa: penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi dan konsultasi dengan kementerian ESDM, dan members gathering pembahasan hal-hal krusial bidang ESDM. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut, pengurus bidang ESDM melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas berbagai kebijakan pemerintah terkait ESDM.

Pandangan APINDO

Perspektif APINDO dalam bidang ESDM didasari pemikiran bahwa untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi, ketersediaan energi dan sumber daya mineral menjadi prasyarat yang mutlak dan tidak lagi hanya sekedar masalah ketersediaan komoditas, tetapi juga merupakan kunci roda ekonomi Nasional dari efek berganda yang dihasilkannya. Seiring dengan industrialisasi ekonomi Nasional, Ketahanan energi berbanding lurus dengan ketahanan ekonomi dan oleh karenanya ketahanan Nasional. Oleh karenanya ketahanan energi yang mencakup ketersediaan dan keterjangkauan baik secara distribusi maupun harga harus diprioritaskan.

Dewan Energi Nasional melalui Outlook Energi Indonesia 2015 memperkirakan secara kumulatif Indonesia akan membutuhkan investasi di bidang energi sebesar US\$ 382 milyar atau hampir 5 ribu triliun Rupiah selama periode 2015-2025. Nilai fantastis ini hampir setara tiga kali penerimaan Negara di dalam APBN-P 2016. Maka menurut APINDO, ketahanan energi Nasional membutuhkan partisipasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sayangnya, saat ini iklim investasi Indonesia khususnya terkait energi masih kurang kompetitif. Dokumen World Bank bertajuk “*Doing Business 2015*” melaporkan bahwa untuk memperoleh pasokan listrik di Indonesia, pengusaha harus melalui 5 prosedur, 90 hari kerja dengan biaya lebih dari 350% dari pendapatan per kapita, jauh kalah kompetitif dibandingkan Malaysia apalagi Singapura.

Hal yang sama ditemui di sektor minyak dan gas (migas). Produksi migas Indonesia terus menurun walaupun konsumsi Nasional terus meningkat, sehingga semakin tergantung pada impor. Turunnya produksi migas akibat semakin kurangnya minat investor untuk melakukan eksplorasi karena dianggap tidak sepadan antara resiko yang harus ditanggung dengan potensi pengembalian modal. Indonesia memiliki salah satu pembagian hasil migas yang paling tidak menarik di dunia karena porsi pemerintah yang sangat tinggi (bisa mencapai 70-80%), padahal seluruh resiko dan modal ditanggung investor. Sistem yang lahir di saat masih mudah mencari migas di Indonesia kini perlu disesuaikan dengan kondisi teknis migas yang relatif semakin sulit.

Di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), yang kita semua harapkan menjadi tumpuan masa depan juga masih terseok karena masih kurangnya investor yang mau bergerak di bidang ini. Pada kenyataannya porsi EBT dalam bauran energi Nasional masih jauh dibawah 10%. Permasalahan



kurang menariknya investasi di bidang energi ini direspon pemerintah dengan upaya untuk memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih kompetitif seperti wacana insentif untuk sektor migas dan feed-in tariff untuk EBT.

Namun, pelaku usaha sulit memberikan justifikasi investasi apabila kebijakan selalu berganti jika terjadi pergantian pejabat, apalagi investasi di sektor ESDM berumur puluhan tahun. Kebijakan pemerintah saat investasi awal dilakukan bisa jadi bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah saat aset sedang beroperasi 5 -10 tahun kemudian.



Di negara-negara lain yang sukses mengamankan investasi sektor energi mereka, tampak jelas bahwa terdapat konsistensi implementasi jangka panjang terhadap kebijakan energi mereka. Sektor energi dikelola secara berkesinambungan bebas dari kepentingan politik temporer. Kebijakan dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan ketahanan energi nasional dan tingkat kepastian serta pengembalian modal investor – bukan untuk mengakomodasi kelompok-

kelompok pencari rente, meskipun atas nama “nasionalisme”. Hampir tidak pernah dijumpai kegaduhan yang membuat investor yang justru kompeten malah hengkang. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaras dalam mendukung proyek-proyek energi dari mulai pembebasan lahan sampai proses perizinan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan latar belakang persoalan dan pemikiran di atas, APINDO merekomendasikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya energi dan mineral berikut. Pertama, kelangsungan usaha dan pembangunan nasional sangat membutuhkan sumber daya energi sebagai penggerak semua sektor dan sumber daya mineral sebagai bahan baku industri. Kedua, keamanan pasokan dan keterjangkauan biaya sumber daya energi dan mineral berdampak langsung terhadap kelangsungan serta daya saing ekonomi Nasional. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Nasional yang pesat membutuhkan investasi dan inovasi untuk peningkatan pasokan energi dan sumber daya mineral yang berkesinambungan. Keempat, investasi dan inovasi membutuhkan persaingan sehat berbasis kompetensi dan bebas dari kepentingan politik. Terakhir, efek berganda dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral perlu direncanakan secara lintas sektoral.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman APINDO dalam menyikapi prioritas isu berikut. *Gross split* sebagai jenis kontrak kerjasama baru pada umumnya merupakan langkah inovatif yg sangat baik mengingat kondisi industri hulu saat ini sangat berbeda dgn 50 tahun lalu sehingga memerlukan jenis kerjasama alternatif. Kuncinya adalah alternatif sehingga investor tidak semata-mata dipaksakan hanya menerima *gross split*. Idealnya investor diberi pilihan antara psc konvensional/sekarang



atau *gross split* sehingga investor dapat memilih sesuai keinginannya. Juga dengan demikian secara berangsur pemerintah bisa menyesuaikan keinginan investor sehingga pada akhirnya kontrak *gross split* melalui penyesuaian menjadi yg terbaik dipandang dari semua pihak. Harus disadari bahwa kemungkinan *gross split* tidak melulu tepat untuk semua jenis aset migas yg ditawarkan pemerintah sehingga kata alternatif kembali menjadi kunci dan apabila pemerintah ingin iklim investasi di industri hulu membaik maka perlu dipikirkan insentif lain yang bisa ditawarkan kepada investor yang memilih jenis kontrak konvensional/sekarang.

Asas cabotage untuk menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia dalam pengangkutan komoditas memiliki tujuan jangka panjang yang baik. Namun mengingat kurang dari 10% kapal nasional yang siap mengangkut komoditas menyebabkan tidak efisiennya biaya logistik. Untuk komoditas penyumbang devisa nasional seperti batubara dan sawit harus menanggung biaya tinggi yang tidak kompetitif dengan menggunakan kapal kapal nasional.

Di sektor energi terbarukan (EBT) menghadapi masalah batas tarif EBT yang ditetapkan maksimal 85% dari biaya pokok energi. Regulasi tersebut menyebabkan puluhan hingga ratusan proyek perusahaan termasuk sektor *geothermal* terancam gagal. APINDO mengharapkan agar pemerintah memberikan dukungan positif pada sektor energi terbarukan sesuai keputusan Presiden yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dengan membuat aturan yang lebih ramah dan mendorong ekspansi energi terbarukan. Aturan yang memberatkan perusahaan ini berdampak pada stagnannya kegiatan operasional perusahaan padahal beban seperti gaji pekerja dan lain-lain tetap berjalan.

Dalam hal kelistrikan, target pencapaian 35.000 MW memerlukan sinergi kuat dari 3 (tiga) pihak yaitu Kementerian ESDM, PLN dan

Swasta dalam mewujudkan rencana tersebut. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik harus segera diimplmentasikan, transmisi yang memadai baik dari segi kapasitas dan jangkauannya yang harus segera dibangun dengan mempercepat tender-tender.

Persoalan divestasi bidang mineral dan batubara yang diwajibkan dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak beroperasi sangat memberatkan. Mengingat industri Tambang adalah industri padat modal dan memiliki masa *Break Event Point* yang sangat lama, dan pada tahun ke 5 industri tambang masih belum memperoleh keuntungan, sehingga sangat sulit untuk melakukan divestasi pada tahun ke 5 sampai dengan tahun ke 10. Menurut APINDO perlu penjadwalan kembali tentang waktu divestasi untuk mencari harga saham yang fair. Dalam hal penentuan harga saham APINDO menyarankan mediasi independent appraisal. Mengenai divestasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme IPO.



Di bidang fiskal, tambang mengkhawatirkan rancangan RPP PNBPN yang mengharuskan pemegang IUPK sebagai



syarat bagi KK/PKP2B untuk ekspor dan sebagai perpanjangan kontrak. APINDO menyarankan kembali ke PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba. Masih mengenai fiskal, Perdirjen Pajak No.47/PJ/2015 yang mengenakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk industri tambang tidak tepat. APINDO merekomendasikan penghapusan perdirjen tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan UU yang mengatur PBB.

Members Gathering

Selain melakukan diskusi terbatas, bidang ESDM APINDO juga mengadakan forum publik untuk mendengarkan *update* informasi-informasi terbaru sekaligus berdiskusi mengenai topik-topik aktual ESDM. Diskusi diikuti perusahaan anggota APINDO dengan menghadirkan nara sumber dari pemerintah, ahli/praktisi dan pemain-pemain besar ESDM.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dibahas dalam *members gathering* APINDO yang dihadiri pelaku industri ESDM maupun pengguna produk ESDM. Nara sumber dari Dewan Energi Nasional, CEO perusahaan migas besar, institut / lembaga kajian bidang ESDM dari dalam dan luar negeri. Menurut sektor swasta RUEN merupakan salah satu *most comprehensive planning* yang pernah dibuat oleh pemerintah. Asumsinya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhannya, daya tariknya bagi pengusaha, bagaimana swasta bisa berpartisipasi dalam proses pemenuhan energi ini. Jika RUEN dilaksanakan siapa pelakunya, apakah campuran antara *private* dengan BUMN, apakah BUMN yang akan mendominasi? Hal itu yang jelas. Jika ada peluang yang cukup besar tentunya perusahaan ingin berpartisipasi.



Mengenai opsi untuk diberikan ke swasta dengan target yang agresif, mulai dari penyediaan migas dan berbagai metodenya, sudah dibahas berulang kali namun pada kenyataannya produksi turun terus. Harusnya swasta dalam jumlah besar berpartisipasi dengan *regulatory framework* yang mendukung.

Hubungan Industrial Sektor Pertambangan dibahas dalam *members gathering* APINDO mengingat banyaknya persoalan ketenagakerjaan di sektor tambang. Dengan adanya pergeseran industri padat karya menjadi padat modal di berbagai sektor, permasalahan ketenagakerjaan menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan di Indonesia.

Tren otomatisasi industri merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, yang menyebabkan perusahaan melakukan kebijakan restrukturisasi yang berdampak pada efisiensi tenaga kerja. Ketika eksekusi program efisiensi terbentur pada ketidaksepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja terkait hak dan kewajiban, konflik hubungan industrial pun tidak terhindarkan, yang pada umumnya dipicu oleh masalah pemutusan hubungan kerja, pemogokan, pesangon, dan sebagainya.



Perselisihan hubungan industrial terutama terjadi di sektor industri pertambangan yang pada umumnya sangat padat modal, yang dirasakan oleh pihak industri mulai mempengaruhi iklim bisnis. Dengan kian meningkatnya kekuatan dan peranan serikat pekerja, gerakan yang mengatasnamakan kepentingan serikat pekerja dipandang sebagai tindakan yang sah menurut hukum dan hak asasi, dengan mengabaikan pertimbangan dari sisi legalitas. Misinterpretasi isu ini khususnya terjadi di media massa, yang dalam laporan jurnalistiknya cenderung memosisikan serikat pekerja di pihak yang benar karena kurangnya pemahaman atas regulasi yang mengatur hubungan industrial, terutama hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Fenomena inilah yang kemudian menjadi kendala dalam mempertahankan stabilitas investasi di Indonesia, terutama di sektor-sektor padat modal, seperti industri pertambangan.

Atas latar belakang tersebut, serta mempertimbangkan maraknya perselisihan hubungan industrial yang terjadi akhir-akhir ini di sektor padat modal, Dewan Pengurus Nasional APINDO memandang perlu untuk menyelenggarakan diskusi dan tukar pikiran antara anggota dan praktisi hukum terkait isu ini. APINDO Workshop akan diselenggarakan dalam rangka *members gathering* rutin APINDO, dan ditujukan untuk mempertajam pemahaman anggota tentang peraturan perundangan dan regulasi yang mengatur hubungan industrial di Indonesia, permasalahan hubungan industrial yang terjadi di sektor padat modal, serta menciptakan dialog terkait solusi bagi permasalahan hubungan industrial. Acara ini juga akan dihadiri oleh media, guna memberikan edukasi bagi jurnalis tentang perspektif industri dalam berbagai perselisihan hubungan industrial di sektor pertambangan yang terjadi akhir-akhir ini sehingga dapat memberikan pemahaman

yang memadai untuk penulisan berita di masa depan.

Prioritas Isu 2018

Meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan Kementerian ESDM. Perubahan organisasi (pergantian personel) di lingkup kementerian ESDM sangat dinamis dan relatif cepat. Dengan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan perbaikan iklim investasi melalui perbaikan regulasi/kebijakan memerlukan perhatian besar dari asosiasi industri.

Pemerintah dalam hal ini Presiden mengharapkan agar peringkat *ease of doing business* Indonesia meningkat ke urutan 40 di tahun 2019. Untuk itu upaya *streamlining/deregulation* menjadi salah satu fokus pemerintah. Oleh karena itu APINDO akan menghimpun masukan dari berbagai sektor mengenai regulasi yang perlu diperbaiki untuk kemudian dikomunikasikan ke pemerintah dalam hal ini Satgas Percepatan Investasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Hubungan yang sudah terjalin cukup baik dengan kementerian ESDM, diantaranya yang ditandai dengan diterimanya pengurus APINDO oleh Menteri ESDM untuk pembahasan hal-hal utama yang perlu mendapatkan perhatian, akan menjadi modal dasar untuk hubungan kelembagaan yang lebih baik antara APINDO dan kementerian ESDM.

Bidang Kajian



Departemen Kajian memiliki beberapa fungsi utama dalam menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program kerja Departemen Kajian sekaligus memberikan laporan output kerja serta analisis berdasarkan beberapa bidang yang menjadi fokus aktivitas Sekretariat APINDO.

Fokus utama bidang analisis dan pelaporan yang dilakukan Departemen Kajian untuk dapat dilaksanakan secara lebih fokus yaitu Hubungan Industrial / Ketenagakerjaan, Investasi dan Perdagangan, serta Industri Sektoral dan Lintas Sektor. Data, informasi, dan output analisis yang disediakan Departemen Kajian disampaikan dalam format yang akurat dan tepat waktu demi tersedianya landasan untuk Sekretariat dan Pengurus dalam mengambil keputusan jangka pendek, menengah dan panjang yang diperuntukkan bagi stakeholder internal maupun eksternal DPN APINDO. Fungsi Departemen Kajian tergambar dalam program kerja yang telah dilakukan di sepanjang 2017, sebagai bagian unit dalam Sekretariat DPN APINDO yang melakukan asistensi terhadap interpretasi isu-isu perkembangan perekonomian yang menjadi fokus utama DPN APINDO, selain sebagai pemberi saran dan rekomendasi, dan juga sekaligus sebagai unit yang membantu stakeholder APINDO dalam pemecahan masalah melalui kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan.

PROGRAM KERJA

Rencana kerja tahunan (2017) Departemen Kajian dilandasi kebutuhan untuk mengaktualisasikan Visi dan Misi APINDO yang telah ditetapkan dan dijadikan landasan pedoman aktivitas kerja Sekretariat. Pelaksanaan program-program kerja Departemen Kajian direalisasikan sebagai berikut :

- *Monitoring*, pencatatan dan kompilasi resume terhadap informasi dan data dari berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah (publik) yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perdagangan, investasi, energi, dan industri. Aktivitas ini berperan dalam menunjang penyusunan analisa dan sejenisnya terkait perkembangan isu-isu terbaru.
 - Pembuatan Makalah Kebijakan / Analisa (*Policy Analysis / Paper*) serta Memorandum Kebijakan (*Policy Memo / Brief*) dengan latar belakang kajian yang terspesifikasi dalam bidang ekonomi c.q. ekonomi ketenagakerjaan, kebijakan publik, serta regulasi, yang juga diperlengkapi dengan penyusunan Stand Point APINDO terkait bidang-bidang kerja yang dianalisis.
 - Penyusunan dan penyiapan kerangka acuan (*Terms of Reference*) sebagai landasan topik/tema bagi pelaksanaan kegiatan *CEO Gathering* oleh Sekretariat DPN APINDO dengan asistensi dari Departemen Kajian.
 - Pengkayaan Wawasan melalui Training, Workshop, Seminar, dan lain sebagainya – dalam hal ini terkait dengan Penyusunan Analisis Kebijakan. Program penunjang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan SDM Departemen Kajian, termasuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemantapan analisa tim agar mampu melaksanakan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tepat dari sisi pelaku usaha. Pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam program ini akan dikaitkan dengan upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas dan wawasan anggota Tim Kajian.
- Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program dan pengembangan di sepanjang tahun 2017, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu output program kerja menjadi keharusan. Demi tercapainya akuntabilitas pelaksanaan program dan pengembangan di

lingkup internal Departemen Kajian, maka kegiatan monitoring dan evaluasi melalui rapat pembahasan dijadikan sebagai wahana kontrol dan pengendalian program yang dilakukan secara kontinyu.

OUTREACH : PUBLIKASI & POLICY SERIES

Departemen Kajian dibentuk dengan tujuan dan fungsi khusus dalam perannya sebagai wadah *think tank* organisasi, melalui keikutsertaan di berbagai sarana diskusi *workshop* dan forum publik, selain peran di dalam bidang-bidang fokus utama sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dan rekomendasi APINDO terhadap kebijakan publik sehingga bermanfaat bagi dunia usaha secara keseluruhan. Peran Departemen Kajian diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah melalui penyediaan dan penyusunan Posisi APINDO dalam bentuk Stand Point, penyusunan menyusun *Policy Memo* dan *Policy Paper* yang berfungsi menyediakan konten terkini terkait dengan kepentingan dunia usaha sebagai partner pemerintahan. Sepanjang 2017 Departemen Kajian telah berperan menjadi sumber beberapa Publikasi APINDO, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Factsheet

Informasi dan data terkini merupakan salah satu kebutuhan utama bagi Sekretariat APINDO maupun bagi anggotanya sebagai salah satu dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menopang keberlanjutan dan ekspansi dunia usaha. Informasi dan rangkaian data-data tersebut disajikan dalam bentuk ringkas yang menggambarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi makro maupun mikro di beberapa bidang,

seperti industri, perdagangan, konsumsi, serta indikator-indikator utama lainnya di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Penyampaian informasi dan data dalam bentuk *Fact Sheet* yang disajikan juga berfungsi menjadi materi *press release* APINDO dalam format *online* sehingga informasi dan data terkini terkait dengan perkembangan dunia usaha dapat tersampaikan.

Fact Sheet APINDO yang disajikan tersedia dalam format data, tabel, grafik, statement resmi pejabat Pemerintah / publik, dalam tampilan yang sebanyak satu s/d dua halaman. Sumber-sumber data dalam *Fact Sheet* APINDO terutama berasal dari rilis resmi data-data Kantor Kepresidenan, Kementerian-Kementerian terkait, Bappenas, BPS, Organisasi-Organisasi Internasional (World Bank, IMF, OECD, ADB, ILO, dan lain-lain). Sepanjang 2017 telah diterbitkan dua puluh tiga *Fact Sheet*.

2. Stand Point & Policy Series APINDO

APINDO mengapresiasi inisiatif berbagai pihak, terutama Pemerintah (Kementerian terkait) dan Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI dalam pengajuan maupun perumusan legislasi dan kebijakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan eksistensi dan aktivitas dunia usaha. Namun, berbagai legislasi (UU, PP, Perpres, Kepmen, Permen, dll) yang terkait aktivitas dunia usaha seringkali belum mampu memenuhi dan mengakomodir kebutuhan riil dunia usaha di beberapa sektor. Oleh karena itu, sebagai salah satu *stakeholders* sekaligus sebagai mitra Pemerintah dalam penyusunan kebijakan, APINDO merumuskan hal-hal yang menjadi kebutuhan riil dunia usaha, demi mensukseskan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui penyusunan berbagai Posisi APINDO di bidang-bidang terkait.

APINDO dalam mandatnya sebagai asosiasi

pengusaha senantiasa mendukung kebijakan pemerintah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Sepanjang 2017, APINDO telah menyatakan pendirian dan advokasinya dalam bentuk penyampaian Posisi APINDO di beberapa hal / bidang utama yang menjadi *concern* dunia usaha sepanjang tahun 2017, yang sebagian diantaranya merupakan penguatan Posisi APINDO di 2016 yang belum dapat dicerna dan dipahami Pemerintah secara utuh. Penegasan dan penyampaian Posisi APINDO tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* DPN APINDO, baik internal maupun eksternal, khususnya terhadap Pemerintah melalui advokasi kebijakan.

Beberapa *stand-points* dalam narasi pendek maupun yang lebih elaboratif berupa rekomendasi kebijakan sebagian diuraikan dibawah ini, dan bagian lainnya dilaporkan dalam bidang 'kebijakan publik'.

2.1 Posisi APINDO Untuk Isu-Isu Labour Day (May day)

Indonesia setiap tahunnya aktif menjadi peserta dan turut berpartisipasi dalam perumusan konvensi ILO. Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi ILO dalam bentuk peraturan maupun perundang-undangan. Namun tugas tidak berhenti sampai disitu, beberapa isu terkait masalah pekerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia karena permasalahan di dunia tenaga kerja yang kompleks. Terlebih hingga saat ini UU 13/2003 sebagai acuan regulasi ketenagakerjaan tidak dapat menjawab permasalahan di dunia usaha dan tenaga kerja yang semakin kompleks.

Seiring perubahan jaman yang terjadi maka teknologi juga berubah, termasuk di dalam kegiatan produksi, dalam bentuk keberadaan sistem otomatis seperti robot dan mesin-mesin canggih lainnya yang semakin umum digunakan. Akan tetapi, negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai bagian

dari ASEAN cenderung lebih bertindak sebagai adaptor yang aktif sebagai pengguna dan kurang aktif sebagai inovator teknologi. Selain itu mayoritas industri di Indonesia merupakan padat karya (*labor intensive*). Oleh karenanya, perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Terkait perkembangan isu buruh, berdasarkan data Kemenaker RI, terjadi penurunan jumlah buruh yang bergabung dalam serikat. Beberapa tahun lalu jumlah buruh yang berserikat mencapai sekitar 4,3 juta. Tahun 2017 turun menjadi sekitar 2,7 juta. Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribu-an, turun menjadi sekitar 7 ribu-an. Sementara pada saat yang sama, jumlah federasi dan konfederasi serikat buruh terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi dalam gerakan buruh. Banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi buruh dalam serikat dan berkurangnya jumlah serikat buruh dalam perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh yang akhirnya malah mendemoralisasi buruh itu sendiri.

Mengenai BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan yang diurus oleh BPJS Kesehatan juga mendapat tantangan besar dari sistem pembiayaan. Hasil studi analisis kesehatan publik (Budi Hidayat, 2016) menunjukkan bahwa kemungkinan besar *fraud* bisa terjadi pada rekam jejak medis yang saat ini masih berada di lokasi yang berbeda, yaitu kantor BPJS Kesehatan sendiri dan rumah sakit. Perbedaan lokasi inilah yang beresiko pada potensi terjadinya *fraud* berupa klaim palsu di administrasi rumah sakit, tidak efisiennya biaya jasa dan dana kontribusi obat yang tidak terukur. Oleh karena itu, kedepannya sangat dibutuhkan perhatian besar dari internal dan dukungan semua pihak untuk mengatasi masalah-masalah yang masih terjadi tersebut.

Terkait BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini masih mengalami kendala berupa belum tercapainya target kepesertaan dari kalangan pekerja, masih kurangnya strategi

dan pengembangan yang bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan; terbatasnya tenaga sumber daya manusia yang bisa berinisiasi dari level jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dan masih terbatasnya perencanaan dari sistem manajerial di internal BPJS Ketenagakerjaan.

2.2 Posisi APINDO Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Alat Angkut Berat

Sejak tahun 2002 selalu terjadi perselisihan antara Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi) dengan pengusaha pengguna / pemilik alat-alat berat sektor pertambangan, sektor jasa pertambangan dan sektor kehutanan terkait UU PDRD No. 28/2009 yang menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap Perda-Perda karena alat berat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor.

Persoalan alat berat yang dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ini setidaknya telah 3 kali diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perkara No. 15/PUU-XV/2017 (UU PDRD) amar putusan MK yang menyatakan bahwa alat-alat berat bukan masuk sebagai obyek PKB sesuai dengan harapan dunia usaha mengingat alat-alat berat adalah bagian dari faktor produksi, bukan sarana transportasi. Namun demikian eksekusi putusan MK tersebut oleh Pemerintah dan Pemda beragam karena putusan MK diluar amar putusannya menyatakan masa transisi 3 tahun sambil menunggu revisi UU PDRD.

APINDO merekomendasikan revisi UU No. 28/2009 tentang PDRD dengan menghapus alat berat dan alat besar sebagai kendaraan bermotor dimana alat berat dibebaskan dari pemungutan PKB dan BBNKB. Juga, agar dilakukan revisi terhadap UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menghapus kata alat berat termasuk kendaraan khusus dalam kategori kendaraan bermotor.

2.3 Posisi APINDO Terhadap UU Ketenagakerjaan dan Pengupahan

Dengan tetap mengapresiasi perbaikan regulasi ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan melalui PP No. 78/2015, APINDO melihat secara keseluruhan, aturan ketenagakerjaan Indonesia masih menjadi salah satu yang paling kaku di kawasan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kewajiban biaya pesangon yang sangat tinggi dan tumpang tindih dengan skema BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam hubungan industrial tidak hanya berkaitan dengan biaya pesangon, namun berbagai hal lain yang juga menuntut penyesuaian agar sejalan dengan perkembangan yang ada. Hal itu antara lain terkait aturan jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, penyelesaian hubungan industrial, regulasi terkait pekerja alih daya, serta berbagai regulasi hubungan industrial lainnya.

Perbaikan kualitas hubungan industrial melalui penggantian UU 13/2003 diarahkan untuk menjadikan pengusaha kompetitif untuk pengembangan bisnisnya sehingga menambah penyerapan tenaga kerja, bagi pekerja untuk jaminan kelangsungan pekerjaan, dan pencari kerja agar mendapatkan kemudahan mendapatkan pekerjaan. Selain sinkronisasi dengan UU Jaminan Sosial, pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru harus dilakukan satu kesatuan paket dengan UU Serikat Pekerja (SP/SB) dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Penggantian UU yang telah diwacanakan bertahun tahun ini perlu kepemimpinan langsung Presiden yang dapat menjamin keberhasilannya mengingat persoalannya yang rumit lintas sektoral sekaligus memiliki aspek politis yang sangat besar.

Selain kebutuhan mutlak terhadap penggantian payung hukum UU Ketenagakerjaan, terdapat empat aspek lainnya yang juga menjadi fokus APINDO di 2018 yang berkaitan erat dengan perbaikan regulasi-regulasi di bidang hubungan industrial, diantaranya

upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), perijinan tenaga kerja, serta pendidikan vokasi dan pemagangan. Untuk mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini memiliki level pendidikan yang rendah, dan sangat membutuhkan industri padat karya untuk menampung mereka. Agar tidak membebani daya saing maka sektor industri padat karya dengan pendidikan pekerja yang rendah di sektor garmen, sepatu, furnitur dan mainan anak perlu mendapatkan prioritas untuk mengurangi beban atas kebijakan ketenagakerjaan.

2.4 Posisi APINDO Terhadap Program Pemagangan

Pasar Tenaga Kerja Indonesia memiliki tantangannya tersendiri, dengan adanya 17,0% pengangguran usia muda per September 2014, yang lebih besar dibandingkan angka rerata 14,9% (*OECD Employment Outlook 2014*). Selain itu, rilis ADB pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa terdapat 60% skills mismatch antara output pendidikan dengan kebutuhan industri.

Secara definisi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 36/2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Perbedaan pandangan tentang pemagangan terjadi diantara pengusaha dan pekerja. Pengusaha memandang Program Pemagangan diperlukan untuk menciptakan pekerja yang berketerampilan, disisi lain para pekerja yang diwakili Serikat Pekerja menilainya

hanya sebagai kesempatan pengusaha untuk mendapatkan buruh dengan upah murah. APINDO dalam hal ini mendukung Program Pemagangan, yang merupakan program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis pekerja, memenuhi kebutuhan perusahaan akan pekerja berketerampilan, dan menstimulasi penciptaan inovasi dari pekerja / pemagangan.

Relasi antara perusahaan dan peserta magang dalam hal ini adalah sebagai pemberi keterampilan dan penerima keterampilan, bukan pemberi upah dan penerima upah. Kompensasi yang peserta magang dapatkan bukan berupa upah sehingga pengaturannya tidak terkait dengan Upah Minimum, yang berhak mereka dapatkan adalah uang saku (meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif pemagangan), jaminan kecelakaan kerja & kematian, dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam hal regulasi pemagangan, APINDO menilai bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 36/2016 mesti direvisi dengan memperbolehkan peserta magang untuk mengikuti pengaturan waktu produksi perusahaan berdasarkan *shift* agar dapat secara menyeluruh mengalami magang dalam proses riil industri.

2.5 Posisi APINDO Terhadap Penataan Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dan Penghapusan PERDA Bermasalah

Pengawasan kebijakan daerah mendapat tantangan besar pasca keputusan MK di tahun 2017 yang menganulir kewenangan Pemerintah / Kemendagri (*executive review*) untuk membatalkan Perda sehingga pembatalan perda hanya bisa dilakukan melalui mekanisme *judicative review* oleh Mahkamah Agung (MA) dan *legislative review* oleh DPRD-Pemda yang bersangkutan. Keputusan tersebut akan menjadi faktor penghambat program Penataan Investasi Pemerintah Secara Terpadu.

Pasca putusan MK tersebut, Kemendagri harus menggunakan kewenangan preventifnya

untuk mengkaji Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) secara utuh dan menyeluruh sebelum kemudian memperoleh persetujuan dan pengesahan agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan investasi yang telah dikeluarkan Pusat.

Dari sisi reformasi pelayanan birokrasi, reformasi perijinan usaha di tingkat pusat seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) semestinya juga dilakukan di tingkat daerah yang memiliki kewenangan penerbitan berbagai perijinan usaha dasar untuk melakukan usaha. Hampir semua Kabupaten / Kota telah memiliki PTSP namun belum banyak berfungsi sebagaimana diharapkan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap model dan kinerja PTSP di daerah. Harus diakui beberapa Pemda telah memiliki arah positif dengan membenahi Perda dan membenahan kelembagaan, namun masih banyak daerah yang belum memiliki semangat serupa untuk mendukung geliat investasi dan perbaikan iklim usaha. APINDO meminta agar Pusat dan Daerah bersama-sama memperbaiki dan menyempurnakan kondisi tersebut secepatnya di tahun 2018 ini. APINDO juga meminta agar Pusat mengajak dan mengikutsertakan Pemda, sehingga proses reformasi di daerah berjalan sejalan dan seiring. Pusat perlu memberi dukungan serius dalam pengembangan ekonomi daerah agar Pemda mampu melayani dan merawat investasi di daerahnya. Tanpa dukungan Pemda, investasi tidak dapat direalisasikan mengingat ijin-ijin dasar untuk realisasi investasi (ijin lokasi, IMB, SIUP, TDP dan HO) merupakan kewenangan Kabupaten / Kota.

APINDO mengharapkan implementasi Perpres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Pedoman Pelaksananya mampu mensinergikan perijinan usaha antara pemerintah pusat dan daerah.

2.6 Posisi APINDO Terhadap Reformasi Perpajakan

APINDO mengapresiasi implementasi dan pencapaian program amnesti pajak 2017. Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan. Pajak yang ada di Indonesia saat ini hanya dilihat sebagai sebuah fungsi anggaran / penerimaan pemerintah, dan bukan sebagai fungsi stimulus untuk menggerakkan ekonomi lebih besar lagi. Penyesuaian tarif pajak yang lebih rendah diyakini akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Dengan demikian, melalui *high compliance* dan aktivitas ekonomi yang semakin besar diyakini akan memberikan pemasukan pajak yang lebih besar kepada negara. Sudah saatnya membahas opsi perubahan sistem PPN (*value added tax*) menjadi *sales tax*.

Pasca pelaksanaan Program Amnesti Pajak, APINDO merekomendasikan agar reformasi perpajakan di Indonesia diarahkan menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, dan yang benar-benar mensupport pertumbuhan ekonomi Indonesia. APINDO ingin melihat reformasi perpajakan yang dilakukan agar diarahkan menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, dan yang benar-benar mensupport pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus menghindari tumpang tindih pengaturan diantara UU Amnesti Pajak dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juga, Pemerintah mesti mengevaluasi besaran tarif PPh Badan serta tarif PPN.

Sebagai perbandingan, Singapura menyesuaikan tarif PPh Badan sebesar 17%. Penurunan tarif PPh juga sedang dibahas di negara lain, seperti di US dari 35% menjadi 15% s/d 20%. Oleh karenanya APINDO berpandangan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serupa terhadap tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20%, sehingga dunia usaha Indonesia semakin berdaya saing. Seperti halnya di dalam

proses penyusunan UU Pengampunan Pajak, APINDO juga meminta agar dilibatkan dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta mengenai pengadilan pajak. Diharapkan proses revisi dan perampungan ketiga UU terkait perpajakan tersebut agar dapat segera terselesaikan di awal 2018. Bila Pemerintah mengalami kesulitan di dalam mengandalkan revisi ketiga UU di bidang perpajakan tersebut, APINDO merekomendasikan agar Kemenkeu RI berinovasi lebih lanjut melalui instrumen PP atau Permen. Revisi terhadap tiga UU di bidang perpajakan itu juga agar diikuti perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pajak untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak.

2.7 Penyampaian Concern APINDO Dalam Audiensi dengan Presiden RI

APINDO selalu berupaya berkontribusi terhadap keberlangsungan dunia usaha serta ekonomi Indonesia seperti yang telah dicanangkan Presiden dan jajaran Pemerintah. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap upaya-upaya Presiden dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam kesempatan Audiensi dengan Presiden Republik Indonesia di 2017, APINDO membahas sejumlah persoalan krusial bagi dunia usaha di tengah perkembangan ekonomi global dan nasional s/d pertengahan tahun 2017. Dalam Audiensi tersebut, APINDO menyampaikan poin-poin pembicaraan yang sebagian diantaranya merupakan persoalan krusial dan penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membahas dan memberikan solusi-solusi melalui masukan-masukan yang disampaikan APINDO dalam Audiensi tersebut.

Adapun poin-poin pembicaraan Audiensi yang disampaikan APINDO kepada Presiden RI diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Ekonomi Makro global, regional dan nasional, khususnya terkait dengan :
 - Pencapaian Investasi (PMA dan PMDN).
 - Perkembangan Industri Manufaktur dan Industri secara keseluruhan, yang dicermati dari tren indeks maupun dari indikator penjualan (sales).
 - Pemulihan perkembangan indikator PDB nasional beserta proyeksi kedepan dalam jangka pendek dan jangka menengah.
 - Pasar Ketenagakerjaan nasional, terutama terkait daya serap angkatan kerja domestik oleh sektor-sektor industri, serta perkembangan Tenaga Kerja Asing (TKA)
2. Realisasi pencapaian sasaran dari Paket-Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid 1 s/d Jilid 15 beserta tantangan pencapaian target PKE kedepannya yang belum terselesaikan.
3. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan dunia usaha, diantaranya :
 - UU Persaingan Usaha.
 - UU Jaminan Produk Halal.
 - RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
 - UU Tapera.
 - UU Perpajakan (PPh dan PPN).
 - UU di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) terkait Lahan Gambut.
4. Otonomi Daerah :
 - Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah.
 - RUU Perubahan terhadap UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. *Skills Development* dalam bentuk Pendidikan Vokasi dan Pemagangan. APINDO mendukung Program Pemagangan yang

merupakan program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis pekerja, memenuhi kebutuhan perusahaan akan pekerja berketerampilan, dan menstimulir penciptaan inovasi pekerja / pemegang.

6. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA*) antara Indonesia dengan berbagai negara maupun dengan kawasan perekonomian lainnya, terutama Indonesia–Australia CEPA (IA–CEPA) dan Indonesia–EU CEPA.

Melalui Audiensi dengan Presiden, DPN APINDO telah memenuhi komitmennya untuk mendukung langkah dan upaya Pemerintah demi terlaksananya dan terciptanya kemajuan bangsa dan negara, melalui penyampaian masukan dan rekomendasi secara detil dan langsung dari para pengurus APINDO yang ikut serta dalam acara Audiensi dengan Presiden tersebut.

3. Publikasi Lainnya

3.1 Survei “Kondisi Dunia Usaha 2017”

Pada Semester II 2017, DPN APINDO mengadakan Survei Kondisi Dunia Usaha 2017 untuk mengetahui kondisi bisnis terkini di tengah geliat pemulihan ekonomi yang terus berlangsung. Responden survei terdiri dari 87,5% industri besar dan 7,5% industri sedang serta selebihnya industri kecil. Perusahaan yang mengikuti survei berasal dari berbagai sektor antara lain industri pengolahan, konglomerasi, perkebunan kelapa sawit, manufaktur, otomotif, jasa dan keuangan, farmasi, hotel, industri padat karya seperti garmen dan tekstil, perdagangan (*retail, supplier, consumer goods, distributor, dll*), energi dan migas, industri makanan dan minuman, logistik, dan lain sebagainya. Perusahaan yang mengikuti survei mayoritas berasal dari area Jabodetabek, serta perusahaan dengan cabang anak perusahaan

yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pengumpulan hasil survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara online yang diisi langsung oleh responden.

Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi penurunan kegiatan usaha. Kontraksi pada bisnis ditandai dengan menurunnya permintaan dalam negeri dan pasar luar negeri. Dibanding permintaan domestik, penurunan permintaan luar negeri sedikit lebih besar dibanding penurunan permintaan domestik (62,5% > 60,0%). Selain itu, tekanan biaya produksi menjadi salah satu tantangan bisnis yang dihadapi berbagai perusahaan (sebanyak 82,5% pelaku usaha menyatakan terjadi kenaikan biaya produksi dibandingkan 2016). Perubahan biaya produksi terbesar berasal dari biaya tenaga kerja (80% pernyataan pelaku usaha dari hasil survei menganggap biaya tenaga kerja yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam biaya produksi).

Di sisi lain, persepsi pelaku usaha terhadap bisnis di masa depan masih memperlihatkan optimisme. Sebanyak 57,5% pelaku usaha memperkirakan terjadi kenaikan jumlah permintaan output perusahaan dalam satu tahun ke depan, 25% menyatakan pesimismenya dengan menyatakan bahwa tidak terjadi kenaikan permintaan *output*, dan 17,5% selebihnya menyatakan ragu-ragu. Kelompok responden yang optimis tersebut menyatakan bahwa sebanyak 60,6% mengklaim pertumbuhan kenaikan output ada di kisaran 5% s/d 20% dibandingkan permintaan saat ini. Sementara 36,4% lainnya menganggap kenaikan permintaan *output* mendatang hanya akan kurang dari 5% dibanding kondisi permintaan saat ini.

Survei Kondisi Dunia Usaha 2017 juga merangkum pendapat para pelaku usaha terhadap Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2014 hingga 2017. Dari hasil survei, 45% responden pelaku usaha menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan dari PKE sudah baik dan 2,5% menyatakan sangat baik. Beberapa

indikator yang menjadi alasan pelaku usaha menganggap PKE baik antara lain keberhasilan Tax Amnesty, kebijakan yang mendorong penguatan konsumsi domestik, izin impor yg mudah, daya beli kendaraan yang meningkat, logistik yang makin efisien, revitalisasi mesin yang meningkat, diskon listrik industri dan pemangkasan birokrasi perizinan, serta kebijakan transaksi dengan mata uang Rupiah.

Di samping respon positif yang diberikan, pelaku usaha juga mengungkapkan masih ada kelemahan dalam beberapa kebijakan PKE sehingga perlu adanya perbaikan, seperti kurangnya sinergi dengan daerah, perlu percepatan pada industri hulu, pengawasan yang harus adil dan jelas, peningkatan produksi melalui penurunan harga gas alam yang belum dilakukan sehingga daya saing migas masih rendah, pengurangan pajak yang akan lebih baik jika dikenakan juga untuk investor asing dan izin prosedur yang bisa lebih disederhanakan lagi.

Dari hasil survei dunia usaha tercatat sebanyak 35% pelaku usaha belum merasakan dampak berarti dari PKE. Pengusaha yang menyatakan PKE belum terasa memiliki beragam alasan seperti : belum ada kebijakan yang berkaitan langsung dengan sektor industrinya, merasa tidak berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan kebijakan yang belum menyentuh sektor UKM di Indonesia. Selain itu 10% lainnya tidak tahu dan menyatakan *no comment*. Sementara 7,5% menyatakan kurang baik karena terdapat kebijakan yang kontraproduktif dan juga merasa pemerintah kurang mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha.

3.2 Outlook Ekonomi 2018 APINDO

Gambaran terakhir dari beberapa proyeksi APINDO maupun dari organisasi-organisasi domestik dan internasional terhadap prospek 2018 telah disusun untuk memberikan landasan terhadap perkiraan-perkiraan yang disusun di dalam *Outlook* Ekonomi 2018 APINDO.

Outlook tersebut berisikan proyeksi ekonomi umum serta proyeksi sektoral 2018, sekaligus menegaskan rekomendasi dan saran kebijakan kepada Pemerintah yang belum terlaksana di 2017, dengan tujuan agar geliat dunia usaha di 2018 akan semakin bergerak pesat untuk keluar dari kondisi stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

APINDO memandang pencapaian growth sepanjang Q1 s/d Q3 2017 tidak terlalu menggembirakan, apalagi perbaikan kinerja industri pengolahan dan dunia usaha secara keseluruhan masih belum memperlihatkan pola ekspansi yang diharapkan. Dengan hasil tersebut, maka target pertumbuhan 2017 keseluruhan sebesar 5,20% seperti terdapat dalam APBN-P 2017 sulit tercapai.

APINDO mem-proyeksikan ekonomi 2018 akan tumbuh dalam rentang 5,05% hingga 5,20%, yang masih berada di bawah target pertumbuhan 2018 dalam RAPBN 2018.

Proyeksi tersebut dibuat dengan landasan kehati-hatian sekaligus pandangan realistis dunia usaha terhadap kelanjutan reformasi struktural. APINDO memandang apabila upaya Pemerintah 2018 tidak jauh berbeda dengan 2017, maka target pertumbuhan akan sulit tercapai.

APINDO berharap upaya Pemerintah benar-benar “*out of the box*” terhadap motor-motor produktif pertumbuhan, yaitu sektor industri konvensional dan sektor-sektor harapan baru yang diharapkan menjadi bintang di 2018, yaitu pariwisata dan industri kreatif tanpa mengesampingkan upaya reformasi struktural yang terus dilakukan untuk mendongkrak kinerja industri pengolahan dan manufaktur, kinerja investasi PMDN maupun PMA, serta penyediaan lapangan kerja.

Beberapa hal penting yang dapat menumbuhkan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian 2018 yang disertakan



dalam *Outlook* Ekonomi 2018 APINDO ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor Energi Berkelanjutan. Permasalahan kurang menariknya investasi bidang energi diakui banyak pihak. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan di awal investasi dapat bertolak belakang / berubah total dengan kebijakan 5-10 tahun kemudian. APINDO tidak pernah meragukan regulasi Pemerintah sepanjang kebijakan & implementasinya dijauhkan dari kepentingan politik sesaat.
2. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Hingga akhir 2017, sudah 16 PKE yang dikeluarkan untuk menopang kinerja dunia usaha. APINDO mengapresiasi kinerja empat Pokja Kemenko Ekonomi yang melakukan perbaikan secara kontinyu. Dengan kembali naiknya peringkat EoDB (*Ease of Doing Business*) Indonesia 2018 menjadi 72, naik dari 91, maka tingkat kepercayaan investor semakin membaik. Disinilah tantangannya untuk memanfaatkan momentum, khususnya terkait implementasi kebijakan.
3. Regulasi Ketenagakerjaan. Selain sinkronisasi dengan UU Jaminan Sosial, pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru harus dilakukan satu kesatuan dengan UU Serikat Pekerja (SP/SB) dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Penggantian UU yang telah diwacanakan bertahun-tahun ini perlu kepemimpinan langsung Presiden yang dapat menjamin keberhasilannya mengingat persoalan yang rumit lintas sektoral serta memiliki aspek politis yang besar. Selain kebutuhan penggantian payung hukum UU Ketenagakerjaan, terdapat empat aspek lain yang juga menjadi fokus APINDO di 2018 yang terkait erat dengan regulasi-regulasi bidang hubungan industrial, diantaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, TAPERA, perijinan tenaga kerja, serta pendidikan vokasi dan pemagangan.
4. Daerah dan Regulasi. Pengawasan kebijakan

daerah mendapat tantangan pasca keputusan MK yang menganulir kewenangan Pemerintah / Kemendagri (executive review) untuk membatalkan Perda. Pembatalan perda hanya bisa dilakukan melalui mekanisme *judicative review* oleh MA dan *legislative review* oleh DPRD-Pemda. Keputusan ini akan menjadi penghambat program Penataan Investasi Pemerintah. Kedepan, agar Raperda-Raperda yang masuk ke Kemendagri dikaji menyeluruh sebelum disetujui dan disahkan agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan investasi yang telah dikeluarkan Pusat. Dengan demikian tidak diperlukan lagi pembatalan perda.

5. Kerjasama Perdagangan Bilateral dan Multilateral. APINDO berharap adanya percepatan kesepakatan perundingan kerjasama perdagangan dalam skema Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) untuk menjamin akses pasar dengan preferensi terbaik bagi pelaku usaha Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan masukan pelaku usaha, khususnya APINDO dan KADIN, agar poin-poin perundingan tidak menjadi blunder yang dapat merugikan kinerja ekspor industri domestik mendatang. Upaya Pemerintah untuk mengikutsertakan dunia usaha dalam perundingan-perundingan perjanjian perdagangan diharap mempercepat penerapan *regulatory reform* dan *bureaucracy reform*, khususnya di tingkat pusat.
6. Stabilitas Kondisi Ekonomi Dan Politik. Memasuki tahun politik 2018, APINDO mengkhawatirkan terhambatnya reformasi struktural yang masih berjalan. Fokus, energi akan terbagi untuk meredam tren politik kelembagaan dan kemasyarakatan bila dinamika yang berkembang ternyata tidak sejalan dengan target reformasi struktural. Yang terpenting adalah menjalankan Politik

Kerja, bukan Politik Rencana atau Politik Wacana. Kepemimpinan nasional telah memberi sinyal politik yang kuat. Namun, seringkali jajaran pembantu Presiden justru berlomba memperbanyak regulasi yang *irrelevant* dan bahkan mempublikasi pencapaian mereka itu. Hal tersebut awalnya dimaksudkan untuk menjaga optimisme, namun justru menciptakan kecemasan dunia usaha.

7. Reformasi Perpajakan. APINDO mengapresiasi implementasi dan pencapaian program amnesti pajak 2017. Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan. Pemerintah juga harus menghindari tumpang tindih pengaturan diantara UU Amnesti Pajak dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. APINDO meminta agar dilibatkan dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta UU pengadilan pajak. Diharapkan proses revisi dan perampungan tiga UU terkait perpajakan tersebut dapat selesai di awal 2018. Bila Pemerintah kesulitan memfinalisasi revisi tiga UU bidang perpajakan itu, APINDO merekomendasikan agar Kemenkeu berinovasi melalui instrumen PP atau Permen.
8. Melanjutkan upaya APINDO untuk perbaikan kualitas kebijakan usaha di tahun 2017, APINDO akan terus melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan di 2018. Beberapa diantaranya terkait Rencana Revisi UU Persaingan Usaha agar KPPU tidak menjadi *super body*. Selain itu, implementasi UU Produk Halal agar tidak salah arah dan justru merugikan perekonomian nasional. Juga, terkait *judicial review* UU Pajak dan Retribusi Daerah di MK untuk menghapuskan jenis pungutan yang tidak semestinya, serta advokasi dalam mengawal penggantian UU Ketenagakerjaan.

9. APINDO mengusulkan beberapa poin. Pertama, agar pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi belakangan ini. Kedua, agar Pemerintah melanjutkan memberi insentif ke sektor padat karya. Pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di industri padat karya dikarenakan tingginya Upah Minimum. Ketiga, Pemerintah diharap meningkatkan proporsi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan pendalaman industri prioritas. Keempat, Presiden diharap mengingatkan jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi.

3.2 Tulisan di Media Publik

Departemen Kajian pada paruh pertama 2017 telah memberikan buah pikirannya pada salah satu isu ekonomi terkait dengan upaya memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia, dalam bentuk tulisan / opini “Menjaga Optimisme Melalui Kelanjutan Kinerja Pemerintah”. Tulisan sumbang pikiran APINDO tersebut telah termuat di Buku “Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia” yang telah dilakukan *soft launching* buku pada April 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Secara singkat, tulisan sumbang saran APINDO ini berupaya menegaskan pikiran dan pandangan terhadap ketidak-tercapaian target pertumbuhan ekonomi 2016 yang sempat mengikis optimisme berbagai pihak terhadap prospek ekonomi di tahun 2017.

Belum terciptanya optimisme terhadap ketercapaian target pertumbuhan ekonomi 2016 maupun 2017 telah menjadi penegasan



bahwa komitmen mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi berikutnya diperkirakan masih akan menemui berbagai kendala. Eksekusi program di lapangan belum menjadi motor utama bagi percepatan target-target yang diharapkan.

Oleh karena itu, APINDO dalam tulisan ini berpandangan bahwa tantangan 2017 tidak lagi hanya berfokus pada dikeluarkannya kebijakan ekonomi yang tepat, namun bagaimana Pemerintah menjamin pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak yang berkepentingan, publik dan swasta, pusat serta daerah. Selain daripada fokus pertumbuhan ekonomi 2017 yang harus diletakkan pada kemampuan indikator Investasi dalam mencapai target.

APINDO dalam tulisan kali ini juga mengkritisi proses penerbitan peraturan perundang-undangan yang kontroversial di tahun 2017. Diantaranya perubahan UU Persaingan Usaha, pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL-CSR), Peraturan Implementatif UU Produk Halal dan TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Pembahasan substansi yang diatur dalam penerbitan UU dan implementasi peraturan UU tersebut sangat potensial menurunkan daya saing usaha sehingga kontraproduktif dengan berbagai upaya perbaikan kebijakan usaha yang telah dirintis sebelumnya.

APINDO mengkritisi namun sekaligus juga membangkitkan optimisme bahwa



proyeksi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 2017 tetap dapat tercapai bahkan dapat melampauinya apabila Pemerintah berkomitmen dan berupaya dengan tindakan yang melampaui ekspektasi dunia usaha. Sehingga diperlukan kebijakan strategis Pemerintah yang dapat memperbesar ekspansi industri, investasi, dan perekonomian 2017, diantaranya melalui :

- Pemerintah mempertahankan dan memperkuat stabilitas ekonomi, menggiatkan promosi iklim usaha dan investasi yang sehat dan maju.
- Pemerintah perlu melakukan percepatan terhadap penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan yang sedang dilakukan.
- Melakukan percepatan harmonisasi regulasi investasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Penyederhanaan terhadap regulasi-regulasi (UU, PP, Perpres) agar lebih bersifat pro pengembangan industri nasional dan daya saing industri, dalam hal ini APINDO menyoroti dan mengkritisi UU Tapera, UU Penyelenggaraan Produk Halal, UU Persaingan Usaha, UU CSR, beserta PP turunannya.
- APINDO juga meminta peran intensif OJK untuk menghimbau perbankan nasional terkait perannya bagi ekspansi kredit yang bersifat produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.
- Selain memperkuat peran perbankan nasional, Pemerintah diminta memperkuat

peran Lembaga Keuangan Non-Bank dalam pengembangan infrastruktur pembiayaan alternatif.

- Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN agar menampilkan keterlibatan BUMN secara konsisten di dalam program pengembangan infrastruktur nasional.

3.3 Penelitian Bersama ILO

Sekretariat DPN APINDO secara berkesinambungan turut serta dalam pelaksanaan kerjasama dengan berbagai lembaga domestik maupun dengan lembaga-lembaga luar negeri. Pelaksanaan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bidang-bidang yang menjadi aktivitas rutin dan teragendakan di setiap tahunnya, maupun dalam beberapa aktivitas yang bersifat ad-hoc. Beberapa kegiatan utama Tim Kajian di sepanjang 2017 yang mengikutsertakan kerjasama dengan lembaga eksternal, diantaranya adalah dengan International Labour Organization (ILO).

Biro Employers' Activities (ACT/EMP) dari International Labor Organization's (ILO) merupakan *stakeholder* DPN APINDO yang secara berkesinambungan saling bekerjasama melalui berbagai diskusi serta penelitian yang membahas berbagai hal terutama yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial. Di akhir Semester II 2017, Biro ACT/EMP ILO sedang melakukan penelitian mengenai Faktor Inklusivitas dan Keberagaman Talenta Dalam Struktur Manajemen Senior dan Dewan Direksi Di Berbagai Perusahaan Serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kinerja Bisnis Perusahaan. Penelitian yang dilakukan Biro ACT/EMP ILO dilakukan dengan menggandeng partner mereka, Lightspeed Research, yang berpengalaman dalam melakukan survei secara *online*.

APINDO memberikan dukungan pada Biro ACT/EMP ILO dalam pelaksanaan survei *online* tersebut dengan meminta kepada Pengurus Harian DPN, ALB, DPP APINDO

Propinsi serta Asosiasi Sektoral, agar dapat berpartisipasi dalam pengisian survei tersebut. APINDO dalam hal ini para anggotanya akan memperoleh manfaat sebagai responden, dalam bentuk kemudahan memperoleh laporan hasil survei lengkap yang akan dipublikasikan oleh Biro ACT/EMP ILO pada 2019 mendatang. Hasil survei tersebut nantinya tentu akan sangat berguna bagi landasan penetapan strategi perusahaan anggota-anggota APINDO melalui *insight* yang terdapat di dalam laporan survei mendatang.

KEGIATAN ASISTENSI & PENDAMPINGAN

Sekretariat DPN APINDO, dalam hal ini Departemen Kajian, sepanjang tahun 2017 telah memberikan dukungan konkrit kepada para ALB (Anggota Luar Biasa) dan Anggota APINDO lainnya dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Pendampingan dan asistensi yang diberikan Departemen Kajian telah terpenuhi dalam berbagai bidang sektor maupun bidang lintas sektor, seperti ketenagakerjaan dan pengupahan, sektor industri, perdagangan, investasi, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam hal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya, yang di sepanjang tahun 2017 diberikan dalam berbagai bentuk seperti materi presentasi dan materi pidato, *talking points*, *speech*, partisipasi keikutsertaan, serta notulensi. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sekretariat APINDO bersama dengan lembaga lainnya yang merupakan *stakeholders* APINDO, seperti partner luar negeri (HIDA, ILO, World Bank, ADB, Oxford Business Group, OECD, IFC, Chambers of Commerce, Embassies, dan lain-lain), serta partner kelembagaan domestik, lembaga pemerintah (kementerian dan lain-lain), kalangan akademisi, *Development Agency*, korporasi, dan lain sebagainya.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan Departemen Kajian diwujudkan dalam bentuk penyiapan lebih dari 70 (tujuh puluh) materi sambutan, talking points, materi presentasi, serta materi pidato :

Selain melalui penyusunan materi presentasi, pidato, dan talking points, kegiatan

Kegiatan Penyusunan Materi :
Presentasi *Power Point*, Pidato, dan *Talking Points*

No.	Kategori Topik / Tema Materi	Jumlah
1	Hubungan Industrial & Ketenagakerjaan	8
2	Bisnis Lintas Sektoral	14
3	Bisnis Sektoral	8
4	Investasi & Perdagangan Nasional / Multilateral / Regional / Internasional	6
5	Topik-Topik Khusus (<i>Sustainable Development Goals, Green Production, Decent Work, Tax Amnesty, Perpajakan, CSR, Deregulasi, Reformasi Birokrasi, Otonomi Daerah, Entrepreneurship, UKM, Moneter, Energi, Persaingan Usaha, Infrastruktur</i>)	10
6	Tanggapan / Respon Kebijakan	4
7	Surat Kepada Presiden / Menteri / Lembaga	1
8	Kata Sambutan Sektoral	8
9	Kata Sambutan Lintas Sektoral	6
10	Lain-lain (<i>Country Paper, Laporan Survei, Pengisian kuesioner, dll</i>)	6
TOTAL		71

pendampingan yang dilakukan Departemen Kajian juga dilakukan di dalam kegiatan / event dimana APINDO diundang oleh berbagai mitra lembaga pemerintah dan non-pemerintah, domestik maupun internasional. Dukungan terhadap beberapa pendampingan dan partisipasi keikutsertaan diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan singkat dari berbagai kegiatan tersebut. Selama 2017,

Departemen Kajian telah ikut serta dalam lebih 20 (dua puluh) kegiatan dalam beberapa kategori, diantaranya :

HARAPAN

Kegiatan Pendampingan :

Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan *Stakeholders* Lainnya yang Diikuti Tindak Lanjut

No.	Kategori Kegiatan	Jumlah
1	Hubungan Industrial & Ketenagakerjaan	6
2	Diskusi Makro Ekonomi & Bisnis Sektoral, Lintas Sektoral	10
3	Tanggapan / Respon Kebijakan	4
4	Sosialisasi Kebijakan & Penelitian	2
5	Topik-Topik Khusus (Pemagangan, CSR, Tax Amnesty, Energi, Reformasi Regulasi & Birokrasi, Statistik, Jurnalistik)	6
6	Internal Sekretariat DPN APINDO (CEO Gathering, Members Gathering, Rapat DPH APINDO, dll)	5
7	Lain-Lain (Survei Lembaga eksternal, Interview / wawancara dengan organisasi, dll)	5
TOTAL		38

Bidang Kajian memiliki harapan yang lebih besar untuk tahun 2018 ini agar apa yang telah direalisasikan dan dicapai selama tahun 2017 lalu dapat semakin solid diwujudkan di tahun 2018 maupun waktu-waktu mendatang, tentunya dengan kualitas pencapaian yang semakin baik. Sukses dan keberhasilan-keberhasilan dalam pengajuan saran dan rekomendasi terhadap serangkaian kebijakan Pemerintah semestinya tidak menjadi sarana berpuas diri, yang semestinya dapat memberi semangat untuk terus mengawal perkembangan dunia usaha yang berkelanjutan

dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berbagai persoalan dan tantangan yang menjadi fokus perhatian APINDO dan *stakeholders*, baik di bidang Pengupahan dan Hubungan Industrial, Pemagangan, Perpajakan, Investasi dan Perdagangan, Otonomi Hubungan Pusat-Daerah, Energi Berkelanjutan, Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta beberapa isu sektoral lainnya seperti infrastruktur, dan lain-lain – telah menjadi landasan optimisme bagi APINDO khususnya Departemen Kajian untuk selalu melihat proyeksi dan harapan di 2018 maupun di waktu mendatang. Landasan optimisme itu didasarkan pada kemudahan penyerapan dan penyampaian gagasan, ide, dan pemikiran APINDO dan Tim Kajian untuk terus mengkritisi dan memberi solusi terhadap berbagai kebijakan publik yang bertentangan dengan semangat untuk mengembangkan dunia usaha di tanah air.

Kebijakan / regulasi di tahun 2017 yang menjadi fokus perhatian APINDO ternyata masih belum dapat dirampungkan Pemerintah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dunia

usaha, diantaranya Revisi UU PPh, PPN serta Ketentuan Umum Perpajakan dalam bidang pajak. Selain itu realisasi PP Jaminan Produk Halal (JPH) pasca diterbitkannya UU JPH menimbulkan debat publik yang tajam antara pemerintah dan pelaku usaha. Demikian juga halnya terkait dengan aturan turunan (PP) dari UU TAPERA, proses revisi terhadap UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli), serta penyusunan UU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang hingga akhir 2017 masih tidak sejalan sesuai dengan apa yang diharapkan APINDO dan dunia usaha secara umum. Walaupun masih belum terdapat di dalam daftar Prolegnas prioritas 2018, APINDO tetap optimis bahwa penggantian UU Ketenagakerjaan akan terealisasi di tahun 2019, dan APINDO akan memanfaatkan waktu yang masih tersedia saat ini s/d 2019 mendatang untuk memantapkan konsep UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut sesuai dengan posisi dan pendirian APINDO yang selama ini diperjuangkan untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan serta iklim hubungan industrial yang sehat dan berkualitas.



Unit Bisnis DPN APINDO



APINDO TRAINING CENTER



INTERNATIONAL PARTNERSHIP CENTER



PUSAT ARBITRASE DAN MEDIASI INDONESIA



APINDO TRAINING CENTER

Research and Program Development (PT PUSAT STUDI APINDO - 2017)

PENDAHULUAN

Skenario pengembangan kompetensi SDM Hubungan Industrial (HI) ATC dirancang dengan akurat, cerdas dan mutakhir berbasis riset terapan di tempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut dirancang Visi dan Misi dari ATC yaitu :

- **Visi :**
Menjadi *Center of Excellence* pengembangan *Human Capital* di Indonesia.
- **Misi :**
 1. Mengembangkan kompetensi pelaku Hubungan Industrial di Indonesia.
 2. Melakukan riset terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
 3. Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota dalam peningkatan pratek-pratek pengembangan *Human Capital* di Indonesia.

Struktur Organisasi APINDO Training Center / PT. Pusat Studi Apindo :

Board of Executive

1. President Directur PT Pusat Studi Apindo :
Franxicus Xaverius Sri Martono
2. Director Business and Development PT Pusat Studi Apindo : Muhammad Aditya Warman

3. Director Marketing PT Pusat Studi Apindo :
Iftida Yasar
4. Director Finance PT Pusat Studi Apindo :
Chris Setyadi Suhendra

Excellent Team

1. Manajer : Marijono
2. Marketing & Cust. Relations : Mariety Ruth Siahaan. Rosa Tri Utami
3. Finance & Training Support : Eka Rahmawati
4. Research Analyt dan Product Syllabus :
Adisti Hapsari, Made Dwi mas Utami

Dalam perjalanannya sejak berdiri sampai dengan saat ini (2010-2017) peran, fungsi, kinerja, dan kompetensi ATC tumbuh dan berkembang.

Luasnya dunia ketenagakerjaan nasional dengan berbagai issue yang timbul, membuat ATC bertekad memposisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan mencapai terciptanya kondisi '*industrial and labour peace*' di Indonesia, mendukung roda perekonomian nasional yang kondusif.

Kegiatan ATC yang dilakukan selama tahun 2017 terlihat seperti dibawah ini :

No.	ACARA	KATEGORI	KOTA	TANGGAL	PESERTA	KATEGORI
1	OS Summit	Retail	Bali	22 Febuari	100	Umum
2	IR Conference Padang	Retail	Padang	10 - 12 Oktober	350	Umum
3	IRCP UNPAD BANDUNG Batch 3	Retail	Bandung	16 - 20 Januari	24	Universitas Padjajaran
4	IRCP UNPAD BANDUNG Batch 4	Retail	Bandung	17 - 21 Juli	17	Universitas Padjajaran
5	IRCP UI Batch 18	Retail	Jakarta	15 - 19 Mei	22	Universitas Indonesia
6	IRCP UI Batch 19	Retail	Jakarta	30 Oktober - 3 November	33	Universitas Indonesia
7	IR Trend PT Kalabe Farma, Tbk	In House	Jakarta	5 Mei	30	Club Kelapa Gading
8	IR Trend Group AAJI	In House	Jakarta	29 September	30	AAJI
9	FGD Djarum	Event	Jakarta	Januari	25	ATC
10	Vendor Managemet Freeport	In House	Timika	7 - 9 Agustus	76	PT Freeport Indonesia
11	LKS Bipartit Mubadala Petroleum	In House	Jakarta	15 Agustus	25	Mubadala Petroleum
12	Strategic IR Multi Media Nusantara	In House	Jakarta	14 November	25	PT Multi Media Nusantara
13	ATC dan Pracena "Problem Solving" Batch II	Retail	Jakarta	10 Mei	15	ATC - Pracena
14	ATC dan Pracena "Problem Solving" Batch III	Retail	Jakarta	8 Agustus	30	ATC - Pracena
15	ATC dan Pracena "Logical Thinking" Batch I	Retail	Jakarta	6 Juli	33	ATC - Pracena
16	ATC dan Pracena "Logical Thinking" Batch II	Retail	Jakarta	18 Oktober	15	ATC - Pracena
Total					850	

KEGIATAN

Penjelasan kegiatan ATC di Tahun 2017 :

I. SERTIFIKASI (REGULER)

a. Industrial Relation Certification Program (IRCP)

1. Angkatan III, IRCP UNPAD Bandung

PT Pusat Studi Apindo (ATC) bekerjasama dengan Universitas Padjajaran bandung dalam program Training Industrial Relations Certification Program (IRCP) yang telah melahirkan angkatan pertama dan telah dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, pada hari Senin - Jumat, 16 - 20 Januari 2017. Program ini

diikuti oleh 24 Peserta. Keseluruhan peserta telah dinyatakan memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikasi IRCP dengan telah mengikuti *training*, ujian dan pengumpulan tugas akhir atau *paper* peserta.



2. Angkatan IV, IRCP UNPAD Bandung

Setelah mengadakan 3 (tiga) *batch* untuk sertifikasi UNPAD, maka dilanjutkan dengan sertifikasi ke-4 di tanggal 17 - 21 Juli 2017 yang diikuti 17 peserta. Keseluruhan peserta telah dinyatakan memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikasi IRCP dengan telah mengikuti Training, ujian dan pengumpulan tugas akhir atau paper peserta.

3. Angkatan XVIII, IRCP UI Depok

PT Pusat Studi Apindo IRCP angkatan XVI dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Senin – Jumat, 15 – 19 Mei 2017. Program ini diikuti oleh 22 Peserta. Keseluruhan peserta telah dinyatakan memenuhi kualifikasi telah melaksanakan 4 hari training dan 1 hari ujian.

4. Angkatan XIX, IRCP UI Depok

PT Pusat Studi Apindo IRCP angkatan XVII dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Senin – Jumat, 30 Oktober – 3 November 2017. Sebagai program penutupan akhir tahun, *batch* ini diikuti oleh 33 peserta.



II. IN HOUSE TRAINING

1. ATC dan AAJI - Industrial Relation Trend

PT Pusat Studi memfasilitasi dan memberikan training kepada Seluruh *Members / Anggota AAJI* pada hari Jum'at, 29 September 2017 pukul 09.00 – 12.00 wib bertempat di Gedung Manulife Sampoerna Strategic. Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 – 46 Semanggi Jakarta Selatan Ruang Focus.

Dalam Seminar ini dibawakan sebanyak 3 Pembicara Yaitu :

- Bapak Soeprayitno, *Expert* Pengupahan
- Ibu Andriani, Direktur Pengupahan Kemenaker
- Ibu Iftida Yasar, Direktur PT Pusat Studi Apindo



2. ATC dan Freeport Indonesia - Audit Vendor

Apindo Training Center bekerja sama dengan Freeport Indonesia melakukan program training dan best practice sharing, focus group discussion, benchmark dengan perusahaan-perusahaan baik skala besar maupun kecil untuk mengurai permasalahan dalam tren ketenagakerjaan. Membangun *mindset* ke dalam *new* perspektif para pelaku hubungan industrial yang tidak hanya menyelesaikan kasus akan tetapi mampu untuk mengantisipasi resiko yang muncul dari hubungan industrial dimana memerlukan *comply* terhadap regulasi, Adapun sasaran yang ingin dituju dari program ini yaitu :

- Memberikan pemahaman para praktisi hubungan industrial terhadap kompetensi yang dimiliki khususnya di bidang Hubungan Industrial.
- Mendorong peningkatan kompetensi pada perusahaan industri pengguna tenaga kerja.
- Mampu mengurai dan memberikan solusi atas permasalahan hubungan industrial di perusahaannya.

3. ATC dan Kalbe Farma - Industrial Relation Trend

Apindo Training Center bekerja sama dengan Kalbe Farma Indonesia memberikan *training* dan *best practice sharing*, kepada Seluruh praktisi IR di PT kalbe Group.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2017 bertempat di Klub Kelapa Gading dengan diikuti sebanyak 30 peserta, dimana 2 orang pembicara yang merupakan *expert* dibidang Hubungan Industrial yaitu :

- Sri Razziaty Ischaya, Mantan Hakim Ad Hoc PPHI dan *Expert* Hubungan Industrial Apindo Training Center dengan materi Penyelesaian PHK Tanpa Masalah
- Soeprayitno, dengan materi Struktur Skala Upah dan PP 78

4. ATC dan Mubadala - LKS Bipartit

Proses menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perjalanannya sering kali menemukan kendala-kendala, baik dari kurangnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangnya terkait dengan hubungan kerja, pengupahan dan *update* hubungan industrial yang sangat dinamis, serta kemampuan dalam hal berkomunikasi untuk menghasilkan *social dialogue* yang efektif.

Komunikasi akan berdampak terhadap semua aspek, komunikasi yang jelas akan menciptakan mutual trust yang akan menjadi tiang pondasi kuat dalam membangun hubungan industrial yang harmonis serta akan menciptakan *employee engagement* yang berdampak besar bagi Perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan bidang Hubungan Industrial pada saat ini, PT Pusat Studi APINDO memfasilitasi dan memberikan training kepada Seluruh karyawan HR dan IR Mubadala Petroleum pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 09.00 - 12.00 bertempat di Ruang Training Mubadala Petroleum yang dihadiri kurang lebih 25 peserta mewakili manajemen dan karyawan

In House Training LKS Bipartit ini dibuka oleh Bapak Bambang Sujatmiko, HR Manager Mubadala Petroleum, dan di hadiri oleh 2 (dua) pembicara *expert* di bidang *Industrial Relation* yaitu :

- Bapak M. Aditya Warman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Wasekum DPN Apindo dan beliau juga menjabat sebagai Director Business Development PT Pusat Studi Apindo
- Ibu Tutut Handayani, M.Psi, Director HR dan IR Matahati Consulting dan Sekertaris Indonesia *Human Resources Institute* (Indhri)

5. ATC dan Multimedia Nusantara - Industrial Relation Trend

ATC memberikan pelatihan kepada manajemen dan karyawan dari perusahaan Multimedia Nusantara pada tgl 14 November

2017 dan diikuti oleh 25 peserta, bertempat di SCBD Jakarta, bertujuan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kompetensi bagi manajemen dan karyawan yang pada akhirnya mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran-sasaran perusahaan.

2 (dua) pakar di bidang Industrial Relation yang memberikan penjelasan yaitu:

- Bapak M. Aditya Warman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Wasekum DPN Apindo dan Beliau juga menjabat sebagai Director Business Development PT Pusat Studi Apindo, membahas mengenai Industrial relations Trend 2018
- Sri Razziaty Ischaya, Mantan Hakim Ad Hoc PPHI dan Expert Hubungan Industrial Apindo Training Center, membahas tentang Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. FGD Djarum

Ditengah perkembangan hukum ketenagakerjaan yang semakin kompleks, memacu para pelaku hubungan industrial maupun *human capital* untuk selalu memperkaya wawasan akan kebijakan-kebijakan baru yang diciptakan oleh para regulator.

Berbagai kebijakan strategis pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi cikal bakal keputusan-keputusan di perusahaan seperti adanya social security dan pengupahan. Namun, kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan terutama bagi perusahaan padat karya. Oleh karena itu kajian, pemikiran, focus group discussion sangat diperlukan dengan menghadirkan *expert* di bidangnya serta mengajak para pemangku kebijakan untuk dapat mereview beberapa tahun perjalanan regulasi serta implementasi di lapangan.

Forum ini bertujuan untuk menghadirkan data dan fakta serta *impact* dari implementasi regulasi yang satu dengan yang lain terhadap perusahaan padat karya, antara lain :

- Menyajikan fakta melalui kajian yang dituangkan ke dalam paper singkat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- Memahami *challenges* dan *concern* dari pelaksanaan PP 78 Tahun 2015 tersebut dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi perusahaan padat karya;
- Mengetahui risk dan *impact* dari pemborongan pekerjaan yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja
- Mengurai solusi strategis untuk tetap mempertahankan *sustainable business growth* di tengah gempuran regulasi yang *over lapping*.



7. Partnership

7.1. ATC dan Pracena – Problem Solving Batch II dan III

Setelah sukses dengan program edukatif di Batch I dan II, ATC mencoba untuk menjalin kerja sama kembali dengan pracena untuk di batch II dan III. Antusiasme peserta dalam mengikuti program ini makin bertambah dikarenakan peserta diberikan edukasi materi yang berbeda dari Industrial Relation dan bisa di aplikatifkan di perusahaan.

7.2. ATC dan Pracena – Logical Thinking Batch II dan III

Kesuksesan ujicoba program Logical Thinking batch I ini menginspirasi Pracena

untuk menyelenggarakan uji coba *batch* ke-II dan III.

8. Event Besar Industrial Relations

8.1. 2nd Outsourcing Summit, Bali

Outsourcing merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang dibutuhkan di era digitalisasi saat ini. Mendasar pada *concern* terhadap bentuk hubungan kerja *outsourcing* sebagai salah satu pilihan dalam membangun bisnis masa depan, maka inovasi perlu dilakukan. Perusahaan penyedia jasa setidaknya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global dan membuka lapangan kerja dalam memberikan kesempatan kerja yang baik. Sebagai salah satu *stakeholder* mengajak dan mendorong pemangku kepentingan untuk membangun komitmen dalam membangun *outsourcing* yang sehat dalam sebuah inisiatif sebagai berikut :

- Melakukan intervensi atas regulasi yang tidak menumbuh kembangkan praktek *outsourcing* yang sehat.
- Memastikan peningkatan kompetensi dan skill up kepada pekerja di tingkat perusahaan alih daya / *outsourcing* menjadi tanggung jawab bersama.
- Membangun fleksibilitas hubungan kerja dan kepastian upah produktif adalah solusi melawan upah murah sebagai sebuah stigma negatif praktek *outsourcing* di Indonesia.

8.2. IR Conference Padang

Kepastian Regulasi dalam setiap dinamika Ketenagakerjaan selalu menjadi Challenges tersendiri, dimana *Conference* kali ini mencatat pentingnya untuk menelaah setiap regulasi yang pemerintah keluarkan tidak berdampak negatif yang berefek pada semakin tingginya *employee cost* yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan cenderung membahayakan pembangunan usaha berkelanjutan.

Pusat Studi Apindo melalui Apindo Training Center ingin mendorong sebuah tatanan ketenagakerjaan dalam sebuah kajian strategik melalui proses analisa, review, studi literatur dan survey untuk membentuk kebenaran berdasarkan logika logika dasar sintesa dalam sebuah struktur berfikir sistematis, terstruktur dan aplikatif.

Atas permasalahan yang menjadi concern dalam hal produktivitas ini, maka ada beberapa acuan permasalahan yang menjadi point penting utama, yaitu :

- Pelaksanaan struktur skala upah yang sudah di mulai dengan pemberlakuan permen Nomor 1 tahun 2016 harus di dasarkan pada *job analyst* dan evaluasi secara berkala.
- Sistem pengupahan harus bisa mengakomodir upah berdasarkan satuan hasil.
- undang-undang tabungan perumahan rakyat pada akhirnya tidak menapaki jalan dengan baik, skema yang masih belum jelas kajiannya tidak akan berlangsung efektif apabila di paksakan.
- Pentingnya pemahaman mengenai tabungan perumahan rakyat dan program Manfaat Layanan Tambahan untuk mendorong harmonisasi kedua program ini.
- Menata kembali Pengelolaan manajemen Rumah sakit Negeri dan Swasta sebagai mitra BPJS Kesehatan;
- Membangun komitmen peserta sesuai prinsip- prinsip SJSN dan asas SJSN;
- Mendorong pelaksanaan COB melalui asuransi komersial.
- Wacana skema asuransi maupun benefit pengangguran harus dikaji lebih seksama agar tidak mengganggu *labor cost* yang sudah goyah.
- Pada akhirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 harus segera di ganti untuk mengakomodir kebutuhan bisnis masa depan.



INTERNATIONAL PARTNERSHIP CENTER

d/a Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia
Tel. : 62-21-8378 0824 - Email : ipc@apindo.or.id

Kerjasama Strategis International

Kemitraan antara Pelaku Bisnis Domestik dan Internasional untuk
Menciptakan Bisnis yang Memberikan Kesempatan Kerja di Indonesia

Dewan Penasehat :
Hariyadi B. Sukamdani,
Shinta W. Kamdani

Dewan Pelaksana :
Adiguna Yos Ginting,
Wahyuni Bahar

Tim Eksekutif :
Diana M. Savitri

Pelayanan Kami

Kami fokus dalam memfasilitasi perusahaan dalam dan luar negeri menuju jaringan strategis melalui program pencocokan bisnis dan kebutuhan bisnis memasuki pasar Indonesia.

Layanan kami dapat menyesuaikan kebutuhan dan spesifik serta memungkinkan klien memilih layanan yang sesuai dengan situasi dan fase bisnis. Layanan kami

dikoordinasikan oleh tim profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman nasional maupun internasional.

Layanan kami meliputi *business intelligence*, konsultasi bisnis dengan tujuan :

- Pertukaran informasi tentang peluang bisnis
- Memberikan konsultasi bisnis
- Advokasi masalah realisasi investasi

B2B Meeting



Business Forum



Forum Bisnis 2017

No.	Forum Bisnis	Mitra Penyelenggara
1.	Seminar Sustainable Energy Solutions for Smart Communities and Industries (14-02-2017)	Business Sweden, Indonesia
2.	Realizing the Indonesia Growth Opportunities	Business Sweden , Indonesia
3.	The High Level Business Delegation - Business Luncheon (20-02-2017)	MEDEF International
4.	France Presidential Visit - Official Business Luncheon (29-03-2017)	Business France, Indonesia
5.	Indonesia - Australia Business Week (07-03-2017)	Australia Trade and Investment Commision (Austrade), Jakarta
6.	Business Forum: EQT AB - Private Equity (20-03-2017)	EQT dan Swedish Business Association, Indonesia
7.	Indonesia - Japan Processing Engineering Forum (22-02-2017)	Japan Management Association, Japan
8.	Business Meeting on Energy Indonesia-Finland and Joint Working Group on Energy (06-06-2017)	Business Finland, Indonesia
9.	The 1 st International Conference and Exhibition on Powder Technology Indonesia (08 dan 09-08-2017)	Universitas Padjajaran, Bandung dan JP Global Transtech, Indonesia
10.	Indonesia-Japan Business Matching for Environmental Technology (12-09-2017)	International Center for Environmental Technology Transfer, Japan
11.	Business Matching Forum for Clean Energy Project in Indonesia (21-12-2017)	International Center for Environmental Technology Transfer, Japan



PUSAT ARBITRASE DAN MEDIASI INDONESIA

Gedung Permata Kuningan Lantai 9
 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur - Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
 Tel : (021) 8378 0824, Fax : (021) 8378 0823/ 8378 0746
 Website : www.apindo.or.id - Email : sekretariat@apindo.or.id

Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia (PAMI) merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Selain Arbitrase, PAMI juga memberikan pelayanan Mediasi, Ajudikasi dan Pendapat Mengikat.

PAMI didirikan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU – 0007633.AH.01.07 Tahun 2017.

Pembentukan PAMI diharapkan mampu menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa yang diperlukan oleh Dunia Usaha di Indonesia. Untuk menjadikan PAMI sebagai yang terbaik maka sejak dari awal para pendiri memberikan komitmen untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung, khususnya Arbiter dan Mediator yang profesional, berintegritas dan profesional.



Peresmian PAMI dihadiri Kepala BKPM, Ketua Muda MA dan Dirjen PHI Kemenaker

Mengapa Dibentuk PAMI

- PAMI didirikan oleh APINDO sebagai organisasi representasi dunia usaha. Sejak kelahiran APINDO Nasional pada tahun 1952, organisasi yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di 34 Provinsi dan ratusan Kabupaten/Kota, telah menunjukkan kontribusinya bagi harmonisasi Hubungan Industrial dan iklim dunia usaha yang kompetitif.
- Pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter atau Mediator yang profesional, kredibel, beintegritas tinggi, dan kompeten di bidangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Arbiter dan Mediator PAMI yang bersifat objektif, independen, dan tidak memihak.
- PAMI mampu menjaga kerahasiaan terkait persengketaan yang dilakukan para pihak yang bersengketa karena proses arbitrase dan mediasi dilakukan secara tertutup untuk publik. Pihak bersengketa dapat tetap melakukan aktivitas usahanya dan tidak terpengaruh dengan proses hukum/persidangan yang sedang berjalan.
- Penyelesaian sengketa melalui PAMI lebih efisien karena kedua belah pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan lamanya jangka waktu sengketa harus diputuskan.
- PAMI berkomitmen untuk menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dunia bisnis khususnya investasi, pada lingkup nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan PAMI sebagai lembaga yang tidak saja berskala nasional, namun juga internasional.



Diskusi PAMI bersama Ketua Mahkamah Agung Bapak M Hatta Ali



Pertemuan Pengurus dengan Arbiter PAMI 2017

Lingkup Kerja

Penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui mekanisme Arbitrase, Mediasi dan Ajudikasi serta Memberikan Pendapat Mengikat dalam ruang lingkup Usaha dan Bisnis, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Struktur Organisasi

Dewan Pengawas

Ketua Umum : Hariyadi B Sukamdani

Anggota :

- Suryadi Sasmita
- Anton J. Supit
- Sanny Iskandar
- Wahyuni Bahar

Dewan Kehormatan

Ketua : Sofjan Wanandi

Anggota :

- Arifin A Tumpa
- Susanti Adinugroho
- Rehngena Purba
- Soebronto Laras
- Benny Soetrisno

Dewan Pengurus

Ketua : Danang Girindrawardana

Wakil Ketua : Indra Safitri

Sekretaris : P. Agung Pambudhi

Bendahara : Chris S.Suhendra

Arbiter PAMI

Para Arbiter PAMI di saat peresmian untuk pertama kalinya adalah :

- Dr. Harifin A Tumpa SH, MH
- Prof. Dr. Nindyo Pramono SH, MS
- Dr. Susanti Adi Nugroho S.H., M.H
- Wahyuni Bahar, SH, LLM
- Prof. Rehngena Purba, SH, MS
- Marianna Sutadi, SH
- Ir. H. Ahmad Rizal, M.H., FCBarb
- M. Aditya Warman, MBA
- A. Kemalsjah Siregar, SH



Simulasi Sidang Pelatihan Arbiter PAMI 2017

**Reproduksi Varietas Simalungun
Deli - Dura x Pisifera - SP 540**
"a wise choice for quick profitability"



PT. PALMA INTI LESTARI
Oil Palm Seed Producer



Profil PT. Palma Inti Lestari

PT. Palma Inti Lestari Berdiri Sejak Tahun 2004.
Merupakan Waralaba Varietas
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
Berdasarkan Kerja Sama (No:18/ SUPER/PPKS/VII/2004).
PPKS (pemilik varietas) Mereproduksi Pohon Induk Hasil
Program Pemuliaannya yang Digunakan oleh
PT. Palma Inti Lestari untuk Menghasilkan Benih.

Benih Dihasilkan dari Reproduksi Tetua Pilihan Betina-Dura Deli
dan Jantan-Pisifera SP 540 T yang Terdapat di
Kebun Induk Bangkinang. DXP Reproduksi Simalungun,
yang Berasal dari Elite Parental Lines Dihasilkan setelah
Penelitian Tahunan yang Dimulai dari Tahun 2006 dari Para Peneliti dari
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan PT. Palma Inti Lestari
Dimana Karakteristik Unggul bahan Tanam ini Adalah Hasil Produksi
Dapat Mencapai 16-18 ton TBS per-hektar Pada Saat Umur Panen 24-35 Bulan.
Sementara Potensi CPO adalah 9 ton/Ha/Tahun Pada Saat Umur 10 Tahun.

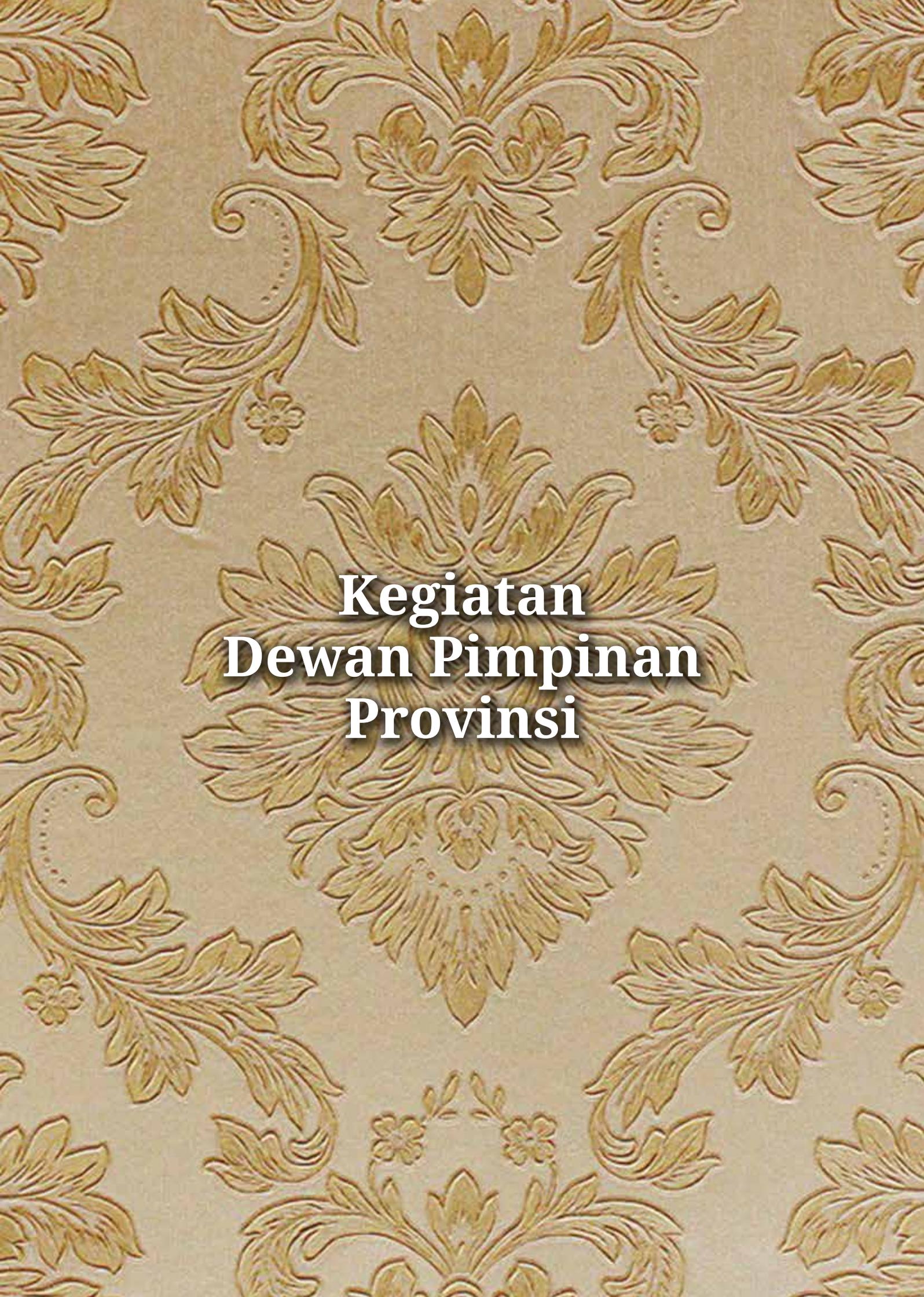
Kantor Perwakilan Pekanbaru :
Jl. OK.M. Jamil No. 01 (Belakang Purna MTQ)
Pekanbaru 28284 Riau, Indonesia
Phone: +62 761 35557
Fax: +62 761 34363

Alamat Kebun Benih :
RT 004/ RW 006 Desa Sei Jernih
Lk. Teratak Bangkinang, Kabupaten Kampar – Riau
Phone : +62 761 35557
No. Hp : 0852 7806 0219/ 0813 7112 7941

Email: seed.sales@pku.darmexagro.com - Website : www.darmexagro.com

TOYOTA INDONESIA

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia



**Kegiatan
Dewan Pimpinan
Provinsi**

DPP APINDO ACEH

Ketua	: H. M. Dahlan Sulaeman SE
Sekretaris Eksekutif	: Kenny Kurniadidarma
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 22 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 512 Perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 24 Perusahaan

KEGIATAN

Beberapa kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh DPP APINDO Aceh dalam tahun 2017 diantaranya :

- 1) Ketua DPP APINDO Aceh H.M. Dahlan Sulaiman, SE. MSi dan Ketua Bidang Organisasi Rosi Amalia, SH.MM mengikuti Discussion tentang Kajian Kritis Dari Perspektif Hukum dan Ekonomi Terhadap Pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aroen Lhokseumawe di Balai Senat Rektor Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2017.



- 2) Tanggal 27 Februari 2017 Ketua DPP APINDO Aceh menghadiri CEO Gathering di Ruang Serba Guna DPN APINDO Jakarta dengan tema “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kepastian Hukum di Indonesia implikasi nya bagi Dunia Usaha“.



- 3) Selasa 28 Februari s/d 02 Maret 2017 Ketua DPP APINDO Aceh bertempat di Western Resort Hotel Serpong, Tangerang mengikuti Konsolidasi Nasional Hakim Ad Hoc Khusus APINDO bersama Ketua DPN dan DPP APINDO se Indonesia.
- 4) Tanggal 07 s/d 08 Maret 2017 Ketua DPP APINDO Aceh beserta Pengurus lainnya yang tergabung dalam LKS Tripartit Aceh mengikuti acara Pertemuan LKS Tripartit se-Aceh yang di ikuti Pengurus DPK APINDO se-Kabupaten/Kota di Aceh yang tergabung di LKS Tripartit Kabupaten/Kota di Hotel Grand Arabia – Banda Aceh. Pada pertemuan tersebut Ketua DPP APINDO Aceh H.M. Dahlan Sulaiman, SE. M.Si juga ditunjuk menjadi salah satu Nara Sumber (Pemateri).



- 5) Tanggal 14 Maret 2017 pada pukul 14.00 s/d 17.00 wib Rapat Pemilihan Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Aceh yang diikuti Ketua dan Pengurus DPP APINDO Aceh serta dihadiri oleh berbagai instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Asosiasi/Organisasi Pengusaha, Asosiasi Profesi, Organisasi Lembaga Latihan Kerja Swasta dan BLK Pemerintah. Terpilih kembali untuk Periode ke-2 secara Aklamasi sebagai Koordinator FKJP Aceh dalam Musyawarah tersebut H.M. Dahlan Sulaiman, SE. M. Si (Ketua DPP APINDO Aceh).
- 6) Pada tanggal 18 maret 2017 Pertemuan dengan Utusan Tenaga Ahli DPR RI yang membahas tentang Peranan APINDO Aceh Dalam Hubungan Industrial yang bertempat di Hotel The Pade.



- 7) Ketua DPP APINDO Aceh H.M. Dahlan Sulaiman, SE.,M.Si mengikuti RAKER-KORNAS APINDO XXVIII yang diselenggarakan di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 19 s/d 21 April 2017 bertempat di Hotel ASTON Palembang.
- 8) Ketua DPP APINDO Aceh, H.M Dahlan Sulaiman menjadi Narasumber pada Kegiatan “Sosialiasi Kebijakan Promosi Pariwisata Pasar Eropah, Timur Tengah, Amerika dan Afrika yang diselenggarakan oleh Kementrian Pariwisata Pada Tanggal 21 - 22 Juli 2017 yang bertempat di Hotel Mekkah Banda Aceh.



- 9) Pada Tanggal 25 Juli 2017 H.M. Dahlan Sulaiman, SE.,M.Si membuka acara “Kegiatan Pelaksanaan Survey Daya Saing Kerjasama ACI-NUS Dengan DPP APINDO Aceh” yang dilaksanakan di Hotel Poma dihadiri Ketua DPP APINDO, Pengurus dan Anggota Serta BPJS Ketenagakerjaan dan Pihak Perbankan.
- 10) Ketua DPP APINDO Aceh, H.M Dahlan Sulaiman SE.M.Si Pada tanggal 25 s/d 27 Juli mengikuti Rapat Koordinasi tentang Peng-Anugrahan BPJS NAKER Award kepada Perusahaan-perusahaan yang bertempat di Hotel Planet Holywood Batam, Kepulauan Riau.



- 11) Ketua DPP APINDO Aceh, H.M Dahlan Sulaiman SE.M.Si menjadi Narasumber pada Kegiatan Workshop Peningkatan Daya Saing dan Daya Tarik Penanaman Modal Di Aceh pada Tanggal 25 Septembar 2017 Bertempat di Grand Nanggro Hotel Banda Aceh.



12) APINDO Aceh juga menghadiri Workshop Revitalisasi Program Kerjasama IMT-GT yang dilaksanakan pada 09 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dan Ketua DPP APINDO Aceh M. Dahlan Sulaiman, SE. M.Si ditunjuk sebagai pemateri/Narasumber pada kegiatan dimaksud.



13). Pada Tanggal 26 Oktober 2017 Ketua DPP Apindo Aceh M. Dahlan Sulaiman, SE. M.Si mengikuti Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Aparatur Pemerintah yang dilaksanakan oleh Disnakermobduk yang dilaksanakan di Hotel Grand Naggroe, Banda Aceh.



14) Pada tanggal 22 s/d 25 Nopember 2017 menghadiri *Asia Competitiveness Institute Annual Conference National University Singapore (NUS)* Bertempat di Grand Capthorne Hotel, Singapura. Pada konferensi tersebut Ketua DPP APINDO Aceh M. Dahlan Sulaiman, SE. M.Si menyampaikan Hasil Survey Apindo tahun 2017 di Provinsi Aceh.



15) Pada tanggal 3 Desember 2017 Meninjau Usaha Binaan DPP Apindo Aceh ,Pabrik Pengolahan Ikan Laut milik UKM di Lhok Seudu, Aceh Besar.



16) Tanggal 4 Desember 2017 Pengurus DPP APINDO Aceh meninjau Usaha Konveksi milik UKM Binaan DPP APINDO Aceh di Sibreh Sukamakmur, Aceh Besar.



- 17) Ketua DPP APINDO Aceh M. Dahlan Sulaiman, SE. M.Si menjadi Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Peningkatan Investasi di Provinsi Aceh (Analisis Faktor Syariat Islam dan Konflik Keamanan 2010 - 2016) untuk penyusunan Desertasi Mahasiswa Pasca Sarjana Program Strata III (S3) Universitas Islam Negari (UIN) Sumatra Utara, atas nama Dra.Malahayati M.Ag. Dilanjutkan dengan bimbingan langsung pada hari Rabu yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh di Peunanyong Banda Aceh.

Peluang Investasi

A. Sektor Pertambangan dan Energi

1. Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geothermal) dan Tenaga Air. Provinsi Aceh menyimpan potensi panas bumi yang cukup besar. Dua kawasan panas bumi yang tengah dikembangkan di Provinsi Aceh adalah wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Seulawah Agam, Aceh Besar dan WKP Jaboi, Pulau Weh.
2. Emas. Provinsi Aceh banyak terdapat potensi lokasi penambangan emas yang tersebar di beberapa daerah, antara lain di Gunong Ujeung Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur masih digarap secara tradisional oleh masyarakat.
3. Biji Besi, di Kabupaten Aceh Besar
4. Timah Hitam (Pb)
5. Granite, di Kabupaten Aceh Selatan
6. Marmer, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan
7. Magnesium, di Kabupaten Aceh Besar yang cukup banyak
8. Pabrik Semen, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie., Tamiang

B. Kelautan dan Peikanan

1. Perikanan tangkap lepas pantai

2. Budidaya rumput laut
3. Keramba ikan dan Lobster
4. Pengolahan dan Pembekuan Ikan Tuna
5. Pengolahan Tepung Ikan
6. Budidaya Teripang dan Tiram

C. Pertanian dan Peternakan

1. Peternakan dan penggemukan sapi
2. Peternakan ayam potong dan ayam petelur.
3. Pabrik Pakan Ternak

D. Perkebunan

1. Kopi
2. Coklat
3. Karet
4. Sawit
5. Nilam
6. Jagung
7. Kayu Jabon.

E. Industri/Pengolahan

1. Pengolahan CPO
2. Pengolahan CPO ke barang jadi (minyak makan, margarine dan lain-lain)
3. Pengolahan Cacao
4. Pengolahan ikan dan tepung ikan
5. Pakan Ternak
6. Packing (kemasan).

F. Pariwisata dan Hiburan

1. Pembangunan Kawasan dan Taman Wisata
2. Pengolahan wisata air/sungai (kapal, resto terapung)
3. TV Lokal.
4. Pacuan Kuda

G. Perhubungan

1. Maskapai penerbangan lokal (antar Kabupaten dan Provinsi)
2. Perhubungan lintas laut antar Kabupaten dan Pulau

H. Perdagangan dan Ritel

1. Mall di Kota Banda Aceh, Lhoukseumawe dan Langsa.

DPP APINDO SUMATERA UTARA

Ketua	: Parlindungan	Purba
Sekretaris	: Laksamana	Adiyaksa
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 13	Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 1.192	Perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 61	Perusahaan

Beberapa kegiatan yang dilakukan DPP Sumatera Utara selama tahun 2017 :

1. Pertemuan DPP APINDO Sumatera Utara, BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara

Pertemuan antara DPP APINDO Sumatera Utara dengan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan terkait dengan pembahasan iuran BPJS yang berdasarkan UMK sesuai dengan PP 78.



2. Kunjungan Duta Besar Republik Korea ke Medan Sumatera Utara

Kunjungan Duta Besar Korea Duta Besar Republik Korea Bapak Cho Taiyoung Ke Medan Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Pemerintahan Korea dengan Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara Pada Khususnya dalam hubungan Bisnis-Ekonomi, budaya, pariwisata, dan lainnya



3. Survey Daya Saing Usaha

Survey daya saing usaha yang diadakan di Medan merupakan survey daya saing usaha tahap keenam yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara, National University of Singapore (NUS) / Asia Competitiveness Institute (ACI). Tujuan Survei ini adalah untuk mengetahui seberapa besar daya saing usaha di setiap daerah yang di survey. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa, 19 September 2017 di Hotel Adimulia Medan.



4. Diskusi Dunia Usaha Bersama BPJS Kesehatan & PT. PLN

Diskusi dunia usaha yang diselenggarakan pada hari kamis, 02 November 2017 di Hotel Karibia Buotique Hotel Medan, bertujuan agar setiap perusahaan ikut serta dalam memajukan program pemerintah untuk menjamin seluruh pekerja agar masuk ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan juga memberikan masukan kepada PT. PLN agar PT. PLN ke depannya lebih baik lagi dalam pencapaiannya dan mendukung perekonomian di Sumatera Utara.



5. Focus Group Discussion (FGD) Deputi Bidang Kemaritiman Dengan Apindo

Focus Group Discussion (FGD) diadakan di Medan pada hari Jumat, 10 November 2017, bertempat di JW Marriott Hotel Medan. Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas percepatan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan Ekonomi untuk mengkordinasikan pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sehubungan dengan terbitnya praturan presiden nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.



6. Pertemuan APINDO dengan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPP Apindo Sumut) melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kota Tebing tinggi dan juga didampingi oleh Dewan Pengurus Kota APINDO Tebing Tinggi, Jumat (8/12/2017). Dalam kesempatan ini APINDO mengajak para pengusaha yang ada di Tebing Tinggi untuk bergabung dengan Apindo. Melalui pemerintah dapat mengusulkan perusahaan-perusahaan untuk bergabung di Apindo sebagai wadah atau organisasi yang mengayomi para pengusaha dan kerjasama yang telah terbentuk antara pengusaha dan pemerintah dapat dipertahankan dan ditingkatkan, agar terciptanya iklim usaha yang lebih sehat lagi.



7. Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota APINDO Se- Sumatera Utara

Adapun Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota Apindo Se-Sumatera Utara yang dilantik meliputi: DPKot Apindo Tebing Tinggi, DPKab Apindo Serdang Bedagai, DPKot

Apindo Pematang Siantar, DPKab Apindo Simalungun, DPKab Apindo Toba Samosir dan juga Pembentukan APINDO Baru yaitu DPKab APINDO Samosir dan DPKot APINDO Sibolga, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2017 bertempat di Samosir Villa, Tuk Tuk Siadong, Kab Samosir, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga di hadiri oleh Ketua Umum APINDO Bapak Hariyadi B Sukamdani, Bupati Samosir Bapak Rapidin Simbolon dan Direktur utama BODT (Badan Otorita Danau Toba) Bapak Arie Prasetyo.



8. Rapat Kerja Konsultasi Provinsi Sumatera Utara (RAKERKONPROV)

Rakerkonprov adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara, Kegiatan Rakerkonprov meliputi laporan kinerja DPKot/DPKab se-Sumatera Utara, selama 1 (satu) Tahun. Rakerkomprov bertujuan untuk memberikan paparan, arahan serta masukan terhadap organisasi kedepannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2017 di Samosir Villa, Tuk Tuk Siadong, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.



9. Business Meeting APINDO Sumatera Utara Bersama BEI (Bursa Efek Indonesia)

Business Meeting APINDOSU bersama BEI dilaksana pada tanggal 16 Desember 2017 yang bertempat di Hotel Adimulia Medan. Pada acara tersebut pengusaha yang tergabung di APINDO didorong untuk "go public". Dengan *go public* perusahaan juga dapat memperbaiki citra dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan atau *good corporate govermance* (GCG). Dengan "go public" maka akan tercipta perusahaan yang sehat untuk berkontribusi kepada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi daerah.



DPP APINDO RIAU

Ketua	: Wijatmoko Rah Trisno
Sekretaris Eksekutif	: Edi Darmawi
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 11 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 357 Perusahaan

Dari total 12 Kabupaten Kota yang ada di seluruh Propinsi Riau, DPP APINDO Riau telah mempunyai perwakilan APINDO DPK/Kota di 11 kabupaten /kota, dimana hanya tinggal 1 kabupaten yang belum terdapat perwakilan APINDO yaitu Kabupaten Rokan Hilir.

Berbagai potensi investasi tersebar di 12 kabupaten / kota di propinsi Riau, diantaranya:

- Industri pengolahan produk turunan CPO
- Industri perkebunan dan pertanian seperti: kelapa sawit, tebu & jagung, pengolahan karet, sawah dan palawija, perkebunan Nenas
- Sektor pembangkit tenaga listrik, industri bio diesel, petrokimia, pupuk organik dan kimia
- Pengembangan industri pariwisata di kabupaten Pelalawan dan Bono sebagai spot wisata dunia
- Sektor peternakan sapi dan sarang wallet
- Industri pertambangan : batubara, kaolin, bentonit, batu kapur, emas dan perak serta industri semen
- Pengembangan Pelabuhan, container dan jasa angkutan pelabuhan
- Industri pengolahan kayu dan industri kapal kayu di daerah pantai

Selain itu Propinsi Riau juga mengembangkan Kawasan Khusus seperti :

- Kawasan Pulau Jemur dan Padamaran
- Kawasan industri Dumai dan Tenayan
- Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kuala Elok Industrial park
- Kawasan Techno Park Pelalawan dan Bono.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP APINDO Riau selama tahun 2017 diantaranya :

- 1) CEOs Gathering DPN APINDO “Outlook Perekonomian Indonesia 2017, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPP APINDO Riau dimana sebagai narasumber adalah Menteri Keuangan RI ibu Sri Mulyani.



- 2) TRY OUT DIALOG SOSIAL Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Palembang Sumatera Selatan, diadakan di Hotel Aston Palembang, Sumatera Selatan 22-24 November 2017



3) Audiensi Apindo Riau dengan OJK Wilayah Riau, 17 Januari 2017 dan DPP APINDO Riau diwakili oleh Ketua dan sekretaris DPP Riau serta Bp Mayunir dan Bukhari dari pengurus DPP Riau



4) Penandatanganan MOU APINDO Riau dengan STIE Riau & AKM Akbar pada tgl 26 Januari 2017



7) Audiensi dengan Gubernur Riau, di kediaman Gubernur di kota Pekanbaru pada tanggal 28 April 2017.



5) Acara Silaturahmi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Riau dengan DPP Apindo Riau, 31 Januari 2017 bertempat di Sekretariat DPP APINDO Riau.



8) Audiensi dengan Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Riau, dihadiri oleh Ketua DPP Riau Bp Wijatmoko, Edi Darmawi, Tiffany, Maya Laura, Fahrial, berlangsung pada tgl 8 Mei 2017 di kantor BI wilayah Riau.



6) Audiensi dengan Kapolda Riau, di kantor Polda Riau pada tanggal 23 Maret 2017

9) Survey Daya Saing Usaha bekerjasama antara DPP Apindo Riau dengan DPN Apindo dan Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura, diadakan di hotel Premier pada tgl 21 Juli 2017



10) Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) APINDO Riau Tahun, diadakan di Hotel Premier Pekanbaru, tgl 21 Juli 2017.



11) Silaturahmi dan Perkenalan dengan Danrem 031 WB yang baru Bp. Brigjen TNI. Edi Nasution, S.SP, bertempat di Makorem 031 WB Pekanbaru pada tgl 6 September 2017



12) Rapat Konsolidasi DPK Apindo Se Riau, diadakan di Pendopo Dumai pada tgl 30 Oktober 2017



13) Undangan DPK Apindo Dumai “Acara Musyawarah Kota DPK Apindo Dumai”, dihadiri oleh ketua Wijatmoko, Agus Setiawan, acara berlangsung di Gedung Pendopo Dumai pada tgl 16 Mei 2017



14) Pelantikan DPK APINDO Pekanbaru Masa Bhakti 2017 – 2022, dihadiri oleh Ketua DPP APINDO, Sekretaris dan Bendahara, bertempat di rumah kediaman Walikota Pekanbaru pada tgl 6 September 2017



15) Undangan Nabila Production “Partisipasi pada event 1st Southeast asia business forum 2017, DPP APINDO Riau diwakili oleh Wijatmoko, Zulfikar dan Agus Setiawan, acara ini berlangsung pada tgl 22 Mei 2017.



DPP APINDO JAMBI

Ketua	: Junus Abdullah
Sekretariat	: Rizal
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 5 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 78 Perusahaan

DPP APINDO Jambi selama tahun 2017 telah melaksanakan berbagai kegiatan baik internal maupun partisipasi pada kegiatan eksternal. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPP APINDO Jambi diantaranya :

- 1) Tanggal 1 - 2 Maret 2017 menghadiri Forum Silaturahmi dan Konsolidasi DPN APINDO seputar penugasan Hakim Ad Hoc PHI dan Kasasi, bertempat di Hotel Great Western, Serpong, Tangerang.
- 2) Tanggal 19-21 April 2017 menghadiri acara Rakerkonas APINDO ke 28 di Hotel Aston, Palembang.
- 3) Tanggal 6 Mei 2017 menyelenggarakan Survey Daya Saing Usaha tahap V atas kerjasama APINDO dengan AC1-NUS bertempat di Hotel Abadi Suite Jarnbi.



- 4) Tanggal 27 Juli 2017 rnenghadiri undangan pertemuan dengan Konsulat Republik Singapura pembicaraan seputar investasi di daerah Jambi bertempat di Swiss Beshotel Jambi.
- 5) Tanggal 31 Juli 2017 menghadiri undangan Disnakertrans Provinsi Jarnbi acara Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 2017 dan Penyerahan Bantuan CSR bertempat di rumah dinas Gubernur Provinsi Jarnbi.
- 6) Tanggal 18 September 2017 menghadiri undangan Menko Perekonomian masalah Sosialisasi dan Konsultasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan Berusaha bertempat di Hotel Best Westren Batam, Kepri.
- 7) Tanggal 5 Oktober 2017 menghadiri Focus Group Discussion dalam rangka Review Dampak Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah terhadap kemudahan Investasi di ruang rapat kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi.



8) Tanggal 11-14 Oktober menghadiri undangan Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja bertempat di Hotel Royal, Jakarta

9) Tanggal 6 November 2017 Rapat DPP-DPH APINDO dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Sektoral menyikapi usul Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) bertempat di Sekretariat APHI Jambi.



10) Tanggal 8 November 2017 menghadiri undangan Korwil KSBSI Provinsi Jambi dalam rangka Sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Hotel Royal Golden Harvest Jambi.



PELUANG INVESTASI

Beberapa potensi daerah Jambi sebagai peluang investasi :

1. Perkebunan/Pertanian
 - Kelapa sawit
 - Karet
 - Kulit manis
 - Kopi
 - Coklat
 - Pinang
2. Industri
 - Pengolahan kelapa sawit dan turunannya
 - Pengolahan karet dan turunannya
 - Pengolahan pakan ternak
3. Pertambangan/Energi
 - Batubara
 - Minyak dan Gas
4. Pariwisata
 - Kawasan wisata/Resort
 - Perhotelan
 - Perhubungan
 - Infrastruktur
5. Jasa dan Perdagangan
 - Pembangunan Pusat Bisnis
 - Pergudangan
 - Ritel/Mall

DPP APINDO BENGKULU

Ketua : M. Basri Muhammad
Sekretaris Eksekutif : Adran
Dewan Pimp. Kab /Kota : 4 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa : 90 Perusahaan

Dalam menjalankan roda organisasi DPP APINDO Bengkulu selalu rutin melakukan aktifitas administrasi sekretariat, disamping memberikan pelayanan keanggotaan, serta aktif di seluruh kegiatan tripartite daerah.

Memberikan pemantapan kepada DPK diseluruh Propinsi Bengkulu, serta melakukan komunikasi dan koordinasi kepada banyak pihak terkait pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk pembahasan UMP dan UMK serta UMSP tahun 2018, disamping itu selalu mengikuti acara yang diselenggarakan oleh DPN APINDO.

Beberapa potensi Ekonomi di Provinsi Bengkulu, diantaranya adalah :

1. Perkebunan Besar (Kelapa Sawit, Karet, Kakau, Teh).
2. Perkebunan Tanaman Industri dan Pengolahannya (Kayu Sengon, Kopi, Sayuran, Buah-Buahan dan Rempah-Rempah).
3. Pertambangan Batu Bara dan Pasir Besi.
4. Perikanan Laut dan Pengolahannya.
5. Tambak Udang.
6. Perhotelan.
7. Pembangunan pembangkit listrik dan pemanfaatan geothermal.
8. Pariwisata (Laut, Pegunungan, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah).

Kegiatan kegiatan yang diikuti DPP APINDO Bengkulu selama tahun 2017 diantaranya :

1. Seleksi Calon Karyawan Dan Peserta Pemagangan, 6 Februari 2017.



2. Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri berbasis pengguna, 3 April 2017.



3. Sosialisasi Perkembangan Perekonomian Daerah Dan Perizinan di Bank Indonesia Bengkulu, 26 April 2017.



4. Penandatanganan Komitmen Pemagangan Ke Jepang dan Pemagangan Dalam Negeri, dihadiri Oleh Menteri Tenaga Kerja, 17 November 2017.



DPP APINDO LAMPUNG

Ketua	: M. Yusuf Kohar, SE., MM.
Sekretaris Eksekutif	: Hariyanto
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 6 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 428 Perusahaan

Sebagaimana telah diketahui bahwa APINDO merupakan Organisasi Pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas dan mandiri yang mempunyai program khusus menangani masalah Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, APINDO merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkesinambungan.

Sebagai suatu organisasi pengusaha DPP APINDO Lampung mempunyai tujuan agar “**Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Dunia Usaha**”, Disamping itu DPP APINDO harus mampu mempresentasikan peranan dunia usaha Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam melindungi, membela serta memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota DPP APINDO.

DPP APINDO Lampung mempunyai 4 buah kiat dalam menjalankan tugas organisasi, yaitu: **Pertama** adalah Pelayanan anggota, yaitu DPP APINDO Lampung berkewajiban melayani anggota sebaik-baiknya dalam berbagai hal, khususnya yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Kedua, organisasi yang mampu mendorong terwujudnya iklim Investasi yang kondusif dan **Ketiga**, menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Keempat, Perkuatan Struktur Organisasi, Perkuatan Kepengurusan, Perkuatan Pelayanan Anggota dan Perkuatan Sekretariat.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2017 berupa kegiatan internal maupun eksternal adalah sesuai dengan program kerja yang telah

dicanangkan dalam Musyawarah Daerah DPP Apindo Lampung Tahun 2014.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017, diantaranya :

1. Mengadakan koordinasi antara DPP Apindo Lampung dengan DPK diseluruh Propinsi Lampung yang berjumlah 10 DPK, berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengupahan untuk Periode Tahun 2017. Rapat kegiatan diadakan pada bulan Januari 2017 bertempat di Sekretariat DPP Apindo Lampung, untuk 1 (satu) periode tahun 2017.
2. DPP Apindo Lampung dan DPK, menghadiri Kegiatan Pembinaan Klinik KB Perusahaan pada hari Senin, 13 Pebruari 2017 bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, dan pada hari Selasa-Rabu, 14-15 Pebruari 2017 bertempat di Kabupaten Mesuji, serta pada hari Rabu 16 Pebruari 2017 bertempat di Kota Bandar Lampung.
3. Menghadiri Forum Silaturahmi Dan Konsolidasi Nasional DPN Apindo pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at, 01, 02 dan 03 Maret 2017 bertempat di Great Western Resort Hotel And Convention Center, Serpong – Tangerang.
4. DPP Apindo Lampung dan DPK, menghadiri workshop kekayaan Intelektual dalam rangka Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Bagi UMKM, bertempat di Emersia Hotel & Resort, Kota Bandar Lampung, 21 Maret 2017
5. DPP Apindo Lampung dan DPK, telah menghadiri Sosialisasi Norma Penyandang

- Disabilitas Program Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2017, Rabu 3 Mei 2017 bertempat di Emersia Hotel & Resort, Kota Bandar Lampung.
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan, pada Kamis 18 Mei 2017 bertempat di Swiss Belhotel Lampung (The Seven Hotel), Kota Bandar Lampung.
 7. DPP Apindo Lampung, telah menghadiri Workshop Diseminasi Harmonisasi Sertifikasi Kompetensi lintas sektor & Referencing to AQRF, pada hari Jum'at, 18 Agustus 2017 di SwissBelhotel Lampung , Kota Bandar Lampung.
 8. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Selasa 17 Oktober 2017 bertempat di Hotel Horison Lampung, Kota Bandar Lampung.
 9. Kegiatan Sosialisasi Pokok-Pokok Pengaturan PMK Jaminan dan Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima, Kamis, 16 Nopember 2017 bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung.
 10. DPP Apindo Lampung, telah menghadiri Kegiatan Try Out Dialog Sosial – Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Rabu–Jumat, 22-24 Nopember 2017, bertempat di Hotel Aston, Palembang.
 11. DPP Apindo Lampung dan DPK, telah menghadiri Seminar Nasional “Aspek Hukum Pidana Korporasi” Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Selasa, 28 Nopember 2017, bertempat di GSG Universitas Malahayati. Kota Bandar Lampung.
 12. DPP Apindo Lampung, dalam kegiatan Advokasi telah memberikan pelayanan, pembelaan, pendampingan kepada anggota diantaranya :
 - a. PT. Umas Jaya Agrotama, bulan Maret 2017, di PHI.
 - b. PT. Fermentech Indonesia, bulan Mei 2017, di Disnakertrans. Propinsi..
 - c. PT. Sari Segar Husada, bulan Juli 2017, di Disnakertrans. Propinsi.
 - d. PT. Sweet Indolampung, bulan Oktober 2017, di PHI.
 - e. PT. Indolampung Perkasa, bulan Oktober 2017, di PHI.
 - f. PT. Eight International, bulan Desember 2017, di Kuasa Hukum TK.
 15. DPP Apindo Lampung, mengadakan kegiatan “APINDO LAMPUNG GATHERING 2017”, dengan tema : “Membangun persaudaraan dan silaturahmi antar pelaku dunia usaha dengan seluruh stakeholders demi mewujudkan ekonomi Lampung yang tangguh”, pada hari, tanggal Jum'at, 22 Desember 2017 bertempat di Hotel Novotel, Bandar Lampung”.
- Potensi Investasi di Propinsi Lampung diantaranya :
1. Lahan Perkebunan Tebu
 2. Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
 3. Lahan Perkebunan Karet
 4. Lahan Pekebunan Singkong
 5. Pertambangan Emas di Kab. Kota Agung & Kab. Pesawaran
 6. Pertambakan Udang
- Jumlah DPK se Propinsi Lampung saat ini sebanyak 10, yaitu :
1. DPK Kota Bandar Lampung
 2. DPK Lampung Selatan
 3. DPK Lampung Tengah
 4. DPK Lampung Timur
 5. DPK Metro
 6. DPK Lampung Utara
 7. DPK Tulang Bawang
 8. DPK Tulang Bawang Barat
 9. DPK Way Kanan, dan
 10. DPK Lampung Barat.

DPP APINDO SUMATERA SELATAN

Ketua	: Sumarjono Saragih
Sekretaris Eksekutif	: Harry Hartanto
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 8 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 66 Perusahaan

KEGIATAN

Beberapa Kegiatan DPP APINDO Sumatera Selatan selama tahun 2017 :

1. Musyawarah Provinsi (Musprov) Apindo Sumsel Tahun 2017

Musyawarah Provinsi (Musprov) Apindo dengan tema “Bersatu Mewujudkan Dunia Usaha yang Berdaya Saing” diadakan di Hotel Santika pada tanggal 7 Maret 2017.

Ketua DPP APINDO Sumsel masa bakti 2017 - 2022 hasil Musprov, telah terpilih kembali yaitu Bapak Sumarjono Saragih.



Musyawarah Provinsi DPP APINDO Sumsel Tahun 2017

2. RAKERKONAS APINDO ke-28 dan Pelantikan Pengurus DPP APINDO Sumsel Masa Bakti 2017 – 2022

DPP APINDO Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Rakerkonas APINDO ke-28 yang dilaksanakan di Hotel Aston Palembang. Rakerkonas dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja

RI, dan dihadiri juga oleh Gubernur Sumsel. Sebagai rangkaian RAKERKONAS, di-



Menteri Tenaga Kerja RI membuka RAKERKONAS APINDO di Palembang



Foto bersama Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Sumsel dan Bupati MUBA



Penyerahan Bendera APINDO oleh Ketua Umum APINDO kepada Ketua DPP APINDO Sumsel terpilih

laksanakan Konferensi Pers APINDO dengan narasumber DPN APINDO dan DPP APINDO Sumsel.



Konferensi Pers RAKERKONAS APINDO

3. Survey Daya Saing Usaha ACI Singapore - APINDO

Pelaksanaan survey daya saing usaha yang merupakan kerjasama ACI-NUS Singapore dan APINDO dilaksanakan di Palembang untuk ke-enam kalinya. Dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 bertempat di Hotel Aston.

Pada bulan November 2017, Ketua DPP APINDO Sumsel diundang untuk menghadiri konferensi ACI tahunan di Singapura. Pada konferensi tahun ini Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin berkesempatan hadir menyampaikan paparan mengenai pembangunan di Sumsel.



Survey Daya saing Usaha ACI Singapore- APINDO Di Palembang, Agustus 2017



Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin pada acara ACI Annual Conference Singapore, November 2017

4. Silaturahmi dengan Media

DPP APINDO Sumatera Selatan melaksanakan pertemuan bersama media di Hotel All Nite & Day Palembang. Pertemuan dalam rangka silaturahmi dan dialog mengenai kondisi dunia usaha Sumatera Selatan.

5. Diskusi Forum HR

Beberapa diskusi forum HR dilaksanakan



Silaturahmi DPP APINDO Sumsel dengan Media

dengan topik antara lain tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan harian lepas (KHL) dan tentang Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan.

6. Rapat Pengurus DPP APINDO SUMSEL



Diskusi Forum HR/SDM APINDO Sumsel

Rapat Pengurus DPP APINDO Sumsel dilaksanakan rutin membahas mengenai program kerja dan review kegiatan, dan lain-lain terkait dunia usaha.

7. Dialog Sosial Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial



Rapat Pengurus DPP APINDO Sumsel

CNV International dan DECP-Belanda, bersama mitra kerja masing-masing KSBSI dan APINDO melaksanakan Dialog Sosial yang diikuti oleh 23 orang peserta perwakilan APINDO dan KSBSI. Acara berlangsung pada 22 – 24 November 2017 yang bertempat di Hotel Aston Palembang.

8. Narasumber Media Cetak dan Media Elektronik

Narasumber untuk media cetak antara lain:



Dialog Sosial Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Kerjasama APINDO – DECP dan CNV International Di Palembang, November 2017

Media Indonesia, Radar Palembang, Tribun Sumsel, Global Media.

Narasumber di acara televisi:

- Narasumber di TVRI Sumsel, topik “Sinergi Pengusaha dan Pekerja”
- Narasumber di Kompas TV, topik “Pendanaan



Wawancara Ketua DPP APINDO Sumsel dengan media cetak

Infrastruktur”

- Narasumber di TVRI Sumsel, topik “Buruh dan Permasalahannya”

9. Aktif Sebagai Narasumber

DPP APINDO Sumatera Selatan aktif menjadi Narasumber dalam beberapa kegiatan



Narasumber di acara televisi

mitra kerja (baik lembaga pemerintah maupun swasta), beberapa diantaranya:

- Narasumber kegiatan Seminar Nasional CSR KESSOS di Auditorium Pemerintah Provinsi Sumsel - Gedung Bina Praja.
- Narasumber pada Sosialisasi PERPPU No 1 Tahun 2017 PMK No 70 Tahun 2017 di kantor DJP Kanwil Pajak Sumsel.
- Narasumber di acara Power Session 2017



Narasumber acara Seminar Nasional CSR KESSOS

Indonesia Marketing Association (IMA)
Chapter Palembang di Atrium Palembang
Indah Mall



Narasumber acara Ditjen Pajak,
Sosialisasi PERPPU No 1 tahun 2017

10. Kegiatan Tim Advokasi Ketenagakerjaan APINDO Sumsel

- Konsultasi perusahaan anggota dengan Tim



Narasumber acara Power Session Indonesia Marketing
Association (IMA) Chapter Palembang

Advokasi Ketenagakerjaan APINDO Sumsel.

- Pendampingan perusahaan oleh Tim Advokasi Ketenagakerjaan APINDO Sumsel di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

11. Peluncuran Program “1000 Gerobak Keren” dalam rangka Road to Asian Games 2018

Dalam rangka Road to Asian Games 2018 di Palembang, DPP APINDO Sumsel bekerjasama dengan GAPKI Sumsel dan Forum CSR Kessos meluncurkan program “1000 Gerobak Keren” untuk pedagang kaki lima. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Sumsel pada kegiatan Seminar Forum CSR Kessos.

12. Audiensi Membangun Jejaring dan

Sinergi dengan Mitra Kerja

Beberapa pertemuan/audiensi dengan



Peluncuran 1000 Gerobak Keren
“Road to Asian Games 2018” oleh Gubernur Sumsel

instansi/lembaga pemerintah/swasta dalam rangka sinergi program kerja/membangun jejaring dan sinergi kegiatan, antara lain dengan :

- Pertemuan dengan Forum CSR Kessos
- Pertemuan dengan Media Indonesia & Group
- Pertemuan dengan Kanwil Ditjend Pajak Sumsel Babel
- Pertemuan dengan K-SPSI Sumsel

13. Terlibat Aktif di Kegiatan-Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Mitra Kerja/Pihak Eksternal

DPP APINDO Sumatera Selatan selalu aktif dalam kehadiran rapat/pertemuan/kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

PROSPEK INVESTASI

Dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat seluas ±300 Ha.



Pertemuan DPP Apindo Sumsel dengan Forum CSR KESOS

- Eco Industrial Park

- Pengembangan industri hilir kelapa sawit, karet, batubara
- Terintegrasi dengan jaringan jalan, kereta api, pelabuhan, dan pusat distribusi regional
- Pelayanan satu pintu
- Insentif

Peran Swasta

- Menjalankan Core Bisnis pengembangan infrastruktur dan pengelolaan kawasan
- Menguasai bisnis penyediaan energi baru dan terbarukan, pengelolaan air
- Limbah, sampah dan konstruksi bangunan
- Pariwisata, MICE
- Industri hilir kelapa sawit dan karet
- Industri pengolahan biji kopi

Peluang industri pengolahan

- Industri hilir produk karet.
- industri hilir pengolahan kelapa sawit/CPO (oleo chemical, minyak goreng/margarin, bio diesel, dll); terutama bio diesel berbahan baku CPO untuk memenuhi kebutuhan Pertamina dalam program solar B 20 tahun 2016.
- Pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan biomassa dari limbah kelapa sawit.

DPP APINDO BANTEN

Ketua	: Deddy Djunaedi
Sekretaris Eksekutif	: Arwin Kusmanta
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 7 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 618 Perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 15 Perusahaan

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, memiliki peluang investasi dan pengembangan yang sangat besar. Dalam level nasional, Banten selalu masuk dalam jajaran 5 besar sebagai daerah tujuan investasi. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Banten, total realisasi investasi Provinsi Banten Triwulan II (April-Juni) Tahun 2017 sebesar Rp. 11,46 triliun dengan 1.439 proyek.

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada TW II Tahun 2017 sebesar Rp. 9.43 triliun dengan 1.157 proyek dan berada di peringkat ke-4 setelah Provinsi Sulawesi

Tengah. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2,03 triliun dengan 282 proyek dan menempati peringkat ke-6 setelah Provinsi Jawa Tengah. Namun secara kumulatif, dari Januari-Juni realisasi PMA Banten menduduki peringkat ke-3 dengan realisasi investasi sebesar 1,224 juta US\$ dan 1525 proyek, sementara PMDN per Januari-Juni berada di peringkat ke-5 dengan capaian Rp. 7,5 triliun dan 393 proyek.

Pencapaian investasi tersebut merupakan indikator bahwa iklim dan potensi penanaman modal di Banten sangat kondusif. Keberhasilan realisasi investasi Banten dari Januari-Juni mencapai 168,79 persen terhadap target daerah dan 38,45 persen terhadap target nasional.

Sektor Investasi

Adapun sektor investasi yang paling banyak diburu PMA ialah Perdagangan dan Reparasi dengan 246 proyek dan nilai investasi Rp. 484,63 miliar, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik dengan 150 proyek dan nilai investasi Rp. 671 miliar, dan industri kimia/farmasi sebanyak 147 proyek dan nilai investasi Rp. 1,3 triliun. Sementara pada sektor PMDN, investasi yang paling banyak diburu ialah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik sebanyak 57 proyek dan nilai investasi Rp. 104,03 miliar, industri kimia dasar dan farmasi sebanyak 34 proyek dan nilai investasi Rp. 57,19 miliar, dan Industri karet, barang dari karet dan plastik sebanyak 31 proyek dan nilai investasi Rp. 48,18 miliar.

Sebaran Wilayah Investasi

Dari sebaran investasi dari TW II Tahun 2017, porsi realisasi investasi tertinggi PMA berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 505 proyek dengan nilai investasi Rp.3,31 triliun, selanjutnya berturut-turut Kota Serang sebanyak 9 dengan nilai investasi Rp. 2,36 triliun, Kota Cilegon sebanyak 103 proyek dan nilai investasi Rp. 1,67 triliun, Kabupaten Serang sebanyak 180 proyek dan Rp. 1,48 triliun, Kota Tangerang sebanyak 220 proyek dan nilai investasi Rp. 475,36 miliar, Kota Tangerang selatan sebanyak 127 proyek dan Rp. 110,51 miliar, dan Kabupaten Lebak sebanyak 15 proyek dan Rp. 2,65 miliar.

Sementara itu, Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), posisi Kabupaten Tangerang bertengger di urutan pertama sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi. Dengan rincian, investasi Kabupaten Tangerang sebanyak 121 proyek dengan nilai investasi Rp. 1,25 triliun, selanjutnya berturut-turut

diikuti oleh Kota Cilegon sebanyak 28 proyek dan nilai investasi Rp. 239 miliar, Kabupaten Serang sebanyak 48 proyek dan nilai investasi Rp. 195,09 miliar, Kota Tangerang sebanyak 55 proyek dan nilai investasi 194 miliar, Kota Serang sebanyak 6 proyek dan nilai investasi 85,32 miliar, Kota Tangerang Selatan sebanyak 15 proyek dan nilai investasi Rp. 44,32 miliar, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 proyek dan nilai investasi Rp 22,26 miliar.

Untuk mendongkrak realisasi investasi, Provinsi Banten melalui DPMPTSP Banten terus melakukan terobosan dalam bidang layanan. Salah satu terobosan tersebut yakni pelayanan dan gagasan visioner lewat program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis online yang diberi nama dengan SIPEKA atau (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka).

Berdasarkan penjabaran data pencapaian investasi, sektor investasi dan sebaran wilayah investasi di Provinsi Banten, DPP APINDO Provinsi Banten berharap pencapaian investasi di Provinsi Banten pada tahun 2018 dapat meningkat, baik PMA maupun PMDN. Dengan adanya SIPEKA memberikan kemudahan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan semoga dapat meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Banten.

Kegiatan

Beberapa Kegiatan DPP APINDO Provinsi Banten selama Tahun 2017 :

1. Workshop Membuat Struktur dan Skala Upah di Perusahaan 13 April 2017

Perusahaan wajib membuat dan memiliki struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b PP 78 Tahun 2015 yaitu terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 dan bagi perusahaan yang belum membuat Struktur dan Skala Upah akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 12 Permenaker

Nomor 1 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, DPP Apindo Provinsi Banten telah menyelenggarakan Workshop Sehari Tentang Membuat Struktur dan Skala Upah dengan tujuan agar peserta workshop dapat memahami dengan baik maksud, tujuan dan bagaimana cara membuat struktur dan skala upah yang bisa diterapkan di masing-masing perusahaan beserta sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya.

Workshop ini diselenggarakan oleh DPP APINDO Provinsi Banten pada Kamis, 13 April 2017 di Grand Serpong Hotel - Kota Tangerang yang dihadiri oleh 105 Perusahaan Anggota APINDO Se-Banten. Ketua DPP APINDO Provinsi Banten Bpk. Deddy Djunaedi membuka acara Workshop ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Sesi Pertama oleh Kadisnaker Provinsi Banten Bpk. H. Alhamidi, S.Sos., M.Si., kemudian pemaparan materi Sesi Kedua oleh Ibu Adriani, SE., MA. selaku Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI, pemaparan materi Sesi Ketiga oleh Ibu Imelda Savitri, SE. selaku Kasie Fasilitasi Pengupahan Kemenaker RI dan Bpk. Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten sebagai moderator.



2. Members Gathering 4 Mei 2017

Setiap tahun kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang semakin meningkat. Berdasarkan informasi di Pengadilan PHI Serang bahwa kasus tahun 2016 naik lebih dari

40% dari kasus tahun 2015 dan diperkirakan tahun 2017 ini juga akan mengalami kenaikan minimal 25 %.

Dari kasus yang masuk hampir 95% adalah kasus yang berkaitan dengan perselisihan PHK sedangkan sisanya adalah berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, seperti masalah upah dan PKWT (perjanjian kontrak kerja) serta berdasarkan informasi ternyata dari sekian banyak kasus yang masuk di Pengadilan Hubungan Industrial ternyata banyak dimenangkan oleh pihak pekerja atau SP/SB.

Mengingat banyak pengusaha yang belum memahami tentang Bagaimana Kiat-Kiat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dalam acara Members Gathering DPP APINDO PROVINSI BANTEN mengupas tentang masalah tersebut, yang telah diselenggarakan pada Kamis, 4 Mei 2017 dengan narasumber yaitu Bapak Rudy Kurniawan, S.H. dan Ibu Kanthi Rahayu, SH., MM., selaku Hakim Adhoc PHI pada PN Serang Unsur Apindo. Acara Members Gathering ini dihadiri oleh 116 perusahaan Anggota APINDO Se-Banten.



3. Survey Daya Saing Usaha Tahun 2017

DPP APINDO Provinsi Banten bekerja sama dengan National University of Singapore / Asia Competitiveness Institute telah melakukan survey daya saing usaha di Provinsi Banten sejak tahun 2012. Pada tahun 2017 ini selain memaparkan Hasil Survey Daya Saing Tahun 2016, Survey Daya Saing

Usaha diselenggarakan kembali di Provinsi Banten yaitu pada Kamis, 3 Agustus 2017 di Novotel Hotel Tangerang - Kota Tangerang. Survey ini dihadiri oleh perwakilan pengusaha (perusahaan) anggota APINDO Se-Banten



acara tersebut yang diwakili oleh Bapak Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten dengan paparan materi “Peran APINDO untuk Mendukung Kesempatan Kerja di Provinsi Banten”.



4. Rapat Internal Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2018

Dalam rangka persiapan penetapan upah minimum dan upah minimum sektoral Tahun 2018, DPP APINDO Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Internal Pengurus Inti DPP APINDO Provinsi Banten bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Unsur APINDO. Dalam rapat tersebut membahas persiapan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh DPP APINDO Provinsi Banten dalam menghadapi Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Tahun 2018. Rapat internal ini telah diselenggarakan pada Kamis, 3 Agustus 2017 di Novotel Hotel Tangerang – Kota Tangerang.

5. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Disnakertrans Provinsi Banten telah mengadakan Sosialisasi Perda tersebut pada Jumat, 18 Agustus 2017 di Ibis Hotel Gading Serpong. DPP APINDO Provinsi Banten turut hadir dan menjadi Narasumber dalam

6. Pendampingan Revitalisasi SMK

Pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2016 menegaskan perlunya Revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. SMKN 3 Kota Tangerang telah ditunjuk oleh Dit. PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SMK dari 125 SMK Revitalisasi Se-Indonesia. Program Revitalisasi SMK fokus kepada 4 bidang, yaitu Revitalisasi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Kerjasama Industri dan peningkatan kualitas lulusan. Ketua DPP APINDO Provinsi Banten Bpk. Deddy Djunaedi turut hadir dan menjadi Narasumber dalam acara Pendampingan Revitalisasi SMK dengan paparan materi “Penguatan Kemitraan SMK”. Acara tersebut diselenggarakan oleh SMKN 3 Kota Tangerang pada Selasa, 5 September 2017 di Aula SMK Negeri 3 Kota Tangerang.



7. Members Gathering tanggal

8 September 2017

Sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya beralih ke provinsi dan telah berjalan efektif terhitung sejak Januari 2017. Dalam pelaksanaan pengawasannya saat ini banyak telah menimbulkan keluhan bagi perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan besar atau perusahaan yang telah mapan dimana secara umum sudah menjalankan normatif peraturan ketenagakerjaan. Diantara keluhan perusahaan adalah langsung dikeluarkannya NOTA PEMERIKSAAN dan kemudian praktek dilapangan timbul pernyataan-pernyataan beberapa petugas bahwa kalau tidak dijalankan nota pemeriksaannya maka perusahaan akan dihentikan produksinya atau bentuk sanksi lainnya.

Atas dasar tersebut diatas, DPP APINDO Provinsi Banten telah menyelenggarakan



Members Gathering September 2017 dengan tema “Membedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/ PUU/XII/2014 dan Keluhan Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten”. Acara tersebut diselenggarakan pada Jumat, 8 September 2017 di Mayora Distribution Center – Kec. Jayanti Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh 141 perusahaan anggota APINDO Se-Banten.

Bapak Deddy Djunaedi selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Banten membuka acara Members Gathering tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kadisnaker Provinsi Banten Bpk. H. Alhamidi,

S.Sos., M.Si., pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Hakim Adhoc PHI pada PN Serang unsur APINDO yaitu Bpk. Rudy Kurniawan, S.H. dan Ibu Kanthi Rahayu, SH., MM., dan dimoderatori oleh Bpk. Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten.

8. Workshop Membuat Struktur dan Skala Upah di Perusahaan 26 Oktober 2017

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, maka amanat pembuatan Struktur dan skala upah dipertegas bahkan sebagai salah satu syarat dan pendaftaran dan/atau pengesahaan PP atau PKB perusahaan. Sebagaimana dimaksud Pasal 13 Permenaker Nomor 1 Tahun 2017, bahwa Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah paling lambat tanggal 23 Oktober 2017 dan bagi perusahaan yang belum membuat Struktur dan Skala Upah akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 12 Permenaker Nomor 1 Tahun 2017.

Workshop yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Provinsi Banten pada Kamis, 26 Oktober 2017 di Great Western Resort Hotel - Kota Tangerang yang dihadiri oleh 40 Perusahaan Anggota APINDO Se-Banten. Pemaparan Materi disampaikan oleh Ibu Diana Utami, SH., MM., selaku Trainer Kementerian Ketenagakerjaan RI Membuat Struktur & Skala Upah, dan dimoderatori oleh Bpk. Arwin Kusmanta selaku Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten.

9. Musyawarah Kota DPK APINDO Kota



Cilegon Tahun 2017

Musyawarah Kota DPK APINDO Kota Cilegon telah diselenggarakan pada Senin, 27 November 2017 di RM Bintang Laguna, Kota Cilegon. Dalam Musyawarah Kota DPK APINDO Kota Cilegon ini, terpilih Bapak Tomy Rachamatullah sebagai Ketua dan Ibu R. Dewi Mutia Farida sebagai Sekretaris DPK APINDO Kota Cilegon Masa Bakti 2017 – 2022.

Banten

Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menyelenggarakan Lokakarya Formulasi Strategi Mengentaskan Pengangguran Provinsi Banten pada Kamis, 14 Desember 2017 di Hotel Le Dian, Serang. DPP APINDO Provinsi Banten turut menghadiri lokakarya tersebut diwakili oleh Sekretaris DPP APINDO Banten Bapak Arwin Kusmanta dan Kadept. Pemberdayaan Kota/Kabupaten Bapak Jacky F. Seif.

10. Lokakarya Formulasi Strategi



Mengentaskan Pengangguran Provinsi

DPP APINDO DKI JAKARTA

Ketua	: Solihin
Sekretaris	: Prayudi Yoedodarmo
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 5 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 250 Perusahaan

Perkembangan dunia usaha telah mengalami kemajuan yang luar biasa, khususnya dunia ketenagakerjaan APINDO sebagai asosiasi para pengusaha telah ikut memberikan andilnya, baik kegiatan yang berupa pembahasan, perundingan, pendampingan, usulan regulasi dan sebagainya dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anggota APINDO DKI Jakarta.

Pada tanggal 24 Agustus 2017 telah dilaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB) APINDO DKI Jakarta dalam Rangka Pemilihan Ketua baru periode

2017-2022 berlangsung meriah bertempat di Ruang serba guna DPN APINDO Jakarta. Pada 15 Desember 2017 di Mercantile World Trade Centre Jakarta telah berlangsung Pelantikan seluruh Pengurus Baru DPP APINDO DKI Periode 2017-2022 yang dihadiri Ketua Umum DPN APINDO Bp. Dr. Hariyadi B. Sukamdani dan dilanjutkan dengan Members Gathering dan Seminar serta Silaturahmi seluruh pimpinan perusahaan anggota Apindo se DKI Jakarta.

Penetapan UMP Tahun 2018 sudah dua tahun terakhir sesuai dengan PP 78 Tahun 2015. Selain itu DPP Apindo DKI juga telah

mengirimkan Calon Anggota Hakim Ad Hoc yang baru sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif.

Di bawah ini beberapa rangkuman kegiatan APINDO DKI Jakarta selama tahun 2017.

LAPORAN TIAP BIDANG

1. Bidang Pengupahan dan Jamsostek :

a. Aktif memonitor dan terlibat komunikasi

dengan Tim Apindo yang di Dewan Pengupahan tingkat Provinsi DKI Jakarta, terutama berjuang dalam rangka mengendalikan laju UMP yang tidak rasional.

b. Setelah keluarnya PP/78, maka masalah krusial di UMP bergeser ke UMSP, bahkan di tahun 2017 ini, keluar keputusan Gubernur tentang UMSP sebanyak 3 kali perubahan.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PIC
1	8 November 2017	PT Sucaco - Konsultasi tentang UMSP 2017	Nurjaman
2	18 Januari 2017	Rapat Dewan Pengupahan - Membicarakan Penanguhan UMP Tahun 2017 - Evaluasi Sektor / Subsektor UMSP 2017	Anggota Dewan Pengupahan
3	9 Februari 2017	Rapat Dewan Pengupahan membahas Evaluasi Sektor / Subsektor UMSP 2017 yang belum tercapai kesepakatan	Anggota Dewan Pengupahan
4	3 Maret 2017	Rapat Dewan Pengupahan membahas Evaluasi Sektor / Subsektor UMSP 2017 yang belum tercapai kesepakatan	Anggota Dewan Pengupahan
5	6 Juni 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Tekstil Sandang Kulit dan Sektor Perhotelan)	Anggota Dewan Pengupahan
6	9 Juni 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Retail, Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum)	Anggota Dewan Pengupahan
7	13 Juni 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor makanan dan Sektor Minuman)	Anggota Dewan Pengupahan
8	15 Juni 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Logam, Elektronik dan Mesin dan Sektor Telekomunikasi)	Anggota Dewan Pengupahan
9	11 Juli 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Otomotif Dan Sektor Asuransi dan Perbankan)	Anggota Dewan Pengupahan
10	14 Juli 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Farmasi dan Kesehatan, Sektor Asuransi dan Perbankan, Sektor KEP)	Anggota Dewan Pengupahan
11	21 Juli 2017	Evaluasi Sektor-sektor Unggulan (Sektor Farmasi dan Kesehatan, Sektor Asuransi dan Perbankan, Sektor KEP, Sektor Otomotif)	Anggota Dewan Pengupahan
12	28 Juli 2017	Rapat Hasil Evaluasi Sektor Unggulan Tahun 2017	Anggota Dewan Pengupahan
13	9 Agustus 2017	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan / implementasi UMP / UMSP dan Struktur Skala Upah di Perusahaan	Anggota Dewan Pengupahan

2. Bidang HI dan Advokasi :
 - a. Memberikan bantuan Cuma-Cuma kepada perusahaan yang melakukan konsultasi dan meminta bantuan dan rekomendasi atas permasalahan di perusahaan masing masing.
 - b. Memberikan jasa Advokasi, bila masalah sampai ke PHI (Contoh : PT Jakarta Propertindo)
 - c. Memfasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan dan bank.
 - d. Lain -lain.
3. Bidang UKM, Pemberdayaan Perempuan dan Gender :
 - a. Memberikan training-training bisnis & SDM kepada pengusaha pengusaha UKM.
 - b. Memfasilitasi untuk mendapatkan kesempatan Pameran dan Promosi.
4. Bidang Pelatihan dan Pemagangan :
 - a. Memberikan Training dan sosialisasi kepada anggota dan perusahaan-perusahaan.
 - b. Memilih topik-topik training yang hangat, berkaitan dengan kebijakan dan regulasi baru yang berdampak pada perusahaan dan Bisnis.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi / Universitas dan jaringan pemagangan serta BLK untuk program pemagangan.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PIC
1	24 Agustus 2017	Survey Daya Saing Usaha	Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta
2	15 Desember 2017	Members Gathering dan Seminar Prospek Ekonomi dan bisnis 2018 & PP No. 1 tahun 2017	Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta
3	15 Desember 2017	Panel Diskusi Struktur dan Skala Upah serta UMP 2018	Pengurus & Anggota APINDO DKI Jakarta

5. Bidang Organisasi dan Sektoral :
 - a. Membuat dan melaksanakan Program Kerja semaksimal mungkin sehingga dapat mewujudkan visi & misi APINDO DKI Jakarta.
 - b. Menghadiri, diskusi dan menerapkan keputusan rapat baik rapat intern maupun rapat undangan dari instansi lain.
 - c. Memantau perkembangan terkait urusan sektoral khususnya UMSP dan memberikan pengarahan kepada Anggota yang masuk dalam UMSP.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PIC
1	12 Januari 2017	Sosialisasi Kesetaraan Gender di Tempat Kerja dan Technical Assistant	Retno Kusumayanti
2	19 - 21 April 2017	Menghadiri Rakerkornas DPN APINDO	Pengurus Inti
3	26 Mei 2017	Focus Group Discussion (FGD) tentang Penentuan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi DKI Jakarta	Edwan Hamidy
4	30 Agustus 2017	Rapat Rutin LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta "Sosialisasi Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan"	Anggota LKS Tripartit
5	4 September 2017	Wawancara Studi Analisa Atas Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Batasan Iklan Tembakau di Luar Ruang	Solihin

6	6 - 7 September 2017	Menjadi Narasumber : Rapat Focus Group Discussion tentang Pengupahan	Anthony Hilman
7	23 - 24 November 2017	Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Institute (ACI) di National University of Singapore	Agus Guntur PM

DOKUMENTASI ACARA APINDO DKI JAKARTA



Sebagian Peserta Musprovlub APINDO DKI Jakarta



Peserta Musprovlub & Survey Daya Saing Usaha (ACI - NUS)



Penyerahan Penghargaan kepada Tim Kesenian SMA Negeri 31 Jakarta



Pemilihan Ketua Baru Periode 2017-2022 Bapak Solihin Ketua APINDO DKI Jakarta (sebelah kanan Pak Hariyadi)



Penyerahan Pataka APINDO dari Ketua Umum DPN APINDO kpd Ketua Baru APINDO DKI Jakarta



Ketua DPP Apindo DKI Bapak Solihin bersama panitia Members Gathering tahun 2017 (Duduk: Ibu Retno, Bapak Solihin, Ibu Mega, Ibu Julita. Berdiri : Bapak Julianto, Bapak Nurzaman, Bapak Agus dan Bapak Prayudi)



Tanggal 15 Desember 2017 Members Gathering, Silaturahmi & Pelantikan Pengurus periode 2017 - 2022



Bapak Agus Guntur PM mewakili APINDO menanam Pohon di Hari Tanam Pohon Nasional di Kawasan Industri Pulogadung - Jakarta

DPP APINDO JAWA BARAT

Ketua	: Dedy Widjaja
Sekretaris Eksekutif	: Rudi Martono
Dewan Pimp. Kab /Kota	: 27 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 1.985 Perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 36 Perusahaan

A. INVESTASI DI PROVINSI JAWA BARAT

1. Prospek dan Potensi Investasi

Perekonomian Provinsi Jawa Barat diperkirakan kembali membaik di tahun 2018 sejalan dengan akselerasi perekonomian nasional. Namun akselerasi di tahun 2018 diperkirakan tidak sebesar tahun 2017 seiring dengan relatif tingginya ketidakpastian pada perekonomian global, untuk keseluruhan tahun 2017 investasi diperkirakan mampu tumbuh pada rentang 4,9% - 5,3% (yoy) atau meningkat dibandingkan realisasi investasi 4,6% pada tahun 2016.

1.1. Industri Manufaktur

Berdasarkan sumber pertumbuhan, lapangan usaha industri pengolahan (industri manufaktur) masih menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar bagi LPE Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Di tengah melambatnya kinerja ekspor manufaktur Jawa Barat, peningkatan laju pertumbuhan industri pengolahan ditopang oleh peningkatan permintaan domestik khususnya antar daerah.

Adapun peningkatan kinerja penjualan domestik terutama terjadi pada sub-lapangan usaha : (1) industri makanan dan minuman; (2)

industri tekstil dan produk tekstil; (3) industri elektronik; dan (4) industri kimia. Sementara itu, kinerja industri otomotif tumbuh melambat pada periode laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Sementara dari industri kecil mikro, beberapa sub industri yang mengalami peningkatan produksi adalah industri farmasi, industri alat angkutan lainnya, jasa reparasi, dan industri kertas. Peningkatan produksi

Industri Mikro dan Kecil Alat Angkut ini mengindikasikan bahwa linkage antara industri hilir otomotif mulai terbangun dengan industri hulu berskala UMK (Usaha Mikro dan Kecil).

Secara umum, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan PMA utama secara nasional, sejalan dengan banyaknya industri dan kawasan industri yang berkembang di Jawa Barat. Pada triwulan II 2017, Jawa Barat menempati posisi kedua sebagai tujuan PMA (setelah DKI Jakarta) dengan pangsa terhadap nasional mencapai 11,83%, diikuti Sulawesi Tengah dengan pangsa sebesar 8,59%. Dukungan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi khususnya dalam mempermudah kegiatan investasi dan pengurusan perijinan juga menjadi salah satu penarik PMA ke Jawa Barat.

Terkait kemudahan pengurusan perizinan 3 jam, beberapa jenis perizinan yang dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi antara lain meliputi:

- (1) IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);

- (2) API (Angka Pengenal Impor);
- (3) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
- (4) SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);
- (5) Izin Kartu Pengawasan untuk sektor perhubungan (perpanjangan izin trayek);
- (6) Izin prinsip penanaman modal; serta
- (7) Perpanjangan IMTA.

Terkait implementasi salah satu Paket Kebijakan yakni pendirian KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) di kawasan industri, dari semula terdapat 5 KLIK di Jawa Barat, kini telah ditambah menjadi total berjumlah 11 KLIK yang tersebar di 11 kawasan industri di Jawa Barat. Dengan demikian, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah KLIK terbanyak secara nasional.

1.2. Infrastruktur

beberapa proyek strategis yang akan diselesaikan antara lain Bandara Internasional Kertajati (launch tahun 2018), Tol Cisumdawu sebagai bagian dari Tol Trans Jawa, Tol BIUTR, LRT Terintegrasi Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, serta mulai digarapnya proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan internasional pertama di Jawa Barat.

Salah satu proyek pembangunan swasta yang turut mendorong investasi bangunan di Jawa Barat adalah pembangunan kawasan kota baru Meikarta di Cikarang yang dimulai sejak bulan Mei 2017. Proyek pembangunan kota dengan konsep modern ini mencakup pembangunan apartemen, perumahan, serta sejumlah fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain.

Adapun berdasarkan sumbernya, diperkirakan pertumbuhan investasi di tahun 2017 masih akan ditopang oleh PMA mengingat mayoritas industri yang ada di Jawa Barat bersifat PMA dan cenderung mengandalkan pembiayaan dari headquarters dalam kegiatan investasi atau ekspansi usahanya.

1.3. Industri Pariwisata

Industri pariwisata dapat dijadikan lokomotif perekonomian bagi Jawa Barat karena pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena imbas dari permasalahan ekonomi, Sektor ekonomi pariwisata ini dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena itu sektor pariwisata ini sangatlah cocok menjadi lokomotif bagi perekonomian di Jawa Barat.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2018 diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, terutama dalam mendorong sektor kepariwisataan.

Enam destinasi pariwisata Jawa Barat akan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Keenam daerah itu adalah Kabupaten Bogor, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Subang, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Pangandaran.

Di samping tawaran KSPN, Pemprov Jawa Barat sudah menyusun 9 kawasan strategis pariwisata provinsi dalam rencana pembangunan. Kesembilan kawasan itu adalah Kawasan Ekowisata Puncak dan sekitarnya, Kawasan Geowisata Palabuhanratu, Ciletuh, Ujung Genteng dan sekitarnya, Kawasan Cagar Budaya Sukabumi, Kawasan Industri Bekasi Karawang, Kawasan Sejarah di Cirebon, Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung, Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan Garut, Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari Di Priangan, serta Kawasan Ekowisata Pantai Apra Cipatujah dan sekitarnya.

Penetapan kawasan pariwisata tersebut bertujuan mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2025 dengan indikasi kontribusi pertumbuhan ekonomi 15%, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 4,5 juta, jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 70 juta atau 27%, peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 7 hari dan wisatawan nusantara 5 hari.

C. BEBERAPA KEGIATAN PENTING DPP APINDO JAWA BARAT (PERIODE JANUARI – DESEMBER 2017)

1. Talkshow tentang Prospek Ekonomi dan Peluang Bisnis Sektor Industri Tahun 2017

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Kawasan Industri Kendal menyelenggarakan acara Talkshow tentang “Prospek Ekonomi dan Peluang Bisnis Sektor Industri Tahun 2017”, pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2017, pukul 12.00 – 17.00 WIB, bertempat di Hotel Crown Plaza Bandung, Jl. Lembong No. 19 Bandung.

Peserta Talkshow yang hadir sebanyak 150 orang, yang terdiri dari : Pengurus dan Anggota DPP APINDO Jawa Barat, Pengurus dan Anggota DPK APINDO se Jawa Barat, dan Para Pelaku Usaha di Jawa Barat.

Bapak Dedy Widjaja hadir dan memberikan sambutan yang sekaligus membuka secara resmi acara Talkshow tersebut.

Para Narasumber Talkshow adalah Bapak Adhi S. Lukman (Ketua Umum GAPMMI – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), Bapak Binsar Marpaung (Sekretaris Umum APRISINDO – Asosiasi Persepatuan Indonesia), Bapak Thomas Darmawan (Ketua DPN APINDO Bidang Perikanan), dan Ibu Susana Wijaya (General Manajer PT. Kawasan Industri Kendal).



Bapak Dedy Widjaja berfoto bersama para narasumber dan Moderator Talkshow

2. Seminar Ekonomi Politik tentang “Jawa

Barat dalam Bingkai Ekonomi dan Politik : Mencari Pemimpin Jawa Barat”

Seminar Ekonomi Politik ini diadakan oleh Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), dengan tema “Jawa Barat dalam Bingkai Ekonomi dan Politik : Mencari Pemimpin Jawa Barat”, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017, pada pukul 08:30 – 13:00 wib, bertempat di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN), Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 170 Bandung.

Bapak Dedy Widjaja selaku Ketua DPP APINDO Jawa Barat hadir dan menjadi Narasumber pada acara Seminar Ekonomi Politik tersebut, dengan membawakan makalah yang berjudul “Mencari Pemimpin Jawa Barat dari Perspektif Pengusaha”.

3. Sosialisasi tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Otoritas



Pemaparan materi oleh Ketua DPP Jawa Barat

Jasa Keuangan (OJK)

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan acara Sosialisasi tentang “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, pada hari Jum’at tanggal 10 Februari 2017, pukul 14.00 - 17.00 wib, bertempat di Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung.

Kegiatan Sosialisasi LAPS OJK ini sangat penting agar Peserta dapat mengetahui dan memahami adanya LAPS yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Nasabah

dengan Lembaga Jasa Keuangan (seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, penjaminan, pasar modal, pegadaian, dll.).

Bapak Martin B. Chandra Sekretaris DPP APINDO Jawa Barat membuka secara resmi acara ini yang dihadiri 75 orang, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota DPP APINDO Jawa Barat serta Pengurus dan Anggota DPK APINDO se Jawa Barat.

4. Penjurian Wilayah Program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Tahun 2016

Pada hari Senin tanggal 20 Februari



Bapak Martin B. Chandra Sekretaris DPP APINDO Jawa Barat membuka secara resmi acara Sosialisasi



Foto bersama narasumber dan peserta sosialisasi

2017, pukul 08.00 wib – selesai, bertempat di Mandiri University Jl. Soekarno-Hatta No. 574 Bandung, Bank Mandiri menyelenggarakan acara Penjurian Wilayah Program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Tahun 2016.

Wirausaha Muda Mandiri (WMM) merupakan program kompetisi, apresiasi, edukasi dan pembinaan kepada generasi muda Indonesia yang berani berwirausaha. Program ini telah diselenggarakan oleh Bank Mandiri sejak tahun 2007 untuk pengusaha muda berprestasi di seluruh Indonesia. Melalui program WMM ini, Bank Mandiri ingin mengajak generasi muda Indonesia menjadi

generasi yang mandiri, yaitu generasi pencipta lapangan kerja yang tangguh dan mampu bersaing di era global. Disamping itu, program WMM juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penciptaan ekosistem yang baik untuk tumbuh kembang wirausahawan di Indonesia

Pada acara tersebut Bapak Rudi Martono selaku Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Jawa Barat menjadi juri untuk Kategori Mahasiswa dan Bapak Martin B. Chandra (Sekretaris DPP APINDO Jawa Barat) menjadi juri untuk Kategori Alumni.

5. Business Gathering Bersama Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan



Para Juri dan para Peserta Program WMM berfoto bersama

Kedutaan Besar Ethiopia untuk Indonesia menyelenggarakan acara Business Gathering Bersama Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia (HE Ambassador Arega Hailu Toffera), bertempat di Hotel Crown Plaza Bandung Jl. Lembong No. 19 Bandung.

Bapak Dedy Widjaja hadir dan memberikan sambutan yang sekaligus membuka secara resmi acara Business Gathering tersebut.

Peserta Business Gathering yang hadir sebanyak 40 orang, yang terdiri dari : Pengurus

dan Anggota DPP APINDO Jawa Barat serta Pengurus dan Anggota DPK APINDO se Jawa Barat.



Acara secara resmi dibuka oleh Bp Dedy Widjaja

Tujuan dari Business Gathering adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada para Pelaku Usaha Jawa Barat tentang peluang bisnis dan investasi di Ethiopia, yang meliputi kebijakan, peluang dan kemudahan-kemudahan dalam berbisnis dan berinvestasi di Ethiopia.

6. Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Karawang Masa Bakti Tahun 2016 - 2021



Foto bersama dengan Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia dan para pengusaha

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Karawang Masa Bakti 2016 – 2021 dilaksanakan pada hari Kamis 16 Maret 2017, pada pukul 11:00 – 16:00 wib, di Hotel Resinda Jl. Resinda Raya No. 1 Karawang (Interchange Tol Karawang Barat).

Ketua DPP APINDO Jawa Barat melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Karawang dimana terpilih sebagai

ketua DPK APINDO Kabupaten Karawang adalah Bapak H. Abdul Syukur.

7. Seminar Nasional dengan tema “Mengembangkan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”



Pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Karawang

Seminar Nasional yang diadakan oleh KADIN JABAR dan AAI JABAR, mengambil tema “Mengembangkan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, pada pukul 09:00 – 18:00 wib, bertempat di Hotel Horison Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 121 Bandung.

Bapak Rudi Martono selaku Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Jawa Barat hadir sebagai Narasumber mewakili Bapak Dedy Widjaja pada acara Seminar Nasional tersebut, dengan membawakan makalah yang berjudul “Perkembangan Industri Manufaktur dan Lingkungan Hidup”.



Bapak Rudi Martono sedang memaparkan presentasinya

Narasumber lainnya adalah Prof Dr. Asep Warlan Yusuf, SH. seorang pakar dan pengamat

hukum ekonomi dari Universitas Parahyangan Bandung. Pejabat dari BAPPENAS RI dan BAPPEDA Jawa Barat serta Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jawa Barat.

8. Audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Acara audiensi ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung.

Pada kesempatan audiensi tersebut Ketua DPP APINDO Jawa Barat, didampingi oleh beberapa orang Pengurus DPP APINDO Jawa Barat dan Pengurus DPK APINDO serta Pengurus KOGA.

Sementara Gubernur Jawa Barat, Bapak H. Ahmad Heryawan didampingi oleh Kadisnaker Jabar, Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Jabar, Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar dan staf lainnya.

Maksud dan tujuan dari acara audiensi tersebut adalah :

- a. Silaturahmi Jajaran Pengurus DPP APINDO JABAR dan DPK APINDO se Jabar serta KOGA kepada Gubernur Jawa Barat.
- b. Saling bertukar pikiran dan informasi dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi



dan investasi di Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada khususnya.

- c. Membahas Upah Minimum Padat Karya Sektor Garmen Tahun 2017 di Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.

9. Talkshow tentang “Penyelenggaraan Industri Manufaktur yang Sesuai dengan

PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri”

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, pukul 15.00 – 18.00 wib, di Hotel Holiday Inn Pasteur Jl. Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan Mandalapratama Permai Industrial City (MPIC) Purwakarta, mengadakan acara Talkshow tentang “Penyelenggaraan Industri Manufaktur yang Sesuai dengan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri”.

Bapak Dedy Widjaja sebagai Narasumber memaparkan makalah yang berjudul “Peluang dan Tantangan Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat”.

Narasumber lainnya adalah Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Kepala BPLHD Jawa Barat, dan Direktur Utama MPIC Purwakarta.

10. Rapat Koordinasi dengan Bapak Wakil Presiden RI

DPP APINDO Jawa Barat bersama-sama dengan para pihak terkait mengadakan Rapat Koordinasi dengan Wakil Presiden RI, Bapak M. Jusuf Kalla, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2017, pukul 10.00 – 11.30 wib, bertempat di



Para Narasumber dan Moderator berfoto bersama

Kantor Wakil Presiden RI Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka membahas Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen Tahun 2017 di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi dan Kota

Depok.

Hadir pada acara Rapat Koordinasi tersebut:

1. Wakil Presiden RI, Bapak M. Jusuf Kalla.



2. Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak M. Hanif Dhakiri
3. Kepala BKPM RI, Bapak Thomas Lembong
4. Gubernur Jawa Barat – Bapak H. Ahmad Heryawan
5. Wakil Walikota Bekasi – Bapak H. Ahmad Syaikh
6. Ketua Umum DPN APINDO – Bapak Hariyadi B. Sukamdani
5. Ketua DPP APINDO Jawa Barat – Bapak Dedy Widjaja
7. Pengurus KOGA (Korea Garment Manufacture's Association in Indonesia)
8. Pengurus DPK APINDO Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi dan Kota Depok.

11. Pertemuan Survey Daya Saing Usaha Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapura mengadakan acara Pertemuan Survey Daya Saing Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 pada hari Selasa 8 Agustus 2017, pada pukul 08.30 – 12.00 wib, bertempat di Hotel Sensa Ruang Shanghai Lantai 3, Jl. Cihampelas No. 160 Bandung.

Pertemuan Survey ini dilakukan untuk mengetahui pandangan dan perspektif Dunia Usaha terhadap daya saing usaha Provinsi Jawa Barat. Hasil survey nantinya akan disampaikan kepada para Pengambil Keputusan di Pusat dan di Provinsi Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Provinsi Jawa Barat.

Bapak Rudi Martono selaku Sekretaris



Bapak Rudi Martono menyaksikan penyerahan Buku Laporan ACI kepada peserta



Para Peserta dan Narasumber dari ACI Singapura berfoto bersama

Eksekutif DPP APINDO Jawa Barat hadir mewakili Ketua DPP APINDO Jawa Barat. Peserta berjumlah 35 orang, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota DPP APINDO Jawa Barat dan DPK APINDO se Jawa Barat.

12. Try-out Dialog Sosial Ketenaga-kerjaan dan Hubungan Industrial

DPP APINDO Jawa Barat bekerjasama dengan DPN APINDO dan DECP Belanda menyelenggarakan acara Try-out Dialog Sosial Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, bertempat di Hotel Novotel Bandung pada 18-19 September 2017.

Peserta dari DPP APINDO Jawa Barat sebanyak 4 (empat) orang, demikian pula dari unsur KSBSI berjumlah 4 (empat) orang. Sebagai narasumber : Mr. Dirk Joose (DECP Belanda) dan Mr. Henk van Beers (CNV Belanda).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat dialog sosial di Provinsi Jawa Barat dengan saling bertukar-pikiran dan pengalaman serta mempelajari pengalaman serupa di negeri Belanda.

13. Audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

DPP APINDO Jawa Barat mengadakan



Bapak Agung Pambudhi (DPN APINDO) menyampaikan sambutan pembukaan



Foto bersama Bapak Rudi Martono dan para peserta

acara Audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 15 November 2017, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bandung.

Bapak Dedy Widjaja memimpin delegasi DPP APINDO Jawa Barat, yang terdiri dari :

Pengurus DPP APINDO Jawa Barat, pengurus DPK APINDO Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi dan Pengurus KOGA Korea.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, MSi. didampingi oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pengupahan dan Hubungan Industrial.

Tujuan dari Audiensi ini adalah :

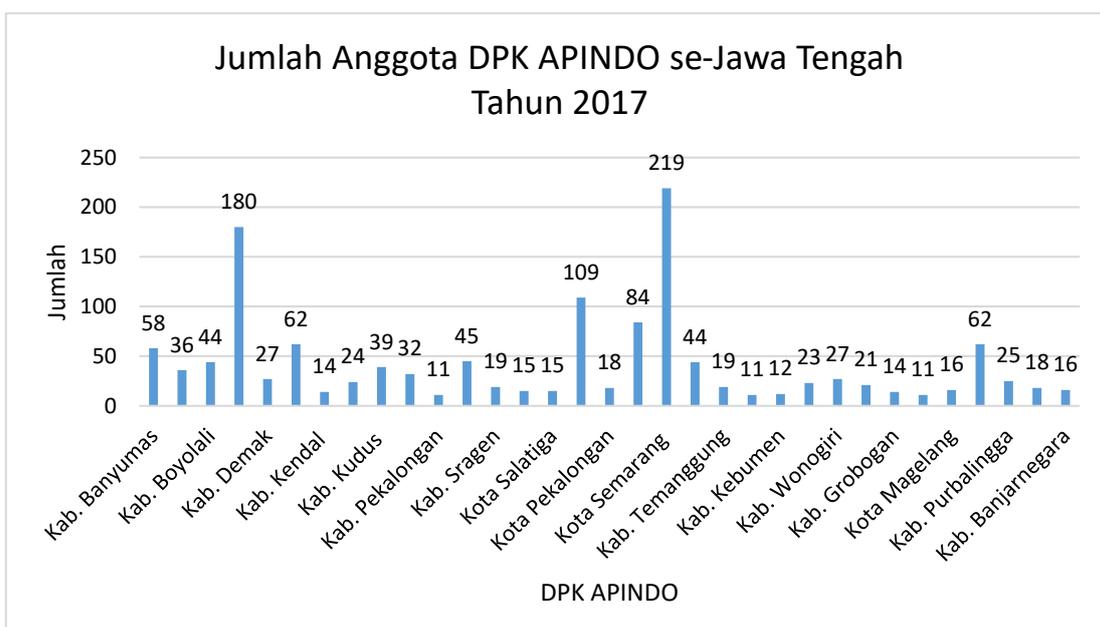
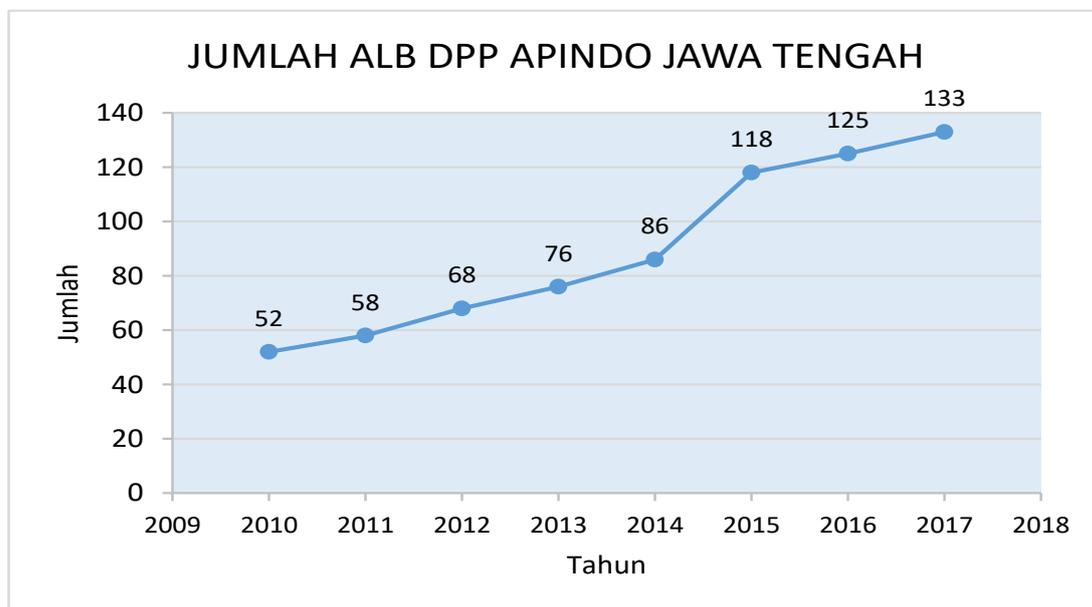
1. Silaturahmi antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat.
2. Menyampaikan secara langsung kepada Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat perihal kondisi dan aspirasi dari para Pelaku Usaha, utamanya para Pelaku Usaha dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan pelaku usaha yang tergabung dalam KOGA, yang berkaitan dengan Upah Minimum Tahun 2018.
3. Mengetahui-memahami pandangan dan kebijakan Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat terkait tentang Upah Minimum Tahun 2018.



Diskusi dengan Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat

DPP APINDO JAWA TENGAH

Ketua : Frans Kongi
Sekretariat : Eko Sulistyowati
Dewan Pimp. Kab. / Kota : 33 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa : 1.370 perusahaan
Anggota Luar Biasa : 133 perusahaan



Beberapa Kegiatan DPP APINDO Jawa Tengah selama tahun 2017, diantaranya :

I. BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN DANA

1. Focus Group Discussion (FGD) Drafting Pedoman Kesetaraan Gender

Acara diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2017, bertempat di Hotel Grasia, Jl. S. Parman No. 29 Semarang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama DPP APINDO Jawa Tengah dan DPN APINDO, untuk pembahasan Pedoman tentang Kesetaraan Gender di lingkungan kerja.

2. Workshop Manajemen Resiko Berwawasan K3

Workshop dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2017, di Hotel Grasia-Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya wawasan K3 dengan pembicara oleh Bapak Mettoni As Maaris.



3. Workshop Strategi Penyusunan dan Negosiasi PP/PKB

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Ruang Training Centre APINDO Jawa Tengah, dengan pemateri Bapak Daryanto, SH. ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dari perusahaan dalam melakukan penyusunan dan negosiasi PP/PKB.



4. Workshop Supervisory Development Programme

Workshop dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017, di Ruang Training Centre APINDO Jawa Tengah dengan pembicara ibu Titi Agustina, SE, Cmt.CPHRM.

Materi yang disampaikan berkenaan tentang peran Supervisory guna mempertajam keterampilan supervisinya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran manajemen dalam perusahaan.



5. Leadership Coaching

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grasia-Semarang dengan pembicara Bapak Daniel Lukito, ST, MM, Msc.IB. Materi yang disampaikan adalah mengenai peningkatan potensi dan kemampuan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan dalam kerjasama tim agar tidak terjadi penolakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.



6. Pelatihan Mendesain KPI (Key Performance Indicator) untuk Pengukuran Kinerja Selaras dengan Tujuan dan Strategi Perusahaan

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 di Ruang Training Centre APINDO Jawa Tengah dengan pembicara Bapak Yoseph Wibisono ini, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pengukuran kinerja yang aplikatif dan efektif guna meningkatkan kesuksesan dalam pengukuran kinerja organisasi serta perusahaan.

II. BIDANG BINA ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN DAERAH

1. Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kabupaten Demak Tahun 2017

MUSKAB dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2017 di Hotel Amantis-Kendal, dengan agenda Laporan Pertanggung-jawaban pengurus periode 2012-2017 dan pemilihan Ketua untuk masa bakti 2017-2022. Terpilih secara aklamasi sebagai Ketua yaitu Bapak MH. Ilyas, SH.



2. Kepesertaan pada RAKERKORNAS APINDO ke -28 di Palembang

Adapun Peserta dan Utusan dari DPP APINDO Jawa Tengah pada RAKERKONAS Ke-28 di Palembang, yaitu Bapak Frans Kongi, Bapak Deddy Mulyadi, Ibu MA Dian L. Melisa, Bapak Royke Joenan, Bapak Daryanto dan Ibu Eko Sulistyowati, Ibu Baningsih Tedjo Kartono, Bapak Kalay Selwan, Ibu Sutianingsih dan Ibu Yanty Rukmana.



3. Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kabupaten Batang tahun 2017

MUSKAB dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Conference Room PT. Primatexco Indonesia-Batang, dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPK APINDO Batang Masa Bakti 2017-2022 Bapak H. Edi Sisworo.



4. Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kabupaten Brebes

MUSKAB dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 di Rumah Makan De' Angklo-Brebes. Dalam MUSKAB ini Bapak Untung Suparwo terpilih menjadi Ketua DPK APINDO Kabupaten Brebes Masa Bakti 2017-2022.



5. Pertemuan DPP APINDO Jawa Tengah dengan Pengusaha se-Kota Tegal

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reorganisasi dan pembentukan APINDO di Kota Tegal.



6. Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kabupaten Cilacap Tahun 2017

MUSKAB dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 di Fave Hotel Cilacap, dan terpilih secara aklamasi Bapak Bambang Sri Wahono, SH, Spn, MH., sebagai Ketua DPK APINDO Kabupaten Cilacap Masa Bakti 2017-2022.



III. BIDANG PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Rapat Koordinasi DPP-DPK APINDO se-Jawa Tengah

Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, bertempat di Ruang Training Centre APINDO Jawa Tengah dan dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengupahan DPK APINDO Se-Jawa Tengah.



2. Road Show Perkuatan Organisasi APINDO dan Dialog Interaktif dengan Perusahaan di 6 (Enam) Eks-Karesidenan Jawa Tengah

Road show dilakukan oleh Tim dari DPP APINDO Jawa Tengah, yang terdiri dari Bidang Organisasi, Bidang Pendidikan dan Latihan, Bidang Hukum dan Pembelaan serta Bidang Pengupahan dan Jamsos, di 6 (enam) eks Karesidenan yang ada di Jawa Tengah, yaitu:

- a. Karesidenan Semarang, dilaksanakan di Hotel Grasia-Semarang, tanggal 21 Desember 2017
- b. Karesidenan Pati, dilaksanakan di Hotel Gripta-Kudus, tanggal 30 November 2017
- c. Karesidenan Surakarta, dilaksanakan di Orient Resto-Solo, tanggal 16 November 2017



- d. Karesidenan Banyumas, dilaksanakan di

Meohotel-Purwokerto, tanggal 14 Desember 2017

- e. Karesidenan Kedu, dilaksanakan di Bena Resto-Magelang, tanggal 5 Desember 2017
- f. Karesidenan Pekalongan, dilaksanakan di Hotel Sahid Mandarin-Pekalongan, tanggal 22 November 2017



IV. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN

1. Silaturahmi dan Buka Bersama DPP APINDO Jawa Tengah dengan Pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Se-Jawa Tengah

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017, bertempat di Hotel Oak Tree Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh DPP APINDO Jawa Tengah dan Pimpinan SP/SB di Jawa Tengah, dalam rangka meningkatkan silaturahmi, komunikasi dan kerjasama dengan SP/SB di Seluruh Jawa Tengah.

2. Kunjungan Ketua Serikat Pekerja atau Serikat Buruh ke DPP APINDO Jawa

Tengah

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Oktober 2017 di Ruang *Training Centre* APINDO Jawa Tengah dengan tujuan membangun kerjasama antara Konfederasi Serikat Pekerja Selluruh Indonesia (KSPSI) dengan DPP APINDO Jawa Tengah.

V. LAIN-LAIN

1. Pelayanan Anggota DPP APINDO Jawa Tengah

1.1. Members Gathering Anggota Luar Biasa APINDO Jawa Tengah

- a. Kupas Tuntas Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dilaksanakan pada Selasa 19 September 2017 bertempat di Ruang *Training Centre* APINDO Jawa Tengah. Pembicara dalam forum ini adalah Bapak Sedy Purwanto Priyawan (Konsultan Pajak).

- b. Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 560/94 tahun 2017 tentang upah



minimum pada 35 Provinsi Jateng 2018 dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dilaksanakan pada Kamis, 23 November 2017 bertempat di Ruang *Training Centre* dengan pembicara merupakan Bapak Drs. Noerwito, MM. MBA.

2. Survei Daya Saing Usaha dan RAKOR DPP-DPK APINDO Se-Jawa Tengah



Acara seminar dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 di hotel Grasia, Jl. S. Parman No.29 Semarang. Kegiatan rutin tahunan ini merupakan kerjasama antara DPN APINDO dengan *Asia Competitiveness Institute Law Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore* yang bertujuan untuk mengetahui daya saing setiap Provinsi di Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi DPP-DPK dalam rangka penguatan organisasi.

3. KADIN Award 2017



KADIN Award dilaksanakan pada 31 Agustus 2017 di Ramashinta Ballroom, Patra Semarang Convention Hotel-Semarang. Dalam ajang bergengsi ini, DPP APINDO Jawa Tengah mendapatkan Penghargaan Asosiasi Terbaik Kategori Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Asosiasi.

4. Mendampingi Kunjungan Komisi IX DPR RI di PT. Djarum Kudus



Acara ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 di PT. Djarum Kudus dalam meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan pengusaha di Jawa Tengah.



DAFTAR POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI JAWA TENGAH TAHUN 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	POTENSI & PELUANG INVESTASI
1	Kota Semarang	a. Pengembangan Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB)
		b. Pengembangan Kawasan BWK V Kec. Pedurungan
		c. Pembangunan Expo Center
		d. Pengolahan Limbah B3
		e. Pemanfaatan IPLT
		f. Pengembangan Hutan Wisata Tinjomoyo

		g. Pengembangan Kampung Wisata Taman Lele
		h. Pengembangan Obyek Wisata Goa Kreo
		i. Pengembangan Agroedukasi
		j. Pengembangan Light Rail Transit (LRT)
		h. Kawasan Industri
		- Kawasan Industri Wijayakusuma
		- Kawasan Industri BSB
		- Kawasan Industri Candi
		- Kawasan Industri TEPZ
2	Kota Salatiga	a. Taman Wisata Salatiga
		b. Taman Wisata Religi
		c. Zona Industri
		d. Revitalisasi TPA Ngronggo
3	Kabupaten Semarang 2016	a. Pembangunan Obyek Wisata Senjoyo
		b. Pembangunan Obyek Wisata Muncul
		c. Pengembangan Usaha Sapi Potong & Sapi Perah
		d. Pengembangan Kawasan Industri
		- Kawasan Industri Bawen
		- Kawasan Industri Tengaran
		- Kawasan Industri Pringapus
		- Kawasan Industri Susukan
		- Kawasan Industri Kaliwungu
4	Kabupaten Kendal	a. Kawasan Industri Kendal
		b. Pengembangan Kawasan Wisata Curug Sewu
		c. Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Pantai Blender
		d. Pengembangan Kampung Teknologi Blumah
		e. Pengembangan Agrobisnis Komoditas Jambu Biji Merah dan Pisang Raja Bulu
		f. Angkutan Aglomerasi Kedungsepur
5	Kabupaten Demak	a. Pengembangan Wisata Pantai Morosari
		b. Kawasan Industri Jatengland
6	Kabupaten Grobogan	a. Usaha Peternakan
		b. Pengembangan Kawasan Wisata Bledug Kuwu
		c. Pengembangan Obyek Wisata Jati Pohon
		d. Alih Fungsi Pemanfaatan Pasar Glendoh & Gedung Wisata Budaya

DPP APINDO JAWA TIMUR

Ketua : Arief Harsono
Sekretaris : Drs Heribertus Gunawan MM.
Dewan Pimp. Kab/Kota : 33 Kabupaten /Kota
Anggota Biasa : 1.578 perusahaan

Secara keseluruhan kegiatan dan aktifitas DPP APINDO Jawa Timur tahun 2017 berlangsung lancar meskipun masih ada beberapa bidang kegiatan yang perlu didorong untuk lebih maju lagi ditahun mendatang.

Hubungan dengan Pemerintah Daerah berjalan lancar, demikian pula dengan instansi sektoral, Consulat Jenderal RI, penerimaan misi dagang/investasi dari luar negeri dan kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya telah berjalan dengan baik dan lancar.

Garis besar kegiatan yang telah dilakukan DPP APINDO Jawa Timur selama tahun 2017 terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu informasi ketenagakerjaan dan kegiatan pelayanan anggota.

Kegiatan informasi diberikan kepada perusahaan anggota APINDO Jawa Timur dan juga kepada seluruh DPK secara umum. Informasi yang diberikan menyangkut permasalahan hubungan industrial dan ketenagakerjaan serta ekonomi makro Indonesia.

Adapun media yang digunakan dalam pelayanan informasi tersebut adalah melalui media cetak, e-mail, faximil yang dibuat dan dikembangkan oleh APINDO Jawa Timur.

a. Temu Konsultasi Anggota

Tujuannya adalah memberikan informasi terkini terkait hubungan industrial dan ketenaga-kerjaan, *sharing* pengalaman serta masukan-masukan bagi pelaksanaan

pengembangan SDM di tingkat perusahaan. Temu Konsultasi dilaksanakan di Isyana Ballroom Hotel Bumi Surabaya, setiap bulan satu kali atau sesuai kebutuhan anggota dan permasalahan yang berkembang. Tema yang diangkat antara lain :

1. Dialog masalah hubungan industrial ketenaga kerjaan terkait Perda No.8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang UMSK di Jawa Timur.
2. Sosialisasi POJK No. 5/POJK-05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat lainnya kerjasama dengan OJK.
3. Penjelasan Permenaker RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
4. Aktivasi kerjasama dibidang pengembangan ekspor dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.
5. Pembinaan mitra kerja Kamtibnas dalam rangka Harkamtibnas di bulan Romadhon dan Idul Fitri 1438 H dengan POLDA Jatim.
6. Survey Daya Saing dan Market Riset Interview & Meeting dengan ACI
7. Tax Breafast Briefing kerjasama PWC dengan APINDO Jatim
8. Indonesia Integrity Initiative Forum 2017 “Memperkuat perekonomian lokal melalui penerapan integritas dunia usaha” dan workshop dari usaha ke usaha dengan Indonesia Bussines Link.

9. Try Out Dialog Sosial Ketenaga kerjaan dan Hubungan Industrial dengan CNV International, DECP dan KSBSI
10. Dinamika penetapan dan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2018 pasca keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015



b. Pelatihan/Seminar

Selama tahun 2017 APINDO Jawa Timur telah banyak melakukan pelatihan untuk berbagai bidang antara lain ;

1. Strategi mengatasi kesurupan dan pencehannya kerjasama APINDO dengan Metaprogress Training dan Consuling.

2. Pelatihan sehari “Bagaimana menyusun dan merancang Struktur dan Skala Upah sesuai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 berdasarkan kemampuan perusahaan.
3. Seminar Nasional Hukum Perdagangan Indonesia dengan Universitas Airlangga.



c. Bantuan hukum

Bantuan hukum diberikan kepada perusahaan-perusahaan anggota APINDO yang mengalami kesulitan dibidang ketenaga kerjaan seperti bantuan advokasi, konsultasi masalah ketenaga kerjaan, perselisihan, PHK, Pengupahan, Pembuatan PP dan PKB.

Tujuan pelaksanaan konsultasi ini adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan secara mendadak mengalami permasalahan dan membutuhkan saran atau penanganan yang cepat.

DPP APINDO BALI

Ketua	: Nengah Nurlaba SH.
Sekretaris	: Made Sueca
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 9 Kabupaten / Kota
Anggota	: 360 perusahaan

Beberapa kegiatan yang diadakan dan diikuti oleh DPP APINDO Bali selama tahun 2017 diantaranya audiensi dengan beberapa dinas yang ada dibawah pemerintah daerah propinsi Bali, selain itu beraudiesi juga dilakukan DPP APINDO Bali dengan Serikat pekerja sektoral yang ada di Bali, dan mengadakan acara gathering dengan anggota dan DPK/kota untuk membahas permasalahan dan issue yang ada dikalangan pengusaha Bali pada umumnya.

Disamping itu pengurus DPP Bali juga mengikuti beberapa seminar yang diadakan oleh instransi pemerintah ataupun swasta.

Dibawah ini beberapa kegiatan yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja & Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, acara diadakan pada tanggal 14 Juni 2017 bertempat di ruang Pertemuan Dinas tenaga kerja dan ESDM Provinsi Bali.



2. Audiensi dan Silaturahmi dengan Serikat Pekerja Pariwisata Provinsi Bali yang diadakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Aula Serikat Perkerja Pariwisata di Provinsi Bali.



3. DPP APINDO Bali mengadakan acara Coffee Morning dan Pengenalan APINDO kepada perusahaan Non Anggota APINDO dengan tujuan menjaring penambahan keanggotaan APINDO di beberapa DPK yang ada di provinsi Bali. Dihadiri oleh ketua DPP APINDO Bali dan beberapa pengurus, acara diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, bertempat di rumah makan Sailagu, Jalan Hayam Wuruk Denpasar Bali.



4. Gathering DPK APINDO Gianyar diadakan untuk bersilaturahmi dan membahas permasalahan yang ada di DPK Gianyar serta mendapatkan penjelasan dari ketua DPP APINDO Bali Bp. Nengah Nurlaba SH. Acara ini diadakan pada tanggal 26 September 2017, dengan lokasi di Batuan Resto, Jalan Raya Batuan, Gianyar Bali.



5. Ketua DPP APINDO Bali menghadiri Kegiatan Program Pemagangan Dalam Negeri yang diadakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, acara diadakan pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Denpasar, Bali.



6. Menghadiri Acara Rembug Nasional, kerjasama DPP APINDO Bali dengan BPJS Ketenagakerjaan BANUSPA dengan mengambil tema : "Aspek Yudisiris dan Manfaat kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja". Dilanjutkan dengan penanda tangan kerjasama DPP APINDO Bali dengan BPJS Ketenagakerjaan Propinsi Bali. Acara diadakan pada tgl 14 Nopember 2017 bertempat di Agung Room, Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali.



7. Menghadiri Seminar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, membahas mengenai "Restrukturisasi utang melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan usaha". Acara diadakan di Hotel Trans Resort Bali pada tanggal 16 November 2017.



DPP APINDO KALIMANTAN BARAT

Ketua	: Ir. Maman Surachman MM
Sekretariat	: Atika
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 14 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 320 Perusahaan

Beberapa kegiatan yang diikuti oleh pengurus DPP APINDO Kalimantan Barat di tahun 2017 :

1. Pelaksanaan Musprov DPP APINDO Kalbar pada tanggal 23 Februari 2017 yang dihadiri oleh seluruh DPK APINDO se Kalimantan Barat yang berjumlah 12 Kabupaten dan 2 Kota. Musprov juga dihadiri oleh ketua DPN APINDO Bapak Antony Hilman. Terpilih sebagai ketua DPP APINDO untuk periode masa bakti 2017 – 2022 bapak Ir. Maman Surachman, MM, untuk yang ketiga kalinya.
2. Mengikuti kegiatan Konsolidasi Informasi dan Komunikasi diseputar penugasan Hakim AdHoc PHI dan Hakim Kasasi di mahkamah Agung Unsur APINDO yang diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 Maret 2017 di Serpong, Tangerang oleh DPN APINDO. DPP APINDO mengirim/ menugaskan 2 orang pengurus DPP APINDO yakni Sekretaris Haryo Yudanto, S.Sos dan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Tedjo Purwanto, SH serta 1 orang Hakim Adhoc PHI dari unsur APINDO Achmad Basjori, SH.
3. Menjadi pembicara dalam forum dialog hukum bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 – 10 Maret 2017. DPP APINDO menugaskan Sekretaris sebagai pembicara.
4. Pelaksanaan Muscab DPK APINDO Sanggau pada tanggal 1 April 2017, Muscab dihadiri oleh perusahaan anggota APINDO yang ada di Kabupaten Sanggau. Terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Sanggau untuk periode masa bakti 2017 – 2022 bapak Ir. Konggo Tjondro, beliau terpilih untuk yang kedua kalinya. Beliau juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
5. Menjadi pembicara dalam Desiminasi SJSN bagi pekerja informal angkatan pertama yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. DPP APINDO menugaskan Sekretaris sebagai pembicara.
6. Mengikuti Rapat Kerja Dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke 28 tahun 2017 di Palembang pada tanggal 19 – 21 April 2017. DPP APINDO Kalbar mengirim 1 orang peserta penuh (Ketua Umum DPP APINDO Kalbar bapak Ir. Maman Surachman, MM) dan 5 orang sebagai Peninjau yakni; Sekretaris Haryo Yudanto, S.Sos, Ketua DPK APINDO Kabupaten Ketapang Chanisius Kuan, Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Ali Wilopo, SH, Ketua DPK APINDO Kabupaten Kapuas Hulu Edi Suhita, Sekretaris DPK APINDO Kabupaten Kapuas Hulu Imam Sudjudi
7. Menjadi pembicara dalam Desiminasi SJSN bagi pekerja informal angkatan kedua yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. DPP APINDO menugaskan Sekretaris sebagai pembicara.
8. Pelaksanaan Muscab DPK APINDO Melawi pada tanggal 10 Juli 2017, Muscab dihadiri

oleh perusahaan anggota APINDO yang ada di Kabupaten Melawi. Terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Melawi untuk periode masa bakti 2017 – 2022 bapak Ir. Apen, beliau terpilih untuk yang kedua kalinya. Beliau saat ini menjabat sebagai Manager/Pimpinan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Melawi.

9. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/BPJS Ketenagakerjaan Award tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2017 di Surabaya. DPP APINDO Kalbar menugaskan Sekretaris.
10. Menjadi salah satu tim penilai BPJS Ketenagakerjaan Award Tahun 2017 untuk wilayah Kalimantan Barat.
11. Mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 15 Oktober 2017 di Jakarta. DPP APINDO menugaskan Sekretaris.
12. Pelaksanaan Muscab DPK APINDO Landak pada tanggal 16 Oktober 2017, Muscab dihadiri oleh perusahaan anggota APINDO yang ada di Kabupaten Landak.

Terpilih sebagai Ketua DPK APINDO Landak untuk periode masa bakti 2017 – 2022 bapak Paulus Hadi, SH, beliau terpilih untuk yang Pertama kalinya. Beliau saat ini menjabat sebagai Manager/Pimpinan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Landak.

13. Mengikuti kegiatan Study Banding Pengupahan ke Dewan Pengupahan Banten yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 17 November 2017 di Provinsi Banten. DPP APINDO menugaskan Sekretaris.
14. Mengikuti kegiatan Konvensi Survey Daya Saing Usaha yang diselenggarakan oleh ACI Singapura pada tanggal 22 – 25 November 2017 di Singapura. DPP APINDO menugaskan Sekretaris.
15. Aktif dalam lembaga lainnya seperti LKS Tripartit Provinsi, Dewan Pengupahan Provinsi, Lembaga Pemagangan Provinsi, Gugus Tugas Kesempatan Dan Pemberlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan Provinsi, Tim Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi, Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

DPP APINDO KALIMANTAN TIMUR

Ketua	: M.Slamet Brotosiswoyo
Sekretaris	: Giat Wahjoewarti (Yayuk)
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 12 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 497 Perusahaan

1. DPP APINDO Kaltim bertemu dengan Pertamina RU V.

Dalam rangka kerjasama pelaksanaan Sertifikasi Ahli Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) bidang Migas di Kalimantan Timur. Menyongsong Pelaksanaan Proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Pertamina RU V di Balikpapan.



2. Pelaksanaan MOU DPP APINDO Kaltim dengan Poltekba

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Kompetensi Di Kalimantan Timur.



3. Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Tempat Kerja Kelas International dan bersertifikat internasional, kerjasama APINDO Kaltim-KADIN Indonesia-KADIN JERMAN

Di Balikpapan, Kalimantan Timur tanggal 20 - 26 Nopember 2017, dengan peserta 20 orang berhasil lulus semua.



4. APINDO Kaltim menghadiri Simposium Pendidikan Vokasi

(Kejuruan Sistim, Ganda yang berorientasi pada praktek-peluang bagi Indonesia) di Jakarta dalam rangka persiapan Komite Vokasi di Kalimantan Timur.



5. Ketua APINDO Kaltim bersama Menaker RI dalam rangka acara Penyerahan Sertifikat Pemagangan Mandiri di Kalimantan Timur.



6. Ketua APINDO Kaltim sebagai Narasumber di Fokus Grup Diskusi Ekonomi dengan tema "Menyongsong Era Baru Infrastruktur Kaltim" yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen



7. APINDO sebagai tuan rumah dalam Gathering Forum HR Balikpapan tanggal 25 Februari 2017, membahas tentang permasalahan permasalahan yang timbul di perusahaan Kalimantan Timur.



8. Hubungan Kelembagaan bukan saja dilaksanakan indoor, tetapi dapat dilakukan di Outdoor (padang golf). Pangdam VI Mulawarman-Kasdam VI Mulawarman-Wabup PPU dan Ketua APINDO Kaltim.



DPP APINDO KALIMANTAN TENGAH

Ketua : Hernica Rasan, MBA
Sekretaris : Ir. Anthon Pawarrangan
Pimpinan Kab./Kota : 14 Kabupaten/Kota
Jumlah Anggota : 278 Perusahaan

Kepengurusan APINDO tingkat Kabupaten /Kota (DPK) di Kalimantan Tengah telah terbentuk di 14 kabupaten/kota, yakni : Dewan Pimpinan Kota (DPK) Palangka Raya, DPK Pulang Pisau, DPK Kuala Kapuas, DPK Barito Selatan, DPK Barito Timur, DPK Barito Utara, DPK Murung Raya, DPK Katingan, DPK Gunung Mas, DPK Kotawaringin Timur, DPK Kotawaringin Barat, DPK Lamandau, DPK Sukamara, DPK Seruyan;

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pengurus DPP Apindo Kalimantan Tengah selama tahun 2017, diantaranya :

1. Survei Daya Saing Usaha Tahun 2017

Asia Competitiveness Institute (ACI), Lee Kuan Yew School of Policy Public, National University of Singapore di Indonesia



bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN-APINDO) kembali mengadakan Survei Daya Saing Usaha Tahun 2017, dimana untuk pelaksanaan di tiap Provinsi dikoordinir

oleh Dewan Pimpinan Provinsi khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh DPP APINDO Kalimantan Tengah. Kegiatan Survei Daya Saing Usaha tahun 2017 dilaksanakan di Ballroom Hotel Aquarius pada 13 Juli 2017 dan dihadiri oleh 21 peserta yang merupakan perwakilan dari pengusaha daerah dari berbagai bidang usaha sebagai responden serta 3 orang perwakilan dari Asia Competitiveness Institute (ACI). Diharapkan pelaksanaan Survei ini dapat menentukan peringkat daya saing Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 33 provinsi lainnya sebagai salah satu sumber informasi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan perekonomian di masing-masing Provinsi.

kegiatan Kebijakan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah, pada 15 November 2017 di Kantor Dinasakertrans Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPP APINDO Kalteng menjadi salah satu narasumber dan turut mengundang 12 perwakilan dari perusahaan-perusahaan anggota DPP Apindo Kalteng.



2. Kebijakan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektor Provinsi untuk tahun 2018. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan

Rangkaian kegiatan yang diikuti DPP Apindo Kalimantan Tengah untuk periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 terangkum dalam tabel kegiatan berikut :

No.	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Pelaksana Kegiatan
1	17 Januari 2017	Rapat K3 tahun 2017	Ruang Rapat Disnakertrans Prov. Kalteng	Kabid Pengawasan Disnakertran Prov
2	20 Januari 2017	Rapat K3 tahun 2017 yang ke-2	Ruang Rapat Disnakertrans Prov. Kalteng	Kabid Pengawasan Disnakertran Prov
3	1 – 3 Februari 2017	Pelatihan Kader Produktifitas	Hotel Neo Palangka Raya	Direktorat Jendral Pelatihan dan Produktifitas kementerian tenaga kerja RI
4	8 Februari 2017	Konsultasi Advokasi kepada karyawan PT. Rinanda Inti Lestari	Gedung Batang Garing Ruang Rapat HPHI Lt. 3	Bidang Advokasi DPP Apindo Kalteng
5	11 Februari 2017	Gelar Wisuda I LP3i Palangka Raya	Hotel Aquarius	LP3i
6	20 Februari 2017	Pelantikan Pengurus DPK APINDO Gunung Mas	GPU Damang Batu Komplek Perkantoran Pemkab Gunung Mas	DPK APINDO Gunung Mas
7	27 Februari 2017	Pembukaan Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2017	Ruang Rapat II Dinas Nakertrans Kalteng Jl. Yos Sudarso No. 2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	1 - 2 Maret 2017	Forum Silaturahmi dan Konsolidasi Hakim AdHoc PHI & Hakim AdHoc Kasasi di Mahkamah Agung Unsur APINDO	GREAT WESTERN RESORT HOTEL AND CONVENTION CENTER Jl. M.H. Thamrin KM 2,7 Serpong - Tangerang 15143	DPN APINDO

Kegiatan DPP APINDO

No.	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat	Pelaksana Kegiatan
9	13 Maret 2017	Focus Group Discussion (FGD) tentang Regional Development Strategy	Swiss Belhotel Danum Palangka Raya	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
10	14 Maret 2017	Kegiatan Promosi Kekayaan Intelektual	Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-UMKM) Jl. MH Thamrin Palangka Raya	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
11	17 April 2017	Pembukaan Rapimprov KADIN	Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng	KADIN Prov. Kalteng
12	19 - 21 April 2017	Rakerkonas APINDO ke-28	Aston Hotel - Palembang	DPN APINDO
13	26 April 2017	Member Gathering DPN APINDO - Rencana UU CSR	Ruang APINDO Training Center Gedung Permata Lt. 10 Jakarta	DPN APINDO
14	2 Mei 2017	Undangan Kegiatan "Konsultasi Publik Hasil Kesepakatan Perundingan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa"	Aquarius Hotel Palangka Raya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng
15	13 Juli 2017	Survei Daya Saing Usaha Tahun 2017	Aquarius Hotel Palangka Raya	ACI
16	18 Juli 2017	Temu Responden 2017 Change for Breakthrough	Hotel Swissbell Palangka Raya	Bank Indonesia
17	25-26 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kepesertaan menuju coverage share perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 	Surabaya	BPJS Ketenagakerjaan
18	2 Agustus 2017	Bimbingan Teknis Persyaratan Kerja Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2017	Ruang Rapat Disnakertrans Prov. Kalteng	Disnakertrans Prov. Kalteng
19	21 Agustus 2017	Menghadiri Peresmian Gedung baru LP3i	Jl. Seth Adji Palangka Raya	LP3i Palangka Raya
20	4 September 2017	Rapat BPJS Ketenagakerjaan Tim Penilai	Kantor Disnakertrans Prov. Kalteng	BPJS Ketenagakerjaan
21	7 September 2017	Forum Group Discussion (FGD) Penyelesaian masalah ekspor impor	Aquarius Boutique Hotel	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
22	19 September 2017	Sosialisasi Prolegnas RUU	Ruang Eka Hapakat Kantor Gubernur	DPR RI dan Gubernur Kalteng
23	20 September 2017	Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan, Regional Periode Agustus 2017	Swiss Belhotel Danum Palangka Raya	BI perwakilan Kalteng
24	28 September 2017	Diseminasi Jaminan Sosial Nasional bagi Pekerja Sektoral Informal Tahun Anggaran 2017	Hotel Royal Global	Disnakertrans Prov. Kalteng
25	29 September 2017	Pertemuan kedua Tim Penilai BPJS Ketenagakerjaan	Kantor BPJS Ketenagakerjaan	Panitia Penilai
26	4-5 Oktober 2017	Forum Group Discussion (FGD) Edukasi Publik Pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Aquarius Boutique Hotel	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
27	11-14 Oktober 2017	Konsolidasi Pengupahan se Indonesia Tahun 2017	Jakarta	
28	17 Oktober 2017	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi menetapkan UMP tahun 2018.	Kantor Disnaker Provinsi	Disnakertrans Provinsi Kalteng/HI
29	19 Oktober 2017	Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah	Ruang Rapat II Disnakertrans Prov. Kalteng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng
30	15 November 2017	Kebijakan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah	Ruang Rapat II Disnakertrans Prov. Kalteng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng
31	23-24 November 2017	Konferensi Tahunan Asia Competitiveness Institute (ACI)	Singapura	ACI
32	28-29 November 2017	Konsultasi Publik Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Berbasis Komunitas	Sampit	Smart, Tbk
33	7 Desember 2017	Diseminasi Kajian Ekonoimi dan Keuangan Regional	Hotel Swissbell Palangkaraya	Bank Indonesia Perwakilan Kalteng.

POTENSI INVESTASI DI KALIMANTAN TENGAH

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki letak yang sangat strategis yakni di tengah-tengah pulau Kalimantan dan dapat dijadikan sebagai titik poros penghubung / *interconnection* antara provinsi lainnya di pulau Kalimantan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah mencapai \pm 153.564 km² (persegi) atau 1,5 kali luas pulau Jawa terdiri:

- Hutan belantara 126.200 km²
- Rawa-rawa 18.125 km²
- Sungai, Danau dan Genangan 4.563 km²
- Tanah lainnya 4.676 km²

Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau.

Secara Geografi Provinsi ini memiliki 11 sungai yang sebagian besar bermula di dataran tinggi dan mengalir dari utara ke selatan melalui Provinsi ke Laut Jawa. Memiliki Hutan hujan tropis, dalam berbagai tahap eksploitasi. Dataran rendah selatan didominasi oleh rawa-rawa lahan gambut dan bakau dipotong oleh banyak sungai.

Sungai merupakan sarana transportasi penting dan lokasi utama untuk permukiman. Dengan infrastruktur yang relatif belum memadai, perekonomian provinsi ini masih bergantung pada sungai. Sungai-sungai utama di Kalimantan Tengah ada 11 sungai yaitu Sungai Barito (900 km), Sungai Kapuas (600 km), Sungai Kahayan di Palangka Raya (600 km), Sungai Katingan (650 km), Sungai Mentaya (400 km), Sungai Seruyan (350 km), Sungai Lamandau (300 km), Sungai Arut (250 km), Sungai Sebangau (200 km), Sungai Kumai (175 km) dan Sungai Jelai (200 km) yang menjadi sarana prasarana perekonomian daerah disamping infrastruktur lainnya.

Infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 8 (delapan) pelabuhan udara, yakni di Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Buntok dan Puruk Cahu. Sedangkan pelabuhan laut ada 8 (delapan) yakni di Sampit, Kumai, Kuala Pembuang, Pegatan Mendawai, Pulang Pisau, Samuda, Pangkalan Bun dan Sukamara. Jalan Raya Lintas Kalimantan dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan, perjalanan barat dan utara ke Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kasongan, Sampit dan Pangkalan Bun, sekitar 1.800 km, sebuah kereta api saat ini diusulkan dari daerah pusat penambangan batu bara ke pelabuhan.

Pulau Kalimantan dianggap salah satu pusat dari keanekaragaman hayati paling penting di dunia, dengan kekayaan berbagai flora dan fauna yang tak tertandingi di tempat lain. Terdapat setidaknya sekitar 6.000 spesies tanaman, lebih dari 3.000 jenis pohon dan 2.500 spesies anggrek. Ada setidaknya 222 spesies mamalia, 620 jenis burung, spesies serangga yang tak terhitung banyaknya dan lebih dari 150 jenis ular. Di Taman Warisan Dunia Heart of Borneo dilindungi hutan hujan khatulistiwa yang terdapat di dataran tinggi lintas batas Indonesia dan Malaysia, untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati, konservasi dan pasokan air di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional.

Perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah berbasis sumber daya alam, produk perkebunan termasuk kelapa sawit dan karet, dan kelapa skala kecil, kopi, lada, jambu mete, kacang, kemiri, pertambangan batubara, emas, perak, tembaga, zircon, nikel, bijih besi, hutan rotan produk, kayu, dan perikanan.

DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN

Ketua	: Dr (Cand) H. Supriadi S.PD., MM.
Sekretariat	: YM. Sri Kusminingsih SE.
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 11 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 448 Perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 8 Perusahaan
Anggota UKM	: 90 Perusahaan

Dalam wilayah Kalimantan Selatan terdapat 13 (tiga belas) Kabupaten dan Kota, terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. DPP APINDO Kalimantan Selatan sampai dengan Februari 2017 telah terbentuk sebanyak 11 (sebelas) Dewan Pimpinan Kabupaten (DPKab) / Dewan Pimpinan Kota (DPKot), yaitu: DPKot APINDO Banjarmasin dan DPKot APINDO Banjarbaru serta DPKab APINDO Banjar, Barito Kuala (Batola), Hulu Sungai Tengah (HST), Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala), Balangan, Tapin.

Hingga akhir 2017 yang belum terbentuk ada 2 (dua) DPKab APINDO, yaitu :

1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)

Dari seluruh lahan yang terdapat di Kalimantan Selatan sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, dan sisanya adalah berupa tanah sawah, hutan negara, tanah kering dan lainnya. Masing-masing lahan tersebut diusahakan untuk 6 (enam) sektor pertanian yang terdiri dari:

1. Tanaman Bahan Makanan
2. Hortikultura
3. Tanaman Perkebunan
4. Peternakan
5. Perikanan
6. Kehutanan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka konsumsi pangan asal ternak terus meningkat dan prediksi konsumsi daging dua dekade mendatang juga cenderung meningkat dan dalam dua dekade mendatang akan mendorong pula peningkatan angka kecukupan gizi berupa protein hewani. Konsumsi protein hewani lima tahun pertama mencapai angka 4,97 gr/kapita/hari, lima tahun kedua sebesar 5,32 gr/kapita/hari, lima tahun ketiga sebesar 5,67 gr/kapita/hari dan lima tahun keempat mencapai angka 6,01 gr/kapita/hari.

Pembangunan perikanan di Kalimantan Selatan telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah di berbagai sektor lainnya. Kebijakan pembangunan perikanan diarahkan dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Perikanan di Kalimantan Selatan terbagi menjadi perikanan rawa dan sungai, Selain itu juga terdapat tambak yang dipasang di sungai. Sektor ini diperoleh dari budidaya dan penangkapan. Penangkapan dilakukan di sungai dan rawa, sedangkan budidaya dilakukan di kolam atau sungai. Sebagian besar budi daya ikan dilakukan di kolam dengan luas mencapai 43.094 m² dan di

keramba seluas 4.353 m².

Kelompok industri yang menjadi tulang punggung sektor industri adalah Industri Kimia, Agro dan hasil hutan dengan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan produksi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok industri yang lain selama periode tersebut. Dari kelompok industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan unit usaha yang terbesar adalah Industri Anyaman Purun/ Bambu dan industri Gula Aren, dan keduanya termasuk dalam industri kerajinan rakyat. Selain itu, industri yang menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah adalah industri kopi bubuk dan pengolahan karet, sementara ini produksi karet masih bersifat Hammernill yaitu bahan baku karet yang masih kasar.

Berdasarkan kondisi sektor industri tersebut, maka rencana pembangunan sektor industri prioritas dilakukan berdasarkan analisis daya saing dan potensi wilayah. Dalam jangka panjang pengembangan industri di arahkan pada penguatan, pendalaman, dan penumbuhan klaster pada kelompok industri:

- a) Industri Agro.
- b) Industri Manufaktur .
- c) Industri Kecil dan Menengah.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP Kalimantan Selatan diantaranya :

1. Sosialisasi UMP dan Perkembangan PHI Kalsel dilaksanakan di Hotel Swiss-



BelHotel Banjarmasin, pada tanggal 27 Oktober 2017, APINDO Kalsel dalam hal ini mengikutsertakan beberapa perusahaan dari cina untuk mempresentasikan perusahaannya dalam acara seminar ini.

2. Acara diskusi panel Strategi beracara di PHI yang diadakan oleh DPP APINDO pada 21 Januari 2017 diikuti oleh berbagai perusahaan yang ada di seluruh Kalimantan Selatan.



3. Acara Survey daya saing usaha yang diadakan pada 26 Juli 2017 di Hotel mercure Banjarmasin atas kerjasama DPP APINDO dan ACI Singapura , merupakan survey yang kesekian kalinya dan diikuti oleh berbagai sektor pengusaha dan pengurus DPKab/ Kota APINDO Kalimantan Selatan. Peserta dihadiri oleh 25 perusahaan yang ada di banjaramsin dan sekitarnya



DPP APINDO SULAWESI SELATAN

Ketua	: Drs. La Tunreng, MM.
Sekretaris	: Yusran IB Hernald
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 24 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 162 perusahaan
Anggota Luar Biasa	: 44 perusahaan

Bidang pertanian dan peternakan masih merupakan bidang usaha yang paling diminati untuk berinvestasi di provinsi Sulawesi Selatan. Produk pertanian seperti vanili, kopi dan kakao adalah produk unggulan dari daerah Sulawesi Selatan, selain itu produk ikan laut, tambak udang dan rumput laut merupakan potensi yang masih menjanjikan.

Untuk industri keramik / marmer, industri semen, pakan ternak, pengolahan kayu dan turunannya masih sangat baik di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.

Investasi menarik di bidang pertambangan dan energi mencakup penambangan pasir besi di Kabupaten Takalar Selayar dan Jeneponto. Granit di Kabupaten Selayar, Marmer di kab. Luwu Utara, Pasir Silika (Kuarsa) Luwu, Pangkep, Barru dan Enrekang, Budidaya Rumput Laut Kab. Bone, Bantaeng, Industri BatuBata di Kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Bone dan Maros, Pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Bone dan Sinjai dan Jeneponto.

Beberapa daerah wisata di propinsi Sulawesi Selatan masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut untuk menarik minat wisata mengunjungi propinsi Sulawesi Selatan, diantaranya :

- Pengembangan Transportasi Wisata Laut, diantaranya terdapat di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), Sinjai (P. Sembilan) dan Maritim Selayar (Takabonerate)
- Pengembangan Usaha Penunjang Wisata Laut

- Pembangunan Perhotelan di Tana Toraja, Makassar, Bira
- Pengembangan Wisata Bahari dan Agro Wisata.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2017 oleh DPP APINDO Sulawesi Selatan, diantaranya :

- 1) Musyawarah Provinsi VI APINDO Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan dialog nasional terkait Jaminan Sosial tanggal 27 April 2017 di Grand Clarion Hotel Makassar



2) DPP APINDO Sulawesi Selatan (Yusran IB Hernald - A.Darwis) menghadiri Kunjungan Kerja DPD Komisi III Uji Shahih Komisi III DPD RI Tentang RUU Pengupahan di Kampus UIN ALAUDDIN 2 Oktober 2017



4) Pengurus DPP APINDO Sulsel saat audiensi dengan OMBUDSMAN RI Sulawesi Selatan tanggal 27 Februari 2017 di Kantor OMBUDSMAN



3) Dialog talk Show dan pelatihan digital marketing, e-commerce, APINDO MAKASSAR Kerjasama dengan GOOGLE INDONESIA, Pemberdayaan Anggota dan binaan UMKM dalam Dunia usaha melalui digital marketing, Google Bisnisku, Efektif Pembuatan Website, SEO & SEM. 6 - 8 oktober 2017 di Karebosi Condotel Makassar



5) Pelantikan Dewan TSLP (Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan) oleh Walikota Makassar - Horison Ultima Hotel 12 oktober 2017.



6) DPP APINDO SULSEL (Yusran IB Hernald) saat menjadi Narasumber bersama Bapak Alvin Lie Ling Pio (Ombudsman RI) Dr. M. Idrus Taba (Akademisi UNHAS) dan BKPM Sulsel. Diskusi yg bertajuk "Kontribusi Ombudsman RI Dalam Menjamin Kemudahan Berusaha" yang diselenggarakan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar 18 Oktober 2017.



7) NICO SIMEN.SH (Ketua Tim Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI APINDO SulSel) saat melakukan Wawancara masing masing calon Hakim Ad Hoc PHI - 18 Oktober 2017 di sekretariat APINDO.



8) DPP APINDO Sul-Sel (Bapak Yusran IB Hernald) Narasumber kegiatan FGD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga, yang diadakan oleh ILO tanggal 11 Januari 2017.



9) Andi Rita Huadi saat mewakili APINDO Sulawesi Selatan dalam kegiatan Kunjungan Austade Duta Australia dalam rangka sharing informasi terkait investasi di Sulawesi selatan tanggal 24 Februari 2017 di kantor BKPM Sulsel



- 10) DPP APINDO SUSEL - Dewan Pengupahan Provinsi saat rapat usulan penetapan UMP tahun 2018 - Dinasty Hotel, 23 oktober 2017.



- 12) DPP APINDO saat menyelenggarakan kegiatan Business Gathering Hubungan Industrial, tanggal 10 maret 2017 di Hotel Grand Clarion



- 11) Ketua DPP APINDO SULSEL Drs. La Tunreng, MM bersama Ir. Muammar Muhayang ketua Apindo Kota Makassar saat menghadiri kegiatan dialog bersama staf Kepresidenan Deputy III tentang Kendala dalam Berusaha di Sulawesi Selatan tanggal 30 oktober 2017 di hotel Swissbell Ujungpandang.



- 13) Pertemuan APINDO Sul-Sel bersama delegasi New Zealand Terkait rencana Kerjasama dalam bidang investasi di bidang tambak, tanggal 18 maret 2017 di Hotel The Rinra Makassar





14) DPP APINDO Sulsel (Drs. La Tunreng MM) saat membawakan sambutan ramah tamah May Day tanggal 1 mei 2017 di Hotel Gammara Makassar



15) Rapat Bakti sosial DPP APINDO SULSEL bersama PSMTI SULSEL, INTI SULSEL di Hotel The Rinra tanggal 5 Juni 2017 Pembagian 2.000 paket sembako di 4 kecamatan di kota Makassar (Kec. Ujung Tanah Tamalate, Mariso dan Biringkanay



16) Pelantikan Dewan Bisnis APINDO Sulawesi Selatan, Malino 9 September 2017.



DPP APINDO SULAWESI TENGGARA

Ketua	: Ir. M. Zuhri Rustan
Sekretariat	: Dae Itha
Dewan Pimp. Kab / Kota	: 15 Kabupaten / Kota
Anggota Biasa	: 335 Perusahaan

Dari 15 daerah kabupaten / kota yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara saat ini, DPP APINDO Sulawesi Tenggara telah memiliki 15 kantor perwakilan di tiap kabupaten / kota, artinya sudah semua kabupaten/kota berdiri Dewan Pimpinan Kabupaten/kota APINDO, merupakan suatu prestasi yang baik dan membanggakan bagi pengurus DPP APINDO Sulawesi Tenggara.

Selama tahun 2017 beberapa kegiatan yang telah dilakukan DPP APINDO Sul-Tra diantaranya :

1. Mengadakan Pertemuan pengurus untuk menetapkan nama-nama calon anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara masa tugas 2017 - 2020 dari unsur APINDO, dan kegiatan ini dilakukan pada tgl 4 Maret 2017.
2. Menghadiri acara undangan koordinasi dengan BPJS Ketenaga kerjaan dalam rangka sosialisasi penilaian terhadap pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehubungan pemberian penghargaan Jaminan Sosial Ketenaga- kerjaan., diadakan di kota kendari pada tgl 25 - 27 juli 2017.
3. MUSPROV DPP APINDO SULTRA 2017 dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara , diadakan pada tgl 21 Agustus 2017 di Kendari.



Pembukaan Musprov DPP APINDO Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Agustus 2017 dan suasana peserta Musprov yang hadir mewakili DPK/kota dan anggota DPP APINDO Sulawesi Tenggara



Ketua DPP terpilih 2017 - 2022 Ir. M Zuhri Rustan (ketiga dari kanan) bersama Sekretaris dan Bendahara DPP



Suasana Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sultra 2017 dan penetapan Upah Minimum Provinsi 2018



Pengurus DPP Apindo Sultra mendampingi Ketum ke Pulau BOKORI Kendari

DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua : Freddy Ongko
Sekretaris : Ir. Theodorus Widodo
Dewan Pimp. Kab / Kota : 16 Kabupaten / Kota
Anggota : 429 Perusahaan

Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki iklim investasi yang cukup kondusif, hal ini ditandai dengan adanya dukungan melalui kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada investor dalam kegiatan penanaman modal, kemudahan tersebut diantaranya yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur
2. Perizinan yang cepat, efisien, ramah, murah, akuntabel, dan transparan.

3. Pemerintah menyediakan Kawasan Industri Bolok (KI-Bolok) di Kabupaten Kupang dengan luas areal 900 Ha². Jarak 3 km dari pelabuhan laut (Pelabuhan Tenau – Kupang) dan 2 km dari pelabuhan angkutan penyeberangan (Pelabuhan Bolok – Kupang).

4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Mbay Kabupaten Nagekeo, dengan luas areal 3.038 km².

Berbagai macam komoditas dapat menjadi pilihan dalam berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Budidaya Mutiara
2. Budidaya Rumput Laut
3. Perikanan dan Kelautan (Perikanan Tangkap dan Budidaya)
4. Garam
5. Kepariwisata (Sail Komodo)
6. Pertanian dan Perkebunan (Jagung)
7. Peternakan (Sapi dan Babi)
8. Pertambangan (Panas Bumi, Mangan dan Bahan Galian)
9. Sektor Jasa dan Transportasi.

Beberapa kegiatan dan acara yang diikuti oleh DPP APINDO NTT selama tahun 2017, diantaranya :

1. Tanggal 27 Januari 2017, menghadiri acara peresmian gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Selama di bulan Februari 2017 ada beberapa acara yang diikuti yaitu menghadiri Focus Group Discussion "Akar masalah dan solusi penanggulangan kemiskinan penduduk Nusa Tenggara Timur", menghadiri rapat persiapan pengawasan pemantauan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat provinsi tahun 2017.
3. Dalam bulan Maret 2017, pengurus DPP APINDO NTT mengikuti beberapa kegiatan diantaranya pada tanggal 1 - 2 Maret 2017, menghadiri kegiatan forum konsolidasi dan advokasi di Jakarta, kemudian pada tanggal 7 - 9 Maret 2017, menghadiri Rakernas Asosiasi Kelompok

UPPKS (BKKBN) tahun 2017 di Makasar, selanjutnya di tanggal 13 Maret 2017 mengikuti rapat dengan agenda kunjungan kerja komisi III di daerah Nusa Tenggara Timur tentang operasional dan aktifitas pelayanan di Pelabuhan Tenau-Kupang.

4. Kegiatan selama bulan April 2017 diantaranya :
 - Tanggal 19 - 21 April 2017, menghadiri kegiatan Rakerkonas APINDO Ke 28 tahun 2017 di Palembang-Sumatera Selatan.
 - Tanggal 26 April 2107, mengikuti rakor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
 - Tanggal 28 - 29 April 2017, mengikuti Bimtek Pengupahan dalam rangka peningkatan pemahaman akan penerapan sistem pengupahan yang adil serta penyusunan manajemen struktur dan skala upah di perusahaan.
5. Tanggal 1 Mei 2017, menghadiri syukuran dan dialog memperingati Hari Buruh tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, sementara itu sebagai wakil dari pengusaha menjadi narasumber dalam kegiatan seminar regional tata kelola ekonomi daerah 2016.



6. Tanggal 13 Juni 2017, mengikuti sosialisasi penyebarluasan informasi peluang pasar ekspor yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTT.
7. Tanggal 24 Juli 2017, sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion “Peranan digital banking dalam memperkuat potensi pertumbuhan daerah NTT”, selain itu mengikuti Kegiatan survei daya saing usaha tahap ke VI tahun 2017 dari Asia Competitiveness Institute (ACI) Singapore, diadakan pada tgl 28 Juli 2017
8. Tanggal 11 Agustus 2017, menghadiri rapat persiapan dalam rangka kegiatan forum investasi di Jakarta, selain itu tanggal 29 Agustus 2017 menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi forum pengembangan ekonomi daerah tingkat Provinsi NTT bersama unsur-unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait kabupaten/kota tahun 2017.
9. Tanggal 4 September 2017, menghadiri acara Pra Launching Layanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (L TSA-P2TKI) Provinsi NTT.

Tanggal 14 September 2017, mengikuti FGD dalam rangka edukasi publik mengenai implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka mendorong peran aktif pelaku usaha daerah dalam memanfaatkan peluang usaha dan investasi secara maksimal dengan hadirnya MEA.

Sementara itu pada tanggal 28 September 2017, menghadiri rapat persiapan peninjauan dan penetapan UMP NTT tahun 2018.

10. Pengurus bidang pengupahan DPP APINDO NTT pada tanggal 11 – 14 Oktober 2017, mengikuti konsolidasi dewan pengupahan se-Indonesia tahun 2017 di Jakarta Barat.
11. Tanggal 9 November 2017, mengikuti pengumuman Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang dihadiri oleh semua mitra hubungan industrial di NTT, sementara pada tanggal 22 - 24 November 2017, mengikuti konferensi tahunan Asia Competitiveness Institute (ACI) di Singapore.
12. Tanggal 14 Desember 2017, mengikuti pertemuan tahunan Bank Indonesia 2017.

Sementara itu di Bulan Desember pula pada tanggal 19 Desember 2017, pengurus DPP NTT mengikuti forum diskusi dengan pokok bahasan mengenai peluang kerjasama bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan (pertukaran dosen, guru, siswa, budaya, olahraga), perdagangan ekspor-imporserta pembahasan penerbangan langsung Kupang-Dili-Darwin.





BPJS
Ketenagakerjaan



PERLINDUNGAN PARI PURNA BAGI PEKERJA INDONESIA

**PASTIKAN ANDA TELAH
MENJADI PESERTA**



www.bpjsketenagakerjaan.go.id



BPJS Ketenagakerjaan



Bpjs.Ketenagakerjaan



BPJS Ketenagakerjaan



@BPJSTKInfo



Laporan Tahunan 2017

APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia



Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)

Gedung Permata Kuningan Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980 - Indonesia

Telp : (62-21) 83780824 (hunティング) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746

Email : sekretariat@apindo.or.id - Website : www.apindo.or.id